

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
(Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)**



TESIS

**Disusun dan Diajukan kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Pendidikan**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

SUTRIMO PURNOMO

1522605062

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.iainpurwokerto.ac.id, E-mail : pps.iainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor. 016 /In.17/D.PPs/PP.009/I/2018

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa.

Nama : Sutrimo Purnomo

NIM : 1522605062

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul : "partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan kabupaten Banyumas".

yang telah disidangkan pada tanggal 13 Desember 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 11 Januari 2018

Direktur,

Dr. H. Abdul Basit, M. Ag.
NIP. 19691219 199803 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website : www.ainpurwokerto.ac.id Email : pps.ainpurwokerto@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : SUTRIMO PURNOMO
NIM : 1522605062
Smt./ Prodi : IV/ Manajemen Pendidikan Islam
Judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
(Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)

NO.	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. H. Abdul Basit, M.Ag. NIP. 19691219 199803 1 001 Ketua Sidang Merangkap Penguji		3/1 2018
2	Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. NIP. 19640916 199803 2 001 Sekretaris Merangkap Penguji		3/1 2018
3	Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Pembimbing Merangkap Penguji		3/1 - 2018
4	Dr. Suparjo, M.A. NIP. 19730717 199903 1 001 Penguji Utama I		21/12 2017
5	Dr. H. M. Hizbul Muflihah, M.Pd. NIP. 19630302 199103 1 005 Penguji Utama II		8/Januari 2018

Purwokerto, Desember 2017
Mengetahui,
Ketua Program Studi MPI

Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : **SUTRIMO PURNOMO**

NIM : 1522605062

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Judul Tesis : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN (Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur'an
Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten
Banyumas)**

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 23 Nopember 2017
Pembimbing,



Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

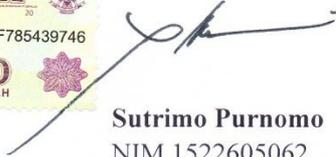
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)”** seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Purwokerto, 23 Nopember 2017


Sutrimo Purnomo
NIM 1522605062

IAIN PURWOKERTO

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
(Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)**

**SUTRIMO PURNOMO
NIM. 1522605062**

ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu *instrumental input* yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang lemah akan menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas pendidikan sehingga perlu dilakukan upaya penguatan pembiayaan pendidikan. Partisipasi masyarakat dinilai tepat bagi penguatan pembiayaan pendidikan sebagai bentuk demokrasi berkeadilan yang bermakna bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkewajiban dalam penyediaan dana. Lembaga pendidikan harusnya memiliki kemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. TPQ Al-Ittihad sebagai lembaga pendidikan Islam dalam pembiayaannya mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, baik pada jenis pembiayaan *capital cost* maupun *recurrent cost*.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan pendekatan analisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan.

Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad bersifat fungsional religius kultural dengan tahapan pembiayaannya, meliputi: *Pertama*, perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan tahapan analisis permasalahan, analisis potensi, dan analisis kepentingan masyarakat yang berasaskan musyawarah untuk mufakat. *Kedua*, pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilakukan melalui penggerakan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi dan koordinasi, serta penjabaran program dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. *Ketiga*, evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara rencana anggaran belanja dan realisasi penggunaannya dengan prinsip transparansi anggaran.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan Pendidikan, dan *Community Based Education*.

**COMMUNITY PARTICIPATION IN EDUCATION FUNDING
(A Case Study at Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk
Purwokerto Selatan District Banyumas Regency)**

**SUTRIMO PURNOMO
NIM. 1522605062**

ABSTRACT

Education funding is one of the important instrumental inputs in educational implementation. A weak education funding will be an obstacle to enhance educational quality so that some efforts should be made to strengthen the education funding. Community participation is considered as an appropriate solution to support the education funding as a form of fair democracy suggesting that the community is entitled to obtain comprehensive educational quality and they are obliged to support the funding. Educational institutions should have the capacity to involve the community in education funding. TPQ Al-Ittihad as an Islamic educational institution has been able to involve active community participation regarding the education funding, in terms of both capital cost and recurrent cost.

The research problem of this research was how community participation contributed to educational funding at TPQ Al-Ittihad Teluk, Purwokerto Selatan District, Banyumas Regency, starting from the stages of planning, implementation, and evaluation of the education funding.

This research implemented a qualitative research applying a case study approach. The data collection methods employed were observation, interview, and documentation. The data were analyzed in some stages consisting of data reduction, data presentation, and interpretation.

The findings of this study indicated that the pattern of community participation regarding the education funding in TPQ Al-Ittihad was a functional religious-cultural relation in which the implementation of financing stages were achieved through the following phases: First, education financing planning was conducted through the stages of problem analysis, potential analysis, and community interest analysis based on consensus decision-making. Second, the implementation of education financing was accomplished by managing the resources and funds, administrative and coordination activities, and the program analysis in accordance with the principles of “from the community, by the community, and for the community”. Third, the evaluation of education funding was conducted by comparing the budget plan with the realization of the expenses that implemented the principle of budget transparency.

Keywords: Community Participation, Education Funding, and Community Based Education.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap, dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

1		<i>Fathah</i>	Ditulis	A
	Contoh	كتب	Ditulis	<i>Kataba</i>
2		<i>kasrah</i>	Ditulis	I
	Contoh	ذكر	Ditulis	<i>Žukira</i>
3		<i>ḍammah</i>	Ditulis	U
	Contoh	يذهب	Ditulis	<i>Yaḏhabu</i>

2. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهليه	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya mati</i>	ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>

	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>
--	------	---------	--------------

3. Vokal Rangkap (*diftong*)

1	<i>Faṭḥah</i> + ya mati	Ditulis	Ai
	كيف	Ditulis	<i>Kaifa</i>
2	<i>Faṭḥah</i> + wawu mati	Ditulis	Au
	حول	Ditulis	<i>ḥaula</i>

C. *Ta' Marbūtah*

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendakai lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

E. *Syaddah* (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

متعدّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

*“Sebuah sahir yang halal adalah tersenyum dan menampakkan wajah bersahabat kepada orang lain” (Aidh al-Qarni) **



*Aidh al-Qarni, *Cahaya Zaman* (Depok: Al-Qalam, 2006), 434.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta yang namanya selalu kusebut dalam setiap doa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah untuk beribadah, kesehatan untuk melakukan kebaikan, keberkahan dalam menjemput rizki, dan memberikan ampunan atas segala dosa.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam, semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir jaman.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan kepada:

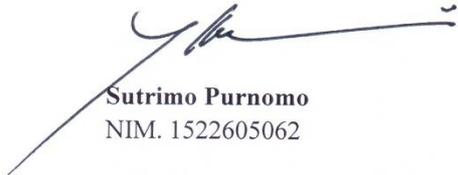
1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus sebagai pembimbing yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan harapan dapat memperoleh hasil yang baik.
4. Dr. H. Munjin, M.Pd.I selaku atasan penulis yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada jenjang magister ini.
5. Seluruh dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah dengan ikhlas membimbing dan mendidik penulis dengan berbagai nasihatnya demi kebaikan penulis.
6. Tenaga Kependidikan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang memuaskan dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi penulis.

7. Kepala, jajaran pengurus, dan dewan asatiz TPQ Al-Ittihad yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan bantuan kepada penulis dengan penuh keramahan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini.
8. Abah Hamid selaku penasihat TPQ Al-Ittihad yang telah mendukung dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam pencarian data bagi penyusunan tesis ini dan yang penulis harapkan doa serta keberkahan ilmunya.
9. Saudara-saudara seperjuangan Program Studi MPI Pascasarjana IAIN Purwokerto angkatan 2015, terimakasih atas bantuan, kerjasama, dan dukungan serta kebersamaan yang telah terjalin hingga saat ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam studi dan penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta teristimewa untuk kedua orang tuaku yang tak pernah henti lisannya berdoa untuk kebaikanmu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Untuk itu, kritik dan saran dari para pembaca penulis harapkan demi perbaikan tesis ini. Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan kemanfaatan dan keberkahan pada tesis ini, baik untuk diri penulis maupun para pembaca. Amin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 23 Nopember 2017
Penulis,



Sutrimo Purnomo
NIM. 1522605062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Rumusan Masalah Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II COMMUNITY BASED EDUCATION DAN PARTISIPASI	
MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN.....	18
A. <i>Community Based Education</i>	18
1. Pengertian <i>Community Based Education</i>	18
2. Aspek <i>Community Based Education</i>	20
3. Prinsip <i>Community Based Education</i>	21
4. Peran Pemerintah dalam <i>Community Based Education</i>	23

5. Peran Masyarakat dalam <i>Community Based Education</i>	25
B. Partisipasi Masyarakat	26
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	26
2. Bentuk dan Tingkatan Partisipasi Masyarakat	28
3. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	40
4. Indikator Partisipasi Masyarakat	41
5. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat	43
C. Pembiayaan Pendidikan	45
1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan	45
2. Jenis Pembiayaan Pendidikan	47
3. Sumber Pembiayaan Pendidikan	49
4. Tahapan Pembiayaan Pendidikan	52
5. Prinsip Pembiayaan Pendidikan	53
D. Hasil Penelitian yang Relevan	54
E. Kerangka Pikir.....	63
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	65
B. Tempat dan Waktu Penelitian	66
C. Objek dan Subjek Penelitian	70
D. Teknik Pengumpulan Data	73
E. Teknik Analisis Data	77
F. Uji Keabsahan Data.....	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Hasil Penelitian	80
1. Profil TPQ Al-Ittihad	80
a. Sejarah Singkat	80
b. Letak Geografis	81
c. Struktur Kepengurusan	82
d. Keadaan Ustaz, Ustazah, dan Santri	82
e. Sarana Pembelajaran	87

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad	89
a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad	91
b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad	117
c. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad	139
B. Pembahasan	154
1. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad	154
2. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad	170
3. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad	186
BAB V PENUTUP	226
A. Simpulan	226
B. Rekomendasi	227

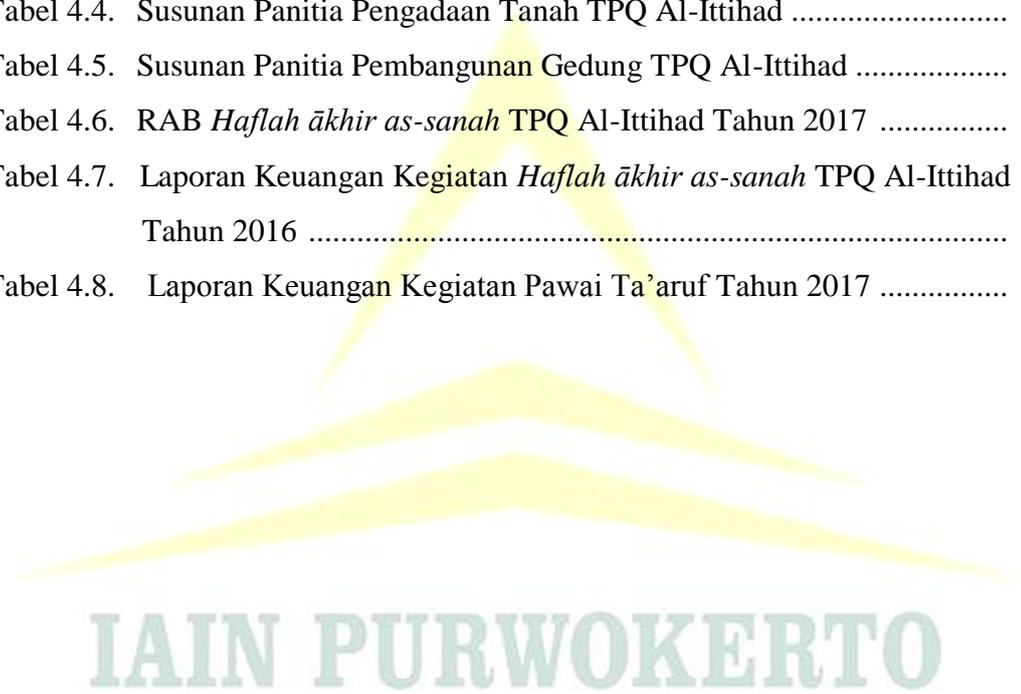
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tahapan Partisipasi Cohen dan Uphoff	32
Tabel 2.2.	Tangga Partisipasi Masyarakat	34
Tabel 2.3.	Tingkatan Partisipasi	35
Tabel 2.4.	Keterlibatan Orang Tua dalam Lembaga Pendidikan	37
Tabel 4.1.	Daftar Ustaz dan Ustazah TPQ Al-Ittihad	83
Tabel 4.2.	Rekapitulasi Daftar Santri TPQ Al-Ittihad	85
Tabel 4.3.	Kondisi Sarana Pembelajaran TPQ Al-Ittihad	88
Tabel 4.4.	Susunan Panitia Pengadaan Tanah TPQ Al-Ittihad	103
Tabel 4.5.	Susunan Panitia Pembangunan Gedung TPQ Al-Ittihad	103
Tabel 4.6.	RAB <i>Haflah ākhir as-sanah</i> TPQ Al-Ittihad Tahun 2017	112
Tabel 4.7.	Laporan Keuangan Kegiatan <i>Haflah ākhir as-sanah</i> TPQ Al-Ittihad Tahun 2016	151
Tabel 4.8.	Laporan Keuangan Kegiatan Pawai Ta'aruf Tahun 2017	152



IAIN PURWOKERTO

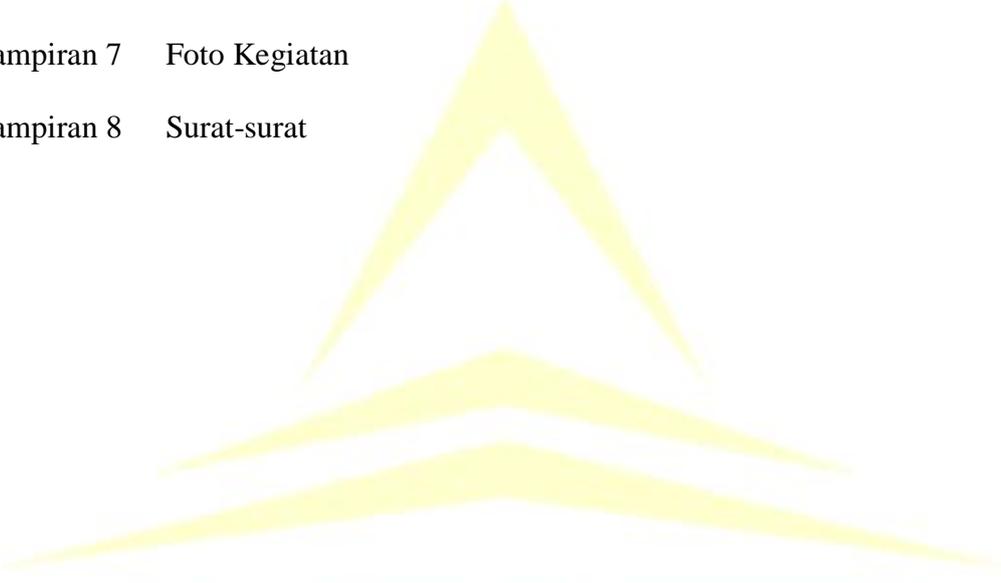
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Prosentase Asal Santri TPQ Al-Ittihad	86
Gambar 4.2. Prosentase Keaktifan Pembayaran SPP Santri TPQ Al-Ittihad	192



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Pedoman Observasi
- Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 4 Catatan Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Catatan Hasil Observasi
- Lampiran 6 Dokumentasi Tertulis
- Lampiran 7 Foto Kegiatan
- Lampiran 8 Surat-surat



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga pendidikan Al-Qur'an yang semakin pesat saat ini menandakan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kemampuan baca tulis Al-Qur'an dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan pendidikan Al-Qur'an membawa misi yang mendasar terkait dengan pentingnya memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an sejak usia dini¹ dan salah satu lembaga pendidikan Al-Qur'an tersebut ialah Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Taman Pendidikan Al-Qur'an atau yang lebih familiar dengan istilah TPQ sesungguhnya telah memperoleh payung hukum dalam penyelenggaraannya termasuk pengakuan pemerintah terhadap peranannya sebagai bagian dari pendidikan pada umumnya yang memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana hal tersebut telah termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di antaranya pada Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.²

Pada Bab VI Bagian Kelima Pasal 26 dalam UU Sisdiknas juga dijelaskan bahwa sejatinya keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur'an

¹Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan TKQ/TPQ* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

²Tim Penyusun, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 8.

menempati peran penting dalam pendidikan nasional yang berada dalam wilayah pendidikan nonformal, yakni:³ *Pertama*, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. *Kedua*, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. *Ketiga*, pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. *Keempat*, satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

Pada pasal 30 ayat (1) sampai dengan (5) dalam UU Sisdiknas yang secara khusus membahas pendidikan keagamaan disebutkan bahwa *pertama*, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama. *Ketiga*, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. *Keempat*, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. *Kelima*, ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁴

³Tim Penyusun, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ...*, 20-21.

⁴Tim Penyusun, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ...*, 24.

Dari beberapa pasal dan ayat tersebut secara tegas menunjukkan bahwa Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan turut memberikan kontribusi dan menempati peran serta posisi yang penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, hal tersebut semakin memperkokoh keberadaan lembaga pendidikan Al-Qur'an sehingga tidak mengherankan ketika saat ini lembaga pendidikan Al-Qur'an khususnya TPQ dapat eksis dan terus berkembang. Data EMIS Kementerian Agama RI⁵ menunjukkan bahwa pada Tahun Pelajaran 2014-2015 secara nasional sudah terdapat 134.860 Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an dengan jumlah rombongan belajar sebanyak 357.337 sehingga diperoleh Rasio Lembaga : Rombel= 1:3, ini berarti rata-rata setiap TPQ mempunyai 3 rombongan belajar. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian dan minat masyarakat untuk menempatkan putra-putri mereka belajar atau mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Adapun jumlah santri Taman Pendidikan Al-Qur'an pada tahun yang sama secara keseluruhan mencapai 7.356.830 orang santri yang terdiri dari 3.541.127 (48,13%) santri laki-laki dan 3.815.703 (51,87%) santri perempuan.

Dengan semakin eksisnya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut seyogyanya dibarengi pula dengan semakin meningkatnya kualitas penyelenggaraan TPQ yang profesional. Namun sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dari sebuah riset terhadap Taman Pendidikan Al-Qur'an ditemukan fakta bahwa pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur'an saat ini masih cenderung dilakukan secara sederhana di mana hal tersebut berdampak pada kondisi TPQ yang lemah sehingga peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang diharapkan

⁵<http://emispendis.kemenag.go.id/emis2016v1/index.php?jpage=S0h0bDk2R3NLZTJIW EJBW1WUIRRUT09> diakses pada 10 Juni 2017 pukul 10.46 WIB.

sukar tercapai.⁶ Hal yang sama juga disampaikan oleh Said Agil Husin Al Munawar⁷ yang menyebutkan bahwa kondisi madrasah (termasuk lembaga pendidikan secara umum) saat ini berada pada posisi yang memprihatinkan di mana salah satu penyebabnya ialah lemahnya partisipasi masyarakat, yakni dengan semakin mudarnya prinsip *community based education* pada madrasah (lembaga pendidikan Islam).

Dalam riset lain yang dilakukan oleh Aliyu A. Kanau dan M. J. Haruna⁸ dengan judul *Towards Promoting Community Participation in Education in Nigeria* diperoleh informasi:

Poor community participation as a major draw back to the development of education in Nigeria and in view of the fact that government alone cannot shoulder total responsibility of providing education for all and at all levels, the need for strategizing ways of enhancing and encouraging community participation.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa lemahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat menjadi penghambat bagi pengembangan pendidikan dan pemerintah sendiri tidak dapat bertanggungjawab secara penuh untuk menyediakan pendidikan bagi semua warganya dan di semua tingkat sehingga dibutuhkan upaya untuk menyusun strategi guna meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliyu dan Haruna mengindikasikan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pendidikan merupakan hal urgen, bahkan lemahnya partisipasi masyarakat dapat menghambat jalannya pengembangan dan peningkatan pelayanan pendidikan sehingga hal tersebut menuntut lembaga pendidikan untuk menyusun strategi dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

⁶Aliwar, "Penguatan Model Pembelajaran Baca Tulis Quran dan Manajemen Pengelolaan Organisasi (TPA) Jurnal", *Al-Ta'dib* 9, no. 1, Januari-Juni 2016.

⁷Said Agil Husin Al Munawar (mantan Menteri Agama RI), "Pendidikan Berbasis Masyarakat Memudar", *Media Indonesia*, Jum'at, 11 Januari 2002, dalam Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 130.

⁸Aliyu A. Kanau dan M. J. Haruna, "*Towards Promoting Community Participation in Education in Nigeria*", *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 2, no. 7 (2013): 131-136.

Dari beberapa pandangan tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan termasuk Taman Pendidikan Al-Qur'an memerlukan adanya upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yunus sebagaimana yang dikutip oleh Sinta Lismayanti menjelaskan bahwa setidaknya terdapat lima prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan demi pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas, yakni:⁹ *Pertama*, kepedulian terhadap masalah, kebutuhan, dan potensi atau sumber daya masyarakat. *Kedua*, kepercayaan timbal balik dari pelayanan program dan dari masyarakat pemilik program. *Ketiga*, fasilitas dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai proses kegiatan. *Keempat*, adanya partisipasi yaitu upaya melibatkan semua komponen lembaga atau individu terutama masyarakat dalam proses kegiatan. *Kelima*, mengayomi peranan masyarakat dan hasil yang dicapai.

Dasim Budimansyah¹⁰ menegaskan bahwa salah satu upaya konkret untuk mendongkrak mutu pelayanan pendidikan adalah dengan penguatan partisipasi masyarakat, yakni dengan mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Partisipasi masyarakat dinilai penting karena merupakan salah satu realisasi dari esensi demokrasi berkeadilan. Hal tersebut bermakna bahwa selain masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, juga melekat kewajiban pada mereka untuk ikut serta dalam pengadaan dan pengelolaan pendidikan, baik dalam hal penyediaan dana, pengembangan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan maupun kepakaran atau keahlian yang diperlukan dalam penyusunan program serta implementasinya.

Secara normatif, partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah diatur pada Bab III Pasal 8 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 yang menyatakan

⁹Sinta Lismayanti, "Upaya Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur'an dalam Meningkatkan Pemahaman Pendidikan Agama pada Orang Tua yang Memiliki Anak Usia Dini di RW 08 Kelurahan Pasanggrahan Ujung Berung Bandung", Skripsi (Bandung: UPI, 2013), 4.

¹⁰Dasim Budimansyah, "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Educationist* 2, no. 1 Januari (2008): 57.

bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.¹¹ Hal tersebut menandakan bahwa eksistensi dan partisipasi masyarakat semakin penting serta mutlak dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan. Setidaknya terdapat dua kepentingan mendasar mengapa hubungan dan partisipasi masyarakat penting dalam pendidikan, yaitu:¹² *Pertama*, kepentingan lembaga pendidikan. Kepentingan lembaga pendidikan dapat dilihat dari pemberian informasi oleh pihak sekolah kepada masyarakat, sehingga masyarakat membentuk opini tersendiri terhadap lembaga pendidikan. Dari opini tersebut diharapkan kesadaran masyarakat dapat tergugah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan di lembaga pendidikan. *Kedua*, kepentingan masyarakat. Dari segi kepentingan masyarakat, yakni masyarakat dapat mengambil manfaat dan menyerap hasil-hasil pemikiran serta perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat sendiri, termasuk dapat melakukan kontrol dan memberikan kritik serta saran bagi pengembangan lembaga pendidikan.

Kemampuan lembaga pendidikan untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat merupakan hal urgen, karena dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi akan berdampak positif bagi peningkatan partisipasi masyarakat yang muaranya pada pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Bryte dan Schneider sebagaimana yang dikutip oleh Tony Gelsthorpe dan John West-Burnham bahwa sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi memiliki satu dari dua kesempatan membuat perbaikan yang signifikan, sedangkan sekolah yang rendah tingkat kepercayaannya dari masyarakat hanya memiliki satu dalam

¹¹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warganegara.

¹²Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 202.

tujuh kesempatan untuk memperbaiki.¹³ Hal tersebut semakin memperkuat bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal urgen yang diperlukan bagi pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan.

Pada penelitian lain disebutkan pula bahwa hanya madrasah atau lembaga pendidikan yang melakukan perbaikan dalam kepercayaan yang dapat membuat perbaikan dalam kinerja akademik.¹⁴ Hasil penelitian tersebut menunjukkan pula bahwa integritas hubungan sosial merupakan hal penting yang perlu didahulukan demi perbaikan kinerja oleh madrasah atau lembaga pendidikan.

Conyears dalam Yahya Mof, dkk. mengidentifikasi tiga kebutuhan dasar dalam pembangunan masyarakat, salah satu di antaranya adalah partisipasi dalam membuat dan melaksanakan program, selain kebutuhan dasar lainnya seperti pangan, sandang dan papan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Karenanya, lembaga pendidikan harus terus berupaya memelihara dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menerapkan konsep manajemen yang baik dengan tawaran-tawaran program yang mampu menarik simpati masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan tentu saja program yang dibangun harus mampu menjawab tuntutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara signifikan,¹⁵ sehingga kolaborasi antara masyarakat dengan lembaga pendidikan harus dikembangkan secara sinergis.¹⁶ Hal ini mengingat adanya kepentingan dan cita-cita yang sama yakni menyelamatkan dan mencerahkan masa depan generasi bangsa.

Oleh karena itu, partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memikul tanggung jawab pendidikan merupakan hal mutlak yang

¹³Tony Gelsthorpe dan John West-Burnham, *Educational Leadership and the Community; Strategies for School Improvement Through Community Engagement* (London: Pearson, 2003), 10.

¹⁴K. A. Rahman, "Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Islam Universitas Jambi* 1, no. 2, Desember (2012): 243.

¹⁵Yahya Mof, dkk., "Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin", *Jurnal Tashwir Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari* 1, no.2, Juli – Desember (2013): 62.

¹⁶Dikutip dari Redaktur Koran Pendidikan, *Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pendidikan* dalam <http://wacana.koranpendidikan.com/view/750/mendorong-partisipasi-aktif-masyarakat-dalampendidikan.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2017.

diperlukan bagi pengembangan lembaga pendidikan, termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan. Dengan pembiayaan yang memadai untuk berbagai program dan kegiatan pendidikan, hal tersebut akan mendorong pencapaian tujuan yang telah ditetapkan hingga akhirnya akan mendukung ketercapaian pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sulistyorini¹⁷ bahwa dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas memerlukan adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumberdaya yang ada dalam suatu lembaga pendidikan dan salah satu sumberdaya yang perlu dikelola dengan baik agar tercipta pendidikan yang berkualitas adalah masalah keuangan atau pembiayaan pendidikan.

Dalam konteks tersebut, Sulistyorini menegaskan bahwa keuangan atau pembiayaan merupakan sumber dana yang diperlukan oleh setiap lembaga pendidikan sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan, pelaksanaan program supervisi, dan kebutuhan operasional lembaga pendidikan lainnya,¹⁸ sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan hal vital bagi sebuah lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam seperti TPQ dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, karena kegiatan pendidikan yang berkualitas tentunya memerlukan sebuah penanganan dalam segi finansial yang memadai di mana hal tersebut erat kaitannya dengan sumber pendanaan atau pembiayaan pendidikan yang kuat pula.

Sumber pembiayaan pendidikan merupakan semua pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur.¹⁹ Definisi sumber pembiayaan pendidikan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan dan kualitas pendidikan yang didukung

¹⁷Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: elKAF, 2006), 98.

¹⁸Sulistyorini, *Manajemen ...*, 98.

¹⁹Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 113.

dengan adanya pembiayaan pendidikan yang kuat tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah atau lembaga pendidikan semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab lingkungan, yakni keluarga (wali siswa) dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga (wali siswa), dan masyarakat. Hal tersebut menegaskan pula bahwa orang tua atau wali siswa dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dan memikul bersama kebutuhan-kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, terlebih dalam hal pembiayaan pendidikan.

Siti Irene Astuti Dwiningrum²⁰ menguatkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendanaan atau pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan kualitas sekolah atau lembaga pendidikan. Otonomi sekolah dalam pembiayaan mampu memberikan kekuatan bagi sekolah untuk menarik dana-dana yang berasal dari luar karena sekolah yang dinilai mempunyai kemampuan swadana bagi pengembangan program-program unggulan sehingga pihak luar pun atau pemerintah memberikan kepercayaan kepada sekolah.

Dari apa yang disampaikan oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum tersebut, apabila ditelaah lebih lanjut dapat dipahami bahwa keterlibatan orang tua atau wali siswa dalam pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi positif bagi lembaga pendidikan untuk memenuhi kelengkapan dan kebutuhan dalam penyelenggaraannya. Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh orang tua atau wali setidaknya menunjukkan semakin besar pula partisipasinya dalam mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembiayaan pendidikan, baik pada perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan atau evaluasi merupakan hal yang dibutuhkan dan penting untuk diwujudkan di mana hal tersebut memiliki posisi dan peran strategis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan.

²⁰Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 250.

Pada *preliminary study* yang dilaksanakan di sebuah Taman Pendidikan Al-Qur'an, yakni TPQ Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas²¹ diperoleh informasi tentang adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembiayaan pendidikan. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu ustazah TPQ Al-Ittihad, yakni Ustazah Annisa²² menyampaikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dapat dikategorikan aktif.

Dalam wawancara tersebut, Ustazah Annisa menjelaskan bahwa ustaz dan ustazah serta pendamping menerima *bisyārah*²³ dengan nominal mulai dari Rp 125.000 hingga Rp 250.000 dengan rincian empat orang ustazah masing-masing menerima Rp 175.000, dua orang pendamping masing-masing mendapat Rp 125.000 dan satu orang ustaz sekaligus sebagai penasihat TPQ Al-Ittihad menerima Rp 250.000 pada tiap bulannya atau setidaknya TPQ harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.200.000 untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping secara rutin pada tiap bulannya. Adapun sumber pembiayaan tersebut menurut penuturan Ustazah Annisa diperoleh dari wali santri dan masyarakat sekitar terutama yang berperan sebagai pengurus TPQ Al-Ittihad. Hal tersebut setidaknya dapat menjadi salah satu indikasi kuatnya pembiayaan pendidikan yang ada di TPQ Al-Ittihad.

Ustazah Annisa juga menjelaskan bahwa selain pembayaran *bisyārah*, pembiayaan yang ada di TPQ Al-Ittihad juga mencakup kebutuhan operasional TPQ, seperti pembelian buku ajar TPQ, alat tulis, buku tulis, keperluan fotokopi, dan sebagainya termasuk untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya partisipatif seperti berpartisipasi dalam pawai ta'aruf *haflah ākhir as-sanah* Pondok Pesantren Anwarushsholihin Teluk atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya terprogram seperti *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad dan juga pembiayaan bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

²¹Selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan **TPQ Al-Ittihad**.

²²Hasil wawancara penulis dengan Ustazah Annisa pada tanggal 27 April 2017.

²³*Bisyārah* merupakan istilah yang digunakan TPQ Al-Ittihad untuk menyebut gaji, upah atau sejenisnya yang diterimakan ustaz dan ustazah tiap bulannya.

Ustazah Annisa juga menjelaskan bahwa selain mendapatkan *bisyārah* secara rutin tiap bulannya, ustaz dan ustazah serta pendamping pada saat menjelang Hari Raya 'Idul Fitri masing-masing mendapat *bisyārah* tambahan atau dapat dikatakan sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) dengan nominal yang diterimakan antara Rp 400.000 sampai dengan Rp 600.000 untuk tiap orang. Perlu diketahui pula bahwa sumber dana THR bagi ustaz dan ustazah serta pendamping ini berasal dari wali santri dan masyarakat sekitar TPQ Al-Ittihad.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, Ustazah Annisa²⁴ menjelaskan bahwa pembiayaan yang ada di TPQ Al-Ittihad tidak bisa dilepaskan dari besarnya dukungan dan partisipasi masyarakat. Ustazah Annisa menyebutkan bahwa sebagian besar bahkan hampir secara keseluruhan sumber pembiayaan pendidikan TPQ Al-Ittihad berasal dari masyarakat khususnya wali santri dan pengurus serta mereka pun turut dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan terlebih dalam hal pembiayaan. Ustazah Annisa memberikan contoh bahwa untuk menentukan nominal atau besaran SPP santri, pengurus TPQ Al-Ittihad mengumpulkan para wali santri untuk duduk bersama dan bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut, pihak TPQ memaparkan rencana kebutuhan pembiayaan TPQ khususnya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Kemudian, pengurus dan wali santri bersepakat dan mengambil keputusan bersama terhadap besaran nominal yang harus dibayarkan wali santri tiap bulannya. Tidak hanya itu, sebagai bentuk laporan dan evaluasi, pengurus pun melaporkan kepada wali santri terkait pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya pada saat pertemuan wali santri khususnya yang berkaitan dengan pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping.

Hal tersebut menunjukkan adanya keterlibatan wali santri di antaranya pada perencanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad khususnya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping yang dilakukan

²⁴Hasil wawancara dengan penulis Ustazah Annisa pada tanggal 27 April 2017.

dalam bentuk pengambilan keputusan ataupun kesepakatan bersama antara pihak TPQ Al-Ittihad, baik pengurus maupun ustaz dan ustazah dengan wali santri melalui musyawarah.

Ustazah Annisa juga menuturkan bahwa pihak RT, RW, dan kelompok pengajian muslimat hingga pihak kelurahan turut dilibatkan dalam pembiayaan pendidikan TPQ Al-Ittihad baik sebagai sumber dana, pembubuhan tanda tangan Lurah sebagai bentuk dukungan hingga sebagai pelaksana. Sebagai contoh yakni pada kegiatan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana hal tersebut masuk pada jenis pembiayaan *capital cost*. Pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dimulai dari pengadaan tanah seluas 25 ubin dengan harga Rp 3.500.000 tiap ubinnya hingga pelaksanaan pembangunan gedung TPQ di mana dalam proses tersebut, baik pada pengadaan tanah hingga pelaksanaan pembangunan gedung melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, bahkan usulan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad berasal dari masyarakat hingga panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad juga berasal dari masyarakat sekitar khususnya di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk. Partisipasi masyarakat selain dalam bentuk inisiasi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad juga diwujudkan secara nyata mulai dari pencarian lokasi atau pengadaan tanah, pengumpulan dana baik untuk pembelian tanah hingga pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, dan sebagainya.

Partisipasi terhadap pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad juga ditunjukkan oleh remaja di wilayah RW 15, yakni dengan membantu untuk mengumpulkan infak pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dari masyarakat di wilayah RW 15 dengan cara berkeliling dari satu rumah ke rumah lain melalui kotak infak. Ibu-ibu di wilayah RW 15 pun turut membantu melalui penyediaan konsumsi dengan cara bergantian sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Perlu diketahui pula bahwa TPQ Al-Ittihad ini berada pada wilayah RW 15 Kelurahan Teluk yang terdiri dari 3 RT yakni RT 1, RT 2, dan RT 3 di mana dalam berbagai

kegiatannya termasuk pada penyediaan dana bagi berbagai kegiatan TPQ Al-Ittihad senantiasa melibatkan warga di wilayah RW 15 tersebut.

Dari paparan tersebut menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif di dalamnya. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad yang diangkat dalam judul penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)”.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperdalam hasil temuan-temuan di lapangan, penelitian ini difokuskan untuk menggali data pembiayaan pendidikan yang berkaitan dengan *capital cost* (biaya pembangunan) dan *recurrent cost* (biaya rutin/operasional) di mana kedua pembiayaan itulah yang melibatkan partisipasi masyarakat di TPQ Al-Ittihad, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas?” Adapun turunan dari rumusan masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas?

3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas?

Adapun masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi wali santri, tokoh masyarakat sekitar, kelompok pengajian muslimat, remaja, pihak RW dan RT di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk serta masyarakat secara luas baik komunitas, swasta, lembaga ataupun instansi yang turut berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, seperti: Pihak Kelurahan Teluk, dan pihak swasta (Toko Kitab Pahala Purwokerto, Warung Dawet Ayu Pak Wahyono). Hal tersebut senada dengan apa yang disebutkan oleh Rahman²⁵ bahwa unsur-unsur masyarakat yang dapat menjalin kerjasama dalam pendidikan di antaranya adalah orang tua siswa, warga, tokoh masyarakat, lembaga agama, dan organisasi kemasyarakatan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara umum ialah untuk menemukan pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Adapun secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.
2. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

²⁵K.A. Rahman, "Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Islam Universitas Jambi* 1, no. 2, Desember (2012): 243. Lihat pula dengan apa yang disampaikan oleh Budimansyah bahwa masyarakat yang dapat menjalin kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan termasuk TPQ adalah masyarakat umum, masyarakat terorganisir (termasuk pihak RT, RW dan ibu-ibu pengajian muslimat) maupun orang tua murid. (Dasim Budimansyah, "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Educationist* 2, no. 1 Januari (2008): 56-63).

3. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Secara praktis, manfaat untuk penulis ialah bahwa seluruh tahapan dan hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan sekaligus pengetahuan empirik dan praktis tentang bagaimana penerapan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam yang didapatkan selama menjalani studi di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Purwokerto. Adapun bagi pembaca atau pihak-pihak terkait, penelitian ini semoga dapat diterima sebagai kontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam, khususnya sebagai alternatif rujukan bagi para manajer, pengurus, dan pendidik di Taman Pendidikan Al-Qur'an untuk mendapatkan solusi alternatif bagi penguatan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan atau evaluasi. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi praktis khususnya bagi para pegiat Taman Pendidikan Al-Qur'an untuk memperoleh alternatif solusi bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam dan dapat menjadi rujukan bagi para pengelola lembaga pendidikan Islam khususnya Taman Pendidikan Al-Qur'an untuk menemukan alternatif pembiayaan pendidikan TPQ dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan kajian dengan tema terkait.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan penelitian ini, penulis membaginya ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, pengesahan direktur, pengesahan tim penguji, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian, abstrak, transliterasi, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Adapun bagian utama penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan kajian teoritik di mana dalam bab ini akan dibahas konsep dasar tentang *Community Based Education (CBE)* dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, hasil penelitian yang relevan hingga kerangka pikir penelitian.

Bab Ketiga berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, obyek dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab Keempat mendeskripsikan profil setting penelitian dan hasil penelitian serta pembahasannya yang terdiri dari temuan-temuan di lapangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

Bab Kelima berisi simpulan dan rekomendasi.

Adapun bagian akhir dalam laporan penelitian ini ialah penutup yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, catatan lapangan hasil observasi,

catatan lapangan hasil wawancara, dokumen pendukung seperti foto dan dokumen tertulis serta daftar riwayat hidup.



BAB II

COMMUNITY BASED EDUCATION DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

A. Kerangka Teori

1. Community Based Education

a. Pengertian Community Based Education

Community Based Education (CBE) atau pendidikan berbasis masyarakat menurut Compton dan H. McClusky sebagaimana yang dikutip oleh Imam Machali¹ merupakan sebuah sistem yang memberikan peluang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan CBE didorong oleh arus globalisasi yang menuntut modernisasi dan demokratisasi dalam semua hal, termasuk pendidikan. Dalam situasi semacam ini, pendidikan sudah seharusnya dikelola secara desentralisasi dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.²

Adapun menurut Winarno Surakhmad dalam Zubaidi sebagaimana yang dikutip oleh Imam Machali,³ CBE merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subjek atau pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program

¹Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/ Madrasah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 354.

²Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad ke-21* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 86.

³Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook ...*, 354.

yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Dengan kata lain, masyarakat harus diberdayakan, diberi peluang, dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola, dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk, dan oleh masyarakat sendiri.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sam M. Chan⁴ bahwa kewenangan pendidikan berbasis masyarakat dapat dirinci mulai dari kewenangan merumuskan atau membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, melaksanakan kebijakan, dan mengevaluasi atau memonitor kebijakan tersebut.

Michael W. Galbraith sebagaimana yang dikutip oleh Imam Machali menjelaskan:⁵

Community Based Education could be defined as an education process by which individuals (in this case adult) become more competent in their skill, attitudes, and concepts in an effort to live in and gain more control over local aspects of their communities through democratic participation.

Definisi CBE yang dikemukakan oleh Michael W. Galbraith dapat dipahami sebagai proses pendidikan di mana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten menangani keterampilan, sikap, dan konsep mereka dalam hidup di dalam dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui partisipasi demokrasi.

P. Cunningham dan E. Hamilton sebagaimana yang dikutip oleh Imam Machali⁶ menegaskan CBE berpegang pada prinsip bahwa setiap manusia atau masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri berdasarkan sumber daya yang

⁴Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 131.

⁵Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook ...*, 354.

⁶Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook ...*, 355.

dimilikinya serta mampu memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.

Dari beberapa paparan tersebut dapat dipahami bahwa CBE merupakan sebuah proses pendidikan di mana masyarakat bertanggungjawab dan memiliki peran serta partisipasi secara aktif pada program pendidikan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan kata lain, sebuah pendidikan dapat disebut berbasis masyarakat jika tanggung jawab mulai dari perencanaan hingga evaluasi berada di tangan masyarakat.

Untuk itu, secara prinsip CBE merupakan pendidikan yang dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada dengan berorientasi pada masa depan serta memanfaatkan kemajuan teknologi.⁷

b. Aspek *Community Based Education*

Umberto Sihombing sebagaimana yang dikutip oleh Fasli Jalal menjelaskan bahwa terdapat lima aspek dalam pelaksanaan CBE, yaitu:⁸

Pertama, teknologi yang dipelajari hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di masyarakat. Teknologi canggih yang diperkenalkan dan adakalanya dipaksakan sering berubah menjadi pengarbitan masyarakat yang akibatnya tidak digunakan sebab kehadiran teknologi itu bukan karena kebutuhan, melainkan karena dipaksakan. Hal inilah yang membuat masyarakat rapuh.

Kedua, kelembagaan, artinya harus ada wadah yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat digugah dan ditumbuhkan dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan lembaga.

⁷Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adi Cita, 2001), 186.

⁸Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi...*, 185-186.

Ketiga, sosial, artinya program belajar harus bernilai sosial atau bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar. Oleh karena itu, program harus digali berdasarkan potensi lingkungan yang dimiliki.

Keempat, kepemilikan program, artinya kelembagaan harus menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah.

Kelima, organisasi, artinya pengelola pendidikan tidak menangani sendiri programnya, melainkan bermitra dengan organisasi kemasyarakatan lain.

c. Prinsip *Community Based Education*

Michael W. Galbraith sebagaimana yang dikutip oleh Imam Machali menjelaskan bahwa CBE memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:⁹

- 1) *Self determination* (menentukan sendiri), bahwa semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.
- 2) *Self help* (menolong diri sendiri), bahwa anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri.
- 3) *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan), bahwa para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat.

⁹Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook ...*, 356-357.

- 4) *Localization* (lokalisasi), bahwa potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program, dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.
- 5) *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian layanan), bahwa adanya hubungan antargenerasi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dalam pelayanan publik yang lebih baik.
- 6) *Reduce duplication of service* (mengurangi duplikasi pelayanan), bahwa masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan, dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan mengoordinasi usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan.
- 7) *Accept diversity* (menerima perbedaan), yakni menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Termasuk perwakilan masyarakat seluas mungkin dituntut dalam pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan program.
- 8) *Institutional responsiveness* (tanggung jawab kelembagaan), bahwa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat.
- 9) *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup), bahwa kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar belakang masyarakat.

Adapun aturan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat (CBE) telah diatur pada pasal 55 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, sebagai berikut:¹⁰

- 1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah.

d. Peran Pemerintah dalam *Community Based Education*

Demokratisasi pendidikan merupakan landasan dan *spirit* pelaksanaan CBE di mana hal tersebut dilaksanakan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, CBE juga merupakan upaya penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat, sehingga peranan pemerintah untuk menyukseskan CBE ini menjadi sangat penting. Sihombing sebagaimana dikutip oleh

¹⁰Tim Penyusun, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ...*, 41-42.

Imam Machali menjelaskan bahwa terdapat lima peran pemerintah dalam pelaksanaan CBE, yakni:¹¹

Pertama, peran sebagai pelayan masyarakat. Dalam pengembangan CBE (Pendidikan Berbasis Masyarakat) prinsip yang diterapkan adalah “memberikan pelayanan terbaik” bagi masyarakat. Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal.

Kedua, peran sebagai fasilitator. Pemerintah sebagai fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.

Ketiga, peran sebagai pendamping. Pemerintah melepaskan peranannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat.

Keempat, peran sebagai mitra. Pemerintah harus mampu memerankan fungsinya sebagai mitra bagi masyarakat. Sebagai mitra, hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, dan setara dalam satu jalur yang sama.

Kelima, peran sebagai penyandang dana. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga wajib bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan mendanai kegiatan belajar masyarakat.

¹¹Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook ...*, 363-364.

e. Peran Masyarakat dalam *Community Based Education*

Masyarakat memegang peranan sentral dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan CBE dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹²

Pertama, tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan pendidik) berperan sebagai pemrakarsa, mediator, motivator, tutor, pengelola, dan bahkan sebagai penyandang dana serta penyedia fasilitas pendidikan.

Kedua, organisasi kemasyarakatan berperan sebagai pemrakarsa, perencana, penyelenggara, organisator, pemberi motivasi, penyedia fasilitas, pengatur kegiatan, pengayom kegiatan, penyedia dana, pembina kegiatan, dan pemecah masalah.

Ketiga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai pembangkit dan penyampai aspirasi masyarakat, pemberi motivasi, pendamping masyarakat, fasilitator, pengembang, penyedia teknologi, penyedia informasi pasar, dan penyedia tenaga ahli serta pengelola program.

Pemerintah dan masyarakat memegang peranan yang penting dalam menata berbagai upaya pendidikan berbasis masyarakat. Peran tersebut harus terwujud secara harmonis dalam semangat kebersamaan untuk saling mengisi secara bertanggungjawab.

Apabila peran masyarakat khususnya bagi para pendidik (ustaz dan ustazah) dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, maka menurut Muhammad Athiyyah al-Abrasyi sebagaimana dikutip oleh Moh. Roqib¹³ bahwa seorang pendidik sudah seharusnya memiliki kepribadian, seperti: 1) Zuhud dan ikhlas, 2) Bersih lahir dan batin, 3) Pemaaf, sabar, dan mampu mengendalikan diri, 4) Bersikap dewasa, dan 5) Mengetahui dan memahami peserta didik (santri) dengan baik.

¹²Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook ...*, 364.

¹³Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 44.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam Moh. Roqib¹⁴ bahwa sikap yang harus dimiliki oleh seorang pendidik di antaranya yaitu: Selalu kontinyu dalam mendekati diri kepada Allah, menjaga diri agar selalu memiliki rasa takut (*khauf*) pada Allah, senantiasa bersikap tenang, menjaga kehormatan, rendah hati, konsentrasi dalam beribadah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, menjauhkan diri dari lingkungan negatif, dan tidak membisniskan ilmu untuk kepentingan duniawi semata (mampu bersikap ikhlas).

2. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹⁵ partisipasi dimaknai sebagai perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Made Pidarta¹⁶ mendefinisikan partisipasi sebagai pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Partisipasi menurut Huneryear dan Hecman¹⁷ adalah keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. Adapun masyarakat dalam UU Sidiknas No. 20 Tahun 2003 dimaknai sebagai kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.¹⁸ Sehingga partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai keikutsertaan atau turut berperan serta sekelompok warga atau orang dalam suatu kegiatan.

¹⁴Moh. Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2009), 187-188.

¹⁵Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

¹⁶Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatoris dengan Pendekatan Sistem* (Jakarta: Cipta, 1990), 53.

¹⁷Huneryager dan Hecman, *Partisipasi dan Dinamika Kelompok* (Semarang: Dahara Prize, 1992), 30.

¹⁸Tim Penyusun, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003...*, 7.

Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum¹⁹ menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal.²⁰ Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif, artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak, ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.²¹

Tuti Budirahayu sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum menjelaskan bahwa pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat, meliputi:²²

- 1) Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan sedangkan hak politik, sebagai hak asasi tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.

¹⁹Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 54.

²⁰Parwoto, *Pemberdayaan Masyarakat dan Prinsip Partisipatif* (Medan: tp., 2007), dalam www.library.usu.ac.id/download/fp/06008762.pdf diakses pada 30 Mei 2017.

²¹Parwoto, *Pemberdayaan ...*, dalam www.library.usu.ac.id/download/fp/06008762.pdf diakses pada 30 Mei 2017.

²²Tuti Budirahayu, *Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Kendala dan Peluang untuk Meraih Pendidikan yang Layak di Era Otonomi Daerah* Paper S-2.

- 2) Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat luas.
- 3) Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- 4) Partisipasi dilakukan secara sistemik, bukan hal yang insidental.
- 5) Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 6) Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan suatu lembaga dan termasuk lembaga pemerintahan.

b. Bentuk dan Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi²³ terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu di mana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program dan masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Basrowi sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum²⁴ menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi nonfisik dan

²³Effendi, *Analisa Persepsi Masyarakat terhadap Taman Nasional Gunung Lauser Desa Harapan Jaya Kabupaten Langat Sumatra Utara* (Sumatera: UNSU, 2002).

²⁴Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 58-59.

partisipasi fisik. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah, menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku-buku atau bantuan lainnya. Adapun partisipasi nonfisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Moeljanto sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum²⁵ menyatakan bahwa dalam konteks partisipasi (masyarakat) lokal, semua mitra pelaksana suatu program merupakan persyaratan murni, artinya pelaksanaan suatu program harus memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum mereka. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat:

- 1) Adanya reorientasi ke arah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi.
- 2) Peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan mereka sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan mereka, masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka.
- 3) Memperlancar komunikasi antarberbagai potensi lokal sehingga masing-masing dapat lebih menyadari perspektif partisipasi lain.
- 4) Penerapan prinsip tertentu, yaitu tentang hidup, belajar merencanakan, dan bekerja bersama-sama dengan rakyat. Kegiatan seperti ini dimulai dari apa yang diketahui dan dimiliki masyarakat dengan cara memberi contoh dan menggunakan

²⁵Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 59-60.

pendekatan yang menyatakan bukan sekedar memberi pertolongan.

Adapun menurut Azyumardi Azra,²⁶ terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pendidikan, antara lain: 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan; 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan madrasah (lembaga pendidikan Islam) yang *quality oriented*; dan 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, sehingga madrasah tidak terpisah dan tetap menjadi bagian integral dari masyarakat muslim secara keseluruhan.

Cohen dan Uphoff sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum²⁷ menjelaskan bahwa partisipasi diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yakni siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya partisipasi. Dalam konteks yang pertama dapat dikaitkan dengan mengklasifikasikan berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu 1) Penduduk setempat, 2) Pimpinan masyarakat, 3) Pegawai pemerintah, dan 4) Pegawai asing yang memungkinkan dipertimbangkan dalam suatu aktivitas. Dalam dimensi kedua memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan: 1) Apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah masyarakat setempat, 2) Apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan, 3) Saluran partisipasi itu, apakah berlangsung dalam individu atau kolektif, dalam organisasi formal ataukah informal dan apakah partisipasi itu secara langsung atau melibatkan wakil, 4) Durasi partisipasi, 5) Ruang lingkup partisipasi, apakah sekali untuk seluruhnya, sementara, atau berlanjut dan meluas; memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam pengambilan

²⁶Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Millennium Baru* (Ciputat: Logos, 2000), 153.

²⁷Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 219.

keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan.

Inti dari suatu partisipasi ialah mengenai “siapa” yang berpartisipasi dan dalam aktivitas “apa” mereka berpartisipasi.²⁸ Cohen dan Uphoff sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum²⁹ membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu: *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. *Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan secara bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial. Berikut rincian keempat jenis partisipasi tersebut:

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan merupakan hal yang penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam

²⁸Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 60.

²⁹Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 61-62.

kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: *Pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana. *Kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi. *Ketiga*, penjabaran program. Hal tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur yang turut menentukan keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang ditetapkan atau tidak.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan ataukah ada penyimpangan.

Secara singkat, berikut partisipasi menurut Cohen dan Uphoff sebagaimana yang dikutip Siti Irene Astuti Dwiningrum dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.
Tahapan Partisipasi Cohen dan Uphoff³⁰

No.	Tahap	Deskripsi
1.	Pengambilan keputusan	Penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2.	Pelaksanaan	Penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
3.	Pengambilan	Partisipasi berkaitan dari kualitas dan

³⁰Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 63.

manfaat	kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
4. Evaluasi	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

Cohen dan Uphoff menambahkan bahwa ilmuwan dan politikus lebih memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi. Sementara para administrator cenderung memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan manfaat terutama dalam rangka memperbaiki *well being* masyarakat. Hal tersebut memperhatikan adanya latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda yang akan menimbulkan konsep partisipasi yang berbeda pula.

Praktik partisipasi sebagai hak politik memerlukan keterlibatan langsung dari warga dalam pembuatan kebijakan publik sehingga terjalin sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kepercayaan publik yang menjadi modal penting dalam pemerintahan yang desentralistik. Partisipasi masyarakat juga berarti adanya keterlibatan langsung bagi warga dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol serta koordinasi dalam mempertahankan hak-hak sosialnya.

Adapun dalam konteks kepemilikan, pendidikan berbasis masyarakat dianggap sebagai berbasis masyarakat jika segala hal yang terkait di dalamnya berada di tangan masyarakat, seperti perencanaan hingga pelaksanaan. Sebaliknya, jika semua penyelenggaraan pendidikan ditentukan pemerintah maka disebut pendidikan berbasis pemerintah atau negara (*state-based education*).³¹

Jika dikaitkan dengan tingkat kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat oleh Shery Arstein dalam Suhirman

³¹Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 134.

sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum dapat dibedakan ke dalam anak tangga sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tangga Partisipasi Masyarakat³²

No.	Klasifikasi	Uraian	Tingkatan
1.	<i>Citizen Power</i>	Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan.	Kontrol masyarakat (<i>citizen control</i>), pelimpahan kekuasaan (<i>delegated control</i>), kemitraan (<i>partnership</i>).
2.	<i>Tokenism</i>	Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan.	Penetraman (<i>placation</i>), konsultasi (<i>conculatation</i>), informasi (<i>information</i>).
3.	<i>Non Participation</i>	Masyarakat hanya dijadikan obyek.	Terapi (<i>therapy</i>), manipulasi (<i>manipulation</i>).

Dari tangga partisipasi tersebut dapat diasumsikan bahwa partisipasi yang mampu menggerakkan dinamika masyarakat adalah partisipasi yang diklasifikasikan ke dalam *citizen power*, karena dalam konteks inilah terdapat keterlibatan *civil society* sebagai pilar penting dalam menggerakkan masyarakat.³³

Secara khusus, Peter Oklay dalam Tadjudin Noer Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

³²Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 64.

³³Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 65.

Tabel 2.3.
Tingkatan Partisipasi³⁴

No.	Tingkatan	Deskripsi
1.	<i>Manipulation</i>	Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.
2.	<i>Consultation</i>	<i>Stakeholder</i> mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
3.	<i>Consensus-building</i>	Pada tingkat ini <i>stakeholder</i> berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu dan kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.
4.	<i>Decision-making</i>	Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
5.	<i>Risk-taking</i>	Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan risiko yang muncul dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.
6.	<i>Partnership</i>	Memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi juga dalam tanggung jawab.
7.	<i>Self-management</i>	Puncak dari partisipasi masyarakat. <i>Stakeholder</i> berpartisipasi dalam proses saling belajar (<i>learning process</i>) untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

³⁴Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 65-66.

Davis dalam Khumas sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum³⁵ menjelaskan bahwa interaksi yang terjalin antara orang tua dan sekolah meliputi dua kategori, yaitu *parental involvement* dan *parental participation*. Indikasi *parental participation* ialah orang tua berpengaruh atau berupaya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pada hal-hal yang sangat penting di sekolah, seperti penentuan program sekolah, masalah keuangan, dan lain-lain. Sebaliknya, indikasi *parental involvement* mengarah pada keterlibatan orang tua pada semua jenis aktivitas yang ditujukan untuk mendukung program-program sekolah. Dari beberapa pertimbangan yang menekankan pada kebutuhan psikologis anak, maka *parental involvement* merupakan solusi yang mungkin lebih tepat untuk dilakukan di sekolah-sekolah.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Azyumardi Azra³⁶ bahwa keikutsertaan masyarakat termasuk wali siswa dalam mendukung program sekolah termasuk pada struktur manajemen pendidikan bertujuan untuk memberikan ruang bagi terciptanya lembaga pendidikan yang akuntabel, efektif dan berkualitas. Pendidikan yang berakar pada masyarakat berarti adanya partisipasi dan kontrol masyarakat sebagai pemilik dan pengguna jasa layanan pendidikan.

Tingkat keterlibatan orang tua di sekolah tidak hanya ditentukan oleh orang tua, tetapi juga ditentukan oleh sistem pendidikan yang berlaku. Khumas sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum menyebutkan bahwa proses keterlibatan orang tua di sekolah/ lembaga pendidikan yang disusun secara hirarkhis dapat digambarkan sebagai berikut:

³⁵Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 72-73.

³⁶Azyumardi Azra, *Pendidikan ...*, 153.

Tabel 2.4.
Keterlibatan Orang Tua dalam Lembaga Pendidikan³⁷

No.	Level	Deskripsi
1.	<i>Spectator</i>	Menunjukkan keterlibatan orang tua di sekolah sangat kecil, bisa dikatakan tidak ada. Orang tua merasakan bahwa sekolah dan guru merupakan sebuah kekuasaan yang otonom sehingga tidak menginginkan campur tangan orang tua. Pintu sekolah dipandang orang tua sebagai penghalang untuk berpartisipasi. Aktivitas yang menuntut partisipasi orang tua dilakukan di luar sekolah. Peran orang tua sangat terbatas. Komunikasi antara guru dan orang tua, baik melalui surat atau telepon sangat jarang terjadi. Bentuk komunikasi terjadi hanya bila orang tua mempunyai keluhan atau penolakan terhadap informasi yang diterima mengenai anaknya. Bahkan lebih buruk dari itu, orang tua memperlihatkan reaksi yang berlebihan terhadap prestasi buruk yang dicapai anak dengan mengkritik sekolah secara terbuka, menghukum anak atau bahkan melukai secara fisik.
2.	<i>Support</i>	Menunjukkan keterlibatan orang tua di sekolah hanya pada saat khusus di mana pihak sekolah meminta keterlibatan mereka. Tugas yang dibebankan kepada orang tua biasanya dapat diselesaikan di rumah dan tidak menuntut waktu dan energi. Sebagai contohnya, orang tua ke sekolah untuk memastikan bahwa anaknya hadir, orang tua memeriksa pekerjaan rumah anak. Selain itu, orang tua biasanya menyumbang bagi sekolah, membayar iuran kelompok orang tua dan sebagainya.
3.	<i>Engagement</i>	Hubungan orang tua dan sekolah saling menghormati dalam suasana yang saling mendukung. Keterlibatan orang tua di sekolah berdasarkan dua kebutuhan umum, yaitu: a. mengamati sekolah dan pengaruhnya terhadap anak, b. agar partisipasinya disaksikan oleh anak. Adapun pihak sekolah mengharapkan orang tua dapat: a. mengembangkan dan mendistribusikan sumber informasi untuk sekolah dan masyarakat, b. bekerja sebagai <i>volunteer</i> dan atau sebagai narasumber untuk membagi pengetahuan,

³⁷Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 74-75.

	<p>keterampilan dan bakat khusus kepada siswa. Guru dapat meminta orang tua untuk menyediakan sarana transportasi dan menemani siswa pada kunjungan studi lapangan. Bahkan di kelas, orang tua dapat membimbing siswa dan membawa siswa pada kegiatan akademis di bawah pengasuhan guru. Keterlibatan orang tua sejalan dengan harapan untuk mengetahui pengalaman anak di sekolah serta pengalaman anak-anak lain, orang tua menyadari bahwa fungsi sekolah tidak hanya menyediakan keterampilan sebagai bekal kerja tetapi sekolah juga berfungsi memberi bekal agar siswa memiliki keterampilan hidup yang berkualitas.</p>
4. <i>Decision making</i>	<p>Orang tua menuntut hubungan yang saling tergantung antara rumah dan sekolah. Pada tingkat ini, kekuatan sekolah diperoleh melalui jaringan yang dimiliki orang tua. Aktivitas orang tua pada tingkat ini adalah secara konsisten mempengaruhi pengambilan keputusan. Orang tua bertanggungjawab pada setiap aspek sekolah.</p>

Adapun pola partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan bersifat *top-down intervention* yang terkadang kurang mendukung aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Dalam hal ini yang relatif lebih sesuai dengan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola pemberdayaan yang sifatnya *bottom-up intervention* yang di dalamnya ada nuansa penghargaan dan pengakuan bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya serta mampu melakukan usaha-usaha pendidikan dengan swadaya dan prinsip kebersamaan. Adapun perencanaan partisipatif dalam menyusun suatu program pembangunan dalam konteks pembangunan pada pendidikan harus dilakukan melalui:³⁸ 1) Analisis Permasalahan, 2) Analisis Potensi, dan 3) Analisis Kepentingan dalam Masyarakat.

³⁸Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 76.

Partisipasi semakin sulit untuk diwujudkan jika partisipasi dimaknai “defisit” bagi pihak yang sedang melakukan proses interaksi sosial. Kecenderungan ini masih terjadi pada satuan pendidikan, ketika seseorang merasa bahwa dengan partisipasi akan mengeluarkan materi, dengan partisipasi akan mengurangi waktu, dengan partisipasi harus belajar lagi, dan dengan partisipasi akan menambah pikiran.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan partisipasi aktif dalam masyarakat perlu dibangun dari dalam diri masyarakat atau orang yang akan berpartisipasi bahwa adanya niat yang sungguh-sungguh dan ikhlas dalam membantu sesama dan mendukung suatu program atau kegiatan. Penanaman kesadaran dan pemahaman juga perlu dilakukan kepada masyarakat bahwa partisipasi yang mereka berikan sejatinya dampak atau manfaat dari partisipasi tersebut mereka jugalah yang akan merasakannya.

Dengan adanya kesadaran dan keikhlasan masyarakat dalam berpartisipasi pada suatu kegiatan, perasaan bahwa dengan partisipasi akan mengeluarkan materi, dengan partisipasi akan mengurangi waktu, dengan partisipasi harus belajar lagi, dan dengan partisipasi akan menambah pikiran, hal-hal tersebut tidak akan muncul dalam diri masyarakat. Dengan kesadaran dan rasa ikhlas masyarakat dalam mendukung dan berpartisipasi dalam suatu program, hal yang akan muncul pada masyarakat ialah sikap profesional dan keterlibatan secara penuh dalam suatu program atau kegiatan. Untuk itu, masyarakat perlu dirangkul untuk mengetahui permasalahan yang ada di mana dari permasalahan tersebut masyarakat diajak untuk menganalisis tentang solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, masyarakat merasa bahwa dirinya ada dan dianggap serta merasa diperlukan bagi pemecahan solusi-solusi terkait permasalahan yang ada.

c. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Seseorang akan berpartisipasi terhadap sesuatu yang mana dalam hal ini dikonotasikan sebagai suatu perwujudan perilaku seorang terhadap suatu objek kegiatan.³⁹ Hal tersebut ditegaskan pula oleh Herbert Blumer dalam Irving M. Zeitlin yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum⁴⁰ bahwa respon faktor, baik langsung maupun tidak, selalu didasarkan atas penilaian atau pemaknaan setiap objek tindakan. Pokok pikiran Blumer dalam menjabarkan pemikiran interaksionalisme simbolis menyebutkan bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna. Dalam kaitannya dengan penafsiran terhadap suatu objek tindakan, Thomas dalam K. Sunarto mengatakan bahwa tindakan seseorang selalu didahului oleh suatu tahapan penilaian dan pertimbangan untuk memperoleh makna atas objek tindakan.

Homans dalam Irving M. Zetlin sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum⁴¹ menjelaskan bahwa perilaku sosial berkenaan dengan suatu kemauan yang mengakibatkan adanya suatu ganjaran dan hukuman dari pihak lain. Titik berat teori Homans ini terfokus pada aspek psikologis dan motivasi individu. Apabila hal tersebut dikaitkan pada eksistensi agama, maka agama dapat dijadikan sebagai sumber motivasi dalam berperilaku sebagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Sunhaji⁴² bahwa:

In religious humanism, normative-religious awareness is the one on a person to believe the existence that religion provides a set of guidance. One's existence in his or her community is based on religious belief. Human being is aware that his or her potential is limited so that external authority (religion) becomes a source of motivation.

³⁹Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 56.

⁴⁰K. Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas UI, tt.), 65.

⁴¹Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 57.

⁴²Sunhaji, "Between Social Humanism and Social Mobilization: The Dual Role of Madrasah in the Landscape of Indonesian Islamic Education", *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017), 130.

Dalam tindakan sosial termasuk kaitannya dengan partisipasi masyarakat ini seyogyanya selalu didasarkan pada empat proposisi, yaitu:⁴³

- 1) Proporsi keberhasilan
Semakin positif respon yang diterima, maka makin sering tindakan tersebut dilakukan.
- 2) Proporsi stimulus
Jika terdapat kesamaan stimulus yang menguntungkan, maka semakin besar pengulangan tindakan dilakukan.
- 3) Proporsi nilai
Semakin bermakna hasil yang diterima, maka semakin sering tindakan tersebut diulangi.
- 4) Proporsi berjenuh-kerugian
Semakin sering menerima respon yang istimewa, maka respon tersebut makin berkurang nilainya.

Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat, antara lain:⁴⁴

- 1) Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat.
- 2) Aspek-aspek tipologis (pembuktian).
- 3) Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya).
- 4) Demografis (jumlah penduduk).
- 5) Ekonomi (desa miskin/ tertinggal).

d. Indikator Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu lembaga pendidikan dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai berikut:⁴⁵

⁴³Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 57.

⁴⁴Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 57-58.

- 1) Kontribusi atau dedikasi *stakeholders* meningkat dalam hal jasa (pemikiran/ keterampilan), finansial, moral, dan material atau barang.
- 2) Meningkatnya kepercayaan *stakeholders* kepada lembaga pendidikan.
- 3) Meningkatnya tanggung jawab *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk peningkatan mutu pendidikan.
- 5) Meningkatnya kepedulian *stakeholders* terhadap setiap langkah yang dilakukan lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu.
- 6) Keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga pendidikan benar-benar mengekspresikan apresiasi dan pendapat *stakeholders* serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

Mulyasa sebagaimana yang dikutip oleh Marzal⁴⁶ menyebutkan bahwa indikator partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu lembaga pendidikan di antaranya:

- 1) Adanya saling pengertian antara sekolah atau lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat termasuk dunia kerja.
- 2) Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing.
- 3) Adanya kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga serta ikut bertanggungjawab atas suksesnya pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut.

⁴⁵Sri Suharyati, "Partisipasi Keluarga Miskin dan Manajemen Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Banjarnegara" *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), 25.

⁴⁶Marzal, "Partisipasi Orang Tua Siswa dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri Yogyakarta II" *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), 41.

Dari beberapa indikator partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di suatu lembaga pendidikan, terdapat titik tengah atau kesamaannya yakni adanya pengertian, kepedulian, dan kerjasama yang baik antara pihak sekolah atau lembaga pendidikan dengan masyarakat, baik dalam hal materi maupun nonmateri demi peningkatan kualitas pendidikan.

e. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Secara umum terdapat tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat, yakni:⁴⁷

1) *Learning process (learning by doing)*

Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas program sekaligus mengamati dan menganalisa kebutuhan serta keinginan masyarakat.

2) *Institutional development*

Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial.

3) *Participatory*

Cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali *need* yang ada dalam masyarakat.

Selain tiga prinsip di atas, untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Menawarkan hadiah kepada masyarakat yang mau berpartisipasi sesuai dengan kuantitas dan tingkatan partisipasinya.

⁴⁷Arifudin Sahidu. "Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat" *Disertasi*, (Bogor: IPB, 1998), 147.

⁴⁸Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 82-83.

- 2) Menawarkan sanksi kepada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi, seperti dengan membayar denda, pemberian hukuman, dan kerugian bagi yang melanggar.
- 3) Melakukan persuasi kepada masyarakat bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pendidikan yang telah dimusyawarahkan, justru hal tersebut akan menguntungkan masyarakat sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- 4) Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan.
- 5) Mengaitkan masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik.
- 6) Menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam pelaksanaan dan mendukung program pendidikan yang dicanangkan agar masyarakat yang menjadi pengikutnya juga ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- 7) Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijakan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa terdapat banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik jika mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 8) Menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan secara sah sebagai pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat.

Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan masyarakat enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan ataupun kegiatan yang telah dirumuskan, antara lain:⁴⁹

- 1) Jika kebijakan tersebut bertentangan dengan tata nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

⁴⁹Ali Imron, *Kebijaksanaan ...*, 83-84.

- 2) Kurang mengikatnya kebijakan tersebut kepada masyarakat. Ada kebijakan yang sangat mengikat dan ada pula kebijakan yang tidak begitu mengikat kepada masyarakat. Kebijakan yang sangat mengikat umumnya memberlakukan sanksi yang jelas, sedangkan kebijakan yang tidak begitu mengikat umumnya tidak terlalu dipatuhi.
- 3) Adanya ketidakpastian hukum, baik bagi mereka yang berpartisipasi aktif maupun pasif.
- 4) Jika kebijakan yang ada terlalu ambisius dan ideal, sehingga oleh masyarakat dianggap tidak realistis, maka hal tersebut bisa menjadi penyebab masyarakat enggan berpartisipasi, karena mereka tidak yakin bahwa partisipasi mereka akan membawa hasil.
- 5) Adanya anggota masyarakat yang memang sengaja tidak berpartisipasi disebabkan alasan-alasan untuk mencari keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan bersama.
- 6) Rumusan kebijakan tidak jelas dan mungkin antara satu kebijakan dengan kebijakan lain terlihat bertentangan. Hal tersebut juga menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi.

3. Pembiayaan Pendidikan

a. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Biaya dalam ekonomi diartikan sebagai pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan serta dapat dihitung sebelumnya. Bila tidak demikian, maka pengeluaran dapat dikategorikan sebagai pemborosan jika tidak melekat pada proses produksi, dapat dihindarkan, dan tidak dapat dihitung sebelumnya.⁵⁰

⁵⁰Agus Irianto, *Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa* (Jakarta: Kencana, 2013), 18.

Adapun menurut Dedi Supriadi⁵¹ biaya pendidikan adalah salah satu komponen instrumental (*instrumental input*) yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang, dan tenaga.

Abuddin Nata⁵² menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan, dan sebagainya.

Mulyasa⁵³ menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan secara keseluruhan menuntut kemampuan suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan.

Dari beberapa definisi tersebut, pembiayaan pendidikan dapat dipahami sebagai ongkos atau biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk uang, barang, dan tenaga.

Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan sukar berjalan dengan lancar.

⁵¹Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 3.

⁵²Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 219.

⁵³E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), 194.

Timbulnya pembicaraan pembiayaan pendidikan antara lain seiring dengan terjadinya pergeseran dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan secara individual dan sambilan dalam situasi ilmu pengetahuan yang belum berkembang, menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara khusus dan profesional dalam situasi ilmu dan pengetahuan yang sudah mulai berkembang. Dalam situasi yang terakhir ini, proses belajar mengajar tidak dapat lagi dilakukan secara sambilan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti masjid atau bagian tertentu dari rumah guru, melainkan sudah memerlukan tempat yang khusus, sarana prasarana, infrastruktur, guru, dan lainnya yang secara khusus diadakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Dalam situasi yang demikian itulah, maka pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang harus diadakan secara khusus.⁵⁴

b. Jenis Pembiayaan Pendidikan

Imam Machali dan Ara Hidayat menyebutkan bahwa keseluruhan biaya pendidikan yang digunakan oleh seorang peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis biaya pendidikan, yakni:⁵⁵

1) *Direct and Indirect Cost* (Biaya Langsung dan Tidak Langsung)

Biaya langsung (*direct cost*) ialah biaya yang langsung digunakan untuk operasional sekolah. Biaya langsung terdiri atas biaya pembangunan (*capital cost*) dan biaya rutin (*recurrent cost*). Biaya pembangunan ialah biaya yang digunakan untuk pembelian tanah bagi pembangunan ruang kelas, perpustakaan, dan lapangan olahraga, biaya konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan mebel, biaya penggantian, dan perbaikan. Untuk menentukan biaya pembangunan digunakan konsep "*capital cost per student place*". Adapun biaya rutin ialah biaya yang digunakan untuk membiayai

⁵⁴Abuddin Nata, *Ilmu ...*, 219.

⁵⁵Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook ...*, 404-405.

kegiatan operasional pendidikan, seperti untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru dan personel sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Untuk menghitung biaya rutin yang dibutuhkan seorang siswa per tahun di sekolah digunakan analisis *unit cost*. Nilai *unit cost* merupakan nilai satuan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada seorang siswa per tahun dalam suatu jenjang pendidikan. *Unit cost* memberikan gambaran tentang besar biaya yang dikeluarkan dan tingkat pelayanan yang diberikan.

Adapun biaya tidak langsung (*indirect cost*) ialah biaya yang menunjang siswa untuk dapat hadir di sekolah. Biaya tersebut meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya lainnya. Biaya tidak langsung sulit dihitung karena tidak ada catatan resmi. Berdasarkan alasan praktis, biaya ini tidak turut dihitung dalam perencanaan oleh para administrator perencana atau pembuat keputusan.

2) *Social Cost and Private Cost*

Social cost ialah biaya yang dikeluarkan masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Biaya ini berupa uang sekolah, uang buku, dan biaya lainnya. Biaya tidak langsung seperti pajak dan retribusi, di dalam *social cost* termasuk *private cost*. Adapun *private cost* ialah biaya langsung yang dikeluarkan dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan biaya hidup setiap siswa. Biaya tidak langsung merupakan *income forgone* setelah dikenai pajak.

3) *Monetary and Non Monetary Cost*

Monetary cost diartikan sebagai biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dibayar oleh masyarakat dan individu. *Nonmonetary cost* ialah kesempatan yang hilang karena digunakan untuk membaca buku dan belajar.

Adapun menurut Nanang Fatah⁵⁶ dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat dua pendekatan, yakni pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro didasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro didasarkan perhitungan biaya alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan peserta didik.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.⁵⁷

c. Sumber Pembiayaan Pendidikan

Landasan hukum standar pembiayaan pendidikan di Indonesia berdasar kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab XIII yang di dalamnya juga memuat sumber pembiayaan pendidikan di mana pada pasal 46 (1) disebutkan bahwa

⁵⁶Nanang Fatah, *Ekonomi ...*, 26.

⁵⁷Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.⁵⁸

Hal serupa dikuatkan pula oleh Mujamil Qomar⁵⁹ bahwa sumber pembiayaan pendidikan terdiri dari: a) Pemerintah baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, maupun kedua-duanya, bersifat umum dan khusus serta diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan, b) Orang tua atau peserta didik, dan c) Masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nanang Fatah bahwa sumber-sumber keuangan sekolah dapat bersumber dari orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan alumni.⁶⁰

Secara umum, sumber pembiayaan pendidikan di antaranya juga dapat diperoleh dari:⁶¹

Pertama, wakaf. Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para ulama dan da'i, mempersiapkan kebutuhan kaum

⁵⁸Tim Penyusun, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Depdiknas, 2005). Berikut secara rinci pasal-pasal yang mengatur tentang pembiayaan pendidikan dalam UU Sisdiknas, yaitu: Pasal 46 (1): Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, Pasal 46 (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 46 (3): Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah., Pasal 47 (1): Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan, Pasal 47 (2): Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 47 (3): Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Pasal 48 (1): Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public, dan Pasal 48 (2): Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

⁵⁹Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Surabaya: Erlangga, 2007), 166.

⁶⁰Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 143.

⁶¹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 293-298.

muslimin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah.

Kedua, zakat. Pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial, sudah sepantasnya zakat dapat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam.

Ketiga, sedekah. Sedekah merupakan anjuran agama yang besar nilainya. Orang yang bersedekah pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali nilainya dari harta yang disedekahkan, bahkan melebihi dari itu. Dari penjelasan tersebut, maka sedekah pula dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan seperti untuk gaji pengajar, beasiswa maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam.

Keempat, hibah. Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial, keagamaan, dan ilmiah. Dengan melihat pengertian hibah, jelas bahwa hibah termasuk salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan.

Secara khusus, bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia termasuk TPQ, sumber pembiayaan pendidikannya dapat berasal dari sumber intern maupun sumber ekstern, yaitu:⁶²

Pertama, sumber biaya intern, yakni: a) Membentuk Badan Usaha atau Koperasi, seperti Badan Usaha dalam bentuk UKM (Usaha Kecil Menengah), Koperasi dan BMT (*Baitulmāl Watamwil*) di mana badan usaha tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi di mana lembaga pendidikan itu berada, b) Membentuk Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf, c) Membentuk badan kerjasama antara Lembaga Pendidikan Islam atau yayasan dengan orang tua murid.

⁶²Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam.....*, 298-300.

Kedua, sumber biaya ekstern, seperti: a) Membentuk donatur tetap, b) Mengupayakan bantuan pemerintah, c) Bantuan luar negeri.

Adapun Martin⁶³ mengatakan bahwa sumber dana atau biaya pendidikan adalah keseluruhan biaya yang berasal dari masyarakat, orang tua, dan pemerintah.

d. Tahapan Pembiayaan Pendidikan

Secara operasional, tahapan atau prosedur dalam pembiayaan pendidikan, meliputi:⁶⁴

1) Perencanaan (*budgeting*)

Perencanaan pembiayaan pendidikan mencakup penyusunan anggaran belanja yang terdiri dari sumber pendapatan, pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan dan alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan.

2) Pelaksanaan (*accounting*)

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi dua kegiatan, yaitu: Penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan anggaran/ biaya. Penerimaan keuangan dari sumber-sumber pembiayaan dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati. Demikian pula dengan pengeluaran biaya pendidikan juga harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Berbagai sumber dana harus digunakan secara efektif dan efisien, artinya pengeluaran harus didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan yang disesuaikan dengan perencanaan.

3) Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dapat

⁶³Martin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 8.

⁶⁴E. Mulyasa, *Pedoman ...*, 81.

diidentifikasi dalam tiga hal, yakni: *Pertama*, pendekatan pengendalian alokasi dana. *Kedua*, bentuk pertanggungjawaban dana, seperti dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan atau triwulan, tahunan atau akhir periode. *Ketiga*, keterlibatan pengawasan dari pihak eksternal lembaga pendidikan.

e. Prinsip Pembiayaan Pendidikan

Prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu:⁶⁵

Pertama, transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan sumber dana dan jumlah rincian penggunaannya, pertanggungjawabannya jelas, sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Penggunaan dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ketiga, efektifitas. Efektifitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan dana dapat dikatakan memenuhi prinsip efektifitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dan mengelola dana yang tersedia untuk membiayai aktifitas dalam mencapai tujuan pendidikan.

Keempat, efisiensi. Efisiensi menekankan pada hasil suatu kegiatan. Efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.

⁶⁵Fauzan, *Pengantar Sistem Administrasi Pendidikan: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 87.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebelum pemaparan terkait penelitian yang relevan dengan penelitian ini perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa beberapa pustaka ataupun rujukan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya ialah *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/ Madrasah di Indonesia* yang ditulis oleh Imam Machali dan Ara Hidayat yang salah satu pembahasannya di dalamnya memaparkan tentang konsep dasar *Community Based Education* atau pendidikan berbasis masyarakat di mana hal tersebut menjadi salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Pustaka yang ditulis oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum Astuti Dwiningrum dengan judul *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* juga dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini yang di dalamnya membahas konsep dasar partisipasi masyarakat dalam pendidikan di mana titik tekannya adalah dengan adanya kerjasama dan partisipasi masyarakat termasuk orang tua atau wali siswa memiliki peran yang penting dalam pendidikan dan kemajuan lembaga pendidikan pendidikan tersebut.⁶⁶

Dalam sebuah penelitian dengan judul *How Do Japanese Schools Promote Parental Involvement?* oleh Melvin Allena Jabar⁶⁷ yang dimuat dalam *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies* disebutkan:

Parental involvement, as some studies have shown, has positive impacts on the overall well being of children. These positive outcomes warrant the need to look at parental involvement programs which can be very useful for replication. Schools in Japan present various activities to mobilize resources and to provide parents opportunities for involvement in their children's education. However, it is interesting to examine how parents think about parental involvement and to what extent do they participate in school and home activities in relation to children's schooling. Parents as partners of teachers and other parents. Parental involvement is not only limited to the parent-child-teacher, but also extends to parent-parent relationships. It also suggests that parental involvement is not only limited to learning activities and school

⁶⁶Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi ...*, 66.

⁶⁷Melvin Allena Jabar, "How Do Japanese Schools Promote Parental Involvement?" *International Journal of Sciences and Humanity Studies* 2, no. 1 (2010): 96-97.

governance, but can also include open communication between teachers and parents and among parents.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan dan partisipasi orang tua selaku bagian dari partisipasi masyarakat menunjukkan adanya dampak positif bagi anak-anak (siswa) sehingga perlu adanya kegiatan atau program yang menggunakan keterlibatan orang tua. Sebagai contoh dalam penelitian tersebut, yakni sekolah-sekolah di Jepang yang menyajikan berbagai kegiatan untuk memobilisasi sumber daya yang ada dan memberi orang tua kesempatan untuk terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa terdapat hal yang menarik dan dapat diteliti lebih dalam tentang bagaimana keterlibatan orang tua dan sejauh mana mereka berpartisipasi dalam aktivitas sekolah dan rumah terkait dengan sekolah anak-anak. Orang tua merupakan mitra guru dan mitra bagi orang tua lainnya. Keterlibatan orang tua tidak hanya terbatas pada orang tua, guru, dan anak, tapi juga meluas ke hubungan antara orang tua. Hal ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar dan tata kelola sekolah, namun juga dapat mencakup komunikasi terbuka antara guru dan sesama orang tua sebagai bagian dari masyarakat.

Penjelasan tersebut setidaknya menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua sebagai bagian dari masyarakat dengan pihak sekolah dalam pendidikan putra-putri mereka merupakan hal yang penting dan menarik untuk diteliti. Bahkan tulisan tersebut juga menjelaskan keterlibatan atau partisipasi ini tidak hanya sebatas antara pihak sekolah atau suatu lembaga pendidikan dengan wali siswa atau masyarakat, namun juga bagaimana keterlibatan atau partisipasi anatara orang tua dengan orang tua dalam pendidikan putra-putri mereka.

Abbas⁶⁸ dalam tulisannya yang berjudul *Community Participation in Education: Challenges and Prospects in Nigeria's Democracy* yang dimuat dalam *European Scientific Journal* menjelaskan:

Community participation in education and democratic participation must be inherently connected to each other for stable polity and good governance, as well as expansion of educational and other services. It is recommended that partnership and interaction between community and government in education must be built to provide initiative, responsibility, sensitivity for participation in education and governance designed to prevent break in communication and breakdown of law and order.

Dalam riset tersebut, Abbas menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan partisipasi demokratis harus saling terkait dan tak terpisahkan untuk pemerintahan yang stabil dan pemerintahan yang baik, serta perluasan layanan pendidikan dan pelayanan lainnya. Selain itu, perlu dibangun adanya kemitraan dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam pendidikan untuk memberikan inisiatif, tanggung jawab, dan kepekaan berpartisipasi dalam pendidikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat yang baik dalam pendidikan, hal tersebut akan membantu dan mendukung bagi terselenggaranya pemerintahan yang stabil (termasuk kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional).

Penelitian yang ditulis oleh Sri Mintarti⁶⁹ dengan judul *Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (Studi Situs SDN Pangjang 2 Ambarawa)* menyebutkan bahwa dalam mengelola TPQ tahapan yang harus ditempuh ialah dimulai dari kegiatan perencanaan yang diawali dengan rapat dewan guru untuk membahas kegiatan administrasi dan kegiatan belajar mengajar. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan di mana hal tersebut memiliki peranan untuk mewujudkan visi dan misi yang ada, yakni mencetak generasi yang cerdas, terampil, santun, berbudi pekerti luhur dan agamis.

⁶⁸Abbas, "Community Participation in Education: Challenges and Prospects in Nigeria's Democracy", *European Scientific Journal* 8, no. 5 (Tt.): 1.

⁶⁹Sri Mintarti, "Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (Studi Situs SDN Panjang 02 Ambawarawa)" *Tesis*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

Tahap selanjutnya yakni kegiatan evaluasi terhadap materi yang telah diajarkan, baik dalam bentuk tugas-tugas saat pembelajaran maupun evaluasi pada akhir semester.

Penelitian dengan judul Manajemen Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir oleh Ambo Upe⁷⁰ menunjukkan bahwa manajemen Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ada di Kecamatan Tembilahan Indragiri Hilir sudah dilaksanakan tetapi masih belum sempurna dengan meningkatnya program pengajaran, santri, guru, keuangan, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang ada di TPQ. Dari hal tersebut dimunculkan adanya rekomendasi bagi pengurus TPQ untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen pendidikannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hatta Abdul Malik⁷¹ dengan judul Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Husna Pasadena Semarang disebutkan bahwa dalam pemberdayaan TPQ Al-Husna langkah-langkah yang dilakukan ialah dimulai dengan mengadakan analisa situasi yakni dengan menggunakan analisis SWOT, kemudian melakukan pendampingan untuk penataan administrasi TPQ sekaligus melakukan pendekatan terhadap para orang tua anak-anak di wilayah Pasadena.

Penelitian dengan judul Manajemen Pengembangan Sumber Daya Pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara oleh Imam Machali dan Fia Ainul Munawaroh⁷² menyimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen pengembangan sumber daya pendidik di TPQ Al-Hidayah dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu menentukan program, proses yang dibutuhkan lembaga, menyusun program, proses perencanaan pengembangan yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan TPQ, melaksanakan program dan proses yang telah direncanakan, serta

⁷⁰Ambo Upe, "Manajemen Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir" *Tesis*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

⁷¹Abdul Malik, "Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Husna Pasadena Semarang", *Dimas Jurnal* 13, no. 2 (2013).

⁷²Imam Machali dan Fia Ainul Munawaroh, "Manajemen Pengembangan Sumber Daya Pendidik di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara", *Jurnal An-Nur* 6, no. 2 Desember (2014).

mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Adapun faktor yang mendukung dalam pelaksanaannya adalah kuantitas sumber daya pendidik yang tidak terlalu banyak, motivasi yang tinggi baik dari kepala TPQ maupun dari dewan guru serta berbagai dukungan dari masyarakat, Pemkab Jepara, dan dari lembaga Qiraati pusat. Adapun faktor yang menghambat adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh dewan guru serta keterbatasan dana yang ada.

Dalam penelitian lain yang ditulis oleh Agus Wibowo⁷³ dengan judul Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Keterlaksanaan Pendidikan di Sekolah Daerah Terpencil (Studi Multisitus pada SDN Panikel 02 dan SDN Ujunggagak 03, Kampung Laut, Kabupaten Cilacap) dijelaskan beberapa temuan sebagai berikut: 1. Jenis-jenis partisipasi yang dibutuhkan sekolah dari masyarakat adalah tenaga, pikiran, uang, fasilitas, dan barang yang dimiliki masyarakat, 2. Unsur-unsur masyarakat yang berpartisipasi adalah wali murid, lembaga desa, Yayasan Sosial Bina Sejahtera (YSBS) Minomartani, pemuka masyarakat dan tokoh agama, 3. Pembuatan program perencanaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui langkah-langkah awal yaitu analisis permasalahan yang muncul, analisis potensi yang dimiliki, dan analisis kebutuhan, kepentingan atau kemauan masyarakat, 4. Teknik-teknik yang dilakukan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah mengakui keberadaan masyarakat dengan memberikan tanggung jawab kepada masyarakat atas kegiatan sekolah, menumbuhkan rasa memiliki, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, menyebarluaskan segala kelebihan atau kekuatan yang dimiliki sekolah, melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan sekolah, dan memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk selalu memberikan saran, masukan, ataupun kritik kepada sekolah, 5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam taraf *placation*, 6. Hasil dan dampak dari partisipasi masyarakat dapat dirasakan oleh sekolah dan masyarakat itu sendiri.

⁷³Agus Wibowo, "Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Keterlaksanaan Pendidikan di Sekolah Daerah Terpencil (Studi Multisitus pada SDN Panikel 02 dan SDN Ujunggagak 03, Kampung Laut, Kabupaten Cilacap)" *Tesis*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2015).

Diana Sufa Rahmawati⁷⁴ dalam risetnya yang berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor* menyebutkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat di SDN Cibeusi sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator, di antaranya komite sekolah dan orang tua mempunyai kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan di sekolah seperti dalam penyusunan perencanaan dan keputusan kebijakan, pelaksanaan pelayanan pendidikan hingga dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan pendidikan. Adapun upaya SDN Cibeusi untuk memberdayakan masyarakat ialah dengan meminta kritikan, saran dan masukan dari orang tua dan masyarakat sekitar, penyusunan dan pengesahan RAPBS bersama komite sekolah serta sekolah menjalin komunikasi dan kerjasama dengan komite dan orang tua siswa tentang program sekolah dan tingkat kemajuan/ perkembangan siswa. Namun, hal berbeda ditemukan di SDN Jatinangor, yakni adanya kecenderungan partisipasi masyarakat yang rendah di sekolah tersebut. Hal ini bisa dilihat dari bentuk partisipasi yang diberikan yakni hampir tidak ada atau boleh dikatakan tidak ada partisipasi dalam bentuk dana dan material. Hal tersebut bukan karena tanpa alasan, tetapi memang kecenderungan kemampuan dan kondisi sosial ekonomi orang tua yang lemah sehingga pihak sekolah merasa tidak berdaya ketika harus meminta partisipasi dalam bentuk materi, namun partisipasi dalam bentuk lain seperti tenaga dan saran masih tetap diberikan masyarakat kepada pihak sekolah.

Penelitian lain dengan judul *Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin* yang ditulis oleh Yahya Mof, dkk.⁷⁵ menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan di madrasah tersebut cukup beragam, yakni partisipasi sebagai pengurus komite madrasah, partisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan di madrasah, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan

⁷⁴Diana Sufa Rahmawati, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor" *Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 110-111.

⁷⁵Yahya Mof, dkk., "Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin", *Tashwir* 1, no. 2 (2013): 61.

madrasah. Strategi dan pendekatan yang dilakukan pihak madrasah dalam membina dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin meliputi tiga hal, yakni: 1. Identifikasi masalah, 2. Perlakuan dan pendekatan, 3. Pembinaan.

Sitti Roskina Mas⁷⁶ dalam tulisannya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa peran serta masyarakat melalui komite dan dewan pendidikan memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat. Secara khusus ditekankan pula bahwa komite sekolah harus mampu mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan menciptakan suasana serta kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Suhardi dan M. Ary Irawan⁷⁷ dengan judul Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Yanmu NW Praya Lombok Tengah NTB) menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam pengembangan pondok pesantren tersebut tidak hanya sebatas pada pemikiran dan tenaga semata, namun juga bantuan dalam bentuk pendanaan.

Dalam penelitian lain dengan judul Model-model Partisipasi Masyarakat dalam Dunia Pendidikan di Kota Samarinda oleh Muhammad Iwan Abdi⁷⁸ menjelaskan bahwa ditemukan adanya fakta tentang kurangnya kesadaran sekolah terhadap pentingnya partisipasi masyarakat bagi

⁷⁶Sitti Roskina Mas, "Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan", *Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Malang* (tt.)

⁷⁷Muhamad Suhardi dan M. Ary Irawan, "Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Yanmu NW Praya Lombok Tengah NTB)", *Jurnal Kependidikan IKIP Mataram* 14, (2015).

⁷⁸Muhammad Iwan Abdi, "Model-model Partisipasi Masyarakat dalam Dunia Pendidikan di Kota Samarinda", *Jurnal Fenomena STAIN Samarinda* 4, no. 2 (2012).

pengembangan sekolah. Hal ini menyebabkan eksistensi masyarakat terabaikan. Untuk itu, perlu membangun persepsi bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, sehingga diharapkan muncul kesadaran sekolah untuk dapat mulai membangun kerjasama dan partisipasi aktif dan positif dengan masyarakat.

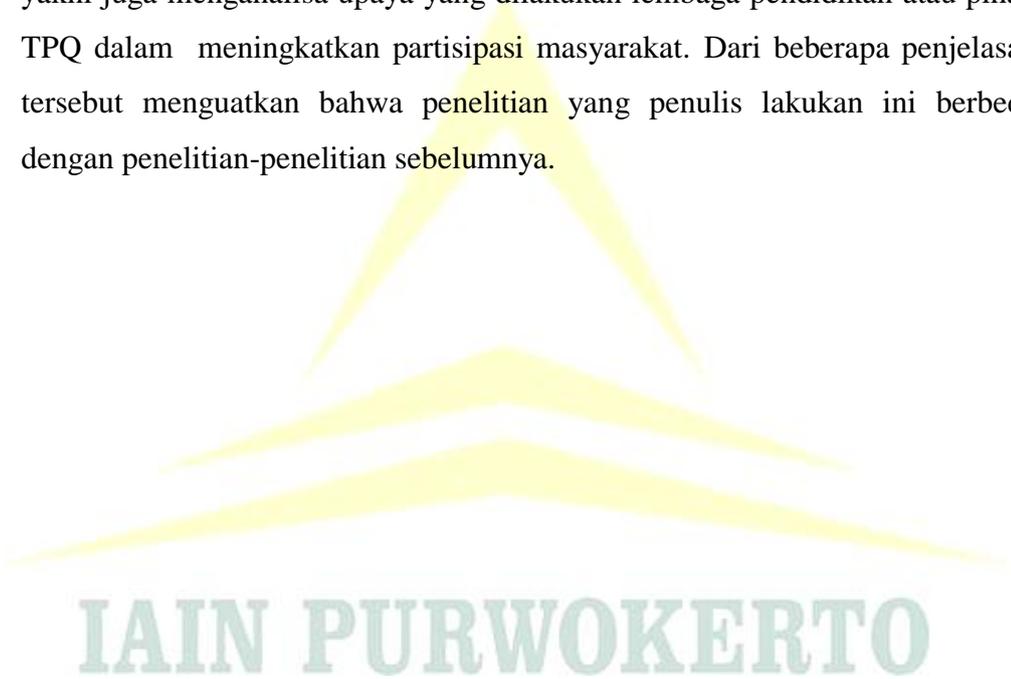
Dari beberapa penelitian tersebut, berikut beberapa letak perbedaan dan posisi penulis dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Melvin Allena Jabar dan Abbas, keduanya memiliki kesimpulan yang sama bahwa partisipasi masyarakat dibutuhkan bagi pengembangan lembaga pendidikan. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis tulis ini di mana partisipasi masyarakat memiliki peran yang urgen dalam pengembangan lembaga pendidikan dan peningkatan pelayanan kualitas pendidikan. Namun, terdapat titik perbedaan di mana dalam penelitian tersebut hal yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pendidikan secara umum, sedangkan penelitian yang penulis susun ini terdapat pada lembaga pendidikan keagamaan (TPQ) dan difokuskan pada pembiayaan pendidikannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sufa Rahmawati difokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan penelitian tersebut dilaksanakan di lembaga pendidikan formal, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di lembaga pendidikan nonformal (TPQ) serta menjadikan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai fokus penelitian, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi serta tidak sekedar membahas tentang bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan sehingga jelas berbeda dengan penelitian Sufa Rahmawati tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yahya Mof, Agus Wibowo dan Muhammad Suhardi sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ketiganya lebih menitikberatkan pada bagaimana mengelola suatu masyarakat di mana hal yang menjadi obyek manajemen adalah masyarakat. Hal ini berbeda

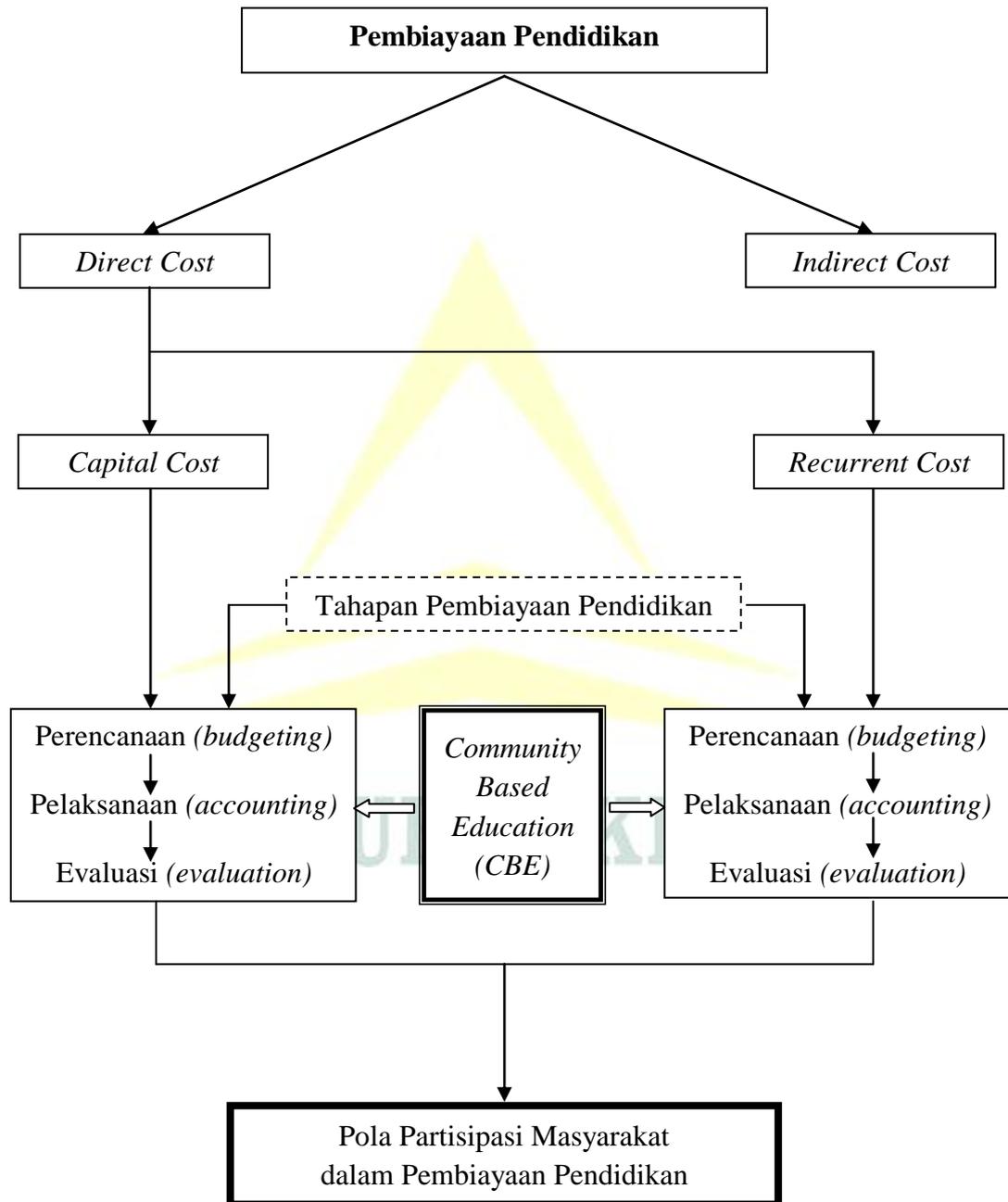
dengan apa yang penulis teliti bahwa posisi masyarakat ialah sebagai pelaku dari pembiayaan pendidikan tersebut. Selain itu, lokasi penelitian yang penulis teliti merupakan lembaga pendidikan nonformal (TPQ) di mana hal tersebut berbeda dengan penelitian ketiganya yang bertempat di lembaga pendidikan formal, sehingga tentunya memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Hal lain yang juga menjadi pembeda ialah penelitian yang penulis lakukan ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang tidak sekedar mengungkapkan bagaimana bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat kepada lembaga pendidikan, namun lebih dari itu yakni juga menganalisa upaya yang dilakukan lembaga pendidikan atau pihak TPQ dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dari beberapa penjelasan tersebut menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.



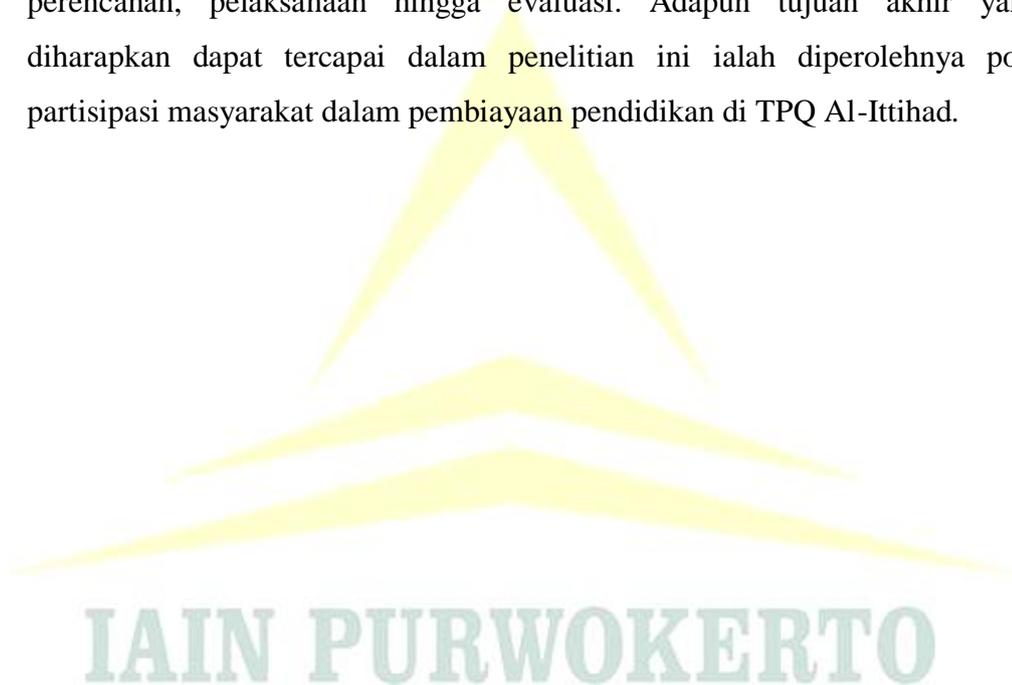
IAIN PURWOKERTO

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pikir dalam penelitian ini, berikut dipaparkan kerangka pikir yang digunakan sebagai berikut:



Dari kerangka pikir tersebut dapat digambarkan bahwa pembiayaan pendidikan secara umum dapat dikategorikan pada dua hal, yakni *direct cost* (biaya langsung) dan *indirect cost* (biaya tidak langsung). Terkait dengan kedua jenis pembiayaan pendidikan tersebut, penelitian ini difokuskan pada jenis pembiayaan pendidikan *direct cost* yang terdiri dari *capital cost* (biaya pembangunan) dan *recurrent cost* (biaya rutin/ operasional). Kemudian, kedua jenis biaya tersebut dianalisis tentang bagaimana konsep *Community Based Education* atau pendidikan berbasis masyarakat diimplementasikan dalam tahapan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Adapun tujuan akhir yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini ialah diperolehnya pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Adapun hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif di mana penulis secara langsung turun ke lapangan (lokasi penelitian) yakni di TPQ Al-Ittihad untuk mengamati, menggambarkan, dan menceritakan keseluruhan situasi sosial yang ada mulai dari aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) hingga aktivitas (*activity*) yang ada di dalamnya di mana antara aspek yang satu dengan yang lain saling berinteraksi.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Stake sebagaimana yang dikutip oleh Creswell² menjelaskan bahwa pendekatan studi kasus merupakan sebuah pendekatan penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus yang ada pun dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Creswell juga menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Haris Herdiansyah³ bahwa pertanyaan yang diajukan pun lebih sering diawali dengan kata *how* dan *why*, karena dalam studi kasus seorang peneliti hendak mencari keunikan kasus yang diangkat, sehingga lebih memfokuskan bidang pertanyaan kepada proses (*how*) dan alasan (*why*).

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

²John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 20.

³Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), 97.

Dalam pendekatan studi kasus terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pada saat menyusun pertanyaan, yaitu:⁴

1. Apa yang terjadi dan bagaimana suatu hal atau fenomena dapat terjadi (gambaran dan batasan fenomena yang akan diteliti)?
2. Siapa sajakah yang terlibat di dalamnya (informan penelitian)?
3. Apa tema sentral atau inti permasalahan (*central phenomenon*) yang akan diteliti?
4. Konstruksi teoritis apa yang dapat dipakai untuk mendasari fenomena yang diteliti dan mengapa teori tersebut berkaitan?
5. Apa dan di mana keunikan dari fenomena yang diteliti?

Dengan pendekatan studi kasus ini, penulis berupaya untuk memahami dan menggali situasi sosial yang ada di TPQ Al-Ittihad, baik melalui komunikasi secara langsung dengan kepala, pengurus, dan ustaz dan ustazah TPQ Al-Ittihad, wali santri, termasuk masyarakat di lingkungan TPQ Al-Ittihad mulai dari pihak RT, RW, kelompok pengajian muslimat, remaja hingga pihak swasta (seperti Toko Kitab Pahala Purwokerto dan Warung Dawet Ayu Pak Wahyono). Selain itu, penulis juga melakukan dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan data penelitian hingga melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang ada di TPQ Al-Ittihad dan lingkungan sekitarnya khususnya hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Ittihad yang beralamat di Jalan Hos Noto Suwiryo RW 15 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan ketertarikan penulis untuk meneliti TPQ Al-Ittihad antara lain sebagai berikut:

⁴Haris Herdiansyah, *Metodologi ...*, 97.

- a. TPQ Al-Ittihad sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam nonformal di mana dalam pembiayaan pendidikannya berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan adanya partisipasi masyarakat di dalamnya, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.⁵
- b. Partisipasi masyarakat yang ada di TPQ Al-Ittihad cenderung kompleks. Hal tersebut bisa dilihat dari elemen-elemen masyarakat yang ikut berpartisipasi, yakni tidak hanya berasal wali santri, namun juga pihak RT dan RW di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk, kelompok pengajian muslimat,⁶ remaja hingga masyarakat di luar lingkungan TPQ Al-Ittihad seperti instansi pemerintah (Kelurahan Teluk dan pihak Kecamatan Purwokerto Selatan), pihak swasta (Toko Kitab Pahala Purwokerto, Warung Dawet Ayu Pak Wahyono), LSM (Dompot Peduli Santri/ DPS), dan sebagainya. Tidak hanya itu, masyarakat di sekitar TPQ Al-Ittihad yang anggota keluarganya tidak memiliki keterlibatan secara langsung dengan TPQ Al-Ittihad, seperti menjadi wali santri, santri ataupun pengurus, mereka juga turut berpartisipasi dalam kegiatan TPQ khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan. Hal tersebut di antaranya bisa dilihat dari pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, yakni semula TPQ belum memiliki gedung mandiri bahkan tanah pun belum punya hingga sekarang telah berdiri gedung TPQ Al-Ittihad di mana dana yang digunakan bahkan inisiasi

⁵Telah disebutkan sebelumnya dalam kajian teori tentang indikator partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mulyasa bahwa adanya kegiatan saling membantu dan kerjasama yang erat serta pengertian antara pihak lembaga pendidikan dengan masyarakat karena mengetahui arti penting dan peranannya masing-masing di mana hal tersebut dapat ditemukan di TPQ Al-Ittihad seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Selain itu, indikator tingginya partisipasi masyarakat yang lain menyebutkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga pendidikan dapat mengekspresikan apresiasi dan pendapat masyarakat atau *stakeholders* dan hal tersebut juga bisa ditemukan di TPQ Al-Ittihad di antaranya dalam setiap pengambilan keputusan terkait kegiatan TPQ Al-Ittihad terlebih dalam hal pembiayaan pendidikan selalu melibatkan wali santri untuk bermusyawarah bersama dalam pengambilan keputusannya.

⁶Perlu diketahui pula bahwa nama kelompok pengajian muslimat yang ada di lingkungan TPQ Al-Ittihad adalah Halimatussa'diyah dan bahkan sebagian besar pengurus TPQ Al-Ittihad berasal kelompok pengajian muslimat tersebut. Informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Ustazah Annisa pada tanggal 27 April 2017.

atau usulan pembangunan gedung tersebut sekaligus panitia pelaksana pembangunannya berasal dari masyarakat di sekitar TPQ Al-Ittihad khususnya di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk. Hal tersebut setidaknya dapat menjadi indikator adanya perhatian dan kepedulian serta kerjasama dari masyarakat kepada TPQ Al-Ittihad.

- c. Adapun kaitannya dengan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, khususnya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping bahwa pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad cenderung telah dikelola dengan tertib. Hal tersebut di antaranya dapat dibuktikan dari kesejahteraan ustaz dan ustazah serta pendamping di mana empat orang ustazah secara rutin tiap bulannya mendapatkan *bisyārah* sebesar Rp 175.000, dua orang pendamping mendapatkan Rp 125.000, dan seorang ustaz sekaligus penasihat TPQ Al-Ittihad mendapatkan Rp 250.000 tiap bulannya, maka setidaknya TPQ Al-Ittihad harus mengeluarkan biaya sebanyak Rp 1.200.000⁷ tiap bulannya untuk pembayaran *bisyārah* tersebut dan uniknya hal tersebut dapat terlaksana secara rutin. Adapun anggaran pembayaran *bisyārah* tersebut direncanakan secara bersama-sama antara pengurus dan wali santri TPQ Al-Ittihad dalam pertemuan rutin wali santri. Selain itu, tiap tahunnya menjelang Hari Raya ‘Idul Fitri tiap ustaz dan ustazah serta pendamping mendapatkan tambahan *bisyārah* atau semacam THR antara Rp 400.000 hingga Rp 600.000 di mana dana tersebut baik *bisyārah* maupun THR berasal dari masyarakat sekitar khususnya wali santri dan pengurus, bahkan pada tiap tahunnya, ustaz dan ustazah serta pendamping mendapatkan seragam baru. Hal tersebut setidaknya

⁷Terkait dengan gaji ataupun upah yang diterima oleh ustaz dan ustazah serta pendamping, penulis telah menyurvei beberapa TPQ khususnya di wilayah Purwokerto Selatan. Dari beberapa TPQ tersebut diperoleh informasi bahwa tidak semua TPQ tersebut memberikan upah secara rutin kepada ustaz dan ustazahnya. Bahkan terdapat TPQ di mana ustaz dan ustazahnya tidak mendapatkan upah sama sekali. Jikalau ada TPQ yang memberikan upah kepada ustaz dan ustazah, jumlah atau nominal yang dikeluarkan oleh pihak TPQ belum ada yang di atas atau melebihi pengeluaran TPQ Al-Ittihad. Sebagai contoh TPQ Al-Birru Teluk di mana setiap bulannya dengan seorang ustaz dan empat orang ustazah, total biaya yang dikeluarkan Rp 600.000.

dapat menjadi indikator adanya perhatian masyarakat khususnya wali santri dan pengurus TPQ Al-Ittihad terhadap kesejahteraan ustaz dan ustazah serta pendamping serta kuatnya pembiayaan pendidikan yang ada di TPQ Al-Ittihad.

- d. Adanya pertemuan rutin antara pengurus dan ustazah serta pihak TPQ dan wali santri tiap bulannya di mana dalam pertemuan tersebut pengurus TPQ Al-Ittihad menyampaikan laporan keuangan terutama berkaitan dengan biaya yang masuk dan keluar kepada wali santri khususnya untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pengurus TPQ Al-Ittihad untuk melaksanakan pelaporan ataupun evaluasi bersama masyarakat khususnya wali santri terhadap pengelolaan dana TPQ sebagai bagian dari transparansi pengelolaan anggaran atau dana yang berasal dari masyarakat.
- e. Jumlah santri TPQ Al-Ittihad sebanyak 91 orang. Dari 91 santri tersebut, 46% santri dari jumlah keseluruhan berasal dari luar lingkungan TPQ Al-Ittihad, yakni di luar wilayah RW 15 Kelurahan Teluk, mulai dari berbeda wilayah RW, berbeda kelurahan atau desa, bahkan hingga berbeda kecamatan.⁸ Hal tersebut setidaknya menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap TPQ Al-Ittihad sehingga mereka memilih TPQ tersebut sebagai tempat mengaji bagi putra-putri mereka. Hal tersebut juga tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam partisipasinya untuk mengembangkan TPQ termasuk dalam hal pembiayaan pendidikannya serta adanya upaya pihak TPQ dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas TPQ Al-Ittihad secara terus-menerus.⁹

⁸Hasil wawancara penulis dengan Ustazah Annisa pada tanggal 27 April 2017.

⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustazah Annisa pada tanggal 27 April 2017, berkaitan dengan prestasi TPQ Al-Ittihad bahwa telah banyak prestasi yang telah diraih, baik di tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten dan menurutnya hal tersebut tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk menyukseskan setiap even kegiatan yang diikuti.

Beberapa pertimbangan tersebut mendorong ketertarikan penulis untuk meneliti lebih mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, terlebih didukung dengan latar belakang pengurus TPQ Al-Ittihad yang sebagian besar merupakan seorang akademisi¹⁰ walaupun hal tersebut tidak dapat menjadi jaminan bagi peningkatan kualitas TPQ Al-Ittihad, namun setidaknya dapat menjadi modal dan dorongan bagi pengelolaan TPQ khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif di dalamnya, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan 3 September 2017 atau sekitar 10 minggu. Untuk kebutuhan analisis data pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad khususnya bagi *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping (*recurrent cost*) digunakan data keuangan TPQ Al-Ittihad Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan pertimbangan kelengkapan data terkait perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap pengelolaan dana *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping tersebut. Adapun untuk data pembiayaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad (*capital cost*) sesuai dengan waktu pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad tersebut.

C. Obyek dan Subyek Penelitian

Adapun obyek dan subyek dalam penelitian ini, yaitu:

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini ialah partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Adapun fokus obyek kajiannya ialah pada jenis pembiayaan *capital cost* dan *recurrent cost* yang meliputi partisipasi masyarakat dalam

¹⁰Informasi tersebut penulis peroleh dari penjelasan Ustazah Annisa pada tanggal 27 April 2017 yang menyatakan bahwa sebagian besar pengurus TPQ Al-Ittihad merupakan orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi (sarjana), yakni ada yang menjadi guru, pegawai kantor, waka kesiswaan, dan sebagainya.

tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap dua jenis pembiayaan tersebut di TPQ Al-Ittihad.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat melekatnya data atau variabel penelitian yang dipermasalahkan.¹¹ Adapun subyek dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pengurus TPQ Al-Ittihad

Penulis menggali data kepada Pengurus TPQ Al-Ittihad di antaranya berkaitan dengan sejarah dan perkembangan TPQ, kondisi TPQ, bagaimana pihak TPQ khususnya kepala TPQ dalam melaksanakan tahapan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dengan melibatkan partisipasi masyarakat, bagaimana pihak TPQ dalam menjalin hubungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyukseskan berbagai kegiatan ataupun program yang ada di TPQ Al-Ittihad khususnya dalam hal pembiayaan pendidikannya.

b. Ustaz dan Ustazah TPQ Al-Ittihad

Data yang penulis gali dari ustaz dan ustazah TPQ Al-Ittihad antara lain berkaitan dengan bagaimana keterlibatan ustaz dan ustazah dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif serta bagaimana para ustazah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat khususnya para wali santri TPQ Al-Ittihad untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pendidikan.

c. Wali Santri TPQ Al-Ittihad

Wali santri TPQ Al-Ittihad sebagai bagian dari masyarakat, penulis menggali informasi kepada mereka di antaranya berkaitan dengan bagaimana komunikasi dan partisipasi yang selama ini dibangun oleh pihak TPQ Al-Ittihad terhadap wali santri, bagaimana bentuk partisipasi yang diberikan wali santri terhadap kegiatan TPQ

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 18.

Al-Ittihad khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan, tanggapan ataupun kepuasan para wali santri terhadap apa yang diusahakan TPQ dalam mendidik putra-putri mereka termasuk kepuasan dalam hal pembiayaan TPQ, mengapa para wali santri memilih TPQ Al-Ittihad sebagai tempat mengaji bagi putra-putri mereka, apa yang menjadi harapan wali santri kepada TPQ Al-Ittihad khususnya bagi pendidikan putra-putri mereka, dan sebagainya.

d. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud di sini ialah tokoh masyarakat sekitar, pihak RT dan RW di lingkungan RW 15, remaja, kelompok pengajian muslimat, wali santri, dan instansi seperti pihak Kelurahan Teluk dan Kecamatan Purwokerto Selatan, hingga pihak swasta seperti, seperti Toko Kitab Pahala Purwokerto, Warung Dawet Ayu Pak Wahyono, dan sebagainya.

Dari masyarakat tersebut, penulis menggali data sesuai dengan kebutuhan jenis pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Untuk jenis pembiayaan pendidikan *capital cost*, penulis lebih banyak menggali data dari pengurus RW 15, pengurus RT di lingkungan RW 15, Ketua Takmir Masjid Al-Ittihad, tokoh masyarakat, remaja RW 15, pihak swasta seperti Toko Kitab Pahala Purwokerto dan Warung Dawet Ayu Pak Wahyono serta sebagian pengurus TPQ Al-Ittihad dan ustazah sebagai pelengkap dengan pertimbangan bahwa merekalah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad termasuk dalam pembiayaannya.

Adapun untuk memperoleh data bagi pembiayaan pendidikan dengan jenis pembiayaan *recurrent cost*, penulis menggali data dari wali santri, pengurus dan ustazah TPQ Al-Ittihad di mana merekalah yang secara langsung terjun di dalam pengelolaan pembiayaan tersebut, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Selain itu, sumber utama pembiayaan pendidikan jenis *recurrent cost* ialah wali santri dan pengurus TPQ Al-Ittihad.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teknik Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹³ Penulis secara langsung turun ke lapangan atau lokasi penelitian yaitu di TPQ Al-Ittihad untuk mengamati dan mencatat kondisi serta kejadian-kejadian yang terjadi, baik dari segi tempat (*place*), pelaku (*actor*) seperti kepala dan pengurus TPQ Al-Ittihad, dewan guru, wali santri, dan masyarakat hingga aktifitas (*activity*) yang berlangsung di dalamnya khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

Adapun dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan ialah observasi moderat, yakni suatu observasi di mana terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam (turut melakukan apa yang dikerjakan oleh narasumber) dengan orang luar (sekedar mengamati dan tidak turut serta dengan apa yang dikerjakan oleh narasumber).¹⁴

Dengan metode observasi, penulis berusaha mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, seperti pada saat pertemuan pengurus dan ustaz dan ustazah, pertemuan rutin wali santri dengan pengurus, dan pertemuan PKK RW 15 Kelurahan Teluk. Penulis melakukan tiga kali observasi selama penelitian ini, yakni: *Pertama*, pada saat pertemuan pengurus dan ustazah. *Kedua*, pada saat pertemuan pengurus, ustazah, dan wali santri. *Ketiga*, pada saat pertemuan pengurus PKK RW 15 Kelurahan. Selama penulis mengikuti pertemuan-

¹²Sugiyono, *Metode...*, 308.

¹³Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

¹⁴Sugiyono, *Metode...*, 312.

pertemuan tersebut di dalamnya terdapat pembahasan mengenai keuangan TPQ Al-Ittihad bahkan di tingkat PKK RW 15 Kelurahan Teluk pun pembahasan keuangan TPQ Al-Ittihad terutama bagi penarikan donasi menjadi salah satu bagian di dalamnya.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁵ Wawancara juga bermakna percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶ Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan dan dipersiapkan terlebih dahulu dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. Adapun wawancara tak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat wawancara.¹⁷

Dengan menggunakan metode wawancara ini, penulis menggali informasi dengan berbagai pihak yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini, seperti kepala dan pengurus TPQ Al-Ittihad, ustaz dan ustazah, wali santri, hingga masyarakat khususnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur, artinya penulis membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan,¹⁸ di mana

¹⁵Sugiyono, *Metode...*, 317.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 186.

¹⁷Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 180-181.

¹⁸Sugiyono, *Metode...*, 320.

pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang pada saat pelaksanaan wawancara. Dengan wawancara tak terstruktur ini, penulis bisa lebih banyak mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian dan pada saat pelaksanaannya pun terasa lebih nyaman dan akrab dengan pihak yang diwawancarai serta tidak terkesan kaku. Pada penelitian ini, penulis melaksanakan wawancara sebanyak 17 kali wawancara dengan berbagai informan.

a. Pengurus TPQ Al-Ittihad

Selain penulis bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan TPQ Al-Ittihad, kondisi TPQ Al-Ittihad, bagaimana pihak TPQ mengelola atau melakukan tahapan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, bagaimana pihak TPQ Al-Ittihad dalam menjalin hubungan dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyukseskan berbagai kegiatan ataupun program yang ada khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan, penulis juga menanyakan terkait upaya TPQ Al-Ittihad untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat apa sajakah yang diharapkan dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

b. Ustaz dan Ustazah TPQ Al-Ittihad

Kepada ustaz dan ustazah, selain penulis menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana keterlibatan ustaz dan ustazah dalam pembiayaan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif di TPQ Al-Ittihad, penulis juga menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peran dan upaya ustaz dan ustazah dalam membangun komunikasi khususnya terhadap wali santri dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

c. Wali Santri TPQ Al-Ittihad

Kepada para wali santri sebagai bagian dari masyarakat, selain penulis menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana komunikasi dan partisipasi yang selama ini dibangun pihak TPQ Al-Ittihad dengan wali santri, bagaimana bentuk partisipasi yang diberikan wali santri terhadap kegiatan pembiayaan pendidikan, tanggapan ataupun kepuasan para wali santri terhadap apa yang diusahakan TPQ Al-Ittihad dalam mendidik putra-putri mereka khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan, mengapa para wali santri tertarik memilih TPQ Al-Ittihad sebagai tempat mengaji bagi putra-putri mereka, apa yang menjadi harapan wali santri kepada TPQ Al-Ittihad khususnya bagi pendidikan putra-putri mereka, penulis juga menanyakan saran ataupun kritikan dari para wali santri terhadap kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan terutama berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

d. Masyarakat

Kepada masyarakat terutama di lingkungan TPQ Al-Ittihad, selain penulis bertanya terkait dengan bagaimana pihak TPQ Al-Ittihad dalam membangun komunikasi dan partisipasi kepada mereka, bagaimana peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembiayaan TPQ baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, bagaimana bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat kepada pihak TPQ Al-Ittihad khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, penulis juga menanyakan apa yang menjadi alasan dan mendorong masyarakat untuk mau dan turut berperan atau berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di TPQ Al-Ittihad terutama dalam kegiatan pembiayaan pendidikannya.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang

pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹ Dengan teknik dokumentasi ini, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan struktur organisasi, letak geografis, dan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad serta dokumentasi (foto) selama pelaksanaan penelitian

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa model analisis data yang dapat digunakan. Pada penelitian ini, model analisis data yang digunakan ialah model analisis data yang dikembangkan oleh Miles and Huberman, yaitu mulai dari pereduksian data, penyajian data hingga verifikasi dan penyimpulan data.

1. Reduksi Data

Pereduksian data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang data yang tidak perlu.²¹ Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

¹⁹Margono, *Metodologi...*, 181.

²⁰Sugiyono, *Metode...*, 335.

²¹Sugiyono, *Metode...*, 338.

Pereduksian data ini dilakukan setelah penulis memperoleh data yang dianggap cukup untuk penelitian, yakni berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Kemudian, penulis membuang data-data yang sekiranya dianggap kurang mendukung dan tidak diperlukan bagi penelitian serta mengambil data-data yang diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data tereduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data atau menyajikan data. Dalam penyajian data, penulis lebih banyak menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif-naratif (menggambarkan dan menceritakan). Tidak hanya dalam bentuk teks naratif, penyajian data yang penulis lakukan juga dalam bentuk uraian singkat, bagan maupun tabel. Dari data-data tersebut, penulis mengelompokkannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dilakukanlah analisis secara mendalam apakah ada keterkaitan antara data-data tersebut.

3. Verifikasi dan Penyimpulan Data

Langkah ke tiga dalam analisis ini adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan di awal penelitian. Kesimpulan ini diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek di mana sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas yang dapat berupa hubungan kausal, interaktif, dan sebagainya.

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang konkrit di lapangan, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum²² atau juga bisa dipahami sebagai proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Cara berfikir ini

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andy, 2001), 36.

penulis gunakan untuk menganalisa dan menemukan pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus berupa kejadian-kejadian atau pun peristiwa yang konkrit yang ada di TPQ Al-Ittihad menjadi hal yang bersifat umum.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data atau pemeriksaan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas/ konsistensi), dan uji *confirmability* (obyektivitas/ netralitas).²³

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.²⁴ Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan triangulasi, yaitu teknik pengecekan data yang berasal dari berbagai sumber dengan berbagai cara serta dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.²⁵

Selanjutnya, jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi teknik dan sumber. Dengan triangulasi teknik, penulis berupaya membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan sebagainya. Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat diperoleh data yang kredibel. Adapun triangulasi sumber digunakan untuk melakukan konfirmasi terhadap keabsahan dan validitas data yang diperoleh dari informan yang satu dengan informan yang lain.

²³Sugiyono, *Metode...*, 366.

²⁴Sugiyono, *Metode...*, 368.

²⁵Sugiyono, *Metode...*, 372.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil TPQ Al-Ittihad

a. Sejarah Singkat TPQ Al-Ittihad¹

Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Ittihad merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan tata cara baca tulis Al-Qur'an dan praktik ibadah kepada anak-anak khususnya usia PAUD hingga Sekolah Dasar atau sederajat bahkan Sekolah Menengah Pertama. TPQ Al-Ittihad dapat eksis hingga saat ini di antaranya berkat usaha yang sungguh-sungguh dari pendirinya, yaitu Abdul Hamid.

Pada tahun 1984, terdapat beberapa orang santri yang mengaji di Masjid Al-Ittihad di mana lokasi masjid tersebut saat itu belum bernama Grumbul Tasari Lor, namun Grumbul Derik Gondar. Penamaan Grumbul Derik Gondar ini disebabkan karena lokasinya yang dikelilingi oleh sawah dan saat itu pun belum berdiri TPQ Al-Ittihad. Pada saat itu, terdapat beberapa santri yang mengaji di Masjid Al-Ittihad yang berjumlah sekitar tujuh orang di mana saat waktu salat Magrib tiba, mereka beramai-ramai mendatangi Masjid Al-Ittihad untuk melaksanakan salat Magrib berjamaah. Setelah selesai salat, mereka pun mengaji secara bergantian kepada Abdul Hamid, baik *turutan*, Juz 'Amma hingga Al-Qur'an. Para santri diajari tata cara baca Al-Qur'an yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Selain itu, para santri juga diajari tata cara ibadah, seperti salat, bersuci, puasa, dan sebagainya.

Hari demi hari pun berlalu dan para santri yang mengaji semakin bertambah banyak, dari semula tujuh anak menjadi sekitar 25 anak, bahkan banyak santri yang berasal dari luar Grumbul Derik

¹Hasil wawancara dengan Abdul Hamid pada tanggal 2 Agustus 2017.

Gondang saat itu, seperti berasal dari Grumbul Karang Bawang, Kalibiru, Katilampa hingga Karang Nanas yang wilayahnya sudah berbeda kelurahan bahkan kecamatan dengan Masjid Al-Ittihad. Dengan semakin banyaknya para santri tersebut ternyata berdampak pada semakin terbatasnya waktu di mana biasanya waktu antara setelah Magrib hingga menjelang Isya cukup digunakan para santri untuk mengaji, dengan semakin bertambahnya santri maka waktu antara Magrib dan Isya pun tidak lagi memungkinkan untuk mengajari semua santri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tahun 1984 berdasarkan inisiatif Abdul Hamid dibentuklah lembaga pendidikan Al-Qur'an pada dengan nama Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Ittihad di mana pembelajarannya dilaksanakan pada sore hari setelah salat Ashar yang bertempat di Masjid Al-Ittihad. Pemberian nama TPQ Al-Ittihad ini diambilkan dari nama masjid yang saat itu digunakan untuk mengaji, yaitu Masjid Al-Ittihad dan hingga saat ini pun TPQ Al-Ittihad masih tetap eksis mendidik para generasi muda agar mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta mampu mengamalkan ajaran-ajaran Islam sesuai tuntunan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

b. Letak Geografis TPQ Al-Ittihad

TPQ Al-Ittihad beralamatkan di Jalan Hos Notosuwiryo RW 15 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Secara geografis, letak TPQ Al-Ittihad berada di sebelah selatan lapangan sepak bola Kelurahan Teluk. Adapun lingkungan di sekeliling TPQ Al-Ittihad baik sebelah barat, timur, maupun selatan berbatasan dengan rumah-rumah warga, khususnya warga RT 02 RW 15 Kelurahan Teluk.

c. Struktur Kepengurusan TPQ Al-Ittihad

Kemampuan TPQ Al-Ittihad untuk dapat eksis dalam mendidik para generasi muda hingga saat ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran berbagai pihak, tidak hanya ustaz dan ustazah namun juga pengurus TPQ yang tanpa kenal lelah senantiasa memperjuangkan masa depan TPQ Al-Ittihad.

Berikut ini merupakan susunan kepengurusan TPQ Al-Ittihad, sebagai berikut:²

Penasihat	: Abdul Hamid
Kepala	: Eni Setyaningsih
Sekretaris	: Sumiyem
	: Tavip
Bendahara	: Darni Kartiono
Seksi-seksi	
Seksi Pendidikan	: Siti Khotijah
	: Catur Priastuti
Seksi Usaha	: Tuning Stinah
	: Nurhayati
	: Tukiyah
	: Kusrini
	: Nurlaela

d. Keadaan Ustaz, Ustazah, dan Santri TPQ Al-Ittihad

1) Keadaan Ustaz dan Ustazah TPQ Al-Ittihad

Dalam sebuah lembaga pendidikan tentunya diperlukan sosok pendidik yang mampu membimbing para peserta didik atau para santri agar memiliki akhlak yang baik dan pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Berikut merupakan dewan

²Hasil dokumentasi tentang susunan kepengurusan TPQ Al-Ittihad pada tanggal 4 Agustus 2017.

pendidik (ustaz/ustazah) beserta pendamping di TPQ Al-Ittihad, yaitu:

Tabel 4.1.
Daftar Ustaz dan Ustazah TPQ Al-Ittihad³

No.	Nama	Keterangan
1.	Abdul Hamid	Ustaz/ penasihat
2.	Wasirah	Ustazah
3.	Nining Mardiyati	Ustazah
4.	Annisa	Ustazah
5.	Winarni	Ustazah
6.	Sutirah	Pendamping
7.	Murtinah	Pendamping

Selain mengenyam pendidikan agama, beberapa ustazah di TPQ Al-Ittihad pun pernah mengenyam pendidikan formal, seperti Ustazah Nining atau yang lebih akrab disapa dengan Ustazah Ning yang merupakan seorang lulusan Sarjana Ekonomi. Lalu, Ustazah Wasirah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ustazah Roso yang merupakan lulusan PGA dan Ustazah Annisa yang merupakan lulusan Diploma III Jurusan Bahasa Inggris.⁴

Tugas ustaz dan ustazah adalah membimbing para santri untuk mempelajari tata cara baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar, yakni dengan menggunakan metode Iqra' secara satu per satu (privat). Kemudian, ustaz dan ustazah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan materi kepada para santri tentang

³Hasil dokumentasi tentang daftar ustaz dan ustazah serta pendamping TPQ Al-Ittihad pada tanggal 4 Agustus 2017.

⁴Informasi tersebut penulis peroleh dari penjelasan Eni Setyaningsih selaku pengurus TPQ pada saat penulis melakukan dokumentasi terhadap keadaan ustaz dan ustazah TPQ Al-Ittihad pada tanggal 4 Agustus 2017. Dalam penjelasan tersebut, Eni Setyaningsih menceritakan bahwa ustaz dan ustazah di TPQ Al-Ittihad ada yang berprofesi sebagai pedagang (Ustaz Abdul Hamid dan Ustazah Roso) dan ada pula yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga di mana mereka mau menyempatkan waktu mereka untuk mengajar di TPQ Al-Ittihad, bahkan jarak rumah dengan TPQ salah satu ustazah (Ustazah Nani) relatif jauh, yakni dengan keberadaan TPQ Al-Ittihad di Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan, rumah Ustazah Nani berada di Kecamatan Sokaraja yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk dapat sampai ke TPQ Al-Ittihad. Menurut Eni Setyaningsih, kalau bukan karena niat ibadah dan kecintaannya kepada TPQ Al-Ittihad tentunya yang bersangkutan tidak akan mau menyempatkan waktunya untuk mengajar di TPQ Al-Ittihad.

tata cara ibadah dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersuci, salat, puasa, dan sebagainya di mana hal tersebut dilaksanakan secara klasikal. Ustazah juga berkewajiban menerima dan mencatat SPP santri yang selanjutnya disetorkan kepada bendahara TPQ Al-Ittihad.⁵

Adapun tugas pendamping ialah mendampingi para ustazah pada saat pelaksanaan pembelajaran. Pendampingan yang dimaksud di sini ialah mengondisikan suasana pembelajaran agar tetap kondusif, seperti pada saat ada santri yang berlarian, maka tugas pendampinglah yang mengkondisikannya agar anak atau santri tersebut dapat tenang dan tidak mengganggu santri lain yang sedang mengaji. Selain itu, pendamping juga bertugas untuk membantu administrasi kelas, yakni pencatatan SPP dan infak santri yang masuk. Untuk itu, pendamping ditugaskan di kelas yang para santrinya cenderung masih kecil, yakni kelas 1 dan kelas 2 TPQ di mana usia mereka antara PAUD, TK hingga SD kelas 2. Perlu diketahui pula bahwa pendamping di sini berasal dari masyarakat sekitar TPQ Al-Ittihad yang telah merelakan sebagian waktunya untuk mengabdikan diri di TPQ Al-Ittihad. Demikian pula dengan para ustazah, sebagian besar mereka juga merupakan warga di sekitar TPQ Al-Ittihad. Namun terdapat dua ustazah yang berasal dari luar lingkungan TPQ Al-Ittihad, yakni Ustazah Nani yang berbeda kecamatan (Sokaraja) dan Ustazah Ning yang berbeda grumbul (Semanding).⁶

2) Keadaan Santri TPQ Al-Ittihad

Dalam kegiatan pembelajarannya, yakni pada hari Senin hingga Kamis mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB,

⁵Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017.

⁶Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017. Menurut penuturan Ustazah Roso bahwa pendamping pun memiliki hak yang sama dengan ustaz dan ustazah yakni mendapatkan *bisyārah* pada tiap bulannya namun dengan nominal yang berbeda. Jika ustazah mendapatkan nominal Rp 175.000 tiap bulan, pendamping mendapatkan Rp 125.000 di mana perbedaan tersebut didasarkan pada beban tugas dan fungsi masing-masing.

dengan jumlah santri sebanyak 91 orang terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Kelas 1 TPQ (usia anak PAUD, TK, dan SD kelas 1) dengan Ustazah Annisa sebagai wali kelasnya. Kelas 2 TPQ (usia anak SD kelas 2 dan 3) dengan Ustazah Nani sebagai wali kelasnya. Adapun kelas 3 TPQ (usia anak SD kelas 4 dan 5) dibimbing oleh Ustazah Nining dan kelas 4 TPQ (usia anak kelas 6 SD dan SMP serta sebagian kelas 5 SD) diampu oleh Ustazah Roso. Khusus untuk kelas 1 dan kelas 2 TPQ, masing-masing kelas diberi pendamping, yaitu Sutirah untuk pendamping kelas 1 TPQ dan Murtinah untuk pendamping kelas 2 TPQ. Pemberian pendamping untuk kelas 1 dan 2 TPQ ini didasarkan atas pertimbangan usia para santri di kelas tersebut yang masih relatif kecil (kanak-kanak) sehingga membutuhkan pendampingan khusus agar situasi pembelajaran dapat lebih kondusif.⁷

Berikut ini merupakan rekapitulasi daftar santri TPQ Al-Ittihad berdasarkan alamat atau asal santri dan jenis kelamin, yaitu:

Tabel 4.2.
Rekapitulasi Daftar Santri TPQ Al-Ittihad⁸

No.	Asal	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
		L	P		
1	Tasari Lor	28	21	49	A-1
2	Krewed	5	7	12	A-2
3	Karang Bawang	4	9	13	
4	Perum Teluk	1	0	1	
5	Karang Blimbing	1	1	2	
6	Bulupitu	0	1	1	
7	Kalibiru	1	0	1	
8	Depok	1	0	1	
9	Karang Malang	1	0	1	A-3
10	Sudagaran	1	1	2	
11	Pancurawis	2	2	4	
12	Karang Klesem	1	0	1	

⁷Hasil wawancara dengan Darni Kartiono selaku pengurus TPQ Al-Ittihad pada tanggal 9 Agustus 2017.

⁸Hasil olah dokumentasi daftar santri TPQ Al-Ittihad pada tanggal 4 Agustus 2017.

13	Karang Nanas	0	1	1	A-4
14	Sokaraja	0	1	1	
15	Jatiwinangun	0	1	1	
	JUMLAH	46	45	91	

Keterangan asal santri:

A-1 : Satu RW dengan TPQ Al-Ittihad

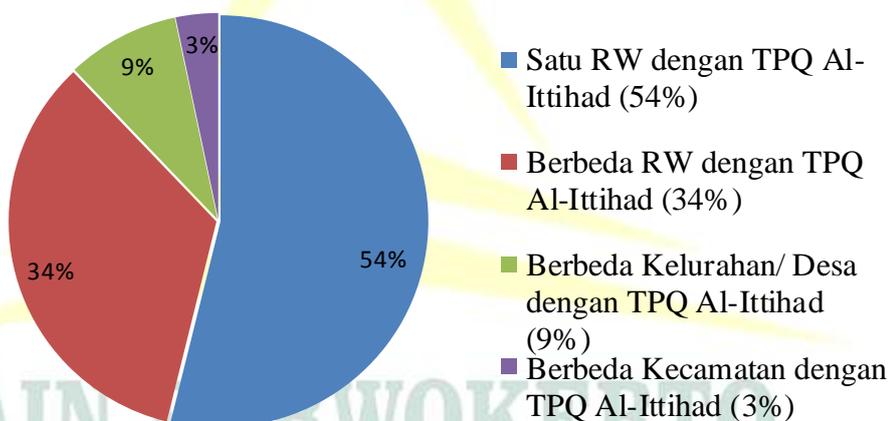
A-2 : Berbeda RW dengan TPQ Al-Ittihad

A-3 : Berbeda Kelurahan/ Desa dengan TPQ Al-Ittihad

A-4 : Berbeda Kecamatan dengan TPQ Al-Ittihad

Dari daftar nama-nama santri tersebut dapat diperoleh prosentase daerah asal santri sebagai berikut:

Prosentase Asal Santri TPQ Al-Ittihad Teluk



Gambar 4.1.
Prosentase Asal Santri TPQ Al-Ittihad

Gambar tersebut memberikan informasi bahwa santri yang tinggal dalam lingkup satu RW dengan TPQ Al-Ittihad sebanyak 54% (49 orang), santri yang tinggal berbeda RW namun masih dalam satu kelurahan dengan TPQ Al-Ittihad sebesar 34% (31 orang), santri yang tinggal berbeda kelurahan atau desa dengan TPQ Al-Ittihad sebanyak 9% (8 orang), dan sebanyak 3% (3 orang)

merupakan santri yang tinggal berbeda kecamatan dengan TPQ Al-Ittihad.

Data alamat ataupun asal santri tersebut setidaknya dapat menjadi indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TPQ Al-Ittihad, sehingga masyarakat memilih TPQ Al-Ittihad sebagai tempat untuk mengaji bagi putra-putri mereka. Dari jumlah santri secara keseluruhan yang mencapai 91 orang, setengah dari jumlah tersebut tepatnya sebanyak 49 santri merupakan penduduk sekitar TPQ Al-Ittihad yang masih dalam lingkup satu RW. Hal tersebut juga menjadi indikasi bahwa masyarakat sekitar pun memberikan perhatian dan kepercayaan kepada TPQ Al-Ittihad untuk mendidik putra-putri mereka.

Terdapat pula 31 santri yang berasal dari RW yang berbeda, delapan santri yang berasal dari daerah yang berbeda kelurahan atau desa hingga empat orang santri yang berasal dari kecamatan yang berbeda dengan TPQ Al-Ittihad di mana hal tersebut semakin memperkuat adanya kepercayaan masyarakat terhadap TPQ Al-Ittihad untuk mendidik putra-putri mereka dalam pendidikan agama khususnya baca tulis Al-Qur'an dan praktik ibadah, bahkan terdapat santri yang tempat tinggalnya berbeda kecamatan dengan TPQ Al-Ittihad seperti Sokaraja dan Jatiwinangun yang jaraknya relatif jauh dengan TPQ Al-Ittihad, namun wali santri tersebut memilih TPQ Al-Ittihad sebagai tempat mengaji bagi putrinya.⁹

e. Sarana Pembelajaran TPQ Al-Ittihad

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dibutuhkan sarana pembelajaran yang memadai. TPQ Al-Ittihad sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang fokus pada pengajaran baca tulis Al-

⁹Hal tersebut dikuatkan pula dengan penuturan Ustazah Annisa pada tanggal 4 Agustus 2017 saat penulis melakukan dokumentasi data santri, beliau menegaskan bahwa memang terdapat sebagian santri yang bertempat tinggal relatif jauh dari TPQ Al-Ittihad, seperti di Sokaraja dan Jatiwinangun.

Qur'an dan pengamalan praktik ibadah memiliki beberapa fasilitas dan sarana yang dapat mendukung lancarnya kegiatan pembelajaran. Adapun sarana pembelajaran yang terdapat di TPQ Al-Ittihad, yaitu:

Tabel 4.3.
Kondisi Sarana Pembelajaran TPQ Al-Ittihad¹⁰

No.	Nama barang	Jumlah	Kondisi
1.	Papan tulis	4 buah	Baik
2.	Papan informasi	2 buah	Baik
3.	Bangku santri	30 buah	Baik
4.	Al-Qur'an	40 buah	Baik
5.	Buku Iqra	30 buah	Baik
6.	Buku materi	50 buah	Baik
7.	Sound System	1 set	Baik
8.	Almari	2 buah	Baik
9.	Juz 'Amma	30 buah	Baik
10.	Alat hadrah	1 set	Baik
11.	Seragam Khatmil Qur'an	35 buah	Baik
12.	Sarung Khataman	35 buah	Baik
13.	Peci	35 buah	Baik
14.	Alat kebersihan (sapu, kain pel, tempat sampah, dan ember)	3 set	Baik

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad

Penyajian deskripsi hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa secara umum partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu: *Pertama*, partisipasi dalam

¹⁰Hasil dokumentasi tentang sarana pembelajaran di TPQ Al-Ittihad pada tanggal 4 Agustus 2017. Dari penjelasan pengurus saat penulis melakukan pencatatan terhadap sarana pembelajaran yang ada di TPQ Al-Ittihad tersebut disampaikan bahwa beberapa sarana tersebut merupakan sumbangan dari masyarakat, seperti bangku dan papan tulis diperoleh dari hasil sumbangan para siswa dan guru SMA N 1 Ajibarang melalui Eni Setyaningsih.

pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan dan pengambilan manfaat. *Ketiga*, partisipasi dalam evaluasi.

Adapun berkaitan dengan tahapan dalam pembiayaan pendidikan, Mulyasa¹¹ menyebutkan bahwa tahapan pembiayaan pendidikan dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap evaluasi di mana hal-hal tersebut saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Kedua teori tersebut, baik teori yang disampaikan oleh Cohen dan Uphoff tentang pengelompokan partisipasi masyarakat dan teori yang disampaikan oleh Mulyasa tentang tahapan dalam pembiayaan pendidikan keduanya memiliki keselarasan, yakni partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk itu, ketiga tahapan dalam pembiayaan pendidikan tersebut, yakni mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad akan digunakan sebagai alur pada penyajian deskripsi hasil temuan penelitian ini.

Dari hasil wawancara dengan Darni Kartiono¹² selaku bendahara TPQ Al-Ittihad diperoleh informasi bahwa secara umum pembiayaan yang ada di TPQ Al-Ittihad meliputi tiga hal, yaitu: *Pertama*, pembiayaan operasional TPQ Al-Ittihad yang terdiri dari pembayaran gaji atau *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping serta pembiayaan bagi kebutuhan pembelajaran, seperti fotokopi materi, pembelian ATK, dan sebagainya. *Kedua*, pembiayaan bagi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran di mana dalam penelitian ini akan difokuskan pada pembiayaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. *Ketiga*, pembiayaan

¹¹Lihat kembali apa yang telah disampaikan oleh Mulyasa tentang tahapan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan dalam E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), 81.

¹²Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 9 Agustus 2017.

bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya terprogram dan partisipatif. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan terprogram adalah kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara rutin dan dalam penelitian ini akan difokuskan pada kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad. Kemudian, kegiatan partisipatif yang ada di TPQ Al-Ittihad, yakni keikutsertaan TPQ Al-Ittihad dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak luar dan dalam penelitian ini akan difokuskan pada keikutsertaan TPQ Al-Ittihad dalam pawai ta'aruf yang diadakan secara rutin tiap tahunnya oleh Pondok Pesantren Anwarushsholihin Pamujan Kelurahan Teluk.

Dalam fokus penelitian ini, jenis pembiayaan yang akan dikaji ialah *capital cost* dan *recurrent cost*. Kedua jenis pembiayaan tersebut jika ditarik ke dalam kondisi yang ada di TPQ Al-Ittihad, maka akan diperoleh adanya kesesuaian, yakni pembiayaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang masuk dalam kategori *capital cost* dan pembiayaan bagi kebutuhan operasional TPQ Al-Ittihad (pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping serta pembiayaan bagi kebutuhan pembelajaran TPQ) yang masuk dalam kategori *recurrent cost* serta terdapat satu pembiayaan lagi yakni bagi kegiatan partisipatif dan terprogram di mana hal tersebut juga turut dikaji dalam penelitian ini. Berikut deskripsi hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad

1) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembiayaan Operasional TPQ Al-Ittihad

Dari hasil wawancara penulis dengan Ustazah Roso¹³ berkaitan dengan perencanaan pembiayaan operasional TPQ Al-Ittihad khususnya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, beliau menyampaikan:

Dalam perencanaan pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, mula-mula pengurus TPQ mengumpulkan para wali santri pada awal tahun pelajaran (bulan Syawal) dengan tujuan bersama-sama bermusyawarah antara wali santri dan pengurus TPQ untuk membahas kebutuhan pembayaran *bisyārah* bagi para ustaz dan ustazah serta pendamping selama satu tahun penuh, yakni 12 bulan. Jika biaya atau dana yang dibutuhkan bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping tiap bulannya sebesar Rp 1.200.000, maka biaya yang diperlukan selama satu tahun sebesar Rp 14.400.000. Perhitungan tersebut kami sampaikan dan kami bahas bersama dengan para wali santri pada pertemuan tersebut dengan rincian empat orang ustazah masing-masing mendapat Rp 175.000, satu orang ustaz sekaligus penasihat TPQ (Abah Hamid) sebesar Rp 250.000, dan dua orang pendamping yang masing-masing mendapat Rp 125.000 untuk tiap bulannya, sehingga kebutuhan pembiayaan bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah selama satu tahun mencapai Rp 14.400.000.

Dalam wawancara yang sama, Ustazah Roso menjelaskan bahwa setelah pemaparan dari pengurus TPQ Al-Ittihad kepada wali santri terkait kebutuhan dana bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping dalam kurun waktu satu tahun tersebut, kemudian pengurus TPQ Al-Ittihad mempersilakan kepada wali santri untuk memberikan tanggapan, saran ataupun pendapat dan bermusyawarah bersama untuk mencari solusi bagi

¹³Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017.

pemenuhan kebutuhan biaya pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping TPQ Al-Ittihad.

Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Darni Kartiono¹⁴ selaku bendahara TPQ Al-Ittihad bahwa pada tahap perencanaan pembiayaan TPQ khususnya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, hal tersebut dilakukan oleh pengurus dan wali santri pada awal tahun pelajaran TPQ dengan cara pihak pengurus TPQ Al-Ittihad mengundang para wali santri pada pertemuan wali santri, yakni tanggal 4 tiap bulannya di mana dalam pertemuan tersebut pengurus TPQ Al-Ittihad menyampaikan rincian kebutuhan biaya selama satu tahun bagi pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping tersebut, yakni sebesar Rp 14.400.000. Kemudian, pihak pengurus dan wali santri TPQ Al-Ittihad bermusyawarah bersama untuk membahas upaya yang perlu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Dari penuturan Ustazah Roso¹⁵ terkait dengan tanggapan wali santri terhadap pemaparan pihak TPQ Al-Ittihad dengan adanya rencana anggaran bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping yang mencapai Rp 14.400.000 untuk satu tahun bahwa wali santri sepakat untuk menanggung biaya tersebut melalui pembayaran SPP untuk mencukupi kebutuhan dana bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping serta tidak ada satu pun wali santri yang merasa keberatan atau terbebani dengan rencana anggaran tersebut. Semua wali santri mendukung dengan rencana anggaran biaya pembayaran *bisyārah* bagi ustaz dan ustazah serta pendamping dengan ditanggung bersama oleh wali santri dan pengurus TPQ Al-Ittihad.

¹⁴Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 9 Agustus 2017.

¹⁵Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017

Hal yang sama juga disampaikan oleh Darni Kartiono¹⁶ bahwa pihak TPQ Al-Ittihad tidak sekedar menyampaikan rincian kebutuhan dana kepada wali santri, namun TPQ juga meminta komitmen para wali santri secara bersama-sama menanggung kebutuhan biaya tersebut, karena sesungguhnya tanggung jawab pembiayaan ini adalah tanggung jawab bersama untuk kemajuan putra-putri para wali santri juga dan para wali santri pun bersepakat tentang hal tersebut.

Perlu diketahui pula bahwa besaran atau nominal SPP yang harus dibayarkan tiap bulannya kepada TPQ Al-Ittihad sebesar Rp 15.000 tiap santri dan besaran nominal tersebut pun tidak ditentukan secara sepihak oleh pengurus ataupun ustaz dan ustazah TPQ Al-Ittihad, namun hal tersebut diputuskan melalui musyawarah antara wali santri dengan pengurus TPQ Al-Ittihad. Ustazah Roso juga menyampaikan bahwa pada awalnya nominal SPP yang harus dibayarkan para santri pada tiap bulannya hanya sebesar Rp 10.000. Adapun kenaikan dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 berangkat dari usulan pihak wali santri. Berikut penjelasan Ustazah Roso¹⁷ yang juga merupakan koordinator ustaz dan ustazah sehingga mengetahui secara mendalam terkait keuangan TPQ Al-Ittihad khususnya yang berkaitan dengan SPP santri, sebagai berikut:

Untuk setiap program ataupun kegiatan TPQ yang melibatkan para santri selalu kami komunikasikan dan kami musyawarahkan dengan wali santri. Apalagi kaitannya dengan uang (SPP). Perlu diketahui bahwa nominal SPP santri sebesar Rp 15.000 untuk tiap bulannya dan ini sebenarnya bukanlah berasal dari usulan pihak TPQ, namun justru usulan tersebut datang dari wali santri. Nominal SPP sebesar Rp 15.000 tiap bulannya ini relatif belum lama berjalan, yakni sekitar tiga tahun di mana sebelumnya para santri hanya diwajibkan membayar SPP sebesar Rp 10.000

¹⁶Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 9 Agustus 2017.

¹⁷Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017.

tiap bulannya. SPP dengan nominal Rp 15.000 ini justru berasal dari usulan wali santri tersendiri. Hal tersebut mungkin didasari oleh adanya rasa iba dan kasihan dengan ustaz dan ustazah sekaligus sebagai bentuk terimakasih karena para ustazah telah mengajari putra-putri mereka, tetapi yang jelas dalam musyawarah ataupun pertemuan wali santri tersebut pihak wali santrilah yang mengusulkan agar SPP santri dinaikkan sebesar Rp 5.000, dari semula Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 tiap bulannya. Pada musyawarah tersebut seluruh wali santri bersepakat untuk menaikkan besaran ataupun nominal SPP dan akhirnya hingga sampai saat ini nominal SPP yang wajib dibayarkan oleh para santri sebesar Rp 15.000 tiap bulannya.

Dari beberapa paparan hasil wawancara tersebut berkaitan dengan perencanaan pembiayaan operasional TPQ Al-Ittihad khususnya dalam hal pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping dapat diketahui bahwa pada tahap perencanaan pembiayaan bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, pengurus TPQ Al-Ittihad tidak serta merta mengambil keputusan secara sepihak, artinya tidak melibatkan wali santri sama sekali. Akan tetapi, hal yang terjadi justru sebaliknya, yakni pihak TPQ Al-Ittihad memperhatikan dan meminta dukungan serta partisipasi wali santri secara aktif. Hal tersebut dapat diketahui di antaranya dengan adanya musyawarah yang diadakan pihak TPQ Al-Ittihad dengan mengundang para wali santri di mana kedua belah pihak tersebut secara bersama-sama berdiskusi untuk merencanakan kebutuhan biaya operasional TPQ Al-Ittihad dalam hal ini bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping TPQ Al-Ittihad.

Adapun musyawarah tersebut dilaksanakan pada awal tahun pelajaran TPQ Al-Ittihad, yakni pada bulan Syawal yang dimulai dengan pemaparan dari pengurus TPQ Al-Ittihad terkait kebutuhan dana selama satu tahun bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, yakni sebesar Rp 14.400.000 dengan

rincian empat orang ustazah masing-masing mendapatkan Rp 175.000, seorang ustaz sekaligus penasihat TPQ Al-Ittihad mendapatkan Rp 250.000, dan dua orang pendamping yang masing-masing mendapat Rp 125.000 pada tiap bulannya. Setelah pemaparan rincian kebutuhan biaya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping oleh pengurus TPQ Al-Ittihad, kemudian acara dilanjutkan dengan sesi penyampaian tanggapan dan saran dari pihak wali santri di mana saat itu semua wali santri sepakat dengan rencana tersebut termasuk besaran nominal *bisyārah* yang diterimakan oleh tiap ustaz dan ustazah serta pendamping tersebut hingga akhirnya ditetapkanlah rencana anggaran bagi pembiayaan pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping TPQ Al-Ittihad berdasarkan hasil musyawarah dan pengambilan keputusan bersama antara pengurus dan wali santri TPQ Al-Ittihad.

Paparan-paparan tersebut setidaknya dapat menjadi indikator bahwa masyarakat khususnya wali santri memiliki andil dan berpartisipasi secara aktif dalam menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak TPQ Al-Ittihad khususnya dalam hal perencanaan pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping yang termasuk kategori perencanaan bagi pembiayaan operasional TPQ Al-Ittihad.

Hal lain yang tidak kalah menariknya dalam hasil wawancara tersebut ialah tentang nominal SPP yang harus dibayarkan santri pada tiap bulannya, yakni sebesar Rp 15.000 di mana pada awalnya para santri hanya diwajibkan membayar SPP sebesar Rp 10.000 tiap bulannya. Adapun kenaikan dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000, yakni sebesar Rp 5.000 bukanlah berasal dari usulan ataupun kebijakan sepihak oleh pengurus TPQ Al-Ittihad, namun hal tersebut justru datang dari usulan wali santri agar nominal SPP santri dinaikkan sebesar Rp 5.000 dan berdasarkan

musyawarah antara pengurus dan wali santri dalam pertemuan rutin wali santri usulan tersebut ditetapkan menjadi hasil musyawarah dan keputusan bersama untuk dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang berkaitan.

Hal tersebut sekali lagi dapat menjadi indikator adanya keterlibatan ataupun partisipasi masyarakat khususnya wali santri dalam perencanaan pembiayaan di TPQ Al-Ittihad terutama dalam pembayaran SPP santri. Selain itu, dengan adanya usulan wali santri kepada pihak TPQ Al-Ittihad untuk menaikkan nominal SPP santri dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000, setidaknya dapat menjadi bukti adanya perhatian wali santri kepada pihak TPQ Al-Ittihad khususnya bagi kesejahteraan ustaz dan ustazah serta pendamping di mana sebelum nominal SPP ini dinaikkan para ustaz dan ustazah mendapatkan *bisyārah* sekitar Rp 125.000 dan setelah dinaikkan para ustaz dan ustazah bisa mendapatkan *bisyārah* sebesar Rp 175.000 pada tiap bulannya.¹⁸

Adapun sumber biaya pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, menurut penjelasan Ustazah Roso¹⁹ ialah berasal dari wali santri (dalam bentuk SPP santri) dan pengurus TPQ Al-Ittihad. Akan tetapi, nominal bantuan atau donasi yang diberikan oleh pengurus untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping tidak ditentukan sebagaimana dengan besaran nominal SPP santri, artinya pihak pengurus memberikan bantuan atau donasi untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping TPQ Al-Ittihad sesuai dengan kerelaan masing-masing.

¹⁸Informasi tentang kenaikan *bisyārah* ustaz dan ustazah ini dari Rp 125.000 menjadi Rp 175.000 diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017.

¹⁹Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017. Beliau juga menambahkan bahwa para pendamping ustazah di TPQ Al-Ittihad ini berasal dari masyarakat yang tinggal di lingkungan TPQ Al-Ittihad di mana yang bersangkutan juga mendapatkan hak yang sama (*bisyārah*) seperti ustaz dan ustazah. Hanya saja nominal yang diterimakan berbeda dengan ustaz dan ustazah.

Perencanaan pembiayaan operasional TPQ Al-Ittihad selain untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah juga meliputi infak santri yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan pembelajaran. Berikut penjelasan Ustazah Annisa²⁰ berkaitan dengan perencanaan infak santri, sebagai berikut:

Sebelum infak santri ini diadakan, pihak ustaz dan ustazah dan pengurus melakukan musyawarah terlebih dahulu pada pertemuan pengurus dengan tujuan pihak TPQ ingin melatih para santri untuk bersedekah dan akhirnya dalam rapat pengurus tersebut ditetapkan akan diadakan infak bagi para santri. Namun hal tersebut tidak langsung dilaksanakan. Hal tersebut baru sekedar wacana, bahkan nominal ataupun teknis pelaksanaannya saat itu belum ada. Selanjutnya, wacana tersebut dibawa atau disampaikan kepada wali santri pada saat pertemuan rutin wali santri.

Dalam wawancara yang sama, Ustazah Annisa juga menjelaskan bahwa saat wacana infak santri tersebut disampaikan kepada wali santri pada saat pertemuan rutin wali santri dengan tujuan untuk melatih para santri bersedekah, para wali santri pun mendukung gagasan tersebut. Setelah semua wali santri sepakat dengan adanya infak santri, kemudian pengurus dan ustaz dan ustazah pun bermusyawarah dengan para wali santri untuk menentukan teknis pelaksanaannya termasuk nominal uang yang diberikan oleh santri. Akhirnya, berdasarkan musyawarah antara pengurus, ustazah, dan wali santri pada saat itu diputuskan bahwa teknis pelaksanaan infak bagi para santri ialah dilaksanakan setiap satu minggu sekali, yakni pada hari Kamis dengan minimal nominal sebesar Rp 500 tiap santri.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan infak santri, pihak TPQ Al-Ittihad sekali lagi melibatkan wali santri dalam pengambilan kebijakannya. Hal ini sedikit berbeda dengan kenaikan SPP santri

²⁰Hasil wawancara dengan Ustazah Annisa pada tanggal 18 Agustus 2017.

dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 yang merupakan usulan dari wali santri dan adapun usulan adanya infak santri ini bukanlah datang atau berasal dari wali santri, namun dari pihak TPQ Al-Ittihad khususnya para ustazah di mana saat itu wacana infak santri dimusyawarahkan terlebih dahulu di tingkat pengurus dan ustaz dan ustazah. Setelah mendapat kesepakatan di tingkat pengurus dan ustaz dan ustazah barulah wacana tersebut disampaikan kepada wali santri dalam pertemuan rutin wali santri hingga akhirnya berdasarkan musyawarah bersama antara pengurus, ustaz dan ustazah, dan wali santri diambillah kebijakan dan keputusan bersama untuk mengadakan infak bagi para santri dengan teknis sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Penjelasan tersebut dapat menjadi bukti bahwa dalam pengambilan kebijakan pengadaan infak santri, pihak TPQ Al-Ittihad melibatkan wali santri untuk menentukan arah atau keputusan yang akan diambil di mana kebijakan atau keputusan tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak terkait.

2) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembiayaan Pembangunan Gedung TPQ Al-Ittihad

Untuk mengawali deskripsi perencanaan pembiayaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, nampaknya perlu disampaikan terlebih dahulu tentang latar belakang adanya usulan ataupun rencana pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Dari hasil wawancara dengan Ustazah Roso,²¹ beliau menyampaikan bahwa sebelum gedung TPQ Al-Ittihad berdiri, para santri mengaji di tempat-tempat yang terpisah. Ada yang menempati Masjid Al-Ittihad, rumah-rumah warga, bahkan ada pula yang menempati garasi warga. Hal tersebut disebabkan karena jumlah santri yang relatif banyak yakni saat itu (sekitar tahun

²¹Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 8 Agustus 2017.

2010) mencapai 160an santri, namun hal tersebut tidak didukung dengan kapasitas tempat mengaji di mana saat itu para santri menempati Masjid Al-Ittihad yang belum mampu menampung jumlah santri secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pihak TPQ Al-Ittihad harus mencari tempat lain untuk mengaji para santri dan berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat sekitar serta dengan kerelaan warga, akhirnya terdapat beberapa warga yang mempersilakan para santri untuk mengaji di rumah mereka.

Hal senada juga disampaikan oleh Ustaz Johar²² yang merupakan Ketua Takmir Masjid Al-Ittihad sekaligus anggota panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, beliau menyampaikan bahwa pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dilatarbelakangi dengan banyaknya jumlah santri yang mengaji hingga mencapai 160 santri di mana tempat mengaji saat itu, yakni Masjid Al-Ittihad dirasa tidak kondusif untuk menampung para santri dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga sebagai solusi sementara agar para santri tetap dapat mengaji, masyarakat ada yang merelakan rumah mereka digunakan sebagai tempat mengaji bagi para santri, bahkan bertempat di garasi mobil warga sekalipun, seperti rumah Pudjiarto di mana teras rumah dan garasi mobilnya digunakan untuk mengaji para santri, rumah Tofik, dan rumah Ibnu. Dengan melihat kondisi tersebut, berdasarkan hasil musyawarah antara pihak RW 15, RT di lingkungan RW 15, kelompok pengajian muslimat beserta jajaran pengurus TPQ Al-Ittihad beserta dewan guru diperoleh kesepakatan untuk membangun gedung TPQ Al-Ittihad, yakni dengan membentuk panitia khusus pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang melibatkan berbagai elemen masyarakat khususnya yang berada di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk.

²²Hasil wawancara dengan Ustaz Johar pada tanggal 14 Agustus 2017.

Penulis juga berkesempatan menggali informasi dari salah satu warga yang merelakan rumahnya dijadikan tempat mengaji bagi para santri TPQ Al-Ittihad, yaitu Eni Setyaningsih di mana beliau juga menjabat sebagai pengurus TPQ Al-Ittihad sekaligus pengurus pengajian muslimat di RW 15 Kelurahan Teluk. Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa berawal dari adanya keprihatinan sekaligus juga rasa bangga dengan jumlah santri yang awalnya hanya berjumlah sekitar 30 orang, namun dengan berjalannya waktu jumlah santri pun semakin meningkat hingga mencapai 160 orang santri saat itu. Hal tersebut menyebabkan para santri harus belajar di rumah-rumah hingga garasi warga.²³

Masih dalam wawancara yang sama, Eni Setyaningsih menceritakan bahwa terdapat santri yang mengaji di rumah Tofik sejumlah satu kelas. Ada pula yang mengaji sebanyak satu kelas di rumah Ibnu. Kemudian di rumah Eni Setyaningsih sendiri, yakni di garasi mobil hingga ruang keluarga atau ruang tengah. Dari hal tersebut muncullah berbagai masukan dan keinginan dari masyarakat di wilayah RW 15 melalui perwakilan RW, RT hingga kelompok pengajian muslimat agar TPQ Al-Ittihad memiliki gedung tersendiri. Dari penjelasan Eni Setyaningsih, masyarakat merasa iba dan kasihan dengan para santri yang dengan semangat tinggi untuk menuntut ilmu namun harus belajar di teras hingga garasi mobil warga.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari usulan warga tersebut diadakanlah pertemuan (yang digagas oleh Abdul Hamid selaku tokoh masyarakat sekaligus penasihat TPQ Al-Ittihad) tingkat RW 15 yang melibatkan perwakilan pengurus tiap RT di lingkungan RW 15, pengurus pengajian muslimat, pengurus TPQ Al-Ittihad beserta dewan guru untuk bermusyawarah bersama mencari solusi

²³Hasil wawancara dengan Eni Setyaningsih pada tanggal 15 Agustus 2017.

bagi permasalahan terkait tempat mengaji para santri. Dari pertemuan tersebut diperoleh adanya kesepakatan untuk melaksanakan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dengan membentuk panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, mulai dari panitia pengadaan tanah hingga pembangunannya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk.

Masih dalam wawancara yang sama, Eni Setyaningsih menyampaikan bahwa masyarakat pun antusias dan mendukung terhadap rencana pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Berikut penuturan Eni Setyaningsih berkaitan dengan hal tersebut:

Masyarakat saat itu sangat antusias. *Alhamdulillah*, mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga evaluasi terlebih kaitannya dengan pendanaan semua melibatkan masyarakat, yakni dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari panitia pembangunannya saja, semuanya merupakan masyarakat dari lingkup wilayah RT 1, RT 2 dan RT 3 di lingkungan RW 15. Bahkan hingga perumusan kebutuhan bahan dan biaya, semua panitia dilibatkan namun tetap terdapat salah satu sebagai ahlinya termasuk dalam hal penarikan dana, itupun berasal dari masyarakat sekitar termasuk remaja yang ikut menarik infak dari masyarakat. Kemudian dalam hal pelaksanaan ataupun penggunaan dana, panitia juga lah yang diberi amanah untuk membelanjakannya dengan sepengetahuan bendahara dan ketua yang kemudian hal tersebut (setiap pemasukan dan pengeluaran yang ada dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad) disampaikan kepada panitia lain dalam pertemuan panitia yang dihadiri oleh pihak RW, pihak RT, pengurus muslimat RW 15, hingga pengurus TPQ Al-Ittihad beserta jajaran dewan guru serta tokoh masyarakat sekitar termasuk takmir Masjid Al-Ittihad. Kemudian, dari laporan bendahara terkait pemasukan dan pengeluaran yang ada, pihak RT khususnya pengurus RT yang hadir saat itu melaporkan kepada masyarakat atau warganya saat pertemuan rutin RT.

Adapun terkait dengan pembentukan panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang melibatkan berbagai elemen

masyarakat khususnya di wilayah RW 15, Ustazah Roso²⁴ turut menguatkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Johar bahwa saat itu salah satu tokoh masyarakat di wilayah tersebut yang juga merupakan imam Masjid Al-Ittihad sekaligus sebagai penasihat TPQ Al-Ittihad, yakni Abdul Hamid mengumpulkan berbagai elemen masyarakat di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk, mulai dari Ketua RW 15 beserta pengurus, Ketua RT 1, 2 dan 3 di wilayah RW 15 beserta pengurus, pengurus TPQ Al-Ittihad beserta dewan guru, dan pengurus pengajian muslimat di mana saat itu mereka berkumpul di Masjid Al-Ittihad. Musyawarah tersebut dipimpin langsung oleh Abdul Hamid atau yang lebih akrab dipanggil Abah Hamid, yakni dengan dilatarbelakangi oleh semakin bertambahnya santri dan dengan ruang pembelajaran yang terbatas (saat itu masih di Masjid Al-Ittihad), maka untuk mencari solusi permasalahan tersebut TPQ Al-Ittihad perlu memiliki gedung mandiri.

Selanjutnya, berdasarkan usulan Abah Hamid tersebut para peserta rapat bermusyawarah dan akhirnya diperoleh suatu kesepakatan untuk dilaksanakan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, yakni dengan terbentuknya panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang ada di wilayah RW 15. Perlu diketahui pula bahwa pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad saat itu diawali benar-benar dari keadaan tidak memiliki apapun, artinya belum ada dana serupiah pun dan juga TPQ Al-Ittihad belum memiliki tanah untuk lokasi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, sehingga saat itu panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad benar-benar bekerja dari titik nol.

Adapun susunan panitia dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad ini dikelompokkan menjadi dua, yakni panitia pengadaan tanah dan panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

²⁴Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 8 Agustus 2017.

Pertama, susunan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Susunan Panitia Pengadaan Tanah TPQ Al-Ittihad²⁵

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Abdul Hamid	Pelindung	Tokoh masyarakat
2.	Ibnu Asaddudin	Penanggungjawab	Ketua RW 15 Teluk
3.	Sukrisna	Ketua I	
4.	Lutfiantara	Ketua II	
5.	Tavip Riyadi	Sekretaris	
6.	Sunaryo	Bendahara	
<i>Bidang Usaha</i>			
7.	Pudjiarto	Koordinator	
8.	Sugeng Pranoto	Anggota	
9.	Mustofa	Anggota	
10.	Joharudin	Anggota	
11.	Muthohar	Anggota	
12.	Saiful Mukminin	Anggota	

Kedua, susunan panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Susunan Panitia Pembangunan Gedung TPQ Al-Ittihad²⁶

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Abdul Hamid	Pelindung	Tokoh masyarakat
2.	Ibnu Asaddudin	Penanggungjawab	Ketua RW 15 Teluk
3.	Pudjiarto	Ketua I	
4.	Joharudin	Ketua II	
5.	Tavip Riyadi	Sekretaris	
6.	Sunaryo	Bendahara I	
7.	Lutfiantara	Bendahara II	
<i>Bidang Usaha</i>			
8.	Suroso	Koordinator	
9.	Saeful Mu'min	Anggota	
10.	Suyono	Anggota	
11.	Sugeng Pranoto	Anggota	
12.	Kuatno	Anggota	

²⁵Hasil dokumentasi pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan Pudjiarto.

²⁶Hasil dokumentasi pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan Pudjiarto.

13.	Sunar	Anggota
14.	Wahyono	Anggota
15.	Sugiarto	Anggota
16.	Ayub	Anggota
17.	Daliman	Anggota
18.	Tohar	Anggota
19.	Budianto	Anggota
<i>Bidang Pembangunan</i>		
20.	Sukrisna	Koordinator
21.	Warsito	Anggota
22.	Wakidi	Anggota
23.	Sarkim	Anggota

Setelah panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad terbentuk, langkah awal yang diupayakan panitia ialah memilih lokasi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ustaz Johar, yaitu:²⁷

Langkah pertama yang dilakukan setelah panitia pembangunan TPQ Al-Ittihad terbentuk adalah bermusyawarah untuk mencari lokasi atau tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, yakni seperti yang bisa dilihat saat ini di RT 03 RW 15 Kelurahan Teluk, di situlah lokasi tanah yang dibeli untuk pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Kemudian, panitia pembangunan dengan ditemani Abah Hamid mendatangi pemilik tanah tersebut (Ibu Warsiti) untuk menyampaikan maksud dan tujuan pembelian tanah. *Alhamdulillah*, Ibu Warsiti dapat memahami dan mendukung maksud pihak TPQ dengan mengikhlaskan tanahnya dijual untuk pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Penulis juga menanyakan terkait perencanaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad kepada panitia lain khususnya terkait perencanaan keuangan, yakni dengan mewawancarai Suroso²⁸ selaku panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad sekaligus Ketua RT 03 RW 15 Kelurahan Teluk di mana dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan hal yang sama dengan apa yang

²⁷Hasil wawancara dengan Ustaz Johar pada tanggal 14 Agustus 2017.

²⁸Hasil wawancara dengan Suroso pada tanggal 12 Agustus 2017.

disampaikan oleh Ustaz Johar bahwa pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad ini dimulai dengan pengadaan tanah seluas 25 ubin. Tanah tersebut dibeli dari Warsiti di mana saat itu dibentuk panitia khusus pengadaan tanah bagi pembangunan gedung TPQ yang melibatkan masyarakat di wilayah RW 15, mulai dari Takmir Masjid Al-Ittihad, pengurus RW, pengurus RT, dan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, terdapat pula pengurus pengajian muslimat dan tentunya pihak TPQ Al-Ittihad baik pengurus maupun dewan guru juga memiliki andil dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, namun tidak secara tersurat dimasukkan ke dalam susunan kepanitiaan.

Masih dalam wawancara yang sama dengan Suroso bahwa berdasarkan hasil musyawarah panitia pengadaan tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad ditetapkan bahwa pembiayaan pengadaan tanah tersebut bersumber dari masyarakat khususnya di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk dengan kebutuhan dana sebesar Rp 87.500.000 untuk pembelian tanah seluas 25 ubin²⁹ di mana harga untuk tiap ubinnya adalah Rp 3.500.000. Setelah adanya ketetapan tentang sumber dana yang digunakan bagi pengadaan tanah pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, yakni berasal dari masyarakat sekitar khususnya di wilayah RW 15, musyawarah pun dilanjutkan dengan pembahasan teknis penarikan dana dari masyarakat. Sekali lagi, berdasarkan hasil musyawarah ditetapkan bahwa sistem pembiayaan bagi pembelian tanah tersebut adalah tiap orang ataupun kelompok dimohon menyumbang minimal satu ubin atau sejumlah Rp 3.500.000, baik secara tunai maupun diangsur dalam waktu satu tahun. Pembayaran

²⁹Terkait dengan pengadaan tanah seluas 25 ubin ini, saat penulis melihat proposal pengadaan tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di dalamnya tercantum rencana pengadaan tanah seluas 495 m² atau 35 ubin dengan rencana anggaran Rp 122.500.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun pada pelaksanaannya karena satu dan lain hal berdasarkan penjelasan Suroso, pengadaan tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad menjadi 25 ubin. Proposal pengadaan tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad terlampir.

dengan sistem angsuran ini juga atas kebijaksanaan pemilik tanah yang mempersilakan pembayaran tanah tersebut diangsur selama satu tahun karena memang dana yang ada harus dikumpulkan dan dicari terlebih dahulu dari masyarakat.

Dalam penjelasannya, Suroso menerangkan bahwa langkah selanjutnya yang ditempuh ialah perwakilan RT di lingkungan RW 15 yang juga sebagai panitia pengadaan tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad supaya menyampaikan informasi terkait pengumpulan dana pengadaan tanah tersebut kepada masyarakat atau warganya di lingkungan RT masing-masing pada saat pertemuan RT dan termasuk perwakilan pengurus PKK pun diharapkan turut mensosialisasikannya kepada anggota PKK yang lain pada saat pertemuan rutin PKK. Dengan sistem demikian, dalam jangka waktu satu tahun dapat terkumpul dana sejumlah Rp 87.500.000 yang berasal dari warga di lingkungan RW 15 Kelurahan untuk pembelian tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Masih dalam wawancara yang sama, Suroso menjelaskan bahwa setelah tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dapat terbeli, kemudian panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad kembali mengadakan musyawarah untuk membahas pembiayaan bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Saat itu, dibentuklah panitia khusus pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dan sekaligus menandakan telah usainya tugas panitia pengadaan tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Dari hasil musyawarah panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad disepakati bahwa segera dilaksanakan pencarian dana bagi pembangunan tahap I, yakni pembangunan pondasi dan bangunan pokok lantai satu gedung TPQ Al-Ittihad.

Dalam pemaparannya, Suroso menyampaikan bahwa saat itu panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad membuat proposal³⁰ pencarian dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, bahkan dengan mengetahui pihak kelurahan (stempel dan tanda tangan Lurah Teluk). Selain diedarkan kepada masyarakat di wilayah RW 15, proposal tersebut juga diedarkan ke luar wilayah RW 15 Kelurahan Teluk, baik perseorangan, pengusaha swasta, lembaga/ instansi, dan sebagainya. Panitia pun membuat kotak amal pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang diletakkan di beberapa titik, seperti Toko Kitab Pahala, Warung Makan Sederhana Teluk, Aini Cell Teluk, Warung Makan Berkah Lestari Karang Klesem, Toko Daerah, Warung Dawet Pak Wahyono, Toko Hanggar depan SMP N 7 Purwokerto, salah satu warung di Terminal Purwokerto, dan beberapa tempat lainnya.³¹

Adapun rencana anggaran belanja bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad mencapai Rp 721.818.000 (tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas ribu rupiah) di mana saat itu tepatnya pada tahun 2012 dana yang sudah terkumpul dari swadaya masyarakat dan bantuan pihak lain sejumlah Rp 86.500.000 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kekurangan biaya bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad tersebut sebesar Rp 635.318.000 (enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan dana tersebutlah yang akan diusahakan untuk segera dipenuhi. Adapun rencana anggaran belanja tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dua lantai dengan volume delapan ruang, sarana sanitasi, perkantoran, dan halaman serta jalan. Pembangunan dilakukan

³⁰Proposal pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad terlampir.

³¹Pada saat penulis menanyakan alasan pemilihan tempat-tempat ataupun lokasi penitipan kotak amal pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, Suroso memberikan tanggapan bahwa pihak-pihak yang mau menerima penitipan kotak amal tersebut selain karena alasan membantu dan turut beramal, juga karena alasan relasi.

dalam dua tahap, yakni pada tahap I akan dibangun gedung lantai 1 dan sarana penunjang pada tahun 2012. Pada pembangunan tahap II akan diteruskan dengan membangun lantai 2 pada tahun-tahun berikutnya.³²

Penulis juga menanyakan kepada Suroso terkait bantuan yang diberikan warga dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad tersebut, yakni khususnya yang berkaitan dengan bantuan non materi. Berikut penjelasan Suroso:³³

Setelah dana dirasa mencukupi untuk mulai melakukan pembangunan tahap I (pondasi dan gedung pokok lantai 1), panitia pun bermusyawarah dan memutuskan untuk memulai pembangunan gedung TPQ. Saat pembuatan pondasi, banyak masyarakat yang bergotong-royong dengan sukarela membantu pelaksanaannya. Namun, setelah pembuatan pondasi usai, mulailah dengan menggunakan tenaga atau tukang yang dibayar sebagaimana umumnya. Namun terkadang beberapa masyarakat juga turut membantu terutama ketika hari libur. Mereka tidak membantu secara finansial, namun mereka memilih membantu dalam bentuk tenaga. Kemudian, ada juga remaja yang turut membantu mengedarkan kotak amal kepada seluruh masyarakat di lingkungan RW 15 tiap satu minggu sekali tepatnya pada hari Minggu. Hal tersebut pun bagian dari partisipasi masyarakat dalam hal ini remaja bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, namun bukan dalam bentuk uang melainkan sekali lagi dalam bentuk tenaga.

Penulis juga berkesempatan menggali informasi kepada Ketua RW 15 Kelurahan Teluk, yakni Pudjiarto terkait dengan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Saat itu, penulis menanyakan kepada beliau tentang peran ataupun partisipasi pihak RW 15 dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana saat itu beliau juga menjadi salah satu pengurus di RW 15. Pudjiarto³⁴ menjelaskan bahwa ada keinginan yang sungguh-sungguh dari pihak RW 15 untuk membantu TPQ Al-Ittihad, namun jika secara

³²Hasil dokumentasi pada tanggal 15 Agustus 2017.

³³Hasil wawancara dengan Suroso pada tanggal 12 Agustus 2017.

³⁴Hasil wawancara dengan Pudjiarto pada tanggal 15 Agustus 2017.

langsung turun ke lapangan untuk mengajar para santri nampaknya pihak RW belum mampu melakukannya. Akan tetapi, hal yang bisa dilakukan oleh pihak RW 15 adalah membantu dalam penyediaan sarana pembelajaran bagi para santri, yakni dengan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Adapun terkait partisipasi yang diberikan oleh remaja di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk, penulis berkesempatan mewawancarai salah satu remaja, yakni Kevin³⁵ yang ikut serta atau berpartisipasi secara langsung dalam penggalangan dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Dalam wawancara tersebut, Kevin menyampaikan bahwa awal mula keterlibatan remaja dalam penggalangan dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad adalah dengan mengikuti rapat atau musyawarah yang melibatkan berbagai pihak di wilayah RW 15 yang kemudian dikuatkan dengan panggilan dari panitia pembangunan gedung TPQ dan takmir masjid Al-Ittihad kepada pihak remaja di mana saat itu Kevin lah yang memenuhi panggilan tersebut.

Dalam wawancara tersebut, Kevin menjelaskan bahwa remaja dimintai bantuan untuk ikut berperan dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, yakni dalam bentuk penarikan dana kepada masyarakat di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk. Terdapat tujuh orang yang ikut dalam penarikan dana tersebut saat itu, yakni: Ja'far, Arif, Ragil, Taat, Danar, Deni, dan Kevin. Saat pertemuan itu, pihak remaja dimintai kesediaan terlebih dahulu untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dan pihak remaja pun bersedia untuk itu. Remaja dimintai bantuan tenaga untuk menarik infak dari masyarakat dengan menggunakan kotak infak yang telah disediakan oleh panitia. Kevin juga menyampaikan bahwa remaja yang mau berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaganya untuk mengedarkan kotak infak

³⁵Hasil wawancara dengan Kevin (remaja RW 15) pada tanggal 19 Agustus 2017.

kepada masyarakat juga merupakan bagian dari keluarga besar santri Al-Ittihad.

3) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembiayaan Kegiatan Terprogram dan Partisipatif TPQ Al-Ittihad

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam pengantar deskripsi hasil temuan dalam penelitian ini, yaitu selain perencanaan pembiayaan bagi kegiatan operasional TPQ Al-Ittihad (pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping serta pembelian kebutuhan ATK untuk pembelajaran) dan pembiayaan sarana pembelajaran di mana dalam penelitiann ini difokuskan pada pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, terdapat pula pembiayaan lain yakni pembiayaan kegiatan terprogram (*haflah ākhir as-sanah*) dan pembiayaan kegiatan partisipatif (pawai ta'aruf). Berikut penjelasan tentang perencanaan pembiayaan bagi kegiatan terprogram dan kegiatan partisipatif di TPQ Al-Ittihad dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pertama, kegiatan terprogram (*haflah ākhir as-sanah*). Berdasarkan hasil wawancara dengan Darni Kartiono³⁶ selaku bendahara TPQ Al-Ittihad, berkaitan dengan kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad beliau menyampaikan bahwa pada tahap perencanaan pihak TPQ mengadakan musyawarah pembentukan panitia kegiatan *haflah ākhir as-sanah* dengan melibatkan masyarakat di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk. Pembentukan panitia ini dilakukan dengan cara mengundang perwakilan dari pengurus RT 1, RT 2, dan RT 3, pengurus muslimat, dan perwakilan remaja di wilayah RW 15 serta tentunya pengurus TPQ Al-Ittihad beserta ustaz dan ustazah serta pendamping sebagai pemilik hajat.

³⁶Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 10 Agustus 2017.

Dengan musyawarah tersebut dibentuklah susunan panitia kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara hingga kelengkapannya. Kemudian, ketua panitia memberikan arahan kepada masing-masing seksi tentang tugas dan tanggung jawabnya. Pertemuan ataupun rapat panitia ini pun tidak hanya sekali. Pada rapat pertama sebatas dilakukan pembentukan panitia beserta tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada rapat tersebut panitia juga diberi gambaran secara umum terkait pelaksanaan *haflah ākhir as-sanah* oleh ketua panitia, yakni Saeful Mukmin.

Adapun susunan panitia kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad Tahun 2016, yakni bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan ialah Abdul Hamid dan acara tersebut diketuai oleh Saeful Mukmin. Deni Perdana dan Ani Kartiono masing-masing bertugas sebagai sekretaris dan bendahara kegiatan. Untuk seksi perlengkapan dan dekorasi dikoordinatori oleh Suroso dengan anggota Kuat, Untung, dan Rohman. Seksi acara menjadi tanggung jawab Sumiyem dan Uli. Adapun penjemput tamu diserahkan kepada Eni dan Siti Khotijah. Lalu, untuk seksi keamanan dipercayakan kepada Warsum, Daliman, dan Lehan. Adapun seksi konsumsi dipercayakan kepada Naryo dan Taufik.³⁷

Masih dalam wawancara yang sama, Darni Kartiono menjelaskan bahwa berkaitan dengan pembiayaan bagi kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad ini, masyarakat memiliki peran aktif di dalamnya. Masyarakat tidak hanya sebagai penyandang dana khususnya wali santri, namun masyarakat juga turut merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut bersama-sama dengan pihak TPQ Al-Ittihad. Perlu diketahui pula bahwa berdasarkan penuturan Darni Kartiono, masyarakat yang ikut

³⁷Hasil dokumentasi pada tanggal 20 Agustus 2017 terkait susunan panitia haflah akhirissanah TPQ Al-Ittihad Tahun 2016.

berpartisipasi dalam kegiatan *haflah ākhir as-sanah* ini tidak hanya berasal dari wali santri, namun juga masyarakat atau warga yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan TPQ Al-Ittihad, artinya tidak ada anggota keluarganya yang mengaji ataupun menjadi pengurus di TPQ Al-Ittihad, bahkan panitia kegiatan tersebut pun berasal dari masyarakat yang tidak secara langsung turut dalam kegiatan keseharian TPQ Al-Ittihad tetapi mereka mau berpartisipasi dalam memajukan TPQ di antaranya dengan turut membantu dan menjadi panitia dalam kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad.

Selanjutnya, dari penjelasan Darni Kartiono berkaitan dengan perencanaan pembiayaan bagi kegiatan *haflah ākhir as-sanah* tersebut dimulai dengan penjelasan secara rinci terkait kewajiban dan tugas masing-masing seksi. Setelah setiap seksi memahami kewajiban dan tugas masing-masing, kemudian mereka bermusyawarah untuk menyusun draf kebutuhan anggaran yang diperlukan. Setelah semua seksi mengajukannya, maka dalam rapat tersebut anggaran yang diajukan oleh tiap seksi dimusyawarahkan bersama dalam rapat panitia. Lalu, bendahara merkapitulasi dan menghitung jumlah biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad tersebut. Berikut rencana anggaran belanja kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad Tahun 2016:

Tabel 4.6.
Rencana Anggaran Belanja (RAB) *Haflah ākhir as-sanah*
TPQ Al-Ittihad Tahun 2017³⁸

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Honor Pembicara	500.000	-
2.	Sewa <i>sound system</i>	500.000	-
3.	Dekorasi panggung	410.000	-
4.	Tambah daya listrik	150.000	-

³⁸Hasil dokumentasi pada tanggal 20 Agustus 2017 terkait rencana anggaran belanja kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad Tahun 2016.

5.	Konsumsi pelaksanaan	2.597.500	-
6.	Dokumentasi	200.000	-
7.	Honor ustaz dan ustazah	900.000	-
8.	Honor pelatih hadroh	150.000	-
	JUMLAH	5.407.500	
Lain-lain			
1.	Kursi dan Tarub	-	Pinjam RT
2.	Panggung	-	Pinjam RT
3.	Konsumsi penyiapan tempat	-	Pengurus TPQ

Dari penjelasan Darni Kartiono, hasil musyawarah terkait perencanaan pembiayaan tersebut dijadikan acuan bagi kebutuhan pembiayaan kegiatan *haflah ākhir as-sanah*. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang telah direncanakan, berdasarkan hasil musyawarah panitia ditetapkan bahwa sumber pembiayaan kegiatan tersebut berasal dari masyarakat khususnya di wilayah RW 15 yakni dengan menarik donasi atau bantuan dari masyarakat, wali santri, pengurus, pihak RW, pihak RT, dan sebagainya.

Dalam wawancara tersebut, Darni Kartiono menambahkan bahwa langkah awal yang dilakukan oleh pihak TPQ Al-Ittihad sebelum pelaksanaan pembentukan panitia *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad ialah dengan melaksanakan pertemuan wali santri terlebih dahulu dengan agenda utama penyampaian rencana kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad dengan acara inti ialah Khatmil Qur'an. Pengurus TPQ Al-Ittihad pun dalam pertemuan wali santri tersebut meminta dukungan kepada para wali santri untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut dan wali santri pun selalu memberikan dukungan secara penuh. Perlu diketahui pula bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan *haflah ākhir as-sanah*, tidak hanya para santri khatmil qur'an saja yang tampil, melainkan para santri lain yang belum khatam Al-Qur'an pun turut tampil sebagai pengisi acara pada kegiatan tersebut, seperti seni tari, puisi, dan sebagainya.

Masih dalam wawancara yang sama, Darni Kartiono menjelaskan bahwa khusus bagi para santri yang akan melaksanakan khatmil Qur'an, pihak TPQ Al-Ittihad mengundang secara khusus wali santri dari para santri tersebut untuk melakukan musyawarah khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan tersebut. Para wali santri tersebut diundang secara khusus karena putra ataupun putri mereka lah yang sebetulnya menjadi alasan utama diadakannya kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad, yakni dengan acara utama khatmil Qur'an. Dalam pertemuan tersebut, pengurus TPQ Al-Ittihad memberikan motivasi terlebih dahulu kepada wali santri, baik disampaikan oleh pengurus maupun penasihat TPQ Al-Ittihad bahwa dengan putra atau putri mereka telah mampu untuk mengkhhatamkan Al-Qur'an, hal tersebut harus benar-benar disyukuri karena itu merupakan anugrah dari Allah SWT.

Dari adanya pemberian motivasi tersebut sekaligus sebagai wujud rasa syukur, pengurus meminta dukungan dan bantuan secara penuh kepada wali santri. Mereka pun sangat mendukung dan bersedia memberikan sumbangan atau bantuan lebih bagi kegiatan *haflah ākhir as-sanah* sebagai rasa syukur atas putra atau putri mereka yang telah mengkhhatamkan Al-Qur'an. Adapun bagi masyarakat umum ataupun wali santri di mana putra-putri mereka belum melaksanakan khatmil qur'an dimintai bantuan seikhlasnya, tetapi khusus bagi wali santri yang putra atau putrinya melaksanakan khatmil qur'an dimintai bantuan minimal sebesar Rp 250.000 bagi tiap santri dan nantinya uang tersebut pun akan kembali kepada para santri yang melaksanakan khataman, namun dalam bentuk lain, seperti perlengkapan khataman dan sebagainya.

Adapun kaitannya dengan ketentuan nominal yang harus dikeluarkan wali santri sejumlah Rp 250.000 tersebut, hal itu diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama antara wali santri

dengan pengurus TPQ dan bukan berdasarkan kehendak atau keputusan sepihak TPQ, namun sebelumnya pihak TPQ telah membuat rencana usulan biaya yang akan dikeluarkan oleh wali santri tersebut dengan mengacu pada kebutuhan anggaran yang telah disepakati oleh panitia kegiatan *haflah ākhir as-sanah*.

Kedua, perencanaan pembiayaan kegiatan partisipatif. Pembiayaan bagi perencanaan kegiatan partisipatif yang dimaksudkan di sini ialah keikutsertaan TPQ Al-Ittihad pada pawai ta'aruf yang secara rutin diadakan oleh Pondok Pesantren Anwarushsholihin Teluk dalam rangka *haflah ākhir as-sanah* pondok pesantren tersebut. Dari hasil wawancara dengan Darni Kartiono,³⁹ beliau menyampaikan bahwa secara rutin tiap tahunnya TPQ Al-Ittihad mendapat surat undangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pawai ta'aruf tersebut. Langkah pertama yang dilakukan pihak TPQ Al-Ittihad setelah mendapatkan surat tersebut ialah dengan mengadakan pertemuan khusus antara pengurus dan ustaz dan ustazah serta pendamping untuk membahas tindak lanjut dengan adanya undangan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, pihak TPQ bermusyawarah terkait keikutsertaan dalam kegiatan pawai ta'aruf tersebut, khususnya berkaitan dengan teknis pelaksanaan beserta kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan pawai tersebut, terutama konsumsi dan perlengkapan pawai.

Masih dalam wawancara yang sama, Darni Kartiono menjelaskan bahwa setelah rincian kebutuhan pawai ta'aruf tersebut diperoleh, pengurus TPQ Al-Ittihad menyampaikan kepada wali santri pada pertemuan wali santri bahwa TPQ mendapatkan undangan untuk mengikuti pawai ta'aruf dan berdasarkan hasil musyawarah pengurus dan ustaz dan ustazah disepakati TPQ akan berpartisipasi dalam pawai tersebut. Lalu,

³⁹Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 10 Agustus 2017.

pihak TPQ meminta kesepakatan dan dukungan wali santri demi kesuksesan kegiatan tersebut. Setelah itu, pengurus TPQ menyampaikan gambaran umum pelaksanaan kegiatan tersebut beserta rincian anggaran yang dibutuhkan. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pawai ta'aruf saat itu tersebut sebesar Rp 1.140.000 dengan rincian Rp 1.000.000 digunakan untuk konsumsi dan Rp 140.000 digunakan untuk pembelian perlengkapan pawai ta'aruf.⁴⁰

Pengurus bersama para wali santri pun bermusyawarah untuk mencari solusi bagi pemenuhan kebutuhan biaya tersebut dan akhirnya terdapat kesepakatan bersama bahwa biaya ataupun kebutuhan kegiatan pawai ta'aruf tersebut cukup ditanggung oleh pengurus dan wali santri TPQ Al-Ittihad. Pada saat pertemuan wali santri tersebut, terdapat beberapa wali yang langsung memberikan sebagian rizkinya untuk membantu pembiayaan pelaksanaan kegiatan pawai ta'aruf dan ada pula wali santri yang memberikan bantuan dengan menitipkan uang kepada putra atau putri mereka saat mengaji atau bahkan langsung menyerahkannya kepada ustazah atau pengurus. Ada pula wali santri yang menyumbang dalam bentuk barang seperti air mineral, buah, dan sebagainya.

Dari penuturan Darni Kartiono diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan pawai ta'aruf tersebut pihak TPQ Al-Ittihad juga turut melibatkan sebagian remaja di wilayah RW 15, yakni dengan meminta bantuan kepada mereka untuk membuatkan alat musik dari barang-barang bekas yang akan dijadikan sebagai alat musik pengiring pada pelaksanaan pawai ta'aruf, termasuk meminta bantuan remaja untuk mengiri para santri pada saat pawai ta'aruf berlangsung dengan menabuh alat musik tersebut.

⁴⁰Hasil dokumentasi pada tanggal 20 Agustus 2017 tentang rencana anggaran belanja keikutsertaan TPQ Al-Ittihad pada kegiatan pawai ta'aruf.

Selain beberapa kegiatan tersebut, terdapat satu kegiatan lain namun bukan terprogram melainkan telah menjadi rutinitas bahwa berdasarkan penjelasan Darni Kartiono⁴¹ TPQ Al-Ittihad juga memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ustaz dan ustazah serta pendamping tiap tahunnya yang diberikan menjelang hari raya Idul Fitri. Sumber dana THR tersebut berasal dari masyarakat sekitar dan wali santri. Pembiayaan THR ini pun sudah melalui tahap musyawarah dengan wali santri di mana dengan akan datangnya hari raya, maka sudah sewajarnya ustaz dan ustazah serta pendamping mendapatkan THR serta para wali santri pun sangat mendukung hal tersebut.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad

1) Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Operasional TPQ Al-Ittihad

Dalam pelaksanaan pembiayaan operasional TPQ Al-Ittihad, sebagaimana dalam perencanaannya juga terbagi ke dalam dua hal, yakni pelaksanaan pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping serta penggunaan ataupun pembelanjaan infak santri.

Pertama, pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Adapun mekanisme pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping ialah diawali dari penarikan SPP para santri. Dari hasil wawancara dengan Ustazah Roso⁴² tentang mekanisme penarikan SPP para santri, beliau menyampaikan:

Tiap santri kami bagikan kartu SPP tiap bulannya sebelum tanggal tiga. Kemudian kartu SPP tersebut oleh para santri disampaikan kepada orang tua masing-masing untuk diisi dan dibawa oleh wali santri atau orang tua pada pertemuan wali santri pada tanggal empat tiap bulannya. Pada pertemuan wali santri inilah kami mengumpulkan dana dari

⁴¹Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 9 Agustus 2017.

⁴²Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017.

para wali santri di mana dana tersebut memang khusus dan hanya digunakan untuk membiayai atau membayar *bisyārah* ustaz dan ustazah tiap bulannya termasuk kepada para pendamping dengan besaran SPP Rp 15.000 tiap santri.

Dalam wawancara yang sama, Ustazah Roso menerangkan bahwa dengan nominal SPP Rp 15.000 tiap bulannya yang harus dibayarkan oleh para santri, terdapat beberapa santri yang membayar SPP secara rutin tiap bulannya di atas nominal Rp 15.000. Ada yang membayar Rp 20.000 tiap bulannya. Ada pula yang membayar Rp 25.000 tiap bulannya, bahkan ada yang sampai membayar Rp 50.000 tiap bulannya. Hal itu semakin memperkuat keuangan TPQ Al-Ittihad, khususnya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping pada tiap bulannya.

Selain dengan para wali santri yang membayar SPP di atas nominal sesuai kesepakatan (Rp 15.000), ada pula wali santri yang membayar SPP tidak secara rutin. Berikut penjelasan Ustazah Roso⁴³ mengenai hal tersebut:

Ada wali santri yang tidak membayar SPP secara rutin di mana hal tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang memang tidak memungkinkan, seperti satu tahun hanya membayar tiga atau empat bulan saja atau bahkan satu bulan saja. Tetapi hal tersebut bukan menjadi masalah besar bagi kami karena masih ada wali santri lain yang membayar lebih dan hal tersebut bisa digunakan untuk subsidi silang dan wali santri yang membayar lebih pun kami sampaikan tentang hal tersebut dan meminta keikhlasan yang bersangkutan. Hal yang terpenting bagi kami adalah anak-anak mau mengaji.

Masih dalam wawancara yang sama, Ustazah Roso menyampaikan bahwa para ustazah pun memiliki peran dalam pengelolaan SPP santri ini, yakni dengan mengingatkan wali santri melalui putra-putri mereka agar melakukan pembayaran SPP pada saat pertemuan wali santri dan ketika wali santri berhalangan hadir,

⁴³Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017.

maka SPP bisa dibayarkan melalui para santri setelah hari atau tanggal pertemuan wali santri, yakni pada tanggal empat tiap bulannya. Adapun kartu SPP santri tiap kelas juga memiliki warna yang berbeda dengan tujuan untuk memudahkan ustazah dan pendamping dalam pengelompokannya, yakni warna kuning untuk kelas 1 TPQ, warna biru untuk kelas 2 TPQ, warna putih untuk kelas 3 TPQ, dan warna oranye untuk kelas 4 TPQ.

Adapun kaitannya dengan sumber pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping ini, selain wali santri sebagai sumber pembiayaan utama, berdasarkan penjelasan Ustazah Roso beliau menyampaikan bahwa khusus pembiayaan bagi *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping ini terdapat sumber pembiayaan lain selain dari wali santri, yaitu dari pengurus TPQ Al-Ittihad. Para pengurus TPQ Al-Ittihad pada setiap bulannya menyisihkan sebagian dari harta yang mereka miliki untuk membantu memenuhi pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, namun dengan nominal yang tidak ditentukan sesuai dengan kerelaan masing-masing. Hal tersebut tentunya memperkuat ketersediaan biaya pada tiap bulannya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Selain itu, terdapat pula warga yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan TPQ Al-Ittihad, namun ia turut membantu ataupun sebagai donatur bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping.

Selanjutnya, mekanisme pembayaran SPP oleh wali santri kepada pihak TPQ saat pertemuan wali santri pada tanggal empat tiap bulannya, Ustazah Roso⁴⁴ menerangkan bahwa pembayaran SPP saat pertemuan wali santri dilaksanakan setelah rangkaian acara pertemuan tersebut selesai, tepatnya setelah penutupan dan dilanjutkan dengan berjabat tangan antara pengurus, ustaz dan

⁴⁴Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017.

ustazah, pendamping, dan wali santri. Setelah proses jabat tangan selesai, tiap wali kelas (ustazah) dengan didampingi oleh pendamping menempati posisinya masing-masing di meja yang telah disiapkan, lalu para wali santri berkumpul atau mendekat sesuai dengan wali kelas putra-putri mereka masing-masing dan pada saat itulah para wali santri menyampaikan pembayaran SPP bagi putra-putri mereka dengan menyerahkan kartu SPP yang telah diberikan pihak TPQ melalui putra-putri mereka sebelumnya.

Ustazah Roso juga menambahkan bahwa pertemuan wali santri merupakan kesempatan bagi pihak TPQ Al-Ittihad untuk mengumpulkan dana bagi kegiatan TPQ khususnya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Selain itu, pertemuan tersebut juga digunakan sebagai wadah untuk mendengarkan masukan, saran, kritikan, bahkan evaluasi ataupun harapan dari wali santri kepada TPQ Al-Ittihad.

Dari keterangan Ustazah Roso dalam wawancara yang sama, perlu diketahui pula bahwa tiap wali kelas (ustazah) memiliki catatan keuangan kelas/ SPP masing-masing. Pada saat para wali santri membayar SPP, wali kelas mencatat penerimaan uang SPP tersebut pada catatan masing-masing. Kemudian, catatan tersebut beserta uang yang telah terkumpul diserahkan kepada koordinator ustazah (Ustazah Roso). Kemudian, koordinator ustazah pun merekap penerimaan SPP dari masing-masing kelas untuk selanjutnya diserahkan kepada bendahara TPQ Al-Ittihad (Darni Kartiono). Lalu, bendahara TPQ Al-Ittihad mencatat pemasukan tersebut beserta uang SPP dan uang tersebut dikelola untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping.

Pada saat ustaz dan ustazah serta pendamping menerima *bisyārah*, bendahara TPQ meminta kepada masing-masing dari mereka untuk membubuhkan tanda tangan pada lembar penerimaan *bisyārah* sebagai bukti telah menerima *bisyārah* dan antara ustaz

dan ustazah yang satu dengan yang lain pun saling mengetahui besaran atau jumlah *bisyārah* yang diterimakan termasuk pendamping sehingga diharapkan tercipta keterbukaan di antara sesama. Hal tersebut juga digunakan sebagai catatan atau laporan pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping dari TPQ Al-Ittihad kepada wali santri. Berikut penjelasan Ustazah Roso⁴⁵ terkait pencatatan pemasukan TPQ Al-Ittihad khususnya dalam hal SPP santri dan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping:

Semua pemasukan dan pengeluaran TPQ, kami catat dengan sebaik mungkin semampu kami. Termasuk pemasukan dari selain wali santri pun kami catat, baik dari ibu-ibu pengurus RW maupun masyarakat bahkan ada donatur tetap bagi TPQ Al-Ittihad untuk pembayaran *bisyārah* para ustazah, yakni Ibu Eko di mana tiap bulannya ia selalu memberikan bantuan untuk membantu pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping TPQ sebesar Rp 100.000. Kemudian, uang tersebut beserta catatannya disampaikan kepada bendahara TPQ saat pertemuan pengurus dan ustaz dan ustazah serta pendamping. Oleh bendahara TPQ, uang tersebut dikelola lebih lanjut untuk melengkapi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping.

Adapun berkaitan dengan nominal *bisyārah* yang diterimakan oleh ustaz dan ustazah serta pendamping, dari hasil penjelasan Darni Kartiono selaku bendahara TPQ Al-Ittihad⁴⁶ diperoleh informasi bahwa tiap bulannya masing-masing ustazah mendapatkan *bisyārah* sebesar Rp 175.000 dan pendamping Rp 125.000 serta khusus untuk Abah Hamid⁴⁷ sebesar Rp 250.000. Pada saat penulis menanyakan kepada Darni Kartiono tentang alasan pemberian *bisyārah* dengan jumlah atau nominal yang berbeda kepada ustaz dan ustazah, pendamping, dan Abah Hamid,

⁴⁵Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017.

⁴⁶Hasil wawancara dengan Darni Kartiono selaku bendahara TPQ Al-Ittihad pada tanggal 9 Agustus 2017.

⁴⁷Abah Hamid merupakan sebutan masyarakat sekitar untuk KH. Abdul Hamid di mana beliau merupakan tokoh masyarakat sekitar, penasihat sekaligus ustaz di TPQ Al-Ittihad.

beliau menjelaskan bahwa masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sehingga setidaknya hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan pemberian besaran *bisyārah*. Seperti Abah Hamid selaku tokoh masyarakat, penasihat, dan ustaz di TPQ Al-Ittihad tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan yang lain, sehingga perlu diberi *bisyārah* yang memang lebih dibandingkan dengan yang lain. Demikian pula antara ustazah dengan pendamping di mana para ustazah selain membimbing secara langsung satu per satu kepada para santri (privat), mereka juga harus mengajar atau memberikan materi secara klasikal kepada para santri.

Adapun pendamping bertugas untuk mendampingi dan membantu para ustazah dalam mengajar, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kelas termasuk pencatatan SPP santri dan mengondisikan santri supaya dapat kondusif dalam pembelajaran. Adapun pendamping di sini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar TPQ Al-Ittihad yang meluangkan waktunya pada sore hari dan mau untuk ikut serta secara langsung dalam kegiatan TPQ Al-Ittihad. Beberapa alasan tersebutlah yang menjadi pertimbangan pengurus dalam menentukan besaran *bisyārah* yang diterima ustaz dan ustazah serta pendamping.

Kedua, infak santri. Pelaksanaan pembiayaan operasional TPQ Al-Ittihad yang kedua adalah pembelian ATK dan sejenisnya melalui infak santri. Dari hasil wawancara dengan Ustazah Annisa⁴⁸ berkaitan dengan pengelolaan infak santri, beliau menyampaikan bahwa pengelolaan infak santri dilakukan oleh ustazah atau wali kelas masing-masing. Tiap wali kelas atau ustazah berkewajiban menerima ataupun menarik uang infak tersebut dari para santri sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yakni dilaksanakan setiap hari Kamis dengan nominal Rp 500 bagi

⁴⁸Hasil wawancara dengan Ustazah Annisa pada tanggal 18 Agustus 2017.

tiap santri. Setelah itu, wali kelas berkewajiban untuk melakukan pencatatan terhadap uang infak santri tersebut, baik pemasukan maupun pengeluaran uang infak untuk selanjutnya catatan atau laporan tersebut disampaikan kepada wali santri pada saat pertemuan rutin pada tanggal empat tiap bulannya, sehingga wali santri mengetahui berapa jumlah uang infak yang masuk dan digunakan untuk apa saja uang tersebut. Itu semua menjadi kewajiban masing-masing wali kelas dalam pengelolaannya.

Penggunaan uang infak tersebut berdasarkan penjelasan Ustazah Annisa dalam wawancara yang sama disampaikan bahwa penggunaan uang infak santri tidaklah diputuskan secara sepihak oleh ustaz dan ustazah ataupun pengurus, namun melalui musyawarah sebagaimana saat usulan adanya infak santri tersebut muncul. Dalam musyawarah antara wali santri dengan pengurus serta ustazah tersebut, selain menentukan nominal infak yakni Rp 500 tiap santri, juga dibahas terkait teknis pelaksanaannya, siapa yang mengelola, hingga penggunaannya. Wali santri menginginkan infak tersebut dapat kembali lagi untuk kepentingan santri. Akhirnya, berdasarkan musyawarah saat itu ditetapkan bahwa uang infak santri tersebut dikelola oleh wali kelas masing-masing untuk kepentingan kelas masing-masing, khususnya untuk kepentingan pembelajaran santri, seperti fotokopi materi, pembelian ATK untuk pembelajaran, dan sebagainya. Termasuk jika dana yang ada memungkinkan juga bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak terduga, seperti menjenguk santri lain yang sedang terkena musibah, seperti sakit dan sebagainya.

Pada saat penulis menanyakan keterlibatan wali santri dalam infak tersebut melalui para santri, Ustazah Annisa menjelaskan:

Sebagian besar santri memberikan infak, namun ada juga yang tidak karena memang saat itu mereka tidak membawa uang. Bagi kami hal tersebut tidak apa-apa yang penting mereka mau mengaji dan ketika santri yang saat itu tidak

berinfak, bukan berarti selamanya tidak mau berinfak. Ketika santri tersebut mempunyai uang, ia pun mau berinfak.

Adapun terkait teknis pelaksanaan infak santri tersebut, masih dalam wawancara yang sama Ustazah Annisa menceritakan bahwa hal tersebut merupakan otonomi masing-masing kelas. Setiap kelas memiliki caranya masing-masing dan hal tersebut tergantung wali kelas. Ada kelas yang melaksanakan penarikan infak pada awal pembelajaran sebelum para santri menggunakan uangnya untuk membeli makanan, yakni dengan cara para santri menyisihkan uang mereka untuk berinfak dengan dimasukkan ke wadah yang telah disiapkan, seperti dalam bentuk kaleng infak. Ada pula wali kelas yang melaksanakan penarikan infak santri tersebut di akhir pembelajaran saat mereka akan pulang sambil berbaris untuk bersalaman, mereka memasukan uang tersebut ke dalam wadah yang telah disiapkan.

Setelah semua uang infak terkumpul, masing-masing wali kelas menghitung uang tersebut dan dicatat pada lembar infak yang dimiliki masing-masing wali kelas. Setiap pemasukan dan pengeluaran uang infak tersebut wajib dicatat oleh tiap wali kelas untuk dilaporkan kepada pengurus pada saat pertemuan pengurus dan ustaz dan ustazah pada tanggal tiga tiap bulannya serta catatan infak tersebut juga dilaporkan kepada wali santri pada pertemuan wali santri pada tanggal empat tiap bulannya.

2) Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pembangunan Gedung TPQ Al-Ittihad

Setelah adanya perencanaan pembiayaan bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad adalah pelaksanaan pembiayaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Dari hasil wawancara dengan Ustaz Johar⁴⁹ selaku panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad sekaligus sebagai Ketua Takmir Masjid Al-Ittihad, berkaitan dengan pelaksanaan ataupun penggunaan dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad ini beliau menyampaikan bahwa saat itu dengan bermodalkan kemauan dan tekad yang kuat, panitia berupaya semaksimal mungkin untuk dapat membeli tanah bagi lokasi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Dari penjelasan Ustaz Johar diperoleh informasi bahwa tanah yang dijual untuk pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad seluas 25 ubin dengan harga tiap ubin sebesar Rp 3.500.000, sehingga saat itu diperlukan dana Rp 87.500.000. Dengan dana sebesar itu, tentunya perlu waktu untuk mengumpulkannya. Panitia pun meminta tenggang waktu kepada pemilik tanah (Warsiti) agar pembayaran tanah tersebut dapat diangsur atau setidaknya diberi jangka waktu. Atas kebijaksanaan pemilik tanah, panitia diberi tenggang waktu selama satu tahun untuk pelunasan pembayaran tanah. Lalu, panitia pun bermusyawarah untuk mencari solusi bagaimana agar uang sejumlah itu dapat terkumpul dalam waktu satu tahun. Dari hasil musyawarah diputuskan bahwa kepada seluruh warga RW 15 diberi kesempatan untuk menginfakan hartanya bagi pembelian tanah untuk pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui pertemuan RT.

Adapun pelaksanaan pembayaran infak ataupun donasi bagi pembelian tanah untuk pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dilakukan dengan sistem satu orang satu ubin atau lebih dan dapat pula secara berkelompok. Dengan luas tanah 25 ubin, jika satu warga membayar satu ubin berarti setidaknya membutuhkan 25 warga untuk pelunasan pembayaran tanah tersebut.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Ustaz Johar pada tanggal 14 Agustus 2017.

Masih dalam wawancara yang sama, Ustaz Johar menyampaikan bahwa sebagian besar warga yang memiliki kelebihan rizki menyumbang satu ubin untuk satu orangnya (Rp 3.500.000). Selain itu, ada pula yang membayar satu ubin secara berkelompok atau terdiri dari beberapa orang. Pembayaran pun dapat diangsur selama satu tahun. Bagi warga yang kondisi ekonominya cenderung lebih dari cukup dapat membayar infak untuk pembelian tanah tersebut secara kontan. Ada pula warga yang mengangsur dalam beberapa kali angsuran. Namun yang pasti, selama satu tahun tersebut pengumpulan dana untuk pembelian tanah seluas 25 ubin dengan jumlah harga Rp 87.500.000 dapat terlunasi. Adapun pengadaan tanah bagi lokasi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad ini dilaksanakan pada tahun 2011 hingga 2012.

Ustaz Johar menambahkan bahwa saat pengadaan tanah telah usai dan TPQ Al-Ittihad pun memiliki lokasi yang dapat digunakan untuk pembangunan gedung TPQ, langkah selanjutnya yang ditempuh panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad adalah pelaksanaan pembangunan gedung TPQ. Selain sumber dana berasal dari masyarakat sekitar, panitia juga menggalang dana dari luar dengan membuat proposal pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana di dalamnya selain mengetahui RW, panitia juga meminta partisipasi dan keterlibatann pihak Kelurahan Teluk untuk ikut mengetahui pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad berupa pembubuhan tanda tangan dan stempel pada proposal permohonan dana tersebut dan pihak Lurah Teluk pun sangat mendukung dan antusias terkait hal tersebut.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk pihak kelurahan, pada peletakkan batu pertama pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, panitia pun berupaya untuk melibatkan pihak kelurahan dalam hal ini Lurah Teluk (saat itu Rahmat Basuki)

untuk meletakkan batu pertama pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Ustaz Johar menyampaikan bahwa untuk melengkapi kebutuhan dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad selain dengan memaksimalkan bantuan ataupun dana dari masyarakat sekitar TPQ Al-Ittihad khususnya di wilayah RW 15, pengumpulan dana juga dilakukan dengan melibatkan pihak luar TPQ Al-Ittihad seperti pihak swasta yakni dengan meminta ijin untuk meletakkan kotak amal untuk pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, seperti di Toko Kitab Pahala, Warung Dawet Ayu Pak Wahyono, dan sebagainya.

Adapun pihak-pihak swasta tersebut mau menerima dan mempersilakan TPQ Al-Ittihad untuk meletakkan kotak amal di tempat usaha mereka di antaranya disebabkan karena adanya relasi yang baik dengan pihak-pihak tersebut. Namun secara prosedural, panitia tetap menyampaikan maksud dan tujuan penempatan kotak infak tersebut kepada pemilik tempat atau usaha dan mereka pun mau membantu pihak TPQ dengan mengizinkan peletakkan kotak tersebut di tempat usaha mereka. Adapun pembukaan kotak infak tersebut rata-rata dilaksanakan selama enam bulan sekali. Ustaz Johar pun menyampaikan bahwa TPQ Al-Ittihad juga pernah mendapat sumbangan dari salah satu lembaga, yakni SMK Telkom Purwokerto yang menyumbang bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dalam bentuk barang, yaitu berupa keramik sebanyak 40 dus.

Terkait dengan teknis penarikan dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, menurut penjelasan Ustaz Johar⁵⁰ bahwa panitia menyediakan sarana berinjak bagi warga di mana secara rutin pada tiap hari Minggu, remaja RW 15 yang telah ditugaskan untuk berkeliling menarik infak warga akan berkunjung dari satu

⁵⁰Hasil wawancara dengan Ustaz Johar pada tanggal 14 Agustus 2017.

rumah ke rumah yang lain di lingkungan RW 15, mulai dari RT 1, 2 dan 3 dengan membawa kotak infak pembangunan gedung TPQ dan kotak infak tersebut dibuka secara rutin pada tanggal lima tiap bulannya di mana 10% dari pendapatan kotak infak tersebut diberikan kepada pihak remaja yang berkeliling untuk menarik infak.

Dengan adanya partisipasi remaja dalam penarikan infak bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad ini, penulis berkesempatan mewawancarai salah satu remaja yang turut serta dalam kegiatan tersebut, yakni Kevin. Dalam wawancara tersebut, Kevin⁵¹ menjelaskan bahwa saat itu terdapat tujuh orang remaja yang bertugas dari satu rumah ke rumah yang lain untuk menarik kotak infak pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Ketujuh orang tersebut pun dibagi menjadi tiga kelompok di mana 2 kelompok terdiri dari dua orang dan satu kelompok terdiri dari tiga orang. Masing-masing kelompok ditugaskan untuk menarik infak warga dalam lingkup satu RT, yakni RT 1, RT 2, dan RT 3 di wilayah RW 15. Penarikan infak pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad tersebut dilaksanakan pada setiap hari Minggu sore sekitar pukul 16.00 WIB hingga menjelang Magrib dengan berkeliling dari satu rumah ke rumah lain dalam jangka waktu sekitar satu tahun.

Masih dalam wawancara yang sama, saat penulis menanyakan kepada Kevin tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberian infak bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad tersebut, Kevin menjelaskan bahwa tidak semua warga memberikan infak secara rutin saat penarikan infak dilaksanakan. Ada warga yang setiap penarikan memberikan infak dan ada pula warga yang tidak secara rutin berinfak. Menurut Kevin, hal tersebut terjadi di antaranya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang berbeda dari masing-masing warga.

⁵¹Hasil wawancara dengan Kevin pada tanggal 19 Agustus 2017.

Pada saat penulis menanyakan terkait tanggapan warga saat remaja yang secara rutin pada tiap minggunya menarik infak, menurut penjelasan Kevin saat itu tidak ada warga yang menanyakan mengenai hal tersebut. Hal itu dikarenakan pihak RT telah mensosialisasikan ataupun menyampaikannya kepada warga bahwa berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, panitia pembangunan akan menarik infak dari masyarakat melalui kotak infak yang diedarkan oleh remaja satu minggu sekali. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan pihak RT kepada warganya masing-masing, pada saat pihak remaja menarik infak kepada masyarakat, masyarakat telah mengetahui dan dapat memahami hal tersebut.

Dalam wawancara tersebut, Kevin pun menyampaikan bahwa setelah remaja selesai berkeliling untuk menarik dari satu rumah ke rumah yang lain, pihak remaja menyampaikan kotak infak tersebut kepada panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana saat itu Ustaz Johar yang bertugas menerimanya. Adapun pembukaan kotak infak dan penghitungan uang yang ada di dalamnya dilakukan oleh panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, yakni dalam kurun waktu satu bulan sekali. Sesuai dengan hasil musyawarah panitia, maka 10% dari pendapatan dari penarikan infak warga selama satu bulan yang dilakukan oleh remaja diberikan kepada remaja. Namun, berdasarkan penuturan Kevin selaku perwakilan remaja bahwa hak mereka sebesar 10% dari jumlah penerimaan infak selama satu bulan tersebut jarang diterimakan oleh remaja (hanya pernah diterima remaja pada awal-awal penarikan dan itupun hanya satu atau dua kali) dan uang tersebut justru dikembalikan lagi kepada pihak panitia pembangunan sebagai infak dari remaja.

Dari penjelasan Suroso⁵² selaku panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad sekaligus Ketua RT 03 RW 15 diperoleh informasi bahwa secara rutin panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad khususnya ketua, sekretaris, dan bendahara selalu berkoordinasi terkait pengumpulan dana dari masyarakat, yakni pemasukan dari para donatur dan hal tersebut dilaporkan pada saat pertemuan panitia yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan sekali. Adapun setiap pemasukan atau infak yang masuk ke panitia pembangunan, oleh bendahara selalu dicatat, baik nominal maupun sumber infak tersebut dan hal tersebut disampaikan kepada panitia yang lain sebagai perwakilan warga dari tiap RT di lingkungan RW 15 di mana perwakilan RT tersebut berkewajiban menyampaikan kepada warganya terkait keuangan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pudjiarto⁵³ bahwa kala itu pengurus RW 15 berupaya semaksimal mungkin untuk membantu pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, bahkan sebagian besar pengurus RW 15 juga merupakan panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Saat pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad berlangsung, pada pertemuan pengurus RW 15 disediakan waktu khusus untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad terutama dalam hal pendanaan. Setiap ketua ataupun pengurus RT di wilayah RW 15, yakni RT 1 yang diketuai oleh Budi, RT 2 diketuai oleh Warsito dan RT 3 oleh Suroso, kepada masing-masing ketua RT tersebut dimintai bantuan untuk menyampaikan kepada warganya khususnya pada saat pertemuan RT untuk memberikan dukungan secara penuh dalam

⁵²Hasil wawancara dengan Suroso pada tanggal 12 Agustus 2017.

⁵³Hasil wawancara dengan Pudjiarto pada tanggal 15 Agustus 2017.

pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad khususnya dalam hal pendanaan.

Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, hal tersebut dilaksanakan oleh ketua panitia dengan didampingi panitia lain, seperti sekretaris dan bendahara, termasuk tokoh masyarakat sekitar, perwakilan pengurus TPQ Al-Ittihad, pihak RW dan beberapa perwakilan masyarakat dengan mendatangi kediaman pemilik tanah (Warsiti) untuk melakukan pembayaran tanah tersebut. Dengan banyaknya perwakilan masyarakat yang ikut menyaksikan pembayaran tanah, menurut penuturan Suroso diharapkan dapat membangun keterbukaan dan rasa saling percaya antarsesama serta tidak ada rasa curiga antara yang satu dengan yang lain.

Masih dalam wawancara yang sama, Suroso menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad ibu-ibu PKK yang juga sebagian merupakan anggota pengajian muslimat di wilayah RW 15 pun turut berpartisipasi, selain sebagai penyambung lidah panitia terkait dengan kebutuhan dana dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad kepada masyarakat, para ibu di sini juga memberikan bantuan dalam bentuk penyediaan konsumsi. Hal tersebut dilakukan dengan mengadakan musyawarah oleh para pengurus PKK di lingkungan RW 15 terkait kebutuhan konsumsi bagi para pekerja ataupun orang-orang yang turut secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Dari musyawarah tersebut disepakati bahwa ibu-ibu di wilayah RW 15 dimintai bantuan untuk memberikan konsumsi bagi para pekerja pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dengan ketentuan bahwa RT 1 mendapatkan jatah hari Senin dan Selasa, RT 2 hari Rabu dan Kamis, dan RT 3 hari Jum'at dan Sabtu. Adapun jika hari Minggu ada kegiatan

pembangunan gedung TPQ, maka konsumsi pada hari tersebut menjadi tanggung jawab ibu-ibu PKK di tingkat RW. Adapun teknis pembagian tugas pengadaan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada pengurus PKK tingkat RT masing-masing.

Dari keterangan Suroso dalam wawancara tersebut berkaitan dengan pengumpulan dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad terdapat sumber pembiayaan lain, yakni berasal dari Jama'ah Tahlil RW 15 Kegiatan tersebut dilaksanakan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain di wilayah RW 15 pada hari Kamis malam setelah salat 'Isya. Pada saat itu, TPQ sedang membutuhkan dana untuk kebutuhan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dan berdasarkan hasil musyawarah Jama'ah Tahlil tersebut, sebagian kas anggota Jama'ah Tahlil, yakni sekitar Rp 500.000 disumbangkan untuk kepentingan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Adapun terkait dengan kotak infak yang diletakkan di beberapa tempat sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Johar, penulis menanyakan hal tersebut kepada Suroso tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh panitia hingga peletakkan kotak infak tersebut mendapat ijin dari pemilik usaha dan tanggapan yang disampaikan oleh Suroso mengenai hal tersebut, yakni di antaranya disebabkan karena relasi, seperti Warung Dawet Selatan Moro, salah satu warung di terminal Purwokerto, dan Warung Makan Sederhana Teluk di mana terdapat panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang telah mengenal dengan baik pemilik usaha tersebut, termasuk di antaranya adalah Toko Kitab Pahala yang menjadi tempat pembelian buku atau materi pelajaran bagi kegiatan pembelajaran di TPQ Al-Ittihad.

Masih dalam wawancara yang sama, Suroso pun menjelaskan bahwa selain karena telah mengenal pemilik usaha tersebut, panitia ataupun pihak TPQ Al-Ittihad khususnya juga

berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Pada saat penitipan ataupun peletakkan kotak infak tersebut, panitia pun menyampaikan maksud dan tujuannya, yakni TPQ Al-Ittihad sedang memerlukan dana bagi pembangunan gedung TPQ dan panitia pun meminta bantuan kepada yang bersangkutan untuk turut berpartisipasi dalam penggalangan dana dengan memberikan ijin kepada panitia untuk meletakkan atau menitipkan kotak infak tersebut di tempat usaha yang mereka miliki. Mereka pun memahami dan mengizinkan panitia untuk meletakkan kotak infak pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di toko atau tempat usaha mereka. Adapun pengambilan uang infak tersebut dilaksanakan rata-rata selama enam bulan sekali.

Salah satu pengurus TPQ Al-Ittihad sekaligus sebagai Ketua PKK RW 15, yaitu Eni Setyaningsih⁵⁴ terkait dengan pengadaan dana untuk pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad menyampaikan bahwa dana ataupun uang yang digunakan untuk pembelian tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad seluas 25 ubin dengan total biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp 87.500.000, dana tersebut semuanya berasal dari warga di lingkungan RW 15 di mana panitia diberi tenggang waktu selama satu tahun untuk pembayaran tanah tersebut. Menurut Eni Setyaningsih, hal tersebut dapat menjadi salah satu bukti tingginya partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan khususnya bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

⁵⁴Hasil wawancara dengan Eni Setyaningsih pada tanggal 15 Agustus 2017.

3) Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Kegiatan Terprogram dan Partisipatif TPQ Al-Ittihad

Adapun terkait dengan pelaksanaan pembiayaan bagi kegiatan terprogram dan kegiatan partisipatif di TPQ Al-Ittihad, berdasarkan penjelasan Darni Kartiono⁵⁵ diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pembiayaan bagi kegiatan terprogram dan partisipatif di TPQ Al-Ittihad, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk pelaksanaan pembiayaan kegiatan terprogram, yakni kegiatan *haflah ākhir as-sanah* di mana panitia dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai elemen masyarakat, baik pihak RT, RW, muslimat, pengurus dan ustazah TPQ hingga remaja di lingkungan RW 15, maka sudah jelas bahwa pelaksanaan pembiayaan ataupun penggunaan anggarannya tentu dilakukan oleh masyarakat yang terbentuk dalam susunan kepanitiaan tersebut sehingga partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan atau penggunaan pembiayaan kegiatan terprogram ini dapat dikatakan aktif. Masyarakatlah yang mengelola dan menggunakan dana kegiatan *haflah ākhir as-sanah* tersebut secara langsung.

Teknis pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut berdasarkan penjelasan Darni Kartiono bahwa dana yang telah terkumpul dari masyarakat maupun wali santri dilaporkan kepada seluruh panitia pada saat rapat. Kemudian, dana yang ada didistribusikan oleh bendahara panitia kegiatan kepada masing-masing seksi untuk dipergunakan seefektif mungkin sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan setiap anggaran yang digunakan harus dicatat serta terdapat bukti pembeliannya untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran. Kemudian, panitia bekerja sesuai tugas masing-masing dengan menggunakan sumber dana yang ada, baik untuk konsumsi, dekorasi, dan sebagainya.

⁵⁵Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 10 Agustus 2017.

Dalam wawancara yang sama, Darni Kartiono menyampaikan bahwa banyak pula masyarakat yang memberikan bantuan bukan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk tenaga seperti dengan kerja bakti untuk membersihkan dan menyiapkan lokasi acara *haflah ākhir as-sanah* dan biasanya hal tersebut dilakukan oleh bapak-bapak. Bantuan dalam bentuk lain juga diberikan oleh masyarakat, di antaranya oleh remaja, yakni dengan menjaga keamanan serta membantu parkir kendaraan para tamu yang hadir dalam acara *haflah ākhir as-sanah* tersebut termasuk pada saat pembuatan dekorasi panggung, remaja turut terlibat aktif di dalamnya. Ada pula bantuan dari pihak ibu-ibu dalam bentuk pemberian tumpeng, bahkan tidak hanya satu tumpeng, tapi bisa mencapai tiga hingga empat tumpeng.

Bantuan berupa tumpeng yang diberikan oleh pihak ibu-ibu yang jumlahnya mencapai tiga hingga empat tumpeng, menurut penuturan Darni Kartiono bahwa santri yang mengaji di TPQ Al-Ittihad tidak hanya berasal dari lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk saja, namun juga banyak santri yang berasal dari luar wilayah RW 15. Adapun sumbangan tumpeng pada acara *haflah ākhir as-sanah* tersebut berasal dari para wali santri dalam suatu grumbul atau wilayah, seperti wali santri dari Grumbul Krewed, Grumbul Tasari, Grumbul Karang Bawang hingga wali santri di lingkungan RW 15 sendiri sehingga tidak mengherankan jika tumpeng yang terkumpul tidak hanya satu, namun hingga empat tumpeng dan dana untuk pembuatan tumpeng tersebut pun berasal dari wali santri pada masing-masing grumbul tersebut. Adapun tumpeng-tumpeng tersebut dimakan bersama oleh para santri, baik yang khataman maupun tidak serta panitia.

Pada saat penulis menanyakan kepada Darni Kartiono terkait bantuan tumpeng tersebut, apakah hal tersebut merupakan permintaan TPQ Al-Ittihad ataukah sukarela atau inisiatif para wali

santri, Darni Kartiono menyampaikan penjelasannya bahwa pihak TPQ Al-Ittihad tidak pernah meminta para wali santri untuk membuatkan tumpeng pada acara *haflah ākhir as-sanah* tersebut. Para wali santri menyumbangkan tumpeng tersebut atas kesadaran dan inisiatif mereka sendiri.

Adapun peran ustazah pada pelaksanaan pembiayaan bagi kegiatan *haflah ākhir as-sanah* ini tidaklah terlalu signifikan, karena para ustazah tidak dilibatkan secara langsung dalam pembelanjaan dan penggunaan dana yang ada. Para ustazah memiliki tugas khusus, yakni membimbing dan melatih para santri yang akan mengikuti khataman maupun santri yang akan tampil untuk mengisi acara atau pentas pada kegiatan tersebut. Namun, jika terdapat wali santri yang akan memberikan bantuan bagi kegiatan *haflah ākhir as-sanah* melalui para ustazah, mereka pun siap menerima dan mencatatnya yang kemudian bantuan tersebut diserahkan kepada pengurus TPQ ataupun panitia kegiatan.⁵⁶

Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan bagi kegiatan partisipatif, yakni keikutsertaan dalam pawai ta'aruf yang diadakan oleh Pondok Pesantren Anwarushsholihin Pamujan Teluk, menurut penuturan Darni Kartiono⁵⁷ bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan partisipatif ini tidaklah seaktif partisipasi dalam kegiatan *haflah ākhir as-sanah*. Partisipasi masyarakat khususnya wali santri dalam pembiayaan kegiatan pawai ta'aruf ini lebih banyak pada tahap perencanaan, yakni dengan memberikan kesepakatan untuk mengikuti kegiatan tersebut beserta kebutuhan anggaran yang ada di dalamnya serta dengan penentuan sumber pembiayaannya yakni cukup dari pengurus TPQ dan wali santri.

⁵⁶Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 10 Agustus 2017.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 10 Agustus 2017.

Adapun penggunaan ataupun pelaksanaan pembiayaan bagi kegiatan partisipatif tersebut, berdasarkan penjelasan Darni Kartiono dalam wawancara yang sama bahwa wali santri cenderung tidak berperan secara aktif karena kebutuhan-kebutuhan bagi pelaksanaan pawai tersebut, baik biaya konsumsi maupun perlengkapan pawainya dibelanjakan oleh pihak TPQ Al-Ittihad (pengurus dan ustazah) dan hal tersebut merupakan hasil musyawarah antara wali santri serta pengurus TPQ Al-Ittihad, sehingga wali santri pada kegiatan pawai ta'aruf ini lebih banyak berperan sebagai sumber pembiayaan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam perencanaan kegiatan terprogram dan partisipatif bahwa terdapat hal yang sudah menjadi kebiasaan TPQ Al-Ittihad dan hal tersebut merupakan kegiatan rutin tiap tahun, yakni pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ustaz dan ustazah serta pendamping di mana pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan menarik dana dari wali santri dan masyarakat sekitar. Bagi wali santri, dana THR tersebut diserahkan kepada pihak TPQ Al-Ittihad pada saat pertemuan rutin menjelang hari raya, yakni ada wali santri yang langsung memberikan uang tersebut pada saat pertemuan dan ada pula wali santri yang memberikannya di luar hari pertemuan tersebut sebelum tiba hari raya serta tidak ada paksaan dan ketentuan terkait jumlah minimal yang harus diberikan oleh wali santri.⁵⁸

Adapun penarikan dana untuk THR ustaz dan ustazah serta pendamping dari masyarakat sekitar dilakukan oleh Darni Kartiono⁵⁹ selaku bendahara TPQ Al-Ittihad pada tiap selesai salat

⁵⁸Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 10 Agustus 2017.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 9 Agustus 2017. Pada saat penulis meminta penjelasan kepada Darni Kartiono terkait bagaimana masyarakat selain wali santri mengetahui dan mau untuk menyumbang dana bagi THR ustaz dan ustazah serta pendamping, Darni Kartiono memberikan penjelasan bahwa bagi wali santri perlu disosialisasikan terlebih dahulu melalui pertemuan wali santri, maka bagi masyarakat khususnya jama'ah Masjid Al-Ittihad hal tersebut cukup disampaikan dengan lisan secara personal dan memang itu sudah

tarawih. Dari penjelasan Darni Kartiono bahwa beliau selalu membawa catatan pada setiap salat tarawih untuk mencatat dana yang masuk bagi pemberian THR ustaz dan ustazah serta pendamping yang berasal dari jama'ah Masjid Al-Ittihad. Tidak jarang juga pengurus TPQ Al-Ittihad khususnya Darni Kartiono mendatangi satu rumah ke rumah yang lain untuk mengambil donasi atau bantuan dari warga sekitar. Adapun nominal THR yang diterima masing-masing ustazah sebesar Rp 500.000. Kemudian untuk pendamping masing-masing Rp 400.000 dan untuk penasihat sekaligus ustaz TPQ Al-Ittihad mencapai Rp 600.000. Dengan jumlah ustazah sebanyak empat orang, pendamping dua orang, dan penasihat satu orang, maka dana yang dikeluarkan untuk pembayaran THR ustaz dan ustazah serta pendamping sebesar Rp 3.400.000.

Selain dalam bentuk uang, ustaz dan ustazah serta pendamping pun pada saat menjelang hari raya mendapatkan bingkisan dari salah satu pihak swasta, yakni Toko Hanggar (depan SMP N 7 Purwokerto) di mana secara rutin tiap tahunnya pemilik toko tersebut menyumbangkan parcel lebaran untuk ustaz dan ustazah serta pendamping. Awal mula hal tersebut terjadi dimulai dari adanya surat permohonan pihak TPQ Al-Ittihad yang bermaksud meminta bingkisan lebaran kepada Toko Hanggar dan Toko Hanggar pun mengabulkan permohonan tersebut yakni dengan menyumbangkan bingkisan lebaran kepada ustaz dan ustazah dan hingga saat ini pun hal tersebut masih berjalan dengan lancar bahkan sudah tidak perlu menggunakan surat permohonan lagi karena sudah menjadi rutinitas tiap tahunnya.⁶⁰

menjadi kebiasaan tiap tahunnya sehingga warga pun sudah mengetahuinya tanpa harus disosialisasikan sebagaimana kepada wali santri.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 9 Agustus 2017.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad

1) Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembiayaan Operasional TPQ Al-Ittihad

Setelah adanya perencanaan dan pelaksanaan ataupun penggunaan anggaran pembiayaan bagi kegiatan operasional TPQ Al-Ittihad, baik untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping maupun pembelian kebutuhan pembelajaran, seperti ATK melalui infak santri, langkah selanjutnya yang dilakukan pihak TPQ Al-Ittihad ialah melakukan evaluasi terhadap penggunaan pembiayaan tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat khususnya wali santri.

Pertama, evaluasi terhadap pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping TPQ Al-Ittihad. Dari hasil wawancara dengan Ustazah Roso⁶¹ terkait dengan evaluasi pembiayaan kegiatan operasional TPQ Al-Ittihad khususnya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, beliau menjelaskan bahwa bentuk evaluasi yang dilakukan adalah melalui pelaporan keuangan TPQ Al-Ittihad yang disampaikan kepada wali santri pada saat pertemuan wali santri tiap bulannya. Laporan keuangan tersebut disampaikan oleh bendahara TPQ Al-Ittihad atau yang mewakili di mana sebelumnya laporan tersebut telah dimusyawarahkan ataupun disampaikan terlebih dahulu oleh masing-masing wali kelas kepada pengurus pada pertemuan pengurus dan ustazah, yakni pada tanggal tiga tiap bulannya.

Adapun pelaporan yang dilakukan oleh tiap wali kelas kepada pengurus saat pertemuan pengurus mencakup pemasukan yang bersumber dari SPP santri pada masing-masing kelas di mana hal itu terjadi ketika ada wali santri yang tidak hadir saat pertemuan wali santri yang kemudian SPP tersebut dibayarkan

⁶¹Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017.

melalui putra atau putri mereka pada saat kegiatan pembelajaran. Koordinator ustazah (Ustazah Roso) juga melaporkan pemasukan lain selain dari wali santri, seperti sebagian pengurus, pengurus RW, maupun pemasukan dari masyarakat sekitar TPQ Al-Ittihad. Kemudian, laporan dari masing-masing wali santri tersebut diterima oleh bendahara TPQ. Bendahara TPQ mencatat laporan tersebut dan menerima uang yang diberikan dari masing-masing wali kelas untuk dikelola bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping.

Dalam penuturannya, Ustazah Roso juga menyampaikan bahwa Bendahara TPQ bertugas melaporkan pemasukan dan pengeluaran ataupun penggunaan dana tersebut, yakni bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Adapun ketika bendahara TPQ berhalangan hadir, maka laporan keuangan tersebut disampaikan oleh pengurus yang lain.

Ustazah Roso juga menyampaikan:⁶²

Kami berusaha membangun dan menjaga kepercayaan wali santri terhadap TPQ terlebih pada hal pengelolaan keuangan. Harapan kami dari pihak TPQ, semoga dengan adanya upaya tersebut akan muncul rasa saling percaya dan memiliki TPQ di antara kami, sehingga pada saat TPQ memerlukan bantuan wali santri khususnya pada pembiayaan, ada rasa saling keterbukaan dan kepercayaan serta para wali santri juga tidak merasa enggan untuk membantu dan menyokong bagi pembiayaan TPQ Al-Ittihad.

Masih dalam wawancara yang sama, Ustazah Roso menjelaskan bahwa tujuan pihak TPQ melaporkan keuangan khususnya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping kepada wali santri adalah agar timbul kepercayaan wali santri terhadap pihak TPQ dan adanya transparansi penggunaan dana yang berasal dari masyarakat khususnya wali

⁶²Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017.

santri. Selain itu, juga sebagai media evaluasi bersama dan wali santri diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan kritikan ataupun saran bagi pengelolaan keuangan TPQ.

Selanjutnya, sebagai contoh bentuk usulan dari wali santri yakni terdapat wali santri yang memberikan tanggapan ataupun masukan bahwa bagi wali santri yang cenderung tidak membayar SPP secara rutin, artinya kadang membayar dan kadang pula tidak, sebaiknya pihak TPQ tidak bosan untuk mengingatkannya melalui santri bahwa sudah saatnya membayar SPP sehingga kebutuhan dana untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping dapat tercukupi. Jika memang wali santri tidak membayar karena alasan kondisi keuangan yang bersangkutan tidak memungkinkan, sebaiknya hal tersebut disampaikan secara terus terang kepada pihak TPQ melalui hubungan personal artinya tidak di muka umum, sehingga melalui hal tersebut bisa dilakukan subsidi silang oleh wali santri lain yang dirasa memiliki kelebihan dalam hal keuangan. Bahkan terdapat wali santri yang mengusulkan adanya kenaikan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping secara berkala.⁶³

IAIN PURWOKERTO

⁶³Terkait dengan usulan dari wali santri dengan adanya subsidi silang, Ustazah Roso menjelaskan bahwa pada saat pertemuan tersebut diperoleh adanya kesepakatan bersama antara pihak TPQ Al-Ittihad dengan wali santri bahwa wali santri yang lain pun sepakat dan pihak TPQ Al-Ittihad juga meminta keikhlasan bagi wali santri yang membayar SPP lebih untuk membantu santri lain yang tidak membayar karena memang alasan ekonomi. Adapun usulan wali santri terkait dengan kenaikan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping secara berkala hal tersebut masih sebatas wacana dan belum ada keputusan mengenai hal tersebut. Namun, bendahara TPQ Al-Ittihad pernah menyampaikan dalam wawancara pada tanggal 9 Agustus 2017 bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan ustaz dan ustazah serta pendamping kaitannya dengan kenaikan *bisyārah* secara rutin hal tersebut belum mampu dilakukan oleh pengurus TPQ Al-Ittihad. Adapun hal yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan terus menaikkan pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) ustaz dan ustazah serta pendamping di mana hingga sampai saat ini nominal THR yang bisa diterimakan oleh masing-masing ustaz dan ustazah serta pendamping mencapai tiga hingga empat kali penerimaan *bisyārah* dan hal tersebut menurut Darni Kartiono selaku bendahara TPQ akan terus-menerus diupayakan dapat meningkat setiap tahunnya.

Berikut penjelasan Ustazah Roso⁶⁴ terkait dengan adanya wali santri yang tidak membayar SPP secara rutin dan juga penanganannya, sebagai berikut:

Pada pertemuan pengurus dan ustaz dan ustazah, segala masukan dan saran dari pihak wali santri kami musyawarahkan bersama dan hasil musyawarah tersebut pun kami sampaikan kepada wali santri pada pertemuan selanjutnya, seperti wacana subsidi silang SPP bagi santri yang tidak lancar dalam pembayaran SPP dan setelah ditelusuri memang hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi keuangan keluarga yang bersangkutan dan pihak TPQ meminta jangan sampai santri tersebut berhenti mengaji karena tidak membayar SPP secara rutin, tetaplah mengaji. *Alhamdulillah* terdapat wali santri yang membayar SPP lebih dari yang seharusnya di mana kelebihan tersebut bisa digunakan untuk membantu dan menutup kekurangan bagi santri yang tidak membayar SPP dengan lancar karena memang kondisi keuangan keluarga yang tentunya meminta keikhlasan yang bersangkutan. Kemudian, berkaitan dengan penambahan *bisyārah* ustaz dan ustazah secara berkala misal pada tiap tahun, hal tersebut masih dalam wacana karena tentunya dengan melihat kondisi keuangan TPQ.

Dalam wawancara yang sama, Ustazah Roso menambahkan bahwa pihak TPQ Al-Ittihad ingin membangun kepercayaan masyarakat khususnya wali santri melalui pengelolaan keuangan TPQ yang transparan, tidak hanya terhadap wali santri namun juga antarustaz dan ustazah dan pengurus TPQ. Melalui hal tersebut diharapkan akan muncul dan terbangun kepercayaan masyarakat terhadap TPQ Al-Ittihad yang dampaknya mudah-mudahan wali santri dengan ikhlas dan senang hati mau untuk berpartisipasi secara aktif dalam membangun dan mengembangkan TPQ Al-Ittihad khususnya dalam hal penguatan bagi pembiayaan.

Darni Kartiono⁶⁵ selaku bendahara TPQ Al-Ittihad memberikan penguatan terkait dengan adanya wali santri yang

⁶⁴Hasil wawancara dengan Ustazah Roso pada tanggal 7 Agustus 2017.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 9 Agustus 2017.

tidak membayar SPP secara rutin di mana beliau menyampaikan bahwa saat pertemuan wali santri, pihak TPQ Al-Ittihad hanya menyampaikan laporan keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran TPQ khususnya bagi *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Bagi wali santri yang tidak membayar secara rutin, hal tersebut tidak disebutkan secara terang-terangan hanya prosentasenya saja. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak TPQ Al-Ittihad untuk mengatasi permasalahan para wali santri yang tidak membayar SPP secara rutin adalah melalui pendekatan personal, yakni dengan berkomunikasi kepada pihak yang bersangkutan. Pihak TPQ di antaranya menanyakan tentang alasan wali santri tidak membayar SPP dan pengurus pun tidak memaksanya harus membayar jika memang keadaan tidak memungkinkan, bahkan hal yang terpenting adalah agar putra atau putri mereka tetap mau mengaji.

Kedua, evaluasi terhadap pembiayaan ATK bagi kegiatan pembelajaran melalui infak santri. Adapun pola yang dibangun dalam evaluasi pembiayaan ATK melalui infak santri ini cenderung memiliki pola yang sama dengan evaluasi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, yakni tiap ustazah melaporkan pemasukan dan pengeluaran infak santri tersebut melalui catatan infak kepada pengurus ketika pertemuan pengurus pada tanggal tiga tiap bulannya. Kemudian, pengurus melaporkan kondisi keuangan infak santri tiap kelas kepada wali santri pada saat pertemuan wali santri pada tanggal empat tiap bulannya dan tujuan yang diharapkan dengan adanya pelaporan tersebut, yakni untuk membangun keterbukaan antara pihak masyarakat khususnya wali santri dengan pihak TPQ. Dari adanya keterbukaan tersebut akan timbul kepercayaan. Dengan kepercayaan inilah diharapkan akan terbangun kekuatan yang dapat dihimpun untuk memajukan

dan meningkatkan kualitas TPQ di antaranya kuatnya pembiayaan TPQ Al-Ittihad.⁶⁶

Masih dalam wawancara yang sama, Darni Kartiono menambahkan bahwa sebagai bentuk kegiatan evaluasi khususnya terhadap pembiayaan bagi kebutuhan operasional termasuk pembelian ATK untuk kebutuhan pembelajaran santri, maka pada tanggal tiga tiap bulannya diadakan rapat pengurus dan ustaz dan ustazah serta pendamping yang bertujuan untuk membahas pemasukan dan pengeluaran TPQ Al-Ittihad. Kemudian, pada tanggal empat tiap bulannya diadakan pertemuan wali santri dengan menggunakan surat undangan yang telah dibagikan sebelumnya beserta kartu SPP kepada para santri agar disampaikan kepada orang tua atau walinya yang kemudian pada tanggal empat, yakni saat pertemuan wali santri mereka membayar SPP tersebut.

Dari penuturan Darni Kartiono bahwa pada kegiatan pertemuan wali santri ini pihak TPQ melaporkan kepada wali santri terkait dengan pengeluaran dan pemasukan pembiayaan operasional TPQ, termasuk pembelian ATK bagi kebutuhan pembelajaran santri. Dengan adanya pelaporan terhadap pemasukan maupun pengeluaran pada pembiayaan TPQ diharapkan akan muncul dan terbangun keterbukaan antara masyarakat khususnya wali santri dengan pihak TPQ. Dari kepercayaan inilah akan terbangun kekuatan yang dapat dihimpun untuk memajukan dan meningkatkan kualitas TPQ, termasuk bagi penguatan pembiayaan pendidikan.

Adapun terkait dengan pertemuan atau rapat pengurus dan ustaz dan ustazah serta pendamping pada tanggal tiga tiap bulannya, penulis berkesempatan dan diijinkan untuk mengikuti pertemuan tersebut dalam rangka observasi sekaligus memperkenalkan diri kepada pengurus dan ustaz dan ustazah

⁶⁶Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 9 Agustus 2017.

tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2017. Pertemuan antara pengurus dan ustaz dan ustazah serta pendamping tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Ittihad yang lokasinya berdekatan dengan gedung TPQ Al-Ittihad. Pertemuan yang dilaksanakan pada pukul 19.45 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB tersebut diawali dengan pembukaan oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Penasihat TPQ Al-Ittihad. Setelah itu dilanjutkan dengan laporan-laporan, yakni laporan dari tiap wali kelas dan laporan bendahara TPQ. Lalu, acara dilanjutkan dengan lain-lain (sesi diskusi) khususnya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan keuangan TPQ dan diakhiri dengan penutup.

Pada kesempatan tersebut penulis menyaksikan dan mendengarkan dengan seksama proses musyawarah mulai dari tahap pembukaan hingga penutupan rapat. Penulis juga diberi kesempatan untuk berbicara dan hal itu penulis manfaatkan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud serta tujuan penulis, yakni untuk belajar kepada TPQ Al-Ittihad terkait dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Adapun respon yang diberikan oleh pihak pengurus dan para ustaz dan ustazah saat itu sangatlah menggembirakan, yakni mereka dengan senang hati siap membantu terkait data ataupun hal-hal yang dibutuhkan penulis untuk kepentingan penelitian, bahkan penasihat TPQ Al-Ittihad saat itu menyarankan sekaligus menginstruksikan kepada para pengurus dan ustazah agar ketika penulis membutuhkan bantuan ataupun data yang diperlukan dalam penelitian, pengurus dan para ustazah diminta kooperatif dan dapat membantu dengan sebaik mungkin.

Pada rapat tersebut khususnya berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, setiap wali kelas melaporkan kondisi keuangan dalam hal ini ialah penerimaan SPP dari para santri. Kemudian, laporan tersebut dicatat dan direkapitulasi oleh koordinator ustazah untuk

disampaikan kepada bendahara TPQ (Darni Kartiono). Kemudian, laporan tersebut ditanggapi oleh pengurus terutama Kepala TPQ Al-Ittihad, seperti adanya santri yang jarang membayar SPP dan sebagainya. Salah satu hal yang menarik dalam pertemuan tersebut ialah adanya siraman rohani yang disampaikan oleh penasihat TPQ Al-Ittihad (Abdul Hamid) di mana dalam ceramah yang disampaikan beliau menekankan perlu adanya kesamaan pemahaman dan niat yang tulus dari para ustazah dalam mendidik para santri. Jangan melihat dari *bisyārah* yang diperoleh tiap bulan oleh para ustazah dan pendamping, namun justru nilai ibadah dari mendidik para santri itulah yang patut disyukuri terlebih dalam pengajaran Al-Qur'an.

Hal lain yang disampaikan dalam ceramah tersebut ialah kaitannya dengan pembiayaan TPQ bahwa perlu adanya strategi untuk senantiasa menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada dapat terpenuhi demi menunjang lancarnya kegiatan pembelajaran. Dalam siraman rohani tersebut juga disampaikan agar para ustazah dan pengurus untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan semangat untuk selalu membangun dan memajukan TPQ sebagai bagian dari berjihad di jalan Allah.

Pada pertemuan tersebut, bendahara TPQ juga melaporkan kondisi keuangan TPQ termasuk laporan pemasukan SPP dari para ustazah serta pengeluaran untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Pada pertemuan tersebut Darni Kartiono juga menindaklanjuti dan menguatkan hasil rapat sebelumnya terkait kesepakatan yang diambil bersama dengan wali santri sebagai hasil dari musyawarah bahwa penarikan uang pendaftaran hanya diberlakukan bagi santri baru. Adapun santri-santri lama tidak diberlakukan biaya untuk pendaftaran ulang.

2) Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembiayaan Pembangunan Gedung TPQ Al-Ittihad

Evaluasi pembiayaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, dari hasil wawancara dengan Suroso⁶⁷ beliau menyampaikan bahwa setelah tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad terbeli, seluruh panitia dikumpulkan dan ketua panitia meminta kepada bendahara untuk menyampaikan kepada panitia yang hadir dalam pertemuan tersebut tentang laporan secara rinci terkait dana yang terkumpul beserta sumber dana tersebut dan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian tanah tersebut. Kemudian, salah satu panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang juga menjabat sebagai Ketua RW 15 mengamanatkan langsung kepada panitia lain khususnya para ketua RT ataupun pengurus RT di lingkungan RW 15 yang hadir pada saat itu supaya mereka menyampaikan laporan keuangan pengadaan ataupun pembelian tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad kepada warganya masing-masing pada saat pertemuan RT. Menurut Suroso, hal tersebut dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pihak TPQ dan khususnya kepada panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Hal tersebut juga diperkuat dengan penjelasan Pudjiarto⁶⁸ yang saat itu menjadi pengurus RW dan saat ini sebagai Ketua RW 15 sekaligus panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang menyampaikan bahwa panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad khususnya yang juga menjabat sebagai pengurus di lingkungan RT masing-masing agar menyampaikan laporan keuangan kepada warganya, baik pemasukan maupun pengeluaran biaya pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang informasi tersebut diperoleh pada saat pertemuan panitia pembangunan gedung TPQ

⁶⁷Hasil wawancara dengan Suroso pada tanggal 12 Agustus 2017.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Pudjiarto pada tanggal 15 Agustus 2017.

Al-Ittihad. Masyarakat berhak mengetahui hal tersebut di mana uang atau dana tersebut juga berasal dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat pula. Untuk menjaga rasa saling percaya dan keterbukaan antarsesama, maka setiap rupiah yang masuk dan digunakan untuk kebutuhan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad harus disampaikan kepada masyarakat sebagai sumber pembiayaan. Masyarakat pun berhak memberikan masukan, saran, bahkan kritikan kepada panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Hal ini bertujuan agar panitia mengetahui apa yang menjadi harapan, saran ataupun kritik dari masyarakat terhadap pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Dengan terbangunnya rasa saling percaya tersebut diharapkan masyarakat sebagai sumber pembiayaan dapat merasa puas dan percaya sepenuhnya kepada panitia dengan adanya laporan yang jelas dan transparan. Dengan demikian, masyarakat tidak akan merasa ragu ketika akan menyumbang dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad pada tahap selanjutnya dan hal tersebut menurut Suroso mudah-mudahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pengelolaan pembiayaan TPQ Al-Ittihad.

Selanjutnya, berkaitan dengan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, Suroso⁶⁹ menyampaikan:

Secara umum, panitia berkumpul dan bermusyawarah untuk mengevaluasi jalannya pembangunan gedung TPQ termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Namun pada pertemuan pengurus RW, secara khusus terkait pembangunan gedung TPQ ini juga mendapat sesi tersendiri, karena sebagian pengurus RW yang juga merupakan pengurus RT adalah panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad termasuk dalam hal keuangan. Kemudian, hasil evaluasi ataupun pelaporan perkembangan pembangunan termasuk pengelolaan dana yang ada disampaikan kepada masyarakat oleh masing-masing Ketua RT pada saat pertemuan RT

⁶⁹Hasil wawancara dengan Suroso pada tanggal 12 Agustus 2017.

masing-masing. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui perkembangan pembangunan gedung TPQ tersebut termasuk dalam hal pengelolaan pembiayaannya dan masyarakat berhak memberikan masukan terhadap pembangunan gedung TPQ yang kemudian akan diteruskan dan disampaikan kepada panitia pembangunan yang lain khususnya pada saat pertemuan panitia yang waktunya kondisional.

Adapun terkait dengan evaluasi penarikan infak yang dilakukan oleh remaja, Kevin menyampaikan bahwa sepengetahuan remaja setiap pendapatan dari penarikan infak tersebut dilaporkan kepada panitia lain saat pertemuan panitia dan oleh masing-masing RT yang juga menjadi panitia pembangunan, hal tersebut disampaikan kepada warga di lingkungan RT masing-masing pada saat pertemuan RT, sehingga semua warga mengetahui jumlah pendapatan kotak infak tiap bulannya, termasuk dengan adanya potongan 10% untuk remaja walaupun akhirnya uang tersebut juga dimasukkan kembali ke dalam infak.

Dari penjelasan Kevin terkait antusias masyarakat dalam memberikan infak bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad diperoleh informasi bahwa antusias masyarakat cukup tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan di antaranya dari sebagian besar masyarakat yang berinfak bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Namun secara keseluruhan, lebih banyak masyarakat yang berinfak daripada yang tidak berinfak, karena memang saat itu kondisi ekonomi yang barangkali tidak memungkinkan. Adapun nominal atau jumlah infak yang diberikan oleh warga bermacam-macam, mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 10.000 bahkan lebih tiap kali penarikan infak.

3) Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembiayaan Kegiatan Terprogram dan Partisipatif TPQ Al-Ittihad

Dari hasil wawancara dengan Darni Kartiono⁷⁰ selaku bendahara TPQ Al-Ittihad berkaitan dengan evaluasi pembiayaan kegiatan terprogram (*haflah ākhir as-sanah*) dan kegiatan partisipatif (pawai ta'aruf), beliau menyampaikan bahwa untuk evaluasi kegiatan *haflah ākhir as-sanah* dilakukan setelah seluruh rangkaian acara selesai dilaksanakan sekaligus dengan pembubaran panitia. Pada pembubaran panitia inilah dilaksanakan evaluasi bersama, yakni masing-masing seksi menyampaikan hal-hal atau tugas yang telah dilaksanakan selama kegiatan, baik kendala yang dihadapi maupun berkaitan dengan penggunaan sumber dana. Bendahara kegiatan pun melaporkan semua catatan keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran pada kegiatan *haflah ākhir as-sanah* tersebut kepada seluruh panitia yang hadir sebagai perwakilan dari masyarakat dan panitia lain pun dipersilakan memberikan masukan dan tanggapan terhadap laporan bendahara tersebut. Sebagai penguat, penggunaan anggaran kegiatan *haflah ākhir as-sanah* harus dilengkapi dengan bukti atau nota pembelian. Kemudian acara pembubaran panitia tersebut ditutup dengan berjabat tangan untuk saling memaafkan antara panitia yang satu dengan yang lain.

Pada wawancara yang sama, Darni Kartiono menjelaskan bahwa laporan keuangan kegiatan *haflah ākhir as-sanah* tersebut juga disampaikan kepada wali santri pada saat pertemuan rutin wali santri dengan pengurus. Dalam pelaporan tersebut, pengurus TPQ Al-Ittihad menyampaikan semua pemasukan dan pengeluaran kegiatan *haflah ākhir as-sanah* termasuk saldo kegiatan tersebut. Berikut laporan keuangan kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad Tahun 2016, sebagai berikut:

⁷⁰Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 10 Agustus 2017.

Tabel 4.7.
Laporan Keuangan Kegiatan *Haflah ākhir as-sanah*
TPQ Al-Ittihad Tahun 2016⁷¹

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Ket.
		Masuk	Keluar	
1.	Infak wali santri khatmil qur'an	4.050.000	0	16 orang
2.	Infak wali santri	110.000	0	
3.	Infak pengurus	950.000	0	
4.	Infak warga RW 15	475.000	0	
5.	Infak kotak amal masjid	243.300	0	
6.	Honor Pembicara	0	500.000	
7.	Sewa <i>sound system</i>	0	500.000	
8.	Dekorasi panggung	0	410.000	
9.	Tambah daya listrik	0	150.000	
10.	Konsumsi pelaksanaan	0	2.597.500	
11.	Dokumentasi	0	200.000	
12.	Honor ustaz dan ustazah	0	900.000	
13.	Honor pelatih hadroh	0	150.000	
	Jumlah Total	5.828.300	5.407.500	
	Saldo	420.800		
Lain-lain				
1	Kursi dan Tarub			Pinjam RT
2	Panggung			Pinjam RT
3	Konsumsi penyiapan tempat			Pengurus TPQ

Selanjutnya, berkaitan dengan evaluasi pembiayaan kegiatan partisipatif (pawai ta'aruf), berdasarkan keterangan Darni Kartiono⁷² bahwa kegiatan pawai ta'aruf tersebut merupakan kegiatan yang dilombakan. Adapun pelaporan pemasukan dan pengeluaran bagi kegiatan tersebut dilaksanakan setelah kegiatan tersebut terlalui. Pihak TPQ Al-Ittihad melaporkan kepada wali santri tentang dana yang masuk dan dana yang telah digunakan,

⁷¹Hasil dokumentasi pada tanggal 20 Agustus 2017 tentang laporan keuangan kegiatan haflah akhirissanah TPQ Al-Ittihad Tahun 2016. Adapun uang saldo kegiatan sebesar Rp 420.800, berdasarkan kesepakatan panitia dan kerelaan wali santri khususnya bagi wali santri yang putra atau putrinya melaksanakan khatmil qur'an, uang tersebut digunakan untuk konsumsi pembubaran panitia.

⁷²Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 10 Agustus 2017.

karena wali santrilah sumber utama bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengurus TPQ Al-Ittihad juga menyampaikan hasil perlombaan di mana sudah menjadi langganan bahwa TPQ Al-Ittihad selalu mendapatkan juara pada pawai ta'aruf tersebut dan seringkali juara II yang didapatkan di mana hadiah yang diperoleh adalah piala dan uang pembinaan.

Adapun uang pembinaan tersebut berdasarkan penuturan Darni Kartiono disampaikan kepada wali santri dan hal itu dimusyawarahkan bersama antara pengurus dan wali santri hingga akhirnya diperoleh adanya kesepakatan bahwa uang hasil kejuaraan dimasukkan ke dalam kas TPQ yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan TPQ Al-Ittihad, seperti untuk menunjang kebutuhan pembelajaran dan sebagainya di mana saat itu uang yang diterimakan sejumlah Rp 750.000 dan uang tersebut disimpan TPQ untuk memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran TPQ, seperti pembelian bangku, papan tulis, etalase, alat hadroh, dan sebagainya. Pada intinya untuk menambah dan melengkapi sarana pembelajaran santri. Semua wali santri pun sepakat uang tersebut dijadikan tabungan untuk keperluan TPQ.

Darni Kartiono selaku bendahara TPQ Al-Ittihad juga menyampaikan laporan keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran pada kegiatan pawai ta'aruf tersebut, sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Laporan Keuangan Kegiatan Pawai Ta'aruf
Tahun 2017⁷³

No.	Rincian	Jumlah (Rp)		Ket.
		Masuk	Keluar	
1.	Infak wali santri	540000	0	
2.	Infak pengurus	600000	0	

⁷³Hasil dokumentasi pada tanggal 20 Agustus 2017 tentang laporan keuangan kegiatan pawai ta'aruf.

3.	Belanja perlengkapan pawai		140000
	Kertas emas	0	30000
	Lem	0	7000
	Double tape	0	11000
	Kertas manila	0	15000
	Kertas asturo	0	25000
	Tali plastik/ rafia	0	10000
	Benang kasur	0	5000
	Spidol warna	0	20000
	Bolpen	0	12000
	Penggaris	0	5000
4.	Konsumsi		1000000
	Makan peserta dan pendamping	0	750000
	Snack peserta dan pendamping	0	250000
	Air mineral	3 dus	Sumbangan wali santri
	Buah (Jeruk)	7 kg	Sumbangan wali santri
	Permen	5 bks.	Sumbangan wali santri
	JUMLAH TOTAL	1140000	1140000
	SALDO	0	

Adapun berkaitan dengan evaluasi pemberian THR bagi ustaz dan ustazah serta pendamping, menurut penuturan Darni Kartiono⁷⁴ bahwa evaluasi dilakukan dengan pelaporan kepada wali santri pada saat silaturahmi wali santri dan pihak TPQ Al-Ittihad terkait dengan jumlah dana yang terkumpul dan dana yang digunakan. Adapun kepada masyarakat sekitar pihak TPQ Al-Ittihad melaporkannya melalui pertemuan ibu-ibu PKK di tingkat RW beserta jama'ah Masjid Al-Ittihad.

⁷⁴Hasil wawancara dengan Darni Kartiono pada tanggal 10 Agustus 2017.

B. Pembahasan

Berikut ini merupakan hasil analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad yang meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

1. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad

Untuk mengawali analisis terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum bahwa perencanaan partisipatif dalam penyusunan suatu kegiatan atau program pendidikan harus dilakukan melalui tahapan analisis permasalahan, analisis potensi, hingga analisis kepentingan masyarakat. Ketiga tahapan dalam penyusunan perencanaan program pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di atas dapat ditemukan dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Berikut beberapa bukti yang dapat menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembiayaan pendidikan, TPQ Al-Ittihad melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya, antara lain:

Pertama, analisis permasalahan. Hal tersebut dapat dilihat di antaranya dari pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping di mana pihak TPQ Al-Ittihad membutuhkan dana sebesar Rp 1.200.000 pada tiap bulannya atau sebesar Rp 14.400.000 selama satu tahun untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping dengan rincian empat orang ustazah yang masing-masing mendapatkan *bisyārah* Rp 175.000, dua orang pendamping yang mendapatkan Rp 125.000, dan satu orang ustaz sekaligus penasihat TPQ Al-Ittihad yang mendapatkan Rp 250.000 pada tiap bulannya. Hal tersebut tentunya menjadi suatu

permasalahan tersendiri atau lebih tepatnya kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi pihak TPQ Al-Ittihad selama satu tahun.

Analisis permasalahan lain yang dilakukan pihak TPQ Al-Ittihad juga pada pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, bahkan hal tersebut berawal dari keprihatinan masyarakat di lingkungan TPQ Al-Ittihad, yakni dengan semakin meningkatnya kuantitas para santri yang semula berjumlah 30 orang di mana saat itu Masjid Al-Ittihad dapat menampung semua santri, namun dengan bertambahnya santri hingga berjumlah 160 orang, Masjid Al-Ittihad tidak lagi mampu menampung para santri. Sebagai solusi sementara, sebagian warga merelakan rumahnya dijadikan sebagai tempat mengaji bagi para santri, baik di teras rumah, ruang tengah bahkan hingga garasi rumah warga. Walaupun para santri mengaji di teras rumah bahkan garasi warga, mereka tetap memiliki semangat untuk mengaji. Hal tersebutlah di antaranya yang mendorong warga untuk membangun gedung TPQ Al-Ittihad.

Kedua, analisis potensi. Analisis potensi ini pun juga dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad, yakni di antaranya terkait SPP santri bahwa dengan disampaikannya kepada wali santri tentang kebutuhan pembiayaan bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping sebesar Rp 1.200.000 tiap bulannya atau Rp 14.400.000 selama satu tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan pihak TPQ Al-Ittihad khususnya pengurus yang melibatkan wali santri untuk ikut merencanakan dan mencari solusi bersama bagi pemenuhan pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Dengan disampaikannya kebutuhan pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping kepada wali santri juga dapat menjadi indikator bahwa pihak TPQ Al-Ittihad menaruh harapan dan melihat potensi para wali santri untuk ikut menanggung dan mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Adapun berdasarkan hasil musyawarah antara pengurus dengan wali santri menghasilkan suatu kesepakatan bahwa wali santri siap menanggung

kebutuhan pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping melalui SPP santri.

Terdapat hal lain yang dapat semakin menguatkan bahwa TPQ Al-Ittihad melakukan analisis potensi dalam perencanaan pembiayaannya, yakni dengan jumlah atau nominal SPP yang harus dibayarkan oleh santri pada tiap bulannya sebesar Rp 15.000. Angka Rp 15.000 ini tidak muncul dengan sendirinya atau bahkan dengan keputusan sepihak oleh pengurus ataupun ustaz dan ustazah TPQ Al-Ittihad, namun justru angka tersebut berasal dari usulan para wali santri di mana pada awalnya besaran SPP yang harus dibayarkan santri pada tiap bulannya sebesar Rp 10.000. Para wali santri pun mengusulkan agar besaran SPP dinaikkan sebanyak Rp 5.000, yakni dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000. Hal tersebut setidaknya dapat menjadi indikator bahwa dengan disampaikannya kebutuhan pembiayaan bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah kepada wali santri, pihak TPQ Al-Ittihad memberikan kepercayaan kepada wali santri bahwa para wali santri memiliki kemampuan dan potensi untuk memenuhi kebutuhan biaya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Hal tersebut pun terbukti bahwa dengan nominal SPP sebesar Rp 15.000 tiap bulannya, namun justru sebagian besar santri membayar SPP di atas nominal tersebut, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 50.000 walaupun jika dihitung secara menyeluruh selama satu tahun, biaya pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping selama satu tahun belum mampu mencukupinya namun hal tersebut tercukupi dengan adanya bantuan pengurus TPQ Al-Ittihad.

Ketiga, analisis kepentingan dalam masyarakat. Kedua hal tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa kegiatan atau program yang dirancang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Adanya pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad tentunya memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat di mana masyarakat memiliki kebutuhan dan kepentingan berupa tempat mengaji untuk putra-putri mereka. Dari awalnya bertempat di teras rumah hingga garasi mobil yang digunakan oleh pihak TPQ

sebagai tempat para santri mengaji. Pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad tersebut tentunya memiliki kepentingan dan dampak atau manfaat tersendiri khususnya bagi para santri, yakni mereka (para santri) membutuhkan tempat yang layak dan dapat menampung jumlah santri yang semakin banyak sehingga pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad perlu dilaksanakan, karena hal tersebut melibatkan adanya kepentingan masyarakat di mana masyarakat membutuhkan tempat mengaji yang mencukupi dan layak bagi putra-putri mereka dalam mencari ilmu.

Analisis kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad juga merambah pada wilayah pembayaran SPP santri di mana dana yang terkumpul dari wali santri dapat digunakan untuk membayar *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping di mana hal tersebut tentunya juga menjadi bagian dari kepentingan masyarakat khususnya ustaz dan ustazah serta pendamping yang telah menyempatkan waktu mereka dan kerelaan untuk berbagi ilmu dengan para santri sehingga kepada mereka (ustaz dan ustazah serta pendamping) sudah selayaknya mendapatkan *bisyārah* dengan adanya kesepakatan ketentuan nominal yang diterimakan ustaz dan ustazah dan pendampung TPQ Al-Ittihad tiap bulannya.

Dari beberapa penjelasan tersebut tentang tahapan analisis dalam pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum, yakni mulai dari analisis permasalahan, analisis potensi, dan analisis kepentingan dalam masyarakat. Namun, dalam analisis potensi nampaknya TPQ Al-Ittihad belum mampu melakukannya dengan maksimal terutama bagi perencanaan pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sumber pembiayaan utama bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping berasal dari wali santri dan pengurus TPQ Al-Ittihad. Adapun bagi warga di sekitar TPQ Al-Ittihad yang turut membantu bagi kebutuhan pembayaran tersebut menurut penulis hal tersebut belum maksimal.

Dari hasil pengamatan penulis selama pelaksanaan penelitian bahwa walaupun masyarakat khususnya wali santri berpartisipasi aktif dalam pembayaran SPP bagi *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping TPQ Al-Ittihad, masih banyak warga yang kondisi ekonominya tergolong mampu yang belum menjadi donatur tetap bagi TPQ Al-Ittihad. Dari penjelasan Ustazah Roso, baru terdapat sebagian warga di antaranya Eko yang secara rutin atau dapat menjadi donatur tetap tiap bulannya bagi TPQ Al-Ittihad khususnya untuk membantu pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping sebesar Rp 100.000 tiap bulannya. Adapun warga yang lain juga telah turut membantu, namun belum menjadi donatur tetap. Hal inilah yang nampaknya belum dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad, yakni dengan menggandeng dan mengajak warga yang tergolong mampu untuk menjadi donatur tetap bagi TPQ Al-Ittihad. Apabila hal ini dapat terwujud, tentunya akan mendorong bagi peningkatan kesejahteraan ustaz dan ustazah serta pendamping TPQ Al-Ittihad serta penguatan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

Selanjutnya, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap berbagai kegiatan yang ada di TPQ Al-Ittihad khususnya para wali santri tidak hanya sebatas keikutsertaan dengan program atau kegiatan yang telah ditetapkan, namun justru wali santri ikut menentukan kebijakan ataupun keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara wali santri dengan pihak TPQ Al-Ittihad, sehingga masyarakat khususnya wali santri turut menentukan arah dan orientasi pelaksanaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Terdapat beberapa bukti yang dapat menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat khususnya wali santri dalam pengambilan keputusan secara bersama, di antaranya pada perencanaan pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping.

Pengambilan keputusan terhadap pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping dilakukan secara bersama-sama antara pihak TPQ Al-Ittihad dan wali santri. Hal tersebut dilakukan pada saat pertemuan wali santri di awal tahun pelajaran TPQ Al-Ittihad (bulan

Syawal), yakni dengan pemaparan dari pihak TPQ kepada para wali santri terkait kebutuhan dana selama satu tahun yakni sebesar Rp 14.400.000 dengan rincian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di mana saat itu pengurus TPQ Al-Ittihad meminta pendapat dan tanggapan wali santri terkait kebutuhan dana tersebut. Para wali santri pun sepakat dengan hal tersebut dan mereka bersedia membayar SPP secara rutin untuk membantu memenuhi kebutuhan dana bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping TPQ Al-Ittihad. Akhirnya, rencana anggaran bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping tersebut pun menjadi keputusan dan kesepakatan bersama antara pengurus dan wali santri TPQ Al-Ittihad untuk dapat dilaksanakan dan ditaati bersama.

Adapun terkait dengan SPP yang dibayarkan para santri sebesar Rp 15.000 pada tiap bulannya, hal tersebut juga dapat menjadi salah satu indikator bahwa dalam pengambilan keputusan, TPQ Al-Ittihad mengikutsertakan masyarakat dalam pembahasannya. Nominal SPP sejumlah Rp 15.000 ada tidak dengan sendirinya dan bukan menjadi keputusan sepihak oleh TPQ Al-Ittihad, namun hal tersebut justru datang dari inisiasi masyarakat khususnya wali santri. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa awal mula SPP yang harus dibayarkan oleh santri sebesar Rp 10.000 tiap bulannya. Adapun saat ini para santri membayar SPP sejumlah Rp 15.000 merupakan usulan dari para wali santri. Pada saat pertemuan wali santri, terdapat wali yang mengusulkan kepada pihak TPQ Al-Ittihad untuk menaikkan nominal SPP yang harus dibayarkan oleh para santri, yakni dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000. Usulan tersebut pun disampaikan dalam forum pertemuan wali santri dan para wali santri pun sepakat dengan usulan tersebut serta menjadi keputusan bersama. Akhirnya, hingga saat ini SPP yang dibayarkan para santri sebesar Rp 15.000 pada tiap bulannya.

Hal lain yang dapat menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ada di TPQ Al-Ittihad ialah kegiatan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Hal tersebut memiliki kesamaan

pola dengan partisipasi masyarakat khususnya wali santri pada saat kenaikan SPP santri dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000. Kesamaan pola ini dapat dilihat dari adanya usulan yang berasal dari masyarakat atau *stakeholder* dan bukan berasal dari pihak TPQ Al-Ittihad sebagaimana usulan kenaikan SPP santri sebesar Rp 5.000 dari wali santri. Pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad ini berawal dari adanya keprihatinan dan inisiasi dari masyarakat dengan melihat para santri yang semakin meningkat jumlahnya namun dengan kapasitas tempat yang tidak mencukupi sehingga para santri ada yang belajar di rumah warga bahkan di garasi mobil warga.

Bentuk pengambilan keputusan bersama antara wali santri dengan pihak TPQ dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dapat dilihat dari adanya usulan pembangunan gedung TPQ yang berasal dari masyarakat khususnya di sekitar TPQ Al-Ittihad. Usulan tersebut pun direspon oleh tokoh masyarakat sekitar sekaligus ustaz dan penasihat TPQ Al-Ittihad, yakni dengan melakukan pertemuan dengan berbagai elemen mulai dari pengurus RW, pengurus RT, pengurus pengajian muslimat yang juga menjabat sebagai pengurus TPQ Al-Ittihad di lingkungan RW 15, dan ustaz dan ustazah serta pendamping. Dalam musyawarah tersebut disepakati keputusan untuk melakukan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana hal tersebut disepakati oleh semua pihak yang hadir, bahkan masing-masing perwakilan dari pihak RT dan RW menjadi panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad sehingga secara langsung mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dengan diketuai oleh Ketua RW 15 Kelurahan Teluk saat itu. Adapun untuk pengambilan-pengambilan keputusan dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, tentunya hal tersebut melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung karena panitia kegiatan tersebut dilaksanakan oleh panitia yang berasal dari warga sekitar TPQ Al-Ittihad.

Hal lain yang juga menguatkan adanya keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di TPQ Al-Ittihad

ialah infak santri. Namun terdapat perbedaan dengan beberapa bentuk kegiatan di atas, yakni jika kenaikan SPP santri dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 dan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana keduanya berasal dari usulan masyarakat, sedangkan program infak santri berasal dari usulan pihak TPQ Al-Ittihad khususnya dari ustaz dan ustazah dengan tujuan untuk melatih para santri berinfak. Pengambilan keputusan adanya infak santri tersebut dilakukan melalui pertemuan wali santri dengan menawarkan wacana program tersebut kepada para wali santri. Para wali santri pun sepakat dengan wacana program infak santri tersebut sehingga diperoleh keputusan bersama antara pihak TPQ Al-Ittihad dengan wali santri untuk mengadakan infak santri. Tidak berhenti sampai di sini, bahkan teknis pelaksanaannya pun dimusyawarahkan bersama dengan wali santri, mulai dari nominal infak sebesar Rp 500 yang diberikan setiap seminggu sekali pada hari Kamis hingga keputusan bersama terkait pengelolaan uang infak tersebut yang diserahkan sepenuhnya kepada wali kelas untuk digunakan bagi pembiayaan kebutuhan ATK pembelajaran.

Pengambilan keputusan terhadap kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh pihak TPQ Al-Ittihad dengan melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat di dalamnya khususnya wali santri senada dengan apa yang disampaikan oleh Cohen dan Uphoff bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama di mana hal ini sangat penting karena masyarakat turut menentukan arah dan orinetasi pelaksanaan pendidikan yang ada. Adapun menurut Cohen dan Uphoff bahwa wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran dalam rapat atau pertemuan, diskusi, sumbangan pemikiran, dan tanggapan terhadap program yang ditawarkan di mana hal-hal tersebut dapat ditemui di TPQ Al-Ittihad sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Apabila ditelaah lebih lanjut partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad juga terdapat unsur-unsur seperti tujuan yang hendak dicapai, proses pencapaian, waktu pencapaian, dan pelaku yang ada di dalamnya. Sebagai contoh pada perencanaan pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping di mana pihak TPQ Al-Ittihad khususnya pengurus menyampaikan kepada wali santri tentang rencana pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah tersebut di mana tujuan pembiayaan tersebut ialah sebagai ucapan terimakasih wali santri kepada ustaz dan ustazah serta pendamping karena telah membimbing putra-putri mereka.

Adapun proses pencapaiannya dilakukan melalui pembayaran SPP santri yang telah disepakati bersama nominal yang harus dibayarkan kepada TPQ Al-Ittihad tiap bulannya. Terkait waktu pencapaiannya pun disampaikan pihak TPQ Al-Ittihad yakni untuk pembayaran selama satu bulan sekali bahkan dikalkulasi hingga satu tahun ke depan, yakni dibutuhkan dana Rp 14.400.000 untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Adapun pelaksana dari kegiatan tersebut ialah wali santri dan pihak TPQ Al-Ittihad di mana wali santri dan pengurus sebagai sumber pembiayaan utama bagi *bisyārah* ustaz dan ustazah serta bendahara TPQ sebagai pengelola dana yang terkumpul untuk didistribusikan kepada ustaz dan ustazah serta pendamping.

Penjelasan tersebut di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Koontz dan O'Donnell sebagaimana yang dikutip oleh Imam Machali dan Ara Hidayat⁷⁵ yang membatasi perencanaan sebagai suatu proses pemikiran yang rasional dan sistematis tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sehingga proses kegiatan dapat berlangsung efektif, efisien, dan produktif serta memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

⁷⁵Lihat Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook ...*, 20.

Hal lain yang menarik dari aspek-aspek perencanaan yang ada di TPQ Al-Ittihad di antaranya ialah dalam hal pelaksana kegiatan dalam hal ini pembayaran *bisyārah* melalui SPP para santri. Dalam hal kemanajerial, TPQ Al-Ittihad cenderung mampu menempatkan posisi ustaz dan ustazah dan pengurus sesuai dengan tugas masing-masing. Ustaz dan ustazah serta pendamping memiliki tugas utama dan fokus pada pembelajaran, yakni dengan mendidik para santri khususnya dalam hal baca tulis Al-Qur'an. Adapun pengurus memiliki tugas untuk mengelola TPQ, termasuk pengelolaan keuangan. Jika ustaz dan ustazah serta pendamping menerima dan melakukan pencatatan terhadap SPP santri, hal tersebut hanya sebagai tugas tambahan untuk membantu pengurus dan uang SPP tersebut pun setelah diterimakan oleh ustaz dan ustazah atau pendamping disampaikan kepada pengurus untuk selanjutnya menjadi kewajiban pengurus terutama bendahara untuk mengelolanya termasuk menerima dan menarik donasi warga itupun menjadi tugas pengurus. Hal tersebut setidaknya dapat menjadi indikasi bahwa TPQ Al-Ittihad dalam pengelolaannya dapat bersikap profesional di mana hal itu bisa dilihat dari adanya pembagian tugas dan kewajiban pihak-pihak yang ada di TPQ Al-Ittihad, baik ustaz dan ustazah serta pendamping maupun pengurus.

Aspek-aspek lain yang disyaratkan oleh Koontz dan O'Donnel bahwa perencanaan dalam suatu kegiatan setidaknya terdiri dari aspek-aspek tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana cara untuk melakukannya, kapan hal tersebut dilakukan hingga siapa yang akan melakukannya terdapat juga terdapat dalam perencanaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Pertama, dalam hal apa yang akan dilakukan atau dengan kata lain tujuan dari pelaksanaan kegiatan dapat ditemui dalam perencanaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, yakni menyediakan tempat yang layak bagi para santri untuk mengaji di mana sebelumnya karena keterbatasan ruang para santri ada yang menempati rumah-rumah hingga

garasi warga sebagai tempat untuk mengaji. Dengan adanya gedung TPQ Al-Ittihad, para santri dapat mengaji dengan nyaman tanpa harus merasa canggung karena sebelumnya mereka menempati ruang tamu, teras bahkan hingga garasi warga sebagai tempat mereka mengaji.

Kedua, dalam hal cara melakukannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pembentukan panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad bahkan pembentukan panitia pengadaan tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana anggota panitia tersebut berasal dari warga sekitar TPQ Al-Ittihad khususnya warga RW 15 Kelurahan Teluk. Masing-masing panitia memiliki tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terutama dalam hal penggalangan dana yang melibatkan warga di wilayah RW 15 maupun di luar RW tersebut.

Ketiga, dalam hal pelaksanaan atau waktu pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dilaksanakan dalam dua tahap di mana tahap pertama dimulai pada tahun 2012 dengan pembangunan pondasi dan gedung lantai satu. Adapun untuk pembangunan tahap kedua, yaitu pembangunan lantai dua dilaksanakan setelah dana untuk pembangunan lantai dua tersebut terkumpul.

Keempat, dalam hal pelaku atau pelaksana pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Adapun pelaku atau pelaksana pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad ini berasal dari masyarakat di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk yang terbentuk dalam kepanitiaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, mulai dari tokoh masyarakat sekitar, Ketua RW 15 beserta pengurus, Ketua RT beserta jajaran pengurus di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk, pihak Takmir Masjid Al-Ittihad, dan sebagainya sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Dari susunan panitia pelaksana pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang berasal dari masyarakat sekitar, maka tidak diragukan lagi bahwa masyarakat memiliki peran dan partisipasi yang aktif dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mulyasa bahwa dalam perencanaan pembiayaan pendidikan yang mencakup

penyusunan anggaran belanja setidaknya meliputi sumber pendapatan, pengeluaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan bahan dan alat pembelajaran serta honorarium dan kesejahteraan. Kelima hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa TPQ Al-Ittihad khususnya pengurus, telah melakukan perencanaan terhadap kelima hal tersebut.

Pertama, sumber pendapatan. Secara umum, sumber pendapatan bagi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad berasal dari masyarakat, mulai dari wali santri, pengurus hingga masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan TPQ Al-Ittihad. Sebagai contoh pada pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping di mana sumber pembiayaan tersebut ialah wali santri dan pengurus TPQ Al-Ittihad. Kemudian, sumber pendanaan atau pembiayaan bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad cenderung lebih luas dibandingkan bagi pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah, yakni tidak sekedar wali santri dan pengurus TPQ, namun juga merambah kepada masyarakat di luar TPQ Al-Ittihad, seperti pihak-pihak swasta, menjalin kerjasama dengan beberapa toko untuk menempatkan kotak amal pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, dan sebagainya. Lalu, sumber pendanaan kegiatan terprogram dan partisipatif yang berasal dari wali santri, pengurus, dan masyarakat di sekitar TPQ Al-Ittihad khususnya di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk.

Kedua, pengeluaran. Dalam hal pengeluaran, pihak TPQ Al-Ittihad telah membuat rencana anggaran belanja yang dibutuhkan dan hal tersebut dibahas dan disepakati bersama masyarakat khususnya wali santri. Sebagai contoh pada perencanaan pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping di mana hal tersebut dilaksanakan pada awal tahun pelajaran dengan cara melakukan musyawarah antara pengurus dan wali santri untuk menemukan kata sepakat terkait kebutuhan dana bagi pembiayaan tersebut. Pengeluaran lain pun dilakukan dengan membuat rencana anggaran belanja seperti rencana kebutuhan biaya kegiatan *haflah ākhir as-sanah* dan keikutsertaan dalam pawai ta'aruf di mana kedua hal

tersebut disampaikan kepada wali santri untuk mencari solusi bagi pemenuhan pembiayaan tersebut.

Ketiga, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam pengadaan sarana pembelajaran di TPQ Al-Ittihad khususnya pembangunan gedung TPQ, panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dalam pencarian dana membuat proposal pengajuan dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana di dalamnya terdapat rincian anggaran yang dibutuhkan bagi pembangunan gedung tersebut bahkan hingga spesifikasi bangunan pun dicantumkan di dalamnya. Namun perlu diperhatikan pula dalam hal perencanaan dan pemeliharaan sarana pembelajaran ini bahwa TPQ Al-Ittihad belum melakukan perencanaan terkait pengadaan sarana pembelajaran yang dibutuhkan secara berkala, termasuk rencana anggaran bagi perawatan atau pemeliharaan sarana yang ada. Adapun untuk pengadaan sarana pembelajaran yang dibutuhkan dilakukan secara insidental dengan menggunakan uang infak santri yang dikelola oleh masing-masing wali kelas. Perencanaan pengadaan sarana pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah dicitakan sebaiknya perlu dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad secara berkala atau tahunan di mana hal tersebut juga akan berdampak pada perencanaan anggaran yang dibutuhkan bagi pengadaan sarana pembelajaran tersebut.

Keempat, honorarium dan kesejahteraan. Hal tersebut merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian pengurus TPQ Al-Ittihad. Perencanaan terhadap honor ustaz dan ustazah serta pendamping selalu direncanakan dan disampaikan kepada wali santri pada awal tahun pelajaran untuk memperoleh kesepakatan bersama antara wali santri dan pengurus, bahkan menurut Darni Kartiono selaku bendahara TPQ Al-Ittihad, tidak hanya kesepakatan yang dibangun namun juga komitmen yang tinggi dari para wali santri untuk mendukung ketercapaian rencana pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping tersebut melalui

pembayaran SPP secara rutin dengan nominal yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Setelah dilakukan analisis terhadap aspek ataupun tahapan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di TPQ Al-Ittihad, selanjutnya penulis berupaya melakukan analisa terhadap bentuk dan klasifikasi atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Basrowi sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk partisipasi masyarakat, yakni partisipasi fisik dan partisipasi nonfisik. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah, menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku-buku atau bantuan lainnya. Adapun partisipasi nonfisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah pendidikan.

Dari data yang diperoleh, bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan memiliki kecenderungan lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya pengambilan keputusan secara bersama-sama, seperti kesepakatan dalam rencana anggaran pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping yang mencapai Rp 1.200.000 tiap bulannya, kesepakatan pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan *haflah ākhir as-sanah* dan keikutsertaan dalam pawai ta'aruf serta kesepakatan rencana anggaran pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap berbagai kegiatan tersebut khususnya dalam hal perencanaan pembiayaan dapat menjadi indikator bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad adalah partisipasi nonfisik.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat menurut Shery Arstein dalam Suhirman diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu: *Citizen power*,

tokenism, dan *non participation*. Dari ketiga tingkatan klasifikasi partisipasi masyarakat tersebut apabila hal itu ditarik ke dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, berdasarkan data yang diperoleh bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *citizen power* di mana pada tahap atau tingkatan ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang dalam masyarakat termasuk dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat ditemukan pada partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan yang ada di TPQ Al-Ittihad, mulai dari perencanaan dalam pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping di mana di dalamnya telah terjadi distribusi hak, yakni hak ustaz dan ustazah serta pendamping yang mendapatkan *bisyārah* serta hak santri mendapat pendidikan dari para ustazah; distribusi tanggung jawab, yakni wali santri berkewajiban membayar SPP pada tiap bulannya sebesar Rp 15.000 dan tanggung jawab ustaz dan ustazah serta pendamping untuk mendidik para santri; dan distribusi wewenang, yakni pengurus memiliki wewenang untuk mengelola uang SPP dari wali santri dan mengelolanya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping.

Indikator klasifikasi *citizen power* ini juga mensyaratkan adanya pengambilan keputusan secara bersama dan hal itupun juga dapat ditemui di TPQ Al-Ittihad, yakni pada saat perencanaan pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping pengurus TPQ Al-Ittihad mengundang wali santri untuk mengadakan musyawarah bersama terkait pemenuhan kebutuhan bagi pembiayaan tersebut hingga diperoleh kesepakatan bersama. Selain itu, dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad pun dilaksanakan oleh panitia khusus yang berasal dari masyarakat di sekitar TPQ Al-Ittihad. Dalam susunan kepanitian tersebut, terdapat ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi di mana dengan adanya susunan panitia tersebut menunjukkan terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Dari berbagai analisis terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, terdapat satu benang merah yang dapat diambil yakni adanya karakteristik ataupun ciri khas yang dimiliki oleh TPQ Al-Ittihad dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pada berbagai kegiatan ataupun program, baik pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping melalui SPP santri dan donasi pengurus, pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di sekitar TPQ Al-Ittihad khususnya warga RW 15 Kelurahan Teluk, mulai dari tokoh masyarakat, ketua RW beserta pengurus, ketua RT beserta pengurus, dan sebagainya sebagai panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Kegiatan lain yang tentang pengambilan keputusan bersama juga terdapat pada kegiatan terprogram (*haflah ākhir as-sanah*) dan kegiatan partisipatif (pawai ta'aruf) yang melibatkan wali santri dan pengurus bahwa dalam perencanaan pembiayaan kegiatan tersebut selalu dilandasi dengan musyawarah sebagai jembatan pengambilan keputusan dan kebijakan bersama antara pihak TPQ Al-Ittihad dengan masyarakat termasuk wali santri, baik wacana atau usulan tersebut berasal dari masyarakat atau wali santri, seperti kenaikan besaran SPP dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 di mana usulan tersebut menjadi keputusan bersama melalui musyawarah antara pengurus dan wali santri TPQ Al-Ittihad maupun wacana atau usulan yang berasal dari pihak TPQ Al-Ittihad, seperti pelaksanaan program infak santri di mana usulan tersebut berasal dari ustaz dan ustazah dengan tujuan melatih santri untuk berinjak dan hal tersebut pun diambil atau ditetapkan berdasarkan keputusan bersama melalui musyawarah, bahkan teknis pelaksanaannya mulai dari penentuan hari Kamis sebagai hari untuk berinjak, nominal infak sebesar Rp 500 hingga keputusan pengelolaannya oleh ustaz dan ustazah untuk kepentingan pembelajaran juga ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah antara pihak TPQ Al-Ittihad dengan wali santri.

2. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad

Untuk mengawali pembahasan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, Cohen dan Uphoff mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program dalam hal ini pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Adapun ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program menurut Cohen dan Uphoff meliputi: *Pertama*, penggerakan sumber daya dan dana. *Kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi. *Ketiga*, penjabaran program. Dari data yang diperoleh terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad menunjukkan adanya kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Cohen dan Uphoff. Berikut beberapa hal yang dapat menjadi bukti kesesuaian tersebut.

Pertama, adanya penggerakan sumber daya dan dana. Kedua hal ini terlihat jelas dalam berbagai program atau jenis pembiayaan pendidikan yang ada di TPQ Al-Ittihad. Pada pelaksanaan pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, pengurus dan ustaz dan ustazah serta pendamping TPQ Al-Ittihad berupaya menarik dana yang ada di masyarakat khususnya para wali santri dalam acara pertemuan wali santri yang diadakan secara rutin pada tanggal empat tiap bulannya. Para wali santri diberi undangan yang dititipkan kepada putra-putri mereka saat mengaji sekaligus memberikan kartu SPP untuk dibawa pada saat pertemuan wali santri.

Adapun pembayaran SPP santri dilaksanakan pada akhir pertemuan di mana saat itu tiap wali santri berkumpul bersama wali kelas putra-putri mereka untuk melakukan pembayaran SPP, yakni dengan membawa kartu SPP yang telah dititipkan kepada putra-purtri mereka sebelum pelaksanaan pertemuan tersebut. Tidak hanya itu, pada kesempatan tersebut wali santri juga diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan atau saran bahkan

kritik terhadap TPQ atau sekedar menanyakan perkembangan putra-putri mereka.

Pola pembayaran SPP tersebut nampaknya dapat menjadi alternatif bagi lembaga pendidikan lain khususnya TPQ dalam mengumpulkan dana dari para wali santri. Kecenderungan dan hal yang lazim dilaksanakan ialah lembaga-lembaga pendidikan khususnya TPQ yang menerapkan pembayaran SPP bagi para santrinya sebatas memberikan kartu SPP untuk diserahkan kepada wali masing-masing dan kemudian kartu tersebut diisi oleh wali santri dan dibawa kembali oleh santri untuk diserahkan kepada ustaz dan ustazah. Kelemahan dari pola ⁷⁶ tersebut di antaranya ialah keterlibatan ataupun partisipasi masyarakat khususnya wali santri dalam pembayaran SPP cenderung kurang aktif. Namun dengan pola pembayaran SPP yang dilakukan pada saat pertemuan wali santri, pemasukan SPP santri cenderung stabil karena banyak wali santri yang membayarkan SPP pada saat itu. Dengan pola tersebut akan terjalin komunikasi antara pihak TPQ Al-Ittihad dengan wali santri di mana dampaknya ialah pihak TPQ dapat mengetahui apa yang menjadi harapan dan keinginan para wali santri dan wali santri pun dapat mengetahui perkembangan kondisi putra atau putri mereka secara langsung dari penjelasan ustaz dan ustazah. Hal tersebut setidaknya dapat menunjukkan adanya penggerakan yang dilakukan oleh pihak TPQ Al-Ittihad kepada masyarakat khususnya wali santri, baik dalam bentuk sumber daya maupun sumber dana.

Penggerakan sumber daya dan dana ini juga dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Dalam pelaksanaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang dipanitiai oleh masyarakat di

⁷⁶Penulis telah melakukan survey kepada TPQ lain di sekitar wilayah Kelurahan Teluk khususnya, seperti TPQ Al-Birru Teluk di mana di TPQ tersebut pola pembayaran SPP santri dilaksanakan dengan memberikan kartu SPP kepada santri agar disampaikan kepada wali masing-masing dan kemudian santri tersebut mengembalikan kartu SPP yang telah diisi uang pembayaran SPP santri. Menurut penjelesan Ustazah Resti selaku pengelola SPP santri di TPQ Al-Birru bahwa dengan sistem demikian partisipasi wali santri untuk pembayaran SPP cenderung lemah. Namun, ketika pihak TPQ mengumpulkan wali santri untuk membahas suatu kegiatan atau program pada pertemuan wali santri di mana salah satu pembahasan di dalamnya berkaitan dengan dana, peran serta wali santri cenderung lebih tinggi yakni dengan dibuktikan terkumpulnya dana yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan atau program pada saat pertemuan tersebut.

sekitar wilayah TPQ khususnya di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat sekitar (Abdul Hamid), ketua RW beserta pengurus, ketua RT beserta pengurus, takmir Masjid Al-Ittihad, dan sebagainya bahwa ketika melihat susunan panitia yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sekitar menunjukkan adanya penggerakan secara aktif masyarakat yang ada di lingkungan TPQ Al-Ittihad.

Hal lain yang nampaknya cukup menarik terkait terbentuknya panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad ini ialah inisiasi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad justru bermula dari usulan masyarakat di sekitar TPQ Al-Ittihad yang merasa iba dengan para santri yang melaksanakan pembelajaran di rumah-rumah warga, mulai dari teras, ruang tengah hingga garasi mobil warga di mana saat itu Masjid Al-Ittihad tidak lagi mampu menampung jumlah santri yang mencapai 160 orang.

Adapun inisiasi warga untuk membangun gedung TPQ Al-Ittihad direspon dengan cepat oleh pihak TPQ khususnya penasihat sekaligus tokoh masyarakat sekitar, yakni Abdul Hamid di mana beliau mengumpulkan warga di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk melalui perwakilan oleh ketua RW beserta pengurus, ketua RT beserta pengurus, pengurus pengajian muslimat, dan tentunya pihak TPQ Al-Ittihad sendiri mulai dari pengurus, ustaz dan ustazah hingga pendamping untuk menindaklanjuti usulan warga terkait pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Adapun pertemuan tersebut menghasilkan adanya kesepakatan bersama untuk melaksanakan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, yakni dengan dibentuknya panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Hal tersebut setidaknya dapat menjadi indikator adanya penggerakan sumber daya atau masyarakat yang ada di wilayah RW 15 untuk mengatasi solusi bagi penyediaan sarana pembelajaran para santri dalam bentuk pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Selanjutnya, setelah panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad terbentuk, panitia langsung bergerak dengan mengumpulkan dana yang diperlukan bagi pembangunan

gedung TPQ tersebut, di antaranya dengan membuat proposal pengajuan dana pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang diedarkan tidak hanya bagi masyarakat di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk, namun juga di luar wilayah tersebut termasuk peletakkan kotak amal di beberapa toko sebagaimana disebutkan pada deskripsi hasil temuan.

Pihak remaja pun turut digerakkan dalam pencarian dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, yakni dengan penarikan dana dengan menggunakan kotak infak kepada warga di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk setiap hari Minggu pada pukul 16.00 WIB hingga menjelang Magrib. Dari berbagai upaya panitia tersebut telah mampu menghasilkan dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, mulai dari pembelian tanah hingga kebutuhan material pembangunannya, baik yang bersumber dari masyarakat di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk maupun di luar wilayah tersebut, baik dalam bentuk materi/ uang, tenaga, pikiran, maupun barang (seperti SMK Telkom Purwokerto yang menyumbang keramik sebanyak 40 dus bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad) hingga saat ini gedung TPQ Al-Ittihad telah berdiri kokoh dan telah digunakan oleh para santri sebagai tempat untuk mengaji. Beberapa hal tersebut semakin memperkuat adanya penggerakan sumber daya dan dana dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi. Kedua hal tersebut dapat ditemukan dalam beberapa kegiatan khususnya dalam hal pembiayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat di TPQ Al-Ittihad. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Dalam pelaksanaannya, pihak TPQ Al-Ittihad selalu melakukan koordinasi antara pengurus dan ustaz dan ustazah serta pendamping terkait dengan penerimaan SPP santri tiap bulannya, yakni yang dibungkus dalam pertemuan pengurus dan ustaz dan ustazah pada tanggal tiga tiap bulannya untuk berkoordinasi terkait SPP santri tersebut.

Adapun pada saat pelaksanaan pembayaran SPP oleh wali santri kepada masing-masing wali kelas ketika pertemuan antara pihak TPQ dengan wali santri, masing-masing wali kelas melakukan pengadministrasian atau pencatatan pada lembar yang telah disediakan terhadap pembayaran SPP yang dilakukan wali santri kepada TPQ di mana secara rinci dapat diketahui kedisiplinan para wali santri dalam membayar SPP. Adapun catatan tersebut disampaikan oleh masing-masing wali kelas kepada pengurus saat pertemuan pengurus dan ustaz dan ustazah serta pendamping pada tanggal empat tiap bulannya khususnya bendahara TPQ Al-Ittihad melakukan pencatatan terhadap pemasukan ataupun laporan catatan SPP masing-masing wali kelas untuk dilaporkan kepada wali santri pada pertemuan antara pihak TPQ dan wali santri. Tidak hanya itu, dalam penerimaan *bisyārah* tiap ustaz dan ustazah serta pendamping juga diwajibkan membubuhkan tanda tangan pada lembar penerimaan *bisyārah*⁷⁷ yang telah disediakan oleh pengurus di mana dalam lembar tersebut terdapat nominal yang diterimakan masing-masing ustaz dan ustazah serta pendamping sehingga antara satu dengan yang lain dapat mengetahui nominal yang diterimakan.

Pada pelaksanaan program infak santri yang dilaksanakan satu minggu sekali pada hari Kamis dengan minimal nominal yang diinfakan sebesar Rp 500 di mana hal tersebut dikelola oleh wali kelas bahwa masing-masing wali kelas pun memiliki catatan pemasukan dan pengeluaran infak sebagaimana disajikan pada hasil temuan di atas. Adapun catatan tersebut disampaikan kepada pengurus saat pertemuan antara ustaz dan ustazah dan pengurus pada tanggal tiga tiap bulannya. Catatan ataupun laporan tersebut juga disampaikan kepada wali santri pada saat pertemuan wali santri pada tanggal empat tiap bulannya.

Selain dua pelaksanaan administrasi dan koordinasi dua kegiatan di atas, pada pelaksanaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad juga dilakukan adanya administrasi dan koordinasi. Untuk pelaksanaan

koordinasi, hal tersebut dilakukan di antaranya melalui rapat panitia pembangunan di mana dalam pertemuan atau rapat tersebut khususnya berkaitan dengan pembiayaan, bendahara pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad menyampaikan catatan keuangan baik pemasukan maupun pengeluarannya kepada panitia lain di mana pada panitia tersebut terdapat perwakilan dari masing-masing RT di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk. Selanjutnya, panitia yang merupakan perwakilan warga dari masing-masing RT di wilayah RW 15 tersebut menyampaikan kondisi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran yang disampaikan oleh bendahara pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad kepada warganya masing-masing pada saat pertemuan RT.

Dalam hal administrasi khususnya administrasi pembiayaan, bendahara pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad memiliki catatan khusus yang berisi data pembiayaan baik pemasukan dan pengeluarannya termasuk catatan keuangan pada saat pengadaan tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Kegiatan lain yang di dalamnya terdapat pengadministrasian dan koordinasi yang dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad terutama dalam hal pembiayaan ialah pada kegiatan terprogram (*haflah ākhir as-sanah*) dan kegiatan partisipatif (keikutsertaan dalam pawai ta'aruf). Untuk kegiatan *haflah ākhir as-sanah*, pengkoordinasian dilakukan oleh pihak TPQ Al-Ittihad dengan melibatkan masyarakat sekitar yang dibungkus dalam bentuk panitia *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad di mana panitia yang ada di dalamnya melibatkan masyarakat sekitar TPQ Al-Ittihad. Koordinasi-koordinasi yang ada dilakukan dalam bentuk rapat panitia *haflah ākhir as-sanah* di mana di dalamnya terdapat pembahasan tentang anggaran biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Adapun catatan kebutuhan anggaran yang telah disusun disampaikan kepada wali santri untuk dimintai dana bagi pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama bagi para wali santri yang putra atau putri mereka menjadi peserta khatmil qur'an yang tentunya memiliki beban pembiayaan yang berbeda dengan

wali santri lain sebagaimana telah disebutkan pada deskripsi hasil temuan. Selain itu, terdapat pula pengadministrasian atau pencatatan terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran dalam kegiatan tersebut di mana hal itu akan disampaikan kepada wali santri pada saat pertemuan wali santri setelah terselenggaranya kegiatan *haflah ākhir as-sanah*.

Adapun pada kegiatan partisipatif yakni keikutsertaan pada pawai ta'aruf yang diadakan oleh Pondok Pesantren Anwarushsholihin Pamujan Teluk, pihak TPQ Al-Ittihad juga melakukan koordinasi dengan wali santri terkait dengan keikutsertaan dalam pawai tersebut beserta pembiayaannya. Pada pertemuan tersebut, wali santri dimintai pendapat terkait keikutsertaan TPQ Al-Ittihad dan para wali santri selalu mendukung keikutsertaan pihak TPQ dalam pawai tersebut di mana hal tersebut akan berdampak pada adanya penarikan dana kepada wali santri untuk memenuhi kebutuhan bagi pelaksanaannya. Pihak TPQ Al-Ittihad pun memiliki catatan terkait rincian kebutuhan bagi pembiayaan keikutsertaan pawai ta'aruf, terutama dalam hal konsumsi dan perlengkapan pawai. Segala pemasukan dan pengeluaran dari kegiatan tersebut dicatat dan dilaporkan kepada wali santri pada saat pertemuan wali santri.

Koordinasi lain yang dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad pada saat keikutsertaan dalam kegiatan pawai ta'aruf ialah terhadap remaja di wilayah RW 15 di mana para remaja diminta untuk membantu TPQ dalam pembuatan alat musik dari barang-barang bekas untuk mengiringi para santri yang menjadi peserta pawai sekaligus para remaja diminta untuk memainkan alat musik tersebut dan mereka pun berkenan untuk membantu TPQ Al-Ittihad dalam kegiatan pawai ta'aruf tersebut.

Beberapa hal tersebut dapat menunjukkan adanya upaya yang telah dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad dalam kegiatan administrasi dan koordinasi pada berbagai kegiatan ataupun program yang ada khususnya berkaitan dengan pembiayaan pendidikannya.

Ketiga, penjabaran program. Penjabaran program ini dapat ditemukan pada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad

khususnya pada pembiayaan yang ada di dalamnya, antara lain pada pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Penjabaran program tersebut dilakukan oleh pengurus TPQ Al-Ittihad kepada para wali santri pada saat pelaksanaan pertemuan wali santri. Dalam pertemuan tersebut, pengurus TPQ Al-Ittihad menyampaikan program ataupun kebutuhan pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping melalui SPP santri di mana nominal dan teknis pembayarannya telah dijelaskan dalam deskripsi temuan penelitian di atas. Pada pertemuan tersebut, pengurus menyampaikan dan menjabarkan kebutuhan dana bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah sebesar Rp 14.400.000 selama satu tahun atau sebesar Rp 1.200.000 pada tiap bulannya.

Pada kegiatan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad pun, panitia pembangunan gedung TPQ membuat deskripsi ataupun penjabaran program pembangunan gedung tersebut, baik pada saat pengadaan tanah bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad maupun pada saat pembangunan gedung itu sendiri di mana deskripsi ataupun penjabarannya diwujudkan dalam dua bentuk proposal, yakni proposal pengadaan tanah dan proposal pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Pada proposal pengadaan tanah berisi kebutuhan luas tanah yang akan dibeli dan posisi atau letak tanah tersebut beserta dana yang dibutuhkan. Adapun proposal pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad cenderung menjabarkan program secara rinci di mana di dalam proposal tersebut terdapat penjelasan tentang latar belakang pembangunan, tujuan pembangunan, nama kegiatan, rencana anggaran, spesifikasi gedung, sumber dana hingga waktu pelaksanaan pembangunan yakni dimulai pada tahun 2012. Dengan proposal tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara detail tentang rencana pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad sehingga hal tersebut semakin menambah keyakinan dan tidak ragu-ragu untuk memberikan bantuan ataupun sumbangan untuk pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Penjabaran program lain yang dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad ialah infak santri. Program infak santri ini bermula dari usulan ustaz dan ustazah

untuk melatih para santri berinfak. Dalam pertemuan wali santri, pengurus pun menyampaikan usulan tersebut kepada para wali santri termasuk tujuan program tersebut. Para wali santripun mendukung dan dalam pertemuan tersebut diambil kesepakatan bersama antara wali santri dengan pihak TPQ Al-Ittihad bahwa program infak santri tersebut akan segera dilaksanakan di mana pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing wali kelas dengan minimal nominal infak sebesar Rp 500 yang dilaksanakan pada hari Kamis. Adapun uang infak tersebut digunakan untuk kepentingan pembelian ATK bagi pembelajaran santri dan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya darurat, seperti menjenguk santri yang sedang terkena musibah dan sebagainya.

Berbagai pemaparan tersebut dapat dijadikan indikator sekaligus memperkuat adanya ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan berbagai program khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad di mana hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Cohen dan Uphoff bahwa ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu program meliputi penggerakan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi dan koordinasi hingga penjabaran program yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Mulyasa bahwa pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran (penggunaan anggaran/ biaya). Penerimaan dan pengeluaran tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien, artinya pengeluaran harus didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan. Dari apa yang disampaikan Mulyasa tersebut, apabila hal itu ditarik kepada fakta yang ada di lapangan terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, maka ruang lingkup pelaksanaan pembiayaan yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran serta pencatatan terhadap kedua hal tersebut dapat ditemukan dengan jelas.

Pada pelaksanaan pembiayaan operasional TPQ Al-Ittihad, yakni pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping serta pembelian ATK bagi kebutuhan pembelajaran melalui infak santri dapat ditemukan adanya kegiatan pencatatan atau pembukuan terhadap kedua kegiatan tersebut, baik pemasukan maupun pengeluarannya. Adapun catatan atau pembukuan terhadap penerimaan SPP santri dilakukan oleh masing-masing wali kelas, kemudian wali kelas menyampaikannya kepada bendahara TPQ Al-Ittihad untuk dilakukan perekapan terhadap jumlah pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya pada lembar catatan yang telah disiapkan, bahkan bendahara TPQ Al-Ittihad pun melakukan perekapan selama satu tahun penuh terkait jumlah pemasukan dan pengeluaran tiap bulannya di mana laporan tersebut disampaikan kepada wali santri pada pertemuan wali santri di awal tahun pelajaran selanjutnya. Bendahara TPQ pun memiliki bukti penerimaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping di mana hal tersebut diperoleh dengan meminta tanda tangan ustaz dan ustazah serta pendamping pada saat penerimaan *bisyārah* tersebut.

Pembukuan terhadap pemasukan dan pengeluaran pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad juga dilakukan oleh masing-masing wali kelas pada program infak santri. Masing-masing wali kelas sebagai pengelola infak santri tersebut diwajibkan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan pada setiap pemasukan dan pengeluaran infak santri. Pada tiap bulannya, wali kelas mencatat pemasukan dan pengeluaran infak santri pada lembar catatan yang telah disediakan di mana catatan tersebut dilaporkan kepada wali santri pada saat pertemuan wali santri tiap bulannya. Wali kelas juga menyusun rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran infak santri selama satu tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang infak tersebut.

Selanjutnya, pada kegiatan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad juga dilaksanakan adanya pencatatan atau pembukuan pemasukan dan pengeluaran terkait pembiayaan pembangunan tersebut. Hal ini bisa dilihat

dari adanya catatan bendahara terkait pemasukan dan pengeluaran pembiayaan yang ada, termasuk sumber pembiayaan tersebut. Selain itu, catatan rencana anggaran pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad pun dapat ditemukan secara rinci pada proposal pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Pada kegiatan terprogram dan partisipatif TPQ Al-Ittihad melakukan pencatatan atau pembukuan terkait pemasukan dan pengeluaran pada pembiayaan kegiatan tersebut. Pada kegiatan terprogram (*haflah ākhir as-sanah*), rencana kebutuhan kegiatan tersebut disusun sebagai acuan penggunaan dana. Kemudian bendahara kegiatan yang berasal dari warga sekitar TPQ Al-Ittihad melakukan pencatatan terhadap pemasukan dan pengeluarannya. Setelah kegiatan selesai, bendahara pun melaporkan rekapitulasi penggunaan dana yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran kepada panitia lain serta hal tersebut juga disampaikan kepada wali santri. Selain itu, pembukuan terhadap kegiatan partisipatif (keikutsertaan dalam pawai ta'aruf) juga dilakukan oleh pihak TPQ Al-Ittihad di mana sebelumnya pengurus menyusun rencana anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pawai ta'aruf tersebut yang kemudian rencana tersebut disampaikan kepada wali santri untuk penggalangan dana. Semua bentuk pemasukan baik berupa materi/ uang maupun barang seperti air mineral, buah, dan permen serta semua pengeluaran dicatat pada lembar yang telah disediakan. Catatan pemasukan dan pengeluaran tersebut dilaporkan kepada wali santri pada saat pertemuan wali santri.

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan anggaran terutama dalam hal pembukuannya sebagaimana yang disampaikan oleh Mulyasa, berdasarkan paparan fakta yang ada di lapangan dapat diketahui bahwa dalam berbagai kegiatannya, mulai dari pelaksanaan pembiayaan operasional TPQ Al-Ittihad, pelaksanaan pembiayaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad hingga pelaksanaan pembiayaan kegiatan

terprogram dan kegiatan partisipatif, TPQ Al-Ittihad selalu melakukan pembukuan pada penerimaan dan pengeluaran biaya yang ada.

Adapun terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, Basrowi sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum membaginya ke dalam dua jenis, yaitu partisipasi fisik dan partisipasi nonfisik, berdasarkan data yang diperoleh bahwa apabila partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yakni dalam bentuk partisipasi nonfisik, yakni keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah, keputusan, dan kebijakan yang diambil dalam suatu program, maka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad ini cenderung lebih banyak pada partisipasi fisik, yakni partisipasi dalam bentuk pemberian sumbangan berupa dana/ uang ataupun barang pada pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, pemberian bantuan berupa dana/ uang dan barang (tumpeng) dalam kegiatan *haflah ākhir as-sanah*, pemberian bantuan berupa dana/ uang maupun barang (permen, buah, dan air mineral) pada kegiatan pawai ta'aruf, dan pemberian bantuan berupa dana/ uang pada pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping serta infak santri. Adapula bentuk partisipasi nonfisik yang apabila dinilai akan sebanding dengan materi/ uang, yakni gotong royong masyarakat pada awal pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, tepatnya pada saat pembangunan pondasi gedung di mana apabila saat itu menggunakan jasa tukang bangunan tentunya akan mengeluarkan biaya. Namun dengan gotong royong warga, hal tersebut dapat membantu penghematan penggunaan anggaran.

Cohen dan Uphoff sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum menjelaskan bahwa dimensi partisipasi masyarakat di antaranya berkaitan dengan apakah inisiatif yang ada datang dari administrator atau masyarakat setempat, apakah dorongan partisipasi tersebut sukarela atau paksaan, apakah partisipasi tersebut berlangsung

dalam individu atau kolektif, durasi partisipasi hingga apakah partisipasi tersebut bersifat sementara atau berkelanjutan. Terkait dengan apa yang disampaikan Cohen dan Uphoff tersebut, dimensi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan di TPQ Al-Ittihad dalam hal inisiatif dapat diketahui bahwa dalam beberapa kegiatan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, inisiatif yang datang cenderung lebih dominan berasal dari masyarakat setempat. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa hal, antara lain dalam kenaikan besaran atau nominal SPP dan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Inisiatif dalam kenaikan nominal SPP sebesar Rp 5.000, yakni dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 merupakan usulan wali santri yang kemudian mendapat persetujuan dari wali santri lain hingga akhirnya diperoleh kesepakatan terkait kenaikan nominal SPP sebesar Rp 5.000 di mana hal tersebut berlangsung hingga saat ini. Adapun dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, inisiatif yang ada berasal dari permintaan ataupun usulan masyarakat sekitar yang menghendaki TPQ Al-Ittihad memiliki gedung mandiri untuk pembelajaran para santri sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman dan tidak menumpang di rumah-rumah warga.

Adapun apakah partisipasi yang dibangun bersikap paksaan ataukah sukarela, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan partisipasi masyarakat yang dibangun bersifat sukarela. Hal ini bisa dilihat antara lain pada saat penarikan infak warga melalui kotak infak yang diedarkan remaja RW 15 setiap hari Minggu di mana saat itu panitia pembangunan hanya membantu dan memudahkan warga apabila hendak memberikan infak. Dari penjelasan Kevin selaku salah satu remaja yang turut dalam penarikan infak dari masyarakat tersebut menjelaskan bahwa pada penarikan infak tersebut pun terdapat beberapa warga yang tidak memberikan infak karena suatu hal dan para warga pun tidak mendapatkan paksaan untuk wajib berinjak. Hal lain yang dapat menunjukkan kesukarelaan masyarakat dalam berpartisipasi pada berbagai kegiatan TPQ

Al-Ittihad khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan ialah pada kegiatan *haflah ākhir as-sanah*. Dari penuturan Darni Kartiono selaku bendahara TPQ Al-Ittihad menyebutkan bahwa pada saat pelaksanaan *haflah ākhir as-sanah* terdapat beberapa tumpeng bahkan hingga empat buah tumpeng yang disediakan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun tumpeng-tumpeng tersebut datang dari para wali santri mulai dari Grumbul Krewed, Grumbul Tasari, Grumbul Karang Bawang hingga wali santri di lingkungan RW 15 sendiri sehingga tidak mengherankan apabila tumpeng yang ada bisa mencapai 4 buah tumpeng.

Bantuan berupa tumpeng dari wali santri tersebut berasal dari kehendak dan inisiatif para wali santri. Pihak TPQ tidak pernah meminta kepada wali santri untuk membuatkan tumpeng pada acara tersebut. Adapun biaya pembuatan tumpeng tersebut pun berasal dari para wali santri di masing-masing grumbul. Selain itu, pada keikutsertaan TPQ Al-Ittihad pada pawai ta'aruf pun partisipasi yang muncul bersifat sukarela. Infak yang diberikan oleh wali santri untuk kegiatan tersebut tidak ditentukan nominalnya, bahkan terdapat wali santri yang menyumbang dalam bentuk barang, seperti air mineral, permen hingga buah. Bantuan-bantuan tersebut menunjukkan adanya kesukarelaan para wali santri untuk membantu pembiayaan TPQ Al-Ittihad.

Selanjutnya, pelaksanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad berdasarkan temuan yang ada sangat erat kaitannya dengan swadaya masyarakat, seperti pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping yang mengandalkan bantuan pengurus dan wali santri (SPP santri) hingga dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan tersebut pada tiap bulannya yang mencapai Rp 1.200.000. Swadaya masyarakat dalam pembiayaan pendidikan yang ada di TPQ Al-Ittihad juga dapat dilihat dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad terutama pada pengadaan tanah di mana dana sebesar Rp 87.500.000 untuk pembelian tanah seluas 25 ubin dapat terpenuhi dengan sumbangan dari masyarakat di sekitar TPQ Al-Ittihad khususnya di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk, termasuk

pada pembangunan gedungnya pun dana yang ada sebagian besar berasal dari warga yang ada di sekitar TPQ Al-Ittihad. Bentuk swadaya lainnya dapat ditemukan pada kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad di mana dana yang digunakan berasal dari wali santri khususnya para santri yang menjadi peserta khatmil Qur'an, pengurus TPQ, dan masyarakat sekitar bahkan hingga penyiapan tempatnya pun melibatkan swadaya masyarakat dengan melaksanakan kerja bakti bagi pelaksanaan kegiatan *haflah ākhir as-sanah* tersebut termasuk peran serta remaja dalam membantu pembuatan dekorasi panggung.

Dari berbagai bentuk swadaya yang diberikan masyarakat, baik materi maupun tenaga pada berbagai kegiatan atau program yang ada di TPQ Al-Ittihad menunjukkan adanya kebersamaan masyarakat yang tinggi untuk memecahkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang ada di lingkungannya. Hal tersebut juga menunjukkan adanya perhatian masyarakat kepada pelaksanaan pendidikan yang ada di TPQ Al-Ittihad. Beberapa hal tersebut di atas dapat menjadi indikator di mana pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan yang ada di TPQ Al-Ittihad bersifat *bottom-up intervention* sebagaimana yang disebutkan oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum bahwa pola partisipasi masyarakat yang bersifat *bottom-up intervention* merupakan suatu pola partisipasi yang di dalamnya terdapat nuansa penghargaan dan pengakuan di mana masyarakat memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, dan mampu melakukan usaha-usaha melalui swadaya dan prinsip kebersamaan.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad ini ditelaah lebih mendalam akan terlihat jelas bahwa berbagai upaya dan kontribusi masyarakat yang ada memang benar-benar berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana usulan pembangunannya berasal dari keprihatinan masyarakat melihat para santri yang harus belajar di teras hingga garasi

rumah warga. Pelaksanaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad pun dilaksanakan oleh warga, yakni dengan kepanitiaan yang dibentuk dari berbagai elemen masyarakat yang ada di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk. Demikian pula dengan pendanaan bagi kebutuhan pembangunan gedung TPQ yang bersumber dari warga sekitar dan juga warga di luar wilayah RW 15. Adapun penggunaan dan pemanfaatan gedung TPQ Al-Ittihad pun untuk masyarakat di sekitar TPQ Al-Ittihad khususnya wilayah RW 15 dan masyarakat di luar RW 15.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Winarno Surakhmad dalam Zubaidi sebagaimana yang dikutip oleh Imam Machali bahwa pelaksanaan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat (pendidikan berbasis masyarakat) merupakan sebuah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subjek atau pelaku pendidikan, bukan sebagai objek pendidikan. Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasinya secara aktif dalam setiap program pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Dengan kata lain, masyarakat harus diberdayakan, diberi peluang, dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk, dan oleh masyarakat sendiri.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan penjelasan Eni Setyaningsih selaku Kepala TPQ Al-Ittihad bahwa pihak TPQ berusaha melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang ada di TPQ Al-Ittihad terutama dalam pembiayaan pendidikan, yakni dengan menggunakan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab

terhadap berbagai program atau kegiatan khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

3. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembiayaan Pendidikan di TPQ Al-Ittihad

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi suatu program menurut Cohen dan Uphoff bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan ataukah terdapat penyimpangan. Dari data yang diperoleh terkait partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad menunjukkan adanya pola evaluasi yang memiliki kesamaan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Pola yang dibangun ialah dengan melakukan evaluasi, baik berupa penghitungan ataupun pencatatan terhadap pemasukan dan pengeluaran pada suatu kegiatan di tingkat pengurus ataupun panitia kegiatan. Kemudian, hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada wali santri secara langsung ataupun jika kegiatan atau program tersebut melibatkan masyarakat secara luas khususnya di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk, maka panitia kegiatan ataupun pihak TPQ Al-Ittihad melibatkan pihak RT untuk menyampaikan laporan ataupun evaluasi tersebut kepada warganya pada pertemuan RT.

Sebagai contoh pada evaluasi pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Dalam evaluasi tersebut, pola yang dibangun ialah pihak TPQ Al-Ittihad baik pengurus, ustazah, dan pendamping melakukan evaluasi internal terlebih dahulu khususnya berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran biaya yang ada. Adapun setelah dilakukan evaluasi di tingkat pengurus, pihak TPQ Al-Ittihad menyampaikan hal tersebut kepada wali santri pada saat pertemuan rutin wali santri. Dalam pertemuan tersebut pengurus menyampaikan pemasukan dan pengeluaran TPQ Al-Ittihad bagi pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping termasuk pemasukan yang berasal dari selain wali santri, seperti pengurus TPQ Al-Ittihad, warga sekitar, dan sebagainya sehingga

para wali santri dapat mengetahui kondisi keuangan TPQ Al-Ittihad. Pola tersebut juga digunakan untuk evaluasi program infak santri di mana penggunaan infak santri tersebut untuk kebutuhan pembelajaran dan hal-hal yang sifatnya mendesak ataupun darurat, yakni pihak TPQ Al-Ittihad melakukan pertemuan pengurus dan ustaz dan ustazah terlebih dahulu untuk melakukan evaluasi terhadap pemasukan dan penggunaan dana infak yang ada. Lalu, hal tersebut disampaikan kepada wali santri pada saat pertemuan rutin wali santri.

Pola yang hampir sama pun digunakan TPQ Al-Ittihad untuk melaksanakan evaluasi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad khususnya dalam hal pembiayaannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pada evaluasi tersebut, panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang merupakan perwakilan masyarakat di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk melakukan evaluasi internal panitia di mana dalam evaluasi tersebut dibahas perkembangan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad khususnya dalam hal pembiayaan. Bendahara pun melaporkan pemasukan dan pengeluaran pembiayaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Adapun selanjutnya panitia yang berasal dari perwakilan pengurus RT di wilayah RW 15 menyampaikan laporan keuangan dari bendahara pembangunan kepada warga di lingkungan RT masing-masing pada pertemuan rutin RT.

Kedua pola tersebut menunjukkan adanya upaya TPQ Al-Ittihad untuk membangun kepercayaan masyarakat, baik wali santri maupun masyarakat yang tidak berkaitan langsung dengan TPQ Al-Ittihad khususnya di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk melalui keterbukaan atau transparansi penggunaan anggaran/ dana, karena dana yang digunakan dalam berbagai kegiatan atau program di TPQ Al-Ittihad sejatinya dana tersebut berasal dari masyarakat dan masyarakat pun berhak mengetahui penggunaan ataupun pengelolaan dana tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip pembiayaan pendidikan, yaitu transparansi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Fauzan bahwa transparansi merupakan prinsip pertama yang harus dipegang sungguh-sungguh dalam

pengelolaan pendidikan, yaitu adanya keterbukaan sumber dana dan jumlah rincian penggunaannya, pertanggungjawaban yang jelas, sehingga hal tersebut memudahkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan untuk mengetahuinya. Bentuk transparansi pengelolaan anggaran nampaknya dapat ditemukan dengan mudah di TPQ Al-Ittihad di mana dalam setiap kegiatan ataupun program yang dijalankan khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan dana, pihak TPQ Al-Ittihad, baik ustazah maupun bendahara TPQ memiliki catatan keuangan khusus pada setiap kegiatan atau program, seperti pengelolaan SPP santri untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, pengelolaan infak santri untuk pembelian ATK pembelajaran santri, pembiayaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang melibatkan masyarakat secara luas di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk, pelaksanaan kegiatan terprogram (*haflah ākhir as-sanah*), dan pembiayaan bagi keikutsertaan TPQ Al-Ittihad dalam pawai ta'aruf di mana kegiatan-kegiatan tersebut terdapat catatan keuangan secara rinci, mulai dari sumber biaya hingga penggunaan biaya tersebut.

Selain prinsip transparansi dalam penggunaan anggaran, akuntabilitas juga menjadi prinsip yang harus dipegang dalam pembiayaan pendidikan. Untuk mewujudkan pembiayaan pendidikan yang akuntabel di TPQ Al-Ittihad, hal tersebut antara lain dapat dilihat dari adanya susunan kepengurusan TPQ Al-Ittihad yang secara tersurat menunjukkan adanya pengelola keuangan secara khusus, yakni yang berpusat pada bendahara TPQ Al-Ittihad. Sebagai contoh, pada pembiayaan jenis *recurrent cost* bendahara TPQ bekerjasama dengan wali kelas atau ustazah untuk mengumpulkan uang SPP dari wali santri. Ustazah bertugas menerima, mencatat, dan mengumpulkan uang SPP santri. Kemudian, catatan dan uang SPP tersebut diserahkan kepada bendahara TPQ untuk diolah dan didistribusikan sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, bendahara TPQ bertugas untuk membuat laporan keuangan secara rutin terkait pemasukan dan pengeluaran keuangan selama satu bulan. Pemasukan dari uang SPP santri ini dikhususkan untuk

membayar *bisyārah* ustaz, ustazah, dan pendamping sehingga bendahara pun melaporkan kepada wali santri terkait dana uang SPP yang selama satu bulan dan uang yang dikeluarkan untuk pembayaran *bisyārah* ustaz, ustazah, dan pendamping selama satu bulan itu pula. Selain itu, bendahara pun membuat catatan atau laporan keuangan selama satu tahun terkait jenis pembiayaan *recurrent cost* ini. Dengan demikian, wali santri akan mengetahui antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran khususnya bagi pembayaran *bisyārah* ustaz, ustazah, dan pendamping.

Dengan adanya pelaporan keuangan TPQ Al-Ittihad kepada wali santri khususnya pada SPP santri menunjukkan adanya upaya TPQ Al-Ittihad untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang bersumber dari wali santri tersebut. Wali santri berhak mengetahui dana yang digunakan bagi kegiatan pembelajaran putra-putri mereka di TPQ Al-Ittihad, sehingga dengan adanya pelaporan penggunaan dana dari TPQ Al-Ittihad kepada wali santri mengindikasikan adanya akuntabilitas penggunaan dana bagi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

Prinsip pembiayaan pendidikan yang selanjutnya ialah efektifitas. Efektifitas ini berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan dana dapat dikatakan memenuhi prinsip efektifitas apabila kegiatan atau program yang dilakukan dapat mengatur dan mengelola dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan tersebut. Terkait dengan efektifitas penggunaan dana bagi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, hal tersebut dapat dilihat di antaranya pada pembiayaan *recurrent cost*, yakni pembiayaan rutin bagi pembayaran *bisyārah* ustaz, ustazah, dan pendamping.

Pada pertemuan antara pihak TPQ Al-Ittihad dengan wali santri di awal tahun pelajaran, salah satu pembahasannya ialah terkait rencana anggaran bagi pembayaran *bisyārah* ustaz, ustazah, dan pendamping sebagaimana telah dideskripsikan pada hasil temuan tentang perencanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad di mana di dalamnya terdapat kesepakatan antara pihak TPQ Al-Ittihad dengan wali santri bahwa untuk

membayar *bisyārah* ustaz, ustazah, dan pendamping selama satu bulan TPQ Al-Ittihad membutuhkan dana sebesar Rp 1.200.000 dengan rincian satu orang ustaz sekaligus penasihat TPQ Al-Ittihad mendapat Rp 250.000, empat orang ustazah masing-masing mendapat Rp 175.000, dan dua orang pendamping masing-masing mendapat Rp 125.000. Efektifitas penggunaan dana tersebut dapat dilihat dari pembayaran *bisyārah* ustaz, ustazah, dan pendamping yang secara rutin pada tiap bulannya dapat terbayarkan.

Tercapainya pembayaran *bisyārah* ustaz, ustazah, dan pendamping secara rutin pada tiap bulan, sumber pembiayaannya memang tidak murni berasal dari wali santri dalam bentuk SPP santri, namun hal tersebut juga dibantu dengan adanya donasi dari pengurus TPQ Al-Ittihad yang tiap bulannya memberikan sumbangan bagi pemenuhan kebutuhan pembayaran *bisyārah* ustaz, ustazah, dan pendamping. Bantuan yang diberikan oleh pengurus TPQ ini sifatnya sukarela dan tidak dibatasi nominal minimal yang harus diberikan. Hal tersebut berbeda dengan SPP santri yang berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak TPQ Al-Ittihad dengan wali santri bahwa nominal SPP yang harus dibayarkan sebesar Rp 15.000 tiap santri.

Selanjutnya, efisiensi juga menjadi salah satu prinsip pembiayaan pendidikan yang harus dipegang dalam pelaksanaannya. Efisiensi menekankan pada hasil suatu kegiatan atau perbandingan terbaik antara daya (tenaga, pikiran, waktu, dan biaya) dan hasil. Efisiensi penggunaan anggaran bagi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dapat dilihat di antaranya dari besaran nominal SPP santri yang relatif kecil dengan jumlah pertemuan empat kali selama satu minggu. Jika nominal SPP santri sebesar Rp 15.000 tiap bulannya dibandingkan dengan biaya les mata pelajaran yang mencapai ratusan ribu tiap bulannya tentu akan terlihat kecil. Walaupun dengan nominal SPP relatif kecil tersebut, TPQ Al-Ittihad mampu mencetak para santri yang penuh dengan prestasi, baik pada

tingkat kecamatan hingga kabupaten sebagaimana terlampir dalam laporan penelitian ini.

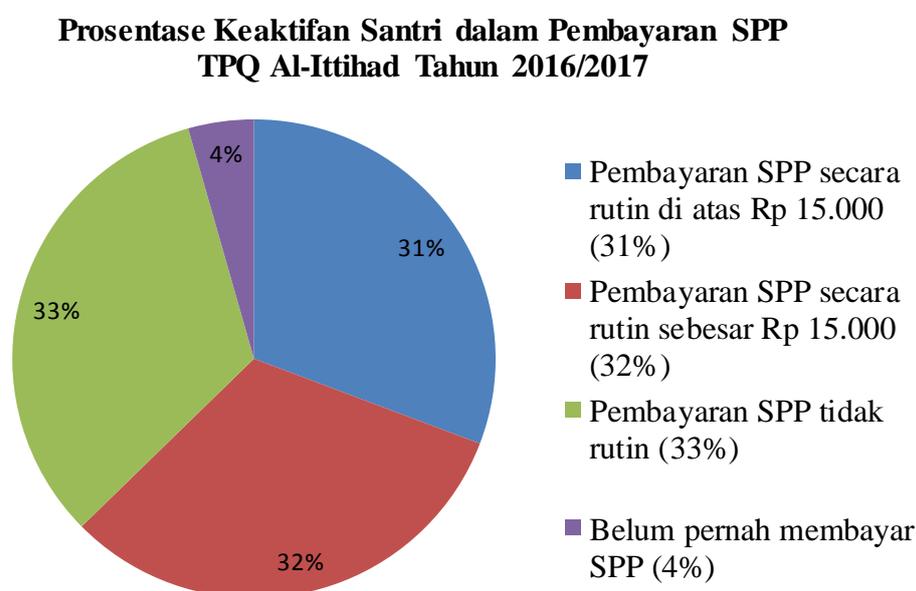
Efisiensi penggunaan anggaran pada pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad ini juga bisa dilihat dari pembiayaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana pada pembangunan tahap awal yakni pondasi bangunan, masyarakat secara bersama-sama bergotong-royong untuk membuat pondasi bangunan tersebut. Apabila tenaga yang digunakan untuk membuat pondasi gedung TPQ Al-Ittihad menggunakan jasa pekerja bangunan tentu hal tersebut memerlukan biaya untuk membayar jasa mereka. Dengan adanya bantuan masyarakat dalam bentuk tenaga, hal tersebut membantu bagi penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Terdapat hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait pelaporan ataupun evaluasi pembiayaan pendidikan bahwa pihak TPQ Al-Ittihad dalam beberapa kegiatannya melibatkan masyarakat di luar RW 15, seperti Toko Kitab Pahala Purwokerto, Warung Dawet Pak Wahyono, dan sebagainya sebagai sumber pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Namun sayangnya, kepada masyarakat ataupun pihak swasta yang menjadi donatur bagi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan khususnya ustaz dan ustazah dan pengurus TPQ Al-Ittihad bahwa tidak ditemukan data atau keterangan terkait adanya pelaporan atau evaluasi pembiayaan pendidikan kepada donatur/ pihak swasta yang berkaitan .

Selanjutnya, Koontz menegaskan bahwa pengawasan/ evaluasi memberikan penekanan pada pengukuran dan koreksi terhadap pencapaian tujuan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan atau usaha yang dilakukan sesuai dengan rencana. Dari teori yang disampaikan Koontz tersebut, berikut analisis terhadap kesesuaian rencana pembiayaan pendidikan terhadap pelaksanaannya di TPQ Al-Ittihad.

Pertama, evaluasi terhadap pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Dengan pembayaran *bisyārah* tersebut secara rutin tiap

bulannya menunjukkan adanya kemampuan TPQ Al-Ittihad untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut bersama wali santri. Hal tersebut setidaknya dapat menjadi indikasi ketercapaian antara rencana dengan realisasi penggunaan anggaran bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Kelancaran pembayaran *bisyārah* tersebut tentunya didukung oleh pembayaran SPP santri oleh para wali santri sebagai bagian dari masyarakat sekaligus sumber utama pembiayaan *bisyārah*. Berikut prosentase keaktifan santri dalam pembayaran SPP di TPQ Al-Ittihad:



Gambar 4.2.
Prosentase Keaktifan Pembayaran SPP Santri TPQ Al-Ittihad

Prosentase tersebut menunjukkan sebanyak 31% (28 santri) membayar SPP secara rutin di atas nominal kesepakatan bersama, yaitu Rp 15.000; 32% (29 santri) membayar SPP secara rutin dengan nominal Rp 15.000 (sesuai nominal kesepakatan); 33% (30 santri) membayar SPP dengan tidak rutin; dan 4% (4 santri) belum pernah membayar SPP. Pada satu sisi, data tersebut mengindikasikan adanya partisipasi wali santri secara aktif dalam pembayaran SPP santri bahkan sebanyak 31% dari total

secara keseluruhan jumlah santri, yakni 91 santri, 28 di antaranya justru membayar SPP di atas nominal kesepakatan yang telah ditentukan (Rp 15.000), yaitu 24 santri membayar sebesar Rp 20.000, 3 santri membayar Rp 25.000, dan seorang santri membayar Rp 50.000 di mana uang tersebut dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping.

Selain dengan wali santri yang membayar lebih dari nominal yang seharusnya, terdapat pula 33% santri yang membayar SPP dengan tidak rutin atau bahkan terdapat empat orang santri yang belum pernah membayar SPP. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi bersama oleh para wali santri dan pengurus terkait keaktifan dan partisipasi wali santri dalam pembayaran SPP. Pihak TPQ Al-Ittihad pun menyampaikan bahwa terkait adanya wali santri yang tidak membayar SPP dengan rutin atau bahkan sama sekali belum pernah membayar SPP, pengurus TPQ Al-Ittihad meminta keikhlasan wali santri terutama bagi mereka yang membayar lebih agar pembayaran kelebihan SPP tersebut diniatkan untuk membantu sesama atau membantu santri lain yang memang secara ekonomi kurang berkecukupan. Hal tersebut pernah dilakukan oleh pihak TPQ dengan menanyakan atau melakukan konfirmasi kepada wali santri yang memang cenderung melakukan pembayaran SPP dengan tidak rutin atau bahkan sama sekali belum pernah membayar bahwa memang beberapa kondisi keuangan di antara mereka kurang memungkinkan sehingga harapan pihak TPQ jangan sampai anak-anak atau para santri putus mengaji hanya karena tidak membayar SPP.

Kedua, evaluasi terhadap pembiayaan kegiatan partisipatif, yakni keikutsertaan dalam pawai ta'aruf yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Anwarushsholihin Pamujan Teluk. Perencanaan pembiayaan dalam kegiatan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 1.140.000 dengan rincian Rp 1.000.000 untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya untuk pembelian perlengkapan pawai. Adapun sumber dana yang masuk dari pengurus TPQ Al-Ittihad sebesar Rp 600.000 dan pemasukan dari wali

santri sebesar Rp 540.000 sehingga total pemasukan bagi kegiatan tersebut sejumlah Rp 1.140.000 di mana jika dikaitkan dengan rencana kebutuhan anggaran, maka pelaksanaan atau penggunaan anggaran kegiatan pawai ta'aruf tersebut sesuai dengan rencana anggaran belanja, yakni sebesar Rp 1.140.000.

Ketiga, evaluasi terhadap pembiayaan kegiatan terprogram (*haflah ākhir as-sanah*). Rencana anggaran belanja pada kegiatan tersebut berdasarkan data yang diperoleh sebesar Rp 5.407.500. Adapun pemasukan yang diperoleh mencapai Rp 5.828.300 dengan rincian infak dari wali santri peserta khatmil qur'an sebanyak Rp 4.050.000, infak wali santri bukan peserta khatmil qur'an sebesar Rp 110.000, infak pengurus TPQ Al-Ittihad sejumlah Rp 950.000, infak warga RW 15 Kelurahan Teluk sebesar Rp 475.000, dan infak kotak amal Masjid Al-Ittihad sebesar Rp 243.300. Data atau catatan keuangan kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dan ketercapaian antara rencana anggaran belanja dengan pelaksanaan anggaran tersebut, bahkan terdapat saldo sebesar Rp 420.800. Dengan adanya saldo tersebut semakin memperkuat bahwa pelaksanaan anggaran pembiayaan memiliki kesesuaian atau selaras dengan rencana anggaran yang disusun.

Data-data keuangan pada beberapa kegiatan di TPQ Al-Ittihad tersebut menunjukkan ketercapaian tujuan dalam hal pembiayaan, yakni pelaksanaan atau penggunaan anggaran yang ada sesuai dengan rencana anggaran belanja, bahkan terdapat beberapa kegiatan di mana terdapat saldo pembiayaan pada kegiatan tersebut. Namun juga terdapat beberapa pembiayaan yang belum dapat diselaraskan antara rencana anggaran biaya dengan pelaksanaannya. Sebagai contoh pada program infak santri. Pada program yang dikelola oleh tiap-tiap wali kelas tersebut, pengurus TPQ Al-Ittihad dan wali kelas terlihat belum memiliki perencanaan terkait pelengkapan sarana atau kebutuhan pembelajaran. Kondisi yang berlangsung saat ini cenderung terlihat bahwa pembelian suatu kebutuhan pembelajaran dilakukan secara insidental sesuai dengan kebutuhan dan

pemasukan yang ada. Hal tersebut nampaknya perlu dibenahi bahwa pada awal tahun pelajaran sebaiknya pengurus bersama ustaz dan ustazah melakukan perencanaan terkait kebutuhan pembelajarn selama satu tahun ke depan sehingga terdapat rencana pelengkapan dan pemenuhan sarana dan prasarana ataupun kebutuhan pembelajaran bagi para santri dan ustaz dan ustazah demi pencapaian tujuan yang telah dicitakan.

Evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mulyasa dapat diidentifikasi ke dalam beberapa hal, di antaranya adanya bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana, seperti pelaksanaan laporan bulanan, triwulan, tahunan hingga akhir periode. Terkait dengan bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana, TPQ Al-Ittihad juga melaksanakan hal tersebut yang diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan. Beberapa laporan penggunaan anggaran yang dilakukan dalam bentuk laporan bulanan antara lain laporan keuangan SPP santri dan infak santri di mana kedua laporan tersebut dilaksanakan pada pertemuan wali santri setiap tanggal tiga tiap bulannya. Dalam pertemuan tersebut, pihak TPQ Al-Ittihad melaporkan kondisi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluarannya. Di samping itu, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pun dilaksanakan oleh TPQ Al-Ittihad dalam bentuk laporan tahunan, khususnya pada pembiayaan *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping melalui SPP santri dan rekapitulasi laporan penggunaan uang infak santri.

Selanjutnya, berkaitan dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, partisipasi yang dilaksanakan cenderung mengacu pada partisipasi nonfisik. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad yang dilaksanakan melalui pertemuan wali santri, pertemuan pengurus, dan beberapa pertemuan panitia kegiatan seperti panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dan panitia kegiatan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad di mana dalam pertemuan tersebut pihak TPQ Al-Ittihad menyampaikan laporan kepada

wali santri terkait pemasukan dan pengeluaran dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

Dari berbagai analisis terkait partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, selanjutnya dalam analisis berikut ini analisis terkait upaya atau usaha yang dilakukan oleh pihak TPQ Al-Ittihad untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Moeljanto sebagaimana yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum menjelaskan beberapa langkah yang bisa digunakan untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat termasuk partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Pertama, adanya reorientasi ke arah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi. Apabila hal tersebut ditarik ke dalam kondisi yang ada di TPQ Al-Ittihad dapat ditemukan adanya beberapa fakta yang dapat mendukung hal tersebut, antara lain pengurus TPQ Al-Ittihad merupakan warga di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk di mana mereka semua merupakan ibu-ibu pengurus pengajian muslimat di wilayah tersebut sehingga koalisi dan jaringan komunikasi yang dibangun dapat berjalan dengan lancar, terutama pada saat pertemuan atau pelaksanaan pengajian muslimat di mana pada kesempatan tersebut para pengurus pengajian muslimat yang juga selaku pengurus TPQ Al-Ittihad dapat menyampaikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan TPQ Al-Ittihad termasuk dalam pembiayaan pendidikannya.

Hal lain yang dapat mendukung adanya reorientasi ke arah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi juga bisa dilihat dari pengurus dan ustaz dan ustazah TPQ Al-Ittihad yang memiliki jabatan tertentu di lingkup RT masing-masing hingga lingkup RW. Eni Setyaningsih sebagai salah satu pengurus TPQ Al-Ittihad juga menjabat sebagai Ketua PKK RW 15

Kelurahan Teluk di mana berdasarkan saat pertemuan pengurus PKK tingkat RW 15 yang saat itu penulis ikut di dalamnya,⁷⁸ dalam pertemuan tersebut Eni Setyaningsih juga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan TPQ Al-Ittihad termasuk dalam hal pembiayaannya dengan mengajak ibu-ibu yang lain untuk bersedekah dan menginfakan sebagian rizkinya untuk kelancaran kegiatan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Tidak hanya itu, salah satu ustazah, yakni Ustazah Roso juga menjadi pengurus PKK RW 15 tersebut di mana beliau juga menjabat sebagai ketua PKK RT 03 RW 15. Selain itu, pengurus TPQ Al-Ittihad yang lain juga banyak yang menjadi pengurus PKK RW 15, seperti Sumiyem, Siti Khotijah, Darni Kartiono, Catur, Tuning Stinah, Nurlaela, dan sebagainya.

Dengan adanya rangkap jabatan di lingkungan masyarakat tersebut, selain menjadi pengurus TPQ Al-Ittihad juga merangkap sebagai pengurus PKK tingkat RW, pengurus PKK tingkat RT hingga pengurus pengajian muslimat, hal tersebut nampaknya dapat menjadi faktor pendukung bagi TPQ Al-Ittihad untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan membangun hubungan yang lebih efektif melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi, baik melalui pertemuan-pertemuan di tingkat PKK RW, pertemuan atau pelaksanaan kegiatan pengajian muslimat hingga pertemuan PKK di tingkat RT. Hal lain yang juga mendukung ialah dari segi geografis, RW 15 Kelurahan Teluk berada dalam satu komplek dengan luas wilayah tidak terlalu besar bahkan bisa dikatakan terkecil dibandingkan dengan luas wilayah RW lain di lingkungan Kelurahan Teluk sehingga memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan penarikan dana sebagaimana yang dilakukan remaja pada saat penarikan infak warga bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di lingkup wilayah RW 15 Kelurahan Teluk.

Kedua, peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan mereka sendiri dan peningkatan kesadaran masyarakat akan

⁷⁸Hasil observasi penulis pada tanggal 6 Agustus 2017 dalam acara pertemuan rutin pengurus PKK RW 15 Kelurahan Teluk.

kebutuhan mereka, masalah mereka, kemampuan mereka, dan potensi mereka. Hal tersebut dilakukan oleh pihak TPQ Al-Ittihad dalam beberapa kegiatan, antara lain pada hari Kamis malam seusai salat Magrib, imam Masjid al-Ittihad sekaligus penasihat TPQ dan juga tokoh masyarakat sekitar, yakni Abdul Hamid memberikan ceramah kepada jama'ah masjid dan masyarakat sekitar hingga masuk waktu salat 'Isya. Ceramah tersebut secara langsung dapat menjadi media untuk mengajak masyarakat agar peduli terhadap pendidikan agama putra-putri mereka termasuk dengan pendidikan agama yang ada di TPQ Al-Ittihad di mana TPQ tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama termasuk dalam hal pembiayaan sehingga dengan cara tersebut Abah Hamid selaku penasihat TPQ Al-Ittihad dapat memberikan dorongan dan mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan TPQ, termasuk dalam hal pembiayaannya.

Dengan adanya usulan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang justru hal itu datang dari masyarakat dan dipanitiai oleh masyarakat sekitar pula dapat menjadi indikator adanya rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan, masalah, kemampuan, dan potensi mereka.

Selanjutnya, pihak TPQ Al-Ittihad pun berupaya untuk selalu membangun kepuasan wali santri terhadap pendidikan yang ada di TPQ Al-Ittihad di mana berdasarkan penjelasan Kepala TPQ Al-Ittihad sebagaimana telah disebutkan dalam deskripsi temuan penelitian bahwa pengurus selalu berupaya memotivasi dan mendorong ustazah dan pendamping untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan kepada para wali santri terutama dalam pengajaran baca tulis Al-Qur'an, yakni dengan senantiasa mendisiplinkan para santri untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. TPQ Al-Ittihad juga telah menjadi langganan juara pada berbagai perlombaan di wilayah Kelurahan Teluk khususnya, bahkan beberapa perlombaan di tingkat Kabupaten pun sering dimenangkan oleh TPQ Al-Ittihad seperti pada perlombaan pawai ta'aruf satu Muharram yang diadakan oleh Badko TPQ Kabupaten Banyumas di

mana saat itu TPQ Al-Ittihad mendapatkan Juara I dan masih banyak prestasi-prestasi lain yang diperoleh TPQ Al-Ittihad.

Dengan adanya wali santri sebanyak 28 orang yang membayar SPP di atas jumlah yang disepakati, yakni Rp 15.000, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 50.000, hal tersebut juga dapat menjadi indikator adanya perhatian dan kepuasan wali santri terhadap pendidikan putra-putri mereka di TPQ Al-Ittihad sehingga mereka mau membayar lebih, bahkan pada saat pelaksanaan *haflah ākhir as-sanah* pun tanpa ada komando ataupun permintaan dari pihak TPQ Al-Ittihad, para wali santri berdasarkan inisiatif dan keinginan sendiri menyumbangkan nasi tumpeng untuk kegiatan tersebut, bahkan hingga empat nasi tumpeng dari wali santri di berbagai grumbul. Apabila nasi tumpeng tersebut diuangkan tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membuatnya dan hal itu akan menambah beban pengeluaran TPQ Al-Ittihad. Dengan adanya bantuan tumpeng dari wali santri tersebut tentunya turut membantu meringankan pengeluaran dana TPQ Al-Ittihad. Tidak hanya itu, dengan adanya warga khususnya remaja yang membantu dalam hal parkir kendaraan bagi para tamu saat pelaksanaan *haflah ākhir as-sanah* TPQ Al-Ittihad, hal tersebut juga turut meringankan bagi pengeluaran TPQ dan juga membantu dalam hal keamanan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Herbert Blumer dalam Irving M. Zeitlin yang dikutip oleh Siti Irene Astuti Dwiningrum bahwa respon faktor, baik langsung maupun tidak, selalu didasarkan atas penilaian atau pemaknaan setiap objek tindakan. Pokok pikiran Blumer dalam menjabarkan pemikiran interaksionalisme simbolis menyebutkan bahwa manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna. Dalam kaitannya dengan penafsiran terhadap suatu objek tindakan, Thomas dalam K. Sunarto mengatakan bahwa tindakan seseorang selalu didahului oleh suatu tahapan penilaian dan pertimbangan untuk memperoleh makna atas objek tindakan. Hal tersebut yang nampaknya menjadi salah satu alasan mengapa partisipasi masyarakat khususnya wali

santri dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan terutama dalam hal pembiayaan di TPQ Al-Ittihad.

Adapun dengan adanya wali santri yang tidak membayar SPP secara rutin, apabila mereka tidak membayar SPP karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan hal tersebut dapat dimaklumi. Namun berdasarkan penuturan Ustazah Annisa ada pula masyarakat atau wali santri yang membayar SPP dengan tidak rutin bukan karena kondisi ekonomi, namun justru karena faktor lain seperti masa bodoh, acuh, apatis, dan sebagainya padahal yang bersangkutan sebenarnya mampu untuk melakukan hal tersebut. Hal ini lah yang nampaknya belum ditemukan terkait partisipasi masyarakat dalam kasus tersebut. Dari data yang diperoleh, pihak-pihak ataupun wali santri yang demikian itu cenderung dibiarkan oleh pihak TPQ dan partisipasi masyarakat dalam hal itu pun belum terlihat. Hal tersebut nampaknya perlu menjadi perhatian pihak TPQ Al-Ittihad dengan melibatkan para wali santri lain untuk mengajak orang-orang atau wali santri yang belum memiliki kepedulian terhadap TPQ Al-Ittihad. Namun sekali lagi, hal yang terpenting bagi pihak TPQ Al-Ittihad adalah anak-anak mau untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di TPQ Al-Ittihad. Adapun berkaitan dengan wali santri yang belum memiliki perhatian penuh terhadap TPQ khususnya dalam hal pembiayaan bahwa tidak hanya wali santri yang menjadi sumber pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, namun juga pengurus TPQ.

Dari beberapa pemaparan tersebut kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, nampaknya semakin menguatkan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di TPQ Al-Ittihad dalam pembiayaan pendidikan dapat tergolong aktif sebagaimana yang disampaikan Mulyasa yang dikutip oleh Marzal bahwa indikator tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain adalah adanya saling pengertian antara lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada dalam masyarakat dan hal tersebut dapat ditemukan di TPQ Al-Ittihad sebagaimana yang telah

dipaparkan sebelumnya, mulai dari banyaknya wali santri yang melakukan pembayaran SPP di atas nominal yang disepakati, pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang berasal dari usulan masyarakat sekitar dan pembangunannya pun dipanitiai oleh masyarakat sekitar, dan sebagainya.

Dengan adanya saling membantu antara lembaga pendidikan dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing hingga adanya kerjasama yang erat antara lembaga pendidikan dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga serta ikut bertanggungjawab atas suksesnya pendidikan di lembaga pendidikan tersebut dan lagi-lagi hal tersebut pun dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan di TPQ Al-Ittihad termasuk pada hal-hal yang sebagian orang menganggap kecil, seperti bantuan dalam bentuk pemberian air mineral, buah-buahan, hingga permen pada keikutsertaan TPQ Al-Ittihad dalam pawai ta'aruf. Hal tersebut setidaknya dapat menunjukkan adanya perhatian wali santri terhadap pihak TPQ Al-Ittihad.

Adapun menurut Ali Imron, terdapat beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari menawarkan hadiah kepada masyarakat yang mau berpartisipasi sesuai dengan kuantitas dan tingkatan partisipasinya, menawarkan sanksi kepada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi, seperti dengan membayar denda, pemberian hukuman dan kerugian bagi yang melanggar, melakukan persuasi kepada masyarakat bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pendidikan yang telah dimusyawarahkan, menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan, mengaitkan masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik, menggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam pelaksanaan dan mendukung program pendidikan yang dicanangkan agar masyarakat yang menjadi pengikutnya juga ikut serta dalam kegiatan tersebut, mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijakan dengan kepentingan masyarakat hingga menyadarkan

masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan secara sah sebagai pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat.

Dari berbagai upaya yang ditawarkan oleh Ali Imron tersebut di atas, terkait penawaran hadiah dan sanksi kepada masyarakat, hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh tidak dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad. Namun upaya yang lebih banyak dilakukan ialah dengan melakukan persuasi dan himbauan kepada masyarakat di mana hal tersebut dilakukan oleh pengurus TPQ Al-Ittihad dalam beberapa pertemuan, mulai dari wali santri, pertemuan PKK tingkat RW 15, pertemuan PKK tingkat RT bahkan hingga *door to door* sebagaimana yang dilakukan oleh remaja RW 15 pada saat penarikan infak kepada warga di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk dari satu rumah ke rumah yang lain.

Hal lain yang juga dilakukan oleh pihak TPQ Al-Ittihad ialah dengan melakukan persuasi khususnya oleh penasihat TPQ Al-Ittihad yang juga selaku imam Masjid Al-Ittihad di mana beliau tidak hanya melakukan persuasi kepada masyarakat pada ceramah yang dilaksanakan setelah salat Magrib hingga menjelang masuk waktu salat 'Isya pada tiap malam Jum'at sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, namun juga pada saat pertemuan wali santri pada tanggal tiga tiap bulannya.⁷⁹ Dalam pertemuan

⁷⁹Penulis berkesempatan mengikuti pertemuan wali santri, pengurus, dan ustaz dan ustazah serta pendamping di mana saat itu dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2017 di gedung TPQ Al-Ittihad dengan peserta atau wali santri yang hadir mencapai 60 orang. Acara tersebut sekaligus sebagai pertemuan perdana di Tahun Pelajaran 2017/2018 dan juga silaturahmi dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Acara tersebut dimulai dengan pembukaan oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani atau ceramah oleh Abdul Hamid. Selain apa yang penulis sebutkan di atas, dalam ceramahnya Abdul Hamid menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para wali santri di antaranya pentingnya pendidikan keagamaan bagi putra-putri mereka di mana hal tersebut sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan tentang hikmah bersedekah mulai dari memanjangkan umur hingga memudahkan rizkinya yang kemudian dikaitkan dengan keterlibatan wali santri dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Kemudian acara dilanjutkan dengan bendahara TPQ mewakili pengurus menyampaikan rasa terimakasih atas kehadiran para wali santri sekaligus melaporkan kondisi keuangan TPQ seperti pemasukan dan pengeluaran, sisa kas, dan sebagainya.

Pada sesi selanjutnya merupakan sesi musyawarah di mana dalam sesi tersebut terdapat beberapa wali santri yang turut menyampaikan pendapatnya baik dalam hal pembelajaran maupun keuangan. Dalam musyawarah tersebut, para wali santri berhak menyampaikan apa yang menjadi saran, harapan, ataupun kritik terhadap TPQ, termasuk dalam hal pembiayaan dan pada saat itu

tersebut beliau selalu diberi waktu dan kesempatan oleh pihak pengurus TPQ Al-Ittihad untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para wali santri bahwa tanggung jawab pendidikan putra-putri mereka adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pengurus dan ustaz dan ustazah serta pendamping, namun juga menjadi tanggung jawab wali santri. Untuk itu, para wali santri harus berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan ataupun program yang dilaksanakan di TPQ Al-Ittihad, termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan.

Dengan menjadikan Abdul Hamid yang merupakan tokoh masyarakat setempat dan beliau juga merupakan tokoh masyarakat di Kelurahan Teluk yakni dengan menjabat Rais Syuri'ah Pengurus NU Kecamatan Purwokerto Selatan sebagai penasihat TPQ Al-Ittihad di mana hal tersebut nampaknya senada dengan apa yang disampaikan oleh Ali Imron bahwa salah satu upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat ialah dengan menggunakan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam pelaksanaan dan mendukung program pendidikan yang dicanangkan agar masyarakat yang menjadi pengikutnya juga ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dari hasil pengamatan penulis selama penelitian, masyarakat di wilayah RW 15 khususnya dan masyarakat lain di luar wilayah tersebut memiliki rasa hormat yang tinggi kepada Abdul Hamid, termasuk apabila pengurus TPQ Al-Ittihad akan mengambil suatu tindakan hal tersebut selalu disampaikan dan meminta saran terlebih dahulu kepada Abdul Hamid.

Selain upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan menggunakan tokoh masyarakat, secara umum terdapat tiga prinsip dasar

salah satu wali santri mengucapkan terimakasih kepada para ustazah dan pengurus yang telah mendidik putra-putri mereka, bahkan wali santri tersebut mengajak kepada wali santri yang lain untuk senantiasa disiplin dalam membayar SPP TPQ karena itu untuk kebaikan putra-putri mereka pula. Setelah sesi musyawarah atau diskusi selesai, acara pertemuan wali santri tersebut ditutup dengan bacaan doa *kafaratul majlis*. Kemudian para wali santri, pengurus, dan para ustazah saling berjabat tangan antara satu dengan yang lain. Setelah acara pertemuan wali santri ini ditutup, para wali santri menemui wali kelas putra-putri mereka untuk membayar SPP TPQ. Uang SPP tersebut dikumpulkan oleh masing-masing wali kelas untuk kemudian disetorkan kepada koordinator ustazah untuk selanjutnya disetorkan kepada bendahara TPQ.

yang bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, yakni *learning process (learning by doing)*, *institutional development*, dan *participatory*.

Pertama, prinsip *learning process (learning by doing)*. Prinsip ini dipahami sebagai proses kegiatan dengan melakukan aktivitas program sekaligus mengamati dan menganalisis kebutuhan serta keinginan masyarakat. Hal tersebut apabila ditarik ke dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad akan ditemukan kondisi di mana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, TPQ Al-Ittihad menggunakan prinsip *learning process (learning by doing)*.

Hal tersebut di atas dapat dilihat di antaranya dari adanya kebutuhan masyarakat dalam bimbingan keagamaan khususnya bagi anak-anak dalam belajar cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan baik dan benar. Kebutuhan tersebut oleh tokoh masyarakat sekitar direspon dengan cara membentuk suatu wadah yang dapat menampung anak-anak untuk mempelajari Al-Qur'an yang diwujudkan dalam bentuk pendirian Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Ittihad. Masyarakat dilibatkan secara langsung di dalamnya terutama bagi dewan guru (ustaz dan ustazah) yang diberdayakan dari masyarakat sekitar. Dengan semakin meningkatnya jumlah santri hingga 160 anak, Masjid Al-Ittihad tidak mampu lagi menampung jumlah santri sebanyak itu sehingga sebagai solusi sementara para santri mengaji di rumah-rumah warga, mulai dari ruang tamu, teras hingga garasi mobil warga.

Kondisi sebagaimana tersebut di atas menumbuhkan rasa empati masyarakat sehingga terdapat usulan dari masyarakat yang difasilitasi oleh pengurus RW 15 Kelurahan Teluk dengan usulan untuk membangun gedung TPQ Al-Ittihad agar para santri dapat mengaji di tempat yang nyaman. Usulan masyarakat tersebut pun direspon positif oleh Abdul Hamid di mana selain beliau sebagai tokoh masyarakat juga menjabat sebagai ustaz sekaligus penasihat TPQ Al-Ittihad. Respon positif tersebut menghasilkan keputusan dan kesepakatan bersama, yakni dengan

terbentuknya panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dan saat ini telah berdiri gedung TPQ Al-Ittihad yang telah dimanfaatkan oleh para santri sebagai tempat untuk mengaji serta masyarakat pun berhak menggunakannya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dari paparan tersebut mengindikasikan bahwa dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat di TPQ Al-Ittihad, pada prinsip *learning process learning by doing*) keterlibatan tokoh masyarakat memiliki peran yang penting. Analisis kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk memiliki wadah belajar Al-Qur'an bagi generasi muda dalam bentuk TPQ yang kemudian dikembangkan dengan mendirikan gedung TPQ Al-Ittihad di mana pada usulan pembangunannya berasal dari masyarakat, hal tersebut direspon dengan cepat dan positif oleh pihak TPQ Al-Ittihad dan tokoh masyarakat sekitar sehingga saat ini TPQ Al-Ittihad telah memiliki gedung mandiri sebagai tempat mengaji bagi para santri di mana jika dikaitkan dengan jenis pembiayaan pendidikan, maka hal tersebut termasuk jenis *capital cost*.

Kedua, prinsip *institutional development*. Prinsip ini dipahami sebagai upaya melakukan kegiatan melalui pranata sosial atau organisasi yang ada di masyarakat sebagai daya tampung dan daya dukung sosial. Hal tersebut dapat ditemukan pada upaya TPQ Al-Ittihad untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, antara lain dapat dilihat dari pelibatan pihak RT dan RW di lingkungan RW 15, bahkan hingga pihak Kelurahan termasuk kelompok pengajian muslimat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

Partisipasi masyarakat atau organisasi tersebut dapat dilihat antara lain pada kegiatan pembiayaan pendidikan jenis *capital cost*, yakni pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Partisipasi yang diberikan pihak RW antara lain dengan mewadahi inisiasi masyarakat untuk membangun gedung TPQ Al-Ittihad yang kemudian usulan tersebut disampaikan kepada tokoh masyarakat sekitar sekaligus selaku penasihat TPQ Al-Ittihad (Abdul Hamid) yang menghasilkan pembentukan panitia

pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, bahkan saat itu Ketua RW 15 Kelurahan Teluk yang berperan sebagai ketua panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Pihak RT di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk khususnya para pengurusnya juga dilibatkan dalam kepanitiaan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Pengurus RT di lingkungan RW 15 yang menjadi panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad menjadi penyambung lidah bagi panitia pembangunan untuk menyampaikan kepada warganya masing-masing tentang kebutuhan dana bagi pembangunan gedung tersebut. Selain untuk menyampaikan kebutuhan dana, pengurus RT yang menjadi panitia pembangunan gedung TPQ pun juga menjadi sarana pelaporan kepada warga tentang kondisi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran dana pada pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana informasi atau laporan keuangan tersebut dilakukan pada saat pertemuan rutin tiap RT.

Kelompok pengajian muslimat di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk pun memiliki peran dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, yakni sebagai wadah bagi penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Hal tersebut terlebih didukung dengan adanya pengurus kelompok pengajian muslimat yang merangkap menjadi pengurus TPQ Al-Ittihad sehingga hal itu mendukung peran kelompok pengajian muslimat untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

Pihak Kelurahan Teluk pun memberikan partisipasi pada pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, yakni dengan memberikan kontribusi dalam bentuk pembubuhan tanda tangan dan stempel pada proposal penggalangan dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad sebagai wujud pihak Kelurahan Teluk yang saat itu Rahmat Basuki menjabat sebagai Lurah Teluk telah mengetahui dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Adanya dukungan dari pihak kelurahan ini memunculkan harapan bahwa

masyarakat akan tergerak hatinya untuk mendukung pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad khususnya pada pengadaan dana. Pada saat peletakan batu pertama pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, Lurah Teluk pun diundang dan dipersilakan untuk meletakkan batu pertama tersebut.

Dengan pemanfaatan pranata sosial yang ada di masyarakat, hal tersebut dapat menjadi sarana untuk memperlancar dan mendukung pihak TPQ Al-Ittihad terutama panitia pembangunan gedung TPQ khususnya pada penggalangan dana dan pelaporan kepada masyarakat tentang perkembangan pembangunan gedung TPQ termasuk pada pembiayaan, baik pemasukan maupun pengeluarannya. Pranata sosial ini akan dapat berfungsi dengan baik jika didukung dengan kondisi masyarakat yang saling mendukung pula. Jika masyarakat tak peduli dengan kondisi dan kebutuhan lingkungannya, maka pranata sosial tersebut pun sukar dapat menjadi sarana bagi keberhasilan suatu kegiatan atau program yang ada di masyarakat.

Ketiga, prinsip participatory. Prinsip ini dilakukan oleh TPQ Al-Ittihad melalui ajakan atau persuasi baik oleh penasihat, pengurus maupun ustazah TPQ Al-Ittihad. Upaya persuasi kepada masyarakat oleh penasihat TPQ Al-Ittihad sekaligus tokoh masyarakat dilakukan antara lain pada saat pengajian rutin Malam Jum'at setelah salat Magrib di Masjid Al-Ittihad. Selain itu, pada pertemuan rutin pengurus dan wali santri, Abah Hamid selaku penasihat TPQ Al-Ittihad selalu diberi kesempatan untuk memberikan ceramah khususnya kepada wali santri agar senantiasa membangun pondasi agama yang kuat pada putra-putri mereka dan wali santri diharapkan selalu mendukung secara penuh terhadap kegiatan ataupun kebutuhan pelaksanaan pembelajaran di TPQ Al-Ittihad, termasuk pada pembiayaan pendidikannya.

Upaya persuasi juga dilakukan pengurus dan ustazah TPQ Al-Ittihad kepada wali santri terutama pada saat acara pertemuan rutin antara pengurus dan wali santri setiap tanggal tiga pada tiap bulannya. Persuasi ini dimaksudkan agar wali santri turut berperan aktif dalam mencari solusi

bagi berbagai permasalahan dan kebutuhan yang ada di TPQ Al-Ittihad, sehingga hal tersebut akan memunculkan rasa memiliki (*sense of belonging*) pada diri wali santri terhadap TPQ Al-Ittihad. Dengan adanya rasa memiliki ini diharapkan wali santri dapat berperan secara aktif bagi pemenuhan kebutuhan pembelajaran di TPQ Al-Ittihad termasuk pada pembiayaan pendidikannya. Pada nantinya, wali santri jugalah yang akan merasakan manfaatnya, yakni dengan bekal pendidikan agama bagi putra-putri mereka.

Dari temuan-temuan di lapangan juga menunjukkan adanya signifikansi partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan terhadap keberlangsungan TPQ Al-Ittihad. Hal tersebut dapat diketahui antara lain dari adanya bantuan dan dukungan dari masyarakat sehingga saat ini TPQ Al-Ittihad dapat memiliki gedung mandiri dan boleh jadi jika tanpa dukungan serta bantuan masyarakat para santri masih belajar di teras-teras atau bahkan garasi rumah warga di mana hal tersebut tentunya dapat mengurangi rasa nyaman para santri dalam mengikuti pembelajaran.

Hal lain yang dapat menjadi indikasi adanya signifikansi partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan terhadap keberlangsungan TPQ Al-Ittihad antara lain ialah adanya konsistensi wali santri dalam memberikan bantuan dana dalam bentuk pembayaran SPP santri di mana dana tersebut digunakan sebagai sumber pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Dari data yang diperoleh menyebutkan bahwa tujuan ustaz dan ustazah dalam mendidik para santri bukanlah untuk mendapatkan materi, namun sudah seharusnya sebagai ungkapan terimakasih wali santri dan pengurus, ustaz dan ustazah berhak mendapatkan *bisyārah* walaupun nominal yang diterimakan ustaz dan ustazah sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tenaga, waktu, dan ilmu yang diberikan kepada TPQ Al-Ittihad.

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas semakin menegaskan bahwa partisipasi masyarakat terutama dalam pembiayaan pendidikan memiliki signifikansi terhadap keberlangsungan atau eksistensi TPQ Al-Ittihad.

Kemudian, kemauan masyarakat terutama wali santri untuk mau dan turut berpartisipasi secara aktif berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan adanya sebab yang saling berkaitan dengan signifikansi partisipasi masyarakat tersebut. Adanya signifikansi partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan terhadap keberlangsungan TPQ Al-Ittihad tidak bisa dilepaskan dari adanya kemauan masyarakat untuk turut berpartisipasi khususnya dalam pembiayaan pendidikannya.

Kemauan masyarakat terutama wali santri untuk mau berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan wali santri menunjukkan adanya faktor yang dapat menumbuhkan partisipasi wali santri tersebut. Adapun faktor tersebut ialah kepercayaan dan kepuasan wali santri terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pihak TPQ Al-Ittihad, baik pengurus maupun ustaz dan ustazah kepada santri dan wali santri.

Dari data yang diperoleh, kepercayaan wali santri kepada pihak TPQ Al-Ittihad berawal atau muncul dari adanya keterbukaan pengurus TPQ Al-Ittihad dalam berbagai kegiatan ataupun program yang ada, terutama pada pengelolaan anggaran. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran atau dana tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan seperti pengelolaan dana SPP santri yang digunakan untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping. Setiap dana yang terkumpul dari SPP santri dan pengeluaran dana tersebut untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, secara rutin laporan keuangan tersebut dilaporkan kepada wali santri pada saat pertemuan rutin wali santri dan pengurus tiap bulannya. Dari laporan tersebut, wali santri dapat mengetahui kondisi dan pengelolaan keuangan khususnya pada pengelolaan dana SPP santri yang digunakan untuk pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping.

Dengan adanya keterbukaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus TPQ Al-Ittihad mendukung terciptanya transparansi pengelolaan anggaran di mana hal tersebut dapat menumbuhkan rasa

percaya atau kepercayaan wali santri terhadap pihak TPQ Al-Ittihad, baik pengurus maupun ustaz dan ustazah serta pendamping.

Adapun terkait kepuasan wali santri, dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa kepuasan wali santri muncul karena wali santri merasa bahwa putra atau putri mereka dapat membaca Al-Qur'an dengan baik. Hal tersebut menjadikan wali santri merasa puas dengan pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pihak TPQ Al-Ittihad, terutama oleh ustaz dan ustazah. Hal tersebut juga secara tidak langsung menunjukkan adanya upaya ustaz dan ustazah dalam mendidik para santri dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan produk dalam hal ini kualitas bacaan santri yang memuaskan.

Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya kepercayaan dan kepuasan para wali santri sebagai pelanggan pendidikan terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan oleh TPQ Al-Ittihad sebagai penyedia jasa pendidikan, hal tersebut dapat menjadi pendorong wali santri untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan atau program termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Dengan kata lain, untuk mendapatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pendidikan diperlukan adanya upaya pihak penyelenggara pendidikan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan transparansi dalam berbagai hal terutama pada pengelolaan anggaran kepada pengguna jasa pendidikan atau masyarakat, sehingga para pengguna jasa pendidikan tersebut akan merasa terpuaskan dan menaruh kepercayaan yang tinggi kepada lembaga pendidikan hingga pada akhirnya lembaga pendidikan tersebutlah yang akan merasakan manfaatnya, yakni dengan adanya partisipasi aktif dari pengguna jasa pendidikan atau masyarakat bagi pemenuhan kebutuhan pendidikan yang ada.

Dengan adanya signifikansi partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan bagi keberlangsungan TPQ Al-Ittihad, bukan berarti tidak ada permasalahan atau hal-hal yang harus dibenahi di TPQ Al-Ittihad. Dari temuan di lapangan mengindikasikan adanya beberapa hal

atau permasalahan yang perlu dicarikan jalan keluar khususnya bagi pembayaran SPP santri. Pada pembayaran SPP santri masih terdapat wali santri yang membayar SPP secara tidak rutin, yakni 33% dari total jumlah santri atau sekitar 30 anak, bahkan terdapat empat anak yang belum pernah membayar SPP. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan agar para wali santri tersebut membayar SPP secara rutin. Dalam hal ini pengurus TPQ Al-Ittihad terlihat belum maksimal dalam mengatasi permasalahan tersebut dan belum melibatkan wali santri lain untuk membantu penyelesaian terhadap masalah tersebut. Dari data yang diperoleh bahwa pihak TPQ Al-Ittihad sudah melakukan upaya melalui pendekatan personal namun belum melibatkan wali santri lain. Sebaiknya, wali santri lain pun turut dilibatkan untuk mencari informasi terkait wali santri yang tidak rutin atau bahkan belum pernah membayar SPP.

Permasalahan lain yang nampaknya perlu diselesaikan ialah berkaitan dengan belum maksimalnya donatur tetap TPQ Al-Ittihad. Dari data yang diperoleh menunjukkan baru terdapat beberapa warga yang menjadi donatur tetap (termasuk pengurus) bagi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, padahal masih banyak warga yang secara ekonomi telah berkecukupan namun belum menjadi donatur tetap bagi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Hal tersebut perlu dimusyawarahkan sungguh-sungguh dengan penasihat dan pengurus serta ustaz dan ustazah untuk mencari cara agar masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih dapat menjadi donatur tetap bagi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, bahkan jika memungkinkan masyarakat atau wali santri dilibatkan dalam hal tersebut.

Adapun secara umum, dari berbagai paparan dan analisis tersebut dapat dipahami bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dengan mengacu terhadap apa yang disampaikan oleh Peter Oklay yang secara khusus memetakan tujuh tingkatan partisipasi masyarakat yang terdiri dari: *Manipulation*,

consultation, consensus-building, decision maker, risk-taking, partnership, dan self-management. Apabila ketujuh hal tersebut disandingkan dengan data dan fakta yang ada di TPQ Al-Ittihad, maka dapat digolongkan bahwa partisipasi masyarakat di TPQ Al-Ittihad masuk pada tingkatan *partnership*, yakni adanya kerjasama secara equal menuju pencapaian hasil yang mutual. Equal tidak hanya dalam bentuk struktur dan fungsi, namun juga dalam bentuk tanggung jawab.

Dalam bentuk struktur dan fungsi, secara tersirat TPQ Al-Ittihad berupaya bersikap profesional dengan menempatkan ustaz dan ustazah fokus sebagai tenaga pendidik, yaitu mengajari para santri khususnya dalam hal baca tulis Al-Qur'an dan ibadah. Adapun pendamping mendapatkan tugas untuk membantu ustazah mengkondisikan para santri agar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Adapun tugas pengurus TPQ Al-Ittihad adalah melakukan pengelolaan TPQ agar tetap eksis, termasuk dalam hal pengelolaan pembiayaan, baik pencarian sumber dana, pendistribusian dana yang diperoleh hingga pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dana yang digunakan kepada masyarakat khususnya para wali santri. Adapun tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak TPQ Al-Ittihad ialah dengan melakukan pelaporan pada setiap penggunaan dana di mana tersebut berasal dari masyarakat termasuk wali santri dan pelaporan tersebut disampaikan kepada masyarakat atau wali santri sebagai sumber pembiayaan pendidikan, baik melalui pertemuan wali santri (untuk pelaporan SPP dan pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping) dan pertemuan RT (untuk pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana panitia pembangunannya berasal dari pengurus RT di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk).

Dengan adanya panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana inisiasi pembangunan gedung tersebut justru berasal dari masyarakat sekitar yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi

terkait di mana anggota panitia tersebut berasal dari masyarakat sekitar menunjukkan adanya kerjasama yang erat dan perhatian kepada TPQ Al-Ittihad untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang berkualitas.

Adapun tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dapat digolongkan ke dalam tingkatan *citizen power* di mana dalam tahap tersebut telah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang di masyarakat. Dalam pembagian hak, masyarakat diberi kesempatan untuk menggunakan gedung TPQ Al-Ittihad, seperti untuk pertemuan remaja, pertemuan PKK, dan pertemuan RT atau RW di lingkungan RW 15 khususnya. Ustaz dan ustazah serta pendamping pun mendapatkan haknya secara rutin tiap bulan, yakni dengan mendapatkan *bisyārah*. Dalam tanggung jawab pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, hal tersebut dibebankan kepada masyarakat di mana masyarakat, baik mereka yang memiliki keterlibatan langsung dengan TPQ Al-Ittihad dengan menjadi santri, wali santri atau pengurus maupun masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung termasuk pihak swasta turut memiliki andil dan partisipasi dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, yaitu sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Adapun terkait wewenang, masyarakat termasuk wali santri diberi kebebasan untuk menyampaikan saran dan kritiknya kepada pihak TPQ Al-Ittihad di mana selanjutnya hal tersebut menjadi evaluasi dan bahan musyawarah bersama demi kemajuan TPQ Al-Ittihad.

Adapun level partisipasi wali santri khususnya dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dapat digolongkan ke dalam level *engagement*, yakni level partisipasi di mana hubungan orang tua atau wali santri dan lembaga pendidikan dalam hal ini TPQ saling menghormati dalam suasana yang mendukung. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai fakta yang ada di TPQ Al-Ittihad, mulai dari kehadiran para wali santri dalam pertemuan rutin wali santri, pembayaran SPP di atas batas nominal yang telah ditentukan, hingga dukungan-dukungan lain baik yang sifatnya

fisik maupun nonfisik termasuk inisiatif wali santri dengan mengusulkan kenaikan SPP dan pemberian tumpeng pada kegiatan *haflah ākhir as-sanah* di mana hal tersebut ada tanpa komando atau usulan dari pihak TPQ Al-Ittihad tentunya menunjukkan adanya hubungan saling menghormati dan mendukung dalam berbagai kegiatan khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

Adapun pemerintah dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dengan melibatkan partisipasi masyarakat lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yakni peran di mana pemerintah mau menyatu dengan masyarakat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka dan membantu menemukan peluang serta mampu memberikan dukungan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kesediaan pemerintah dalam hal ini pihak Kelurahan Teluk dan Kecamatan Purwokerto Selatan yang mau membubuhkan tanda tangan (Lurah dan Camat) dan stempel pada proposal pengajuan dana pengadaan tanah dan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana hal tersebut sebagai bukti dukungan dan membuka jalan bagi pihak TPQ untuk menggalang dana bagi pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad. Tidak hanya itu, pada peletakan batu pertama pembangunan gedung TPQ tersebut, Lurah Teluk yang saat itu dijabat oleh Rahmat Basuki turut dan berkenan hadir untuk meletakkan batu pertama pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad.

Selanjutnya, terkait pola partisipasi masyarakat yang dibangun dari dua jenis pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad yakni *capital cost* (biaya pembangunan) dan *recurrent cost* (biaya rutin/ operasional) keduanya memiliki ciri khas masing-masing. Pada *capital cost* atau biaya pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, pola yang muncul diawali dengan adanya inisiatif dan motivasi dari masyarakat khususnya di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk di mana usulan pembangunan tersebut berasal dari masyarakat dan hal tersebut direspon positif oleh pihak TPQ khususnya penasihat TPQ Al-Ittihad yang juga merupakan tokoh masyarakat sekitar

hingga akhirnya terbentuklah panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad di mana masyarakat tidak hanya sekedar berperan sebagai motivator, pemrakarsa, perencana, penyelenggara, namun juga sebagai penyandang dana. Selain itu, dengan lokasi TPQ Al-Ittihad yang berada dalam lingkup wilayah RW 15 yang relatif kecil dengan tiga RT di dalamnya dan adanya rangkap jabatan pengurus TPQ Al-Ittihad, selain sebagai pengurus TPQ juga sebagian besar merupakan pengurus PKK tingkat RT, pengurus PKK tingkat RW hingga pengurus pengajian muslimat di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk, hal tersebut mendukung kuatnya pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad baik dalam penggalangan dana maupun sistem pelaporan secara bertingkat, yakni mulai dari panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad menyampaikan informasi atau laporan kepada pengurus RT yang juga menjadi panitia pembangunan. Kemudian, pengurus RT melanjutkan informasi atau laporan tersebut khususnya dalam hal pembiayaan kepada warga di lingkungan RT masing-masing.

Adapun pola yang terbentuk pada pembiayaan pendidikan jenis *recurrent cost*, masyarakat khususnya wali santri lebih banyak berperan sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Adapun pemrakarsa program atau kegiatan yang memerlukan pembiayaan cenderung lebih didominasi oleh ustaz dan ustazah dan pengurus TPQ sekaligus sebagai motivator, pemrakarsa, perencana, pelaksana, dan pengelola serta wali santri lebih banyak berperan sebagai penyandang dana. Adapun pada tahapan perencanaan anggaran, pengambilan keputusan dilaksanakan secara bersama namun rancangan pembiayaannya dirumuskan oleh pihak TPQ Al-Ittihad dan hal tersebut disampaikan kepada wali santri pada saat pertemuan rutin. Peran wali santri di sini cenderung lebih dominan pada pembahasan dan pengesahan atau persetujuan terhadap rencana anggaran. Demikian pula pada pelaksanaan atau penggunaan anggaran, pihak TPQ Al-Ittihad lah yang cenderung lebih aktif karena mereka lah yang mengelola keuangan tersebut. Pada tahap evaluasi, pihak TPQ Al-Ittihad

juga memiliki kecenderungan lebih aktif karena merekalah yang melakukan pencatatan dan perekapan dana yang masuk dan keluar sebagai bentuk laporan kepada wali santri atau masyarakat dan wali santri pun berada pada wilayah pengesahan atau persetujuan, namun tetap dengan memperhatikan kebebasan wali santri untuk memberikan kritik dan saran terhadap laporan tersebut.

Dari kedua jenis pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dengan melibatkan partisipasi masyarakat tersebut, masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Namun terdapat kecenderungan bahwa jenis pembiayaan *capital cost* (pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad) cenderung lebih unik dan memiliki ciri khas dibandingkan dengan jenis pembiayaan *recurrent cost* (pembiayaan rutin/ operasional).

Pada jenis pembiayaan *capital cost*, partisipasi masyarakat terlihat sangat dominan. Hal tersebut bisa dilihat mulai dari inisiatif atau usulan pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad hingga panitia pembangunannya berasal dari masyarakat sekitar TPQ Al-Ittihad khususnya di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperan sebagai motivator, pemrakarsa, perencana, penyelenggara, namun juga sebagai penyandang dana, bahkan dalam pengawasan atau evaluasi, pada jenis pembiayaan *capital cost*, terdapat skema yang sistematis di mana evaluasi atau laporan tersebut dimulai dari tingkat panitia pembangunan yang mencakup perwakilan RT di wilayah RW 15, kemudian laporan tersebut dibawa dan disampaikan oleh pengurus RT yang juga sebagai panitia pembangunan kepada masyarakat atau warga di wilayah RT masing-masing dalam pertemuan rutin RT.

Dengan skema tersebut akan mendorong tercapainya transparansi penggunaan anggaran karena masyarakat mengetahui proses jalannya pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad beserta penggunaan dananya yang berasal dari masyarakat. Dengan terciptanya transparansi penggunaan anggaran diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pihak TPQ Al-Ittihad sehingga partisipasi yang

diberikan masyarakat dapat semakin meningkat terutama dalam hal pembiayaan pendidikan.

Adapun pada jenis pembiayaan *recurrent cost*, pihak TPQ Al-Ittihad cenderung lebih aktif dibandingkan masyarakat khususnya wali santri. Pihak TPQ Al-Ittihad baik pengurus maupun ustaz dan ustazah berperan sebagai sebagai motivator, pemrakarsa, perencana, pelaksana, dan pengelola sedangkan wali santri lebih banyak berperan sebagai penyandang dana dan sebagai pemberi persetujuan atau pengesahan terhadap rencana program atau anggaran yang disusun oleh pihak TPQ Al-Ittihad. Dalam tahapan evaluasi pun wali santri cenderung berperan sebagai pemberi persetujuan atau pengesahan terhadap laporan yang disampaikan oleh pihak TPQ, karena pihak TPQ lah yang mengelola dana yang ada sehingga pihak TPQ pula yang menyusun laporan keuangan tersebut untuk disampaikan kepada wali santri dalam pertemuan rutin wali santri.

Beberapa hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa secara umum pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dapat dikategorikan pada *bottom-up intervention*, yakni suatu pola partisipasi yang di dalamnya terdapat nuansa penghargaan dan pengakuan di mana masyarakat memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, dan mampu melakukan usaha-usaha melalui swadaya dan prinsip kebersamaan walaupun dalam beberapa tahapan pembiayaan pendidikan masih terdapat kecenderungan pihak TPQ Al-Ittihad memiliki peran yang lebih aktif, namun bukan berarti masyarakat tidak berperan sama sekali karena sumber pembiayaan pendidikan utama di TPQ Al-Ittihad berasal dari masyarakat.

Selanjutnya, pada akhir analisis partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad penulis berupaya menemukan pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Untuk menemukan hal tersebut, penulis berupaya memahaminya mulai dari pola pikir dan harapan, baik dari pihak TPQ Al-Ittihad kepada

masyarakat ataupun sebaliknya harapan masyarakat kepada pihak TPQ Al-Ittihad. Selanjutnya, aktualisasi partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, mulai keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan. Adapun setelah diketahui pola pikir pihak TPQ Al-Ittihad dan masyarakat yang kemudian diaktualisasikan dalam tahapan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, dampak ataupun signifikansi yang ditimbulkan dari partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad akan menjadi bahasan atau analisis selanjutnya.

Pertama, pola pikir pihak TPQ Al-Ittihad dan masyarakat. Pola pikir yang dibangun oleh TPQ Al-Ittihad beserta jajaran dewan guru terhadap partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dari berbagai data yang diperoleh menunjukkan bahwa TPQ Al-Ittihad sangat mengharapkan adanya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program yang ada, khususnya dalam hal pembiayaan karena pembiayaan inilah yang menjadi penggerak untuk berbagai kegiatan di TPQ Al-Ittihad. Hal tersebut di antaranya dapat dilihat dari sebagian misi yang hendak dicapai oleh TPQ Al-Ittihad, yaitu menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara ustaz dan ustazah, pengurus, dan wali santri serta masyarakat dan meningkatkan rasa tanggung jawab serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TPQ Al-Ittihad. Dengan melihat misi tersebut secara tersurat mengindikasikan bahwa pihak TPQ Al-Ittihad benar-benar membutuhkan dan menginginkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengelola dan mengembangkan TPQ Al-Ittihad. Hal tersebut menjadi dasar berpikir dan bertindak bagi TPQ Al-Ittihad dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatannya termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Hal tersebut diperkuat pula oleh Kepala TPQ Al-Ittihad yang menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraannya, TPQ Al-Ittihad menginginkan masyarakat secara penuh untuk turut berpartisipasi dalam

setiap kegiatan ataupun program termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan dengan berprinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Prinsip inilah yang menjadi acuan dalam berbagai pelaksanaan kegiatan atau program di TPQ Al-Ittihad sehingga tidak mengherankan ketika TPQ Al-Ittihad mengadakan suatu kegiatan masyarakat pun memiliki andil di dalamnya, baik dalam hal materi maupun nonmateri. Hal tersebut juga menjadi indikasi harapan pihak TPQ Al-Ittihad agar masyarakat mau dan turut peduli dengan berbagai kegiatan atau program yang ada di TPQ Al-Ittihad, terutama dalam hal pembiayaan pendidikannya di mana dampak yang muncul ialah dalam berbagai pengambilan keputusan dan kebijakan pihak TPQ Al-Ittihad menjadikan musyawarah untuk mufakat dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi masyarakat khususnya dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dan kebijakan pengambilan keputusan melalui musyawarah dengan masyarakat juga menjadi bagian dari kebijakan yang ada di TPQ Al-Ittihad sebagai bentuk dari prinsip yang dipegang yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Selanjutnya, harapan dan prinsip yang dipegang oleh TPQ Al-Ittihad yakni dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, hal tersebut ternyata disambut positif oleh masyarakat. Hal tersebut di antaranya dapat dilihat dari adanya inisiatif masyarakat dalam jenis pembiayaan *capital cost* (biaya pembangunan). Dengan kondisi saat itu para santri harus belajar di rumah-rumah warga, mulai dari teras, ruang tamu bahkan hingga garasi warga karena Masjid Al-Ittihad tidak lagi mampu menampung jumlah santri, masyarakat merasa terketuk hatinya sehingga muncullah inisiatif dari masyarakat melalui pihak RT dan RW di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk untuk mendirikan atau membangun gedung TPQ Al-Ittihad. Hal tersebut pun disambut baik oleh pihak TPQ Al-Ittihad di mana saat itu penasihat TPQ Al-Ittihad yang juga merupakan tokoh masyarakat sekitar berupaya mewadahi usulan tersebut dengan mengadakan pertemuan tingkat RW 15 yang dihadiri oleh perwakilan

pengurus RW, pengurus RT, kelompok pengajian muslimat di lingkungan RW 15, dan tentunya pengurus TPQ Al-Ittihad beserta dewan guru untuk membahas usulan warga tersebut. Pertemuan tersebut pun menghasilkan adanya keputusan yakni pembentukan panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang panitianya berasal dari berbagai elemen masyarakat sebagaimana tersebut.

Dengan terbentuknya panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad yang berasal dari berbagai elemen atau kelompok masyarakat di sekitar TPQ Al-Ittihad khususnya di wilayah RW 15 hingga berdirinya gedung TPQ Al-Ittihad melalui kepanitiaan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan apa yang menjadi harapan dan prinsip yang dipegang oleh TPQ Al-Ittihad, yakni dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Hal lain yang dapat ditemukan pula ialah kenaikan SPP santri dari Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 di mana usulan kenaikan besaran SPP tersebut bukanlah berasal dari pengurus ataupun ustaz dan ustazah TPQ Al-Ittihad namun justru berasal dari wali santri. Hal tersebut pun dapat menjadi indikasi adanya perhatian dan inisiatif masyarakat dalam hal ini wali santri terhadap pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad khususnya bagi kesejahteraan ustaz dan ustazah serta pendamping.

Adapun harapan wali santri terhadap pihak TPQ Al-Ittihad berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa para wali santri menginginkan putra-putri mereka dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta dapat mengamalkan ibadah sehari-sehari sebagai seorang muslim, terutama salat. Para wali santri pun bersepakat untuk mendukung kebutuhan terutama pembiayaan yang diperlukan untuk ketercapaian hal tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari para wali santri yang membayar SPP secara rutin, bahkan sebagian dari mereka yakni sebanyak 31% dari total santri membayar SPP dengan nominal di atas kesepakatan (Rp 15.000), mulai dari Rp 20.000, Rp 25.000 hingga Rp 50.000 tiap bulannya. Hal tersebut tentunya dapat menjadi indikasi bahwa wali santri

memberikan dukungan terhadap kebutuhan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Termasuk pada kegiatan terprogram yakni *haflah ākhir as-sanah* bahwa tanpa ada komando ataupun permintaan pihak TPQ Al-Ittihad, para wali santri dengan inisiatif sendiri membuat nasi tumpeng untuk disumbangkan pada kegiatan tersebut di mana nasi tumpeng yang disumbangkan tidak hanya satu, namun nasi tumpeng tersebut bisa mencapai empat buah. Hal tersebut sekali lagi dapat menjadi indikasi adanya perhatian dan partisipasi pada pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

Kedua, aktualisasi partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Aktualisasi partisipasi masyarakat ini dimulai dari tahap perencanaan pembiayaan, lalu pelaksanaan pembiayaan pendidikan hingga evaluasi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad. Ketiga tahapan tersebut melibatkan masyarakat secara aktif sebagaimana telah dideskripsikan pada hasil temuan, baik pada jenis pembiayaan *capital cost* maupun *recurrent cost*. Penulis tidak akan mengulang kembali bagaimana tahapan tersebut berlangsung, namun pada bagian ini penulis akan melihat sisi lain dari berlangsungnya tahapan tersebut.

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa dalam proses tahapan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terdapat pilar-pilar masyarakat yang turut berperan aktif di dalamnya, mulai dari tokoh masyarakat, Takmir Masjid Al-Ittihad, pengurus RW, pengurus RT, kelompok pengajian muslimat, dan pihak remaja di lingkungan RW 15 termasuk pihak swasta dan instansi (Kelurahan dan Kecamatan). Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat secara aktif khususnya mereka yang berada di sekitar TPQ Al-Ittihad atau wilayah RW 15 berdasarkan pengamatan penulis dan dari data yang diperoleh menunjukkan adanya peran dan karismatik seorang tokoh sekaligus pemimpin masyarakat, yakni Abdul Hamid yang dihormati dan dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Selain beliau sebagai Imam Masjid Al-Ittihad, dalam lingkup Kecamatan

Purwokerto Selatan beliau berperan sebagai Rais Suriah dalam kepengurusan NU (Nahdlatul Ulama), sehingga beliau pun menjadi tokoh masyarakat tidak hanya di lingkungan RW 15 Kelurahan Teluk, namun juga lingkup Kecamatan Purwokerto Selatan. Beliau pun menjabat sebagai Pengurus Badan Wakaf Kabupaten Banyumas. Dengan menjadikan beliau sebagai penasihat TPQ Al-Ittihad, hal tersebut memberikan kontribusi positif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan atau program di TPQ Al-Ittihad termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan.

Partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, selain didukung dengan adanya seorang tokoh masyarakat yang memiliki karismatik sehingga apa yang disampaikan oleh tokoh tersebut dihormati dan ditaati oleh masyarakat, apabila ditelaah lebih mendalam partisipasi masyarakat secara aktif juga didukung dari dalam diri masyarakat sendiri. Masyarakat yang ada khususnya di wilayah RW 15 memiliki daya dukung yang tinggi terhadap pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad di mana tanpa adanya dorongan dari dalam diri masyarakat untuk membantu dan mendukung di TPQ Al-Ittihad tentunya pembiayaan pendidikan yang ada tidak akan sekuat saat ini. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari adanya usulan dan inisiatif masyarakat untuk membangun gedung TPQ Al-Ittihad sebagai sarana pembelajaran bagi para santri.

Adanya dorongan dari dalam diri masyarakat untuk membantu dan mendorong pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad serta adanya seorang tokoh masyarakat yang dihormati dan memiliki karismatik, kedua hal tersebut memiliki keterkaitan dan saling mendukung dalam membangun pembiayaan pendidikan yang kuat di TPQ Al-Ittihad, baik pada pembiayaan jenis *capital cost* maupun jenis pembiayaan *recurrent cost*.

Hal lain yang juga pantas untuk dikupas ialah upaya untuk mendorong dan melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di

TPQ Al-Ittihad dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang telah menjadi kultur atau kebiasaan yang sudah berjalan, seperti pada pengajian Kamis malam (malam Jum'at) setelah salat Magrib yang bertempat di Masjid Al-Ittihad, kegiatan *tahlilan* di wilayah RW 15, pengajian muslimat, pertemuan pengurus RW, pertemuan pengurus PKK tingkat RW, pertemuan RT, pertemuan wali santri dan pengurus TPQ Al-Ittihad, dan sebagainya di mana dalam kesempatan tersebut Abdul Hamid selaku penasihat TPQ Al-Ittihad berkesempatan untuk melakukan persuasi kepada masyarakat agar turut serta atau berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan di TPQ Al-Ittihad terutama dalam hal pembiayaan pendidikannya. Kesempatan-kesempatan tersebut juga digunakan oleh TPQ Al-Ittihad untuk menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat bagi pemenuhan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.

Ketiga, dampak atau signifikansi yang ditimbulkan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, hal tersebut membawa dampak positif dalam berbagai hal bagi TPQ Al-Ittihad, antara lain kesejahteraan ustaz dan ustazah serta pendamping. Dengan para wali santri dan pengurus yang membayar SPP dan memberikan bantuan secara rutin selaku sumber pembiayaan utama bagi pembayaran *bisyārah* ustaz dan ustazah serta pendamping, ustaz dan ustazah serta pendamping dapat menerima hak mereka secara rutin, bahkan tiap tahunnya menjelang Hari Raya 'Idul Fitri mereka mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) yang nominalnya mencapai tiga hingga empat kali gaji yang diterima pada tiap bulan. Selain itu, ustaz dan ustazah serta pendamping juga mendapat seragam baru tiap tahunnya.

Dampak positif lain yang ditimbulkan ialah dengan adanya perhatian dan inisiatif masyarakat khususnya dalam pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, para santri dapat mengaji di tempat yang lebih layak di mana sebelumnya mereka mengaji di teras dan garasi rumah warga. Setelah adanya gedung TPQ Al-Ittihad, para santri dapat belajar di tempat

yang selayaknya mereka belajar. Masyarakat sekitar pun dapat memanfaatkan gedung TPQ tersebut untuk pertemuan-pertemuan warga.

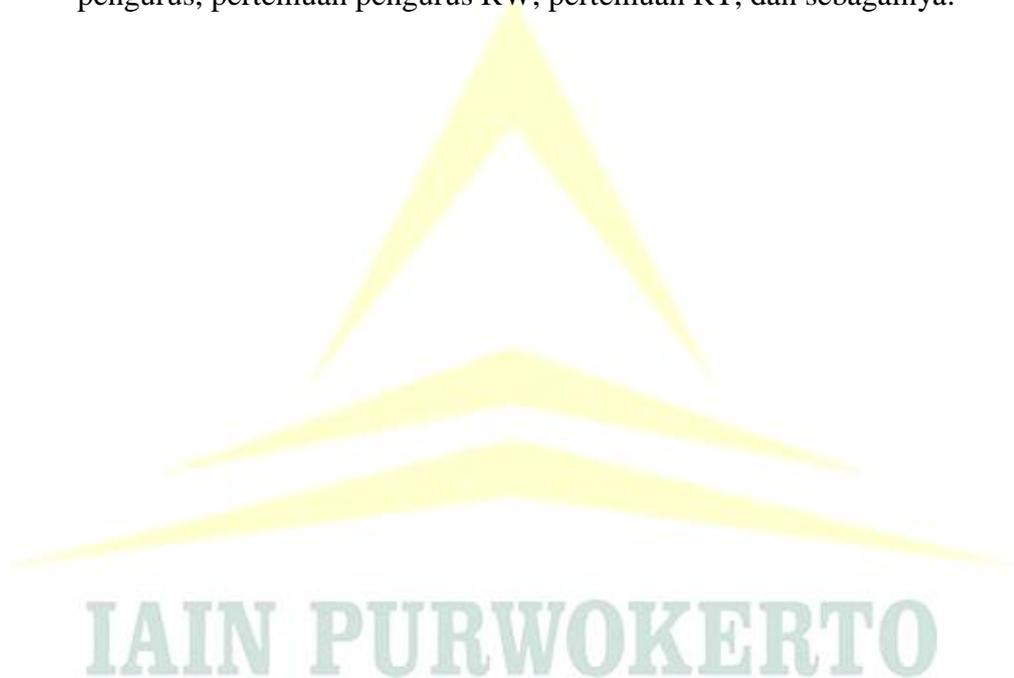
Dengan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad memberikan dampak positif bagi peningkatan prestasi TPQ Al-Ittihad, di antaranya partisipasi remaja di lingkungan RW 15 pada kegiatan keikutsertaan TPQ Al-Ittihad pada pawai ta'aruf yang diadakan oleh Pondok Pesantren Anwarushsholihin. Remaja turut berpartisipasi dalam hal pembuatan alat musik dari barang-barang bekas sekaligus sebagai pemain alat musik tersebut untuk mengiringi para santri TPQ Al-Ittihad yang menjadi peserta pawai tersebut di mana kegiatan pawai ta'aruf tersebut merupakan kegiatan yang dilombakan. Adapun tiap tahunnya secara rutin TPQ Al-Ittihad selalu menjadi langganan juara. Partisipasi remaja dalam kegiatan pawai ta'aruf tersebut setidaknya turut mendukung TPQ Al-Ittihad untuk mendapatkan juara. Apabila TPQ Al-Ittihad menyewa grup musik seperti kenthongan tentunya memerlukan dana untuk membiayai hal tersebut. Namun, dengan bantuan dan partisipasi remaja dapat membantu penghematan bagi pengeluaran pembiayaan TPQ Al-Ittihad, sehingga bantuan tenaga dan jasa remaja tersebut dapat dinilai atau sebanding dengan materi (ketika diuangkan).

Dari berbagai paparan tersebut dapat dipahami bahwa pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad bersifat fungsional religius kultural. Fungsional yang dimaksud di sini ialah masyarakat secara aktif memiliki inisiatif untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, baik pada jenis pembiayaan *capital cost* maupun *recurrent cost*. Masyarakat memiliki perhatian, tanggap, dan mendukung pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad atau dengan kata lain partisipasi yang dibangun dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Adapun yang dimaksud religius ialah kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dilaksanakan dalam lingkup pengembangan kegiatan keagamaan dalam hal ini

pemenuhan kebutuhan pembiayaan, baik *capital cost* maupun *recurrent cost* pada kegiatan keagamaan di TPQ Al-Ittihad.

Adapun kultural, yakni pelaksanaan tahapan pembiayaan pendidikan, penggalangan dana, dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat di TPQ Al-Ittihad dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang telah menjadi kultur dan kebiasaan di masyarakat sekitar TPQ Al-Ittihad khususnya di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk, seperti pengajian Kamis malam (Malam Jum'at) setelah salat Magrib di Masjid Al-Ittihad, pengajian muslimat di lingkungan RW 15, pertemuan wali santri dan pengurus, pertemuan pengurus RW, pertemuan RT, dan sebagainya.



BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad bersifat fungsional religius kultural, yakni partisipasi yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat bagi pengembangan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang telah menjadi kebiasaan atau kultur masyarakat. Penggunaan tokoh masyarakat untuk melakukan persuasi agar masyarakat mau berpartisipasi secara aktif merupakan upaya yang dilakukan TPQ Al-Ittihad untuk mendorong partisipasi masyarakat. *Citizen power* merupakan tingkatan partisipasi masyarakat di TPQ Al-Ittihad di mana telah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang di masyarakat serta partisipasi yang ada berada pada level *engagement*, yakni adanya hubungan wali santri dan pihak TPQ Al-Ittihad yang saling menghormati dan mendukung. Adapun partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dilakukan dengan melibatkan masyarakat pada pengambilan keputusan terkait penyusunan rencana anggaran belanja yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat melalui tahapan analisis permasalahan, analisis potensi, dan analisis kepentingan masyarakat, baik pada jenis pembiayaan *capital cost* maupun *recurrent cost* di mana wujud partisipasinya dilakukan melalui kehadiran dalam pertemuan wali santri, rapat panitia pembangunan gedung TPQ Al-Ittihad, dan pertemuan-pertemuan lain yang berada di wilayah RW 15 Kelurahan Teluk.

Kedua, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dilakukan melalui penggerakan sumber daya

dan dana dengan menggunakan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat; kegiatan administrasi dan koordinasi berupa pencatatan dana yang masuk dan keluar; serta penjabaran program pembiayaan pendidikan melalui pertemuan rutin pengurus, ustaz dan ustazah, dan wali santri.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad dilaksanakan dengan berdasar pada prinsip transparansi penggunaan anggaran di mana setiap dana yang masuk dan keluar dalam berbagai kegiatan dilakukan pengadministrasian. Pola evaluasi atau pelaporan pembiayaan pendidikan untuk jenis *capital cost* dilakukan secara bertingkat, yakni mulai dari tingkat panitia pembangunan, pengurus RT hingga masyarakat di masing-masing RT pada wilayah RW 15. Adapun partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembiayaan operasional dilaksanakan melalui pertemuan wali santri dan pengurus TPQ Al-Ittihad.

B. Rekomendasi

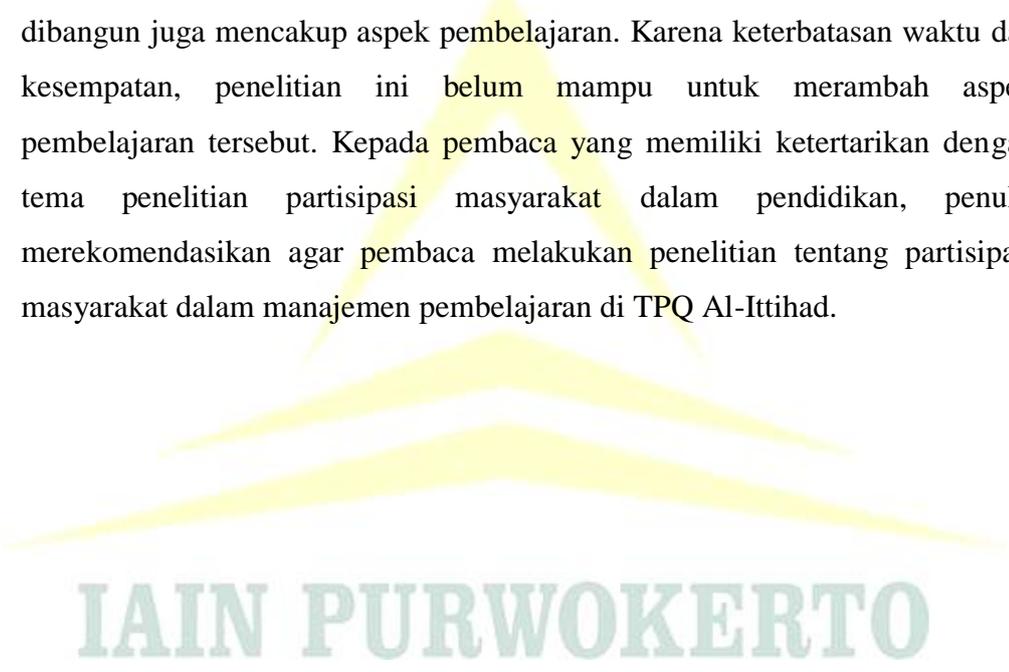
Berdasarkan hasil temuan penelitian, berikut beberapa rekomendasi bagi TPQ Al-Ittihad:

1. Membentuk komite TPQ Al-Ittihad yang anggotanya berasal dari masyarakat dan tokoh sekitar sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.
2. Membentuk kepengurusan wali santri, baik berupa paguyuban wali santri, forum wali santri atau yang sejenis sebagai wadah komunikasi antarwali santri dengan pihak TPQ Al-Ittihad sebagai upaya untuk mempererat hubungan dan pencarian solusi bagi permasalahan yang ada termasuk dalam pembiayaan pendidikan.
3. Membentuk donatur tetap di luar wali santri yang berasal dari masyarakat sekitar sebagai upaya penguatan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad.
4. Membuat rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek melalui musyawarah bersama wali santri dan masyarakat sekitar bagi

peningkatan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, baik pada jenis pembiayaan *capital cost* maupun *recurrent cost*.

5. Menyusun rencana pembiayaan bagi peningkatan kesejahteraan ustaz, ustazah, dan pendamping TPQ Al-Ittihad secara berkala dengan tanpa membebani masyarakat khususnya wali santri.
6. Memperluas jaringan dalam pencarian dana bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad, baik kepada pihak swasta, lembaga, maupun instansi pemerintah.

Partisipasi masyarakat di TPQ Al-Ittihad sejatinya tidak hanya terbatas pada pembiayaan pendidikan semata, namun partisipasi masyarakat yang dibangun juga mencakup aspek pembelajaran. Karena keterbatasan waktu dan kesempatan, penelitian ini belum mampu untuk merambah aspek pembelajaran tersebut. Kepada pembaca yang memiliki ketertarikan dengan tema penelitian partisipasi masyarakat dalam pendidikan, penulis merekomendasikan agar pembaca melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam manajemen pembelajaran di TPQ Al-Ittihad.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, "Community Participation in Education: Challenges and Prospects in Nigeria's Democracy". *European Scientific Journal* 8, no. 5 (Tt.).
- Abdi, Muhammad Iwan. "Model-model Partisipasi Masyarakat dalam Dunia Pendidikan di Kota Samarinda". *Jurnal Fenomena STAIN Samarinda*. 4, no. 2 (2012).
- Aliwar. "Penguatan Model Pembelajaran Baca Tulis Quran dan Manajemen Pengelolaan Organisasi (TPA) Jurnal". *Al-Ta'dib*. 9, no. 1, Januari-Juni (2016).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Millennium Baru*. Ciputat: Logos, 2000.
- Budimansyah, Dasim. "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat". *Jurnal Educationist*. 2, no. 1 Januari (2008): 57.
- Budirahayu, Tuti. *Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Kendala dan Peluang untuk Meraih Pendidikan yang Layak di Era Otonomi Daerah* Paper S-2.
- Chan, Sam M. dan Tuti T. Sam. *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Effendi. *Analisa Persepsi Masyarakat terhadap Taman Nasional Gunung Lauser Desa Harapan Jaya Kabupaten Langat Sumatra Utara*. Sumatera: UNSU, 2002.
- Fattah, Nanang. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- _____. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

- Fauzan, *Pengantar Sistem Administrasi Pendidikan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Gelsthorpe, Tony dan John West-Burnham. *Educational Leadership and the Community; Strategies for School Improvement Through Community Engagement*. London: Pearson, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andy, 2001.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Huneryager dan Hecman. *Partisipasi dan Dinamika Kelompok*. Semarang: Dahara Prize, 1992.
- Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Irianto, Agus. *Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Jabar, Melvin Allena. "How Do Japanese Schools Promote Parental Involvement?", *International Journal of Sciences and Humanity Studies*. 2, no. 1 (2010): 96-97.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adi Cita, 2001.
- Kanau, Aliyu A. dan M. J. Haruna. "Towards Promoting Community Participation in Education in Nigeria", *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. 2, no. 7 (2013): 131-136.
- Lismayanti, Sinta. "Upaya Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur'an dalam Meningkatkan Pemahaman Pendidikan Agama pada Orang Tua yang Memiliki Anak Usia Dini di RW 08 Kelurahan Pasanggrahan Ujung Berung Bandung". Bandung: UPI, 2013.
- Machali, Imam dan Ara Hidayat. *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/ Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Machali, Imam dan Fia Ainul Munawaroh. "Manajemen Pengembangan Sumber Daya Pendidik di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara". *Jurnal An-Nur*. 6, no. 2 Desember (2014).

- Malik, Abdul. "Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Husna Pasadena Semarang". *Dimas Jurnal*. 13, no. 2 (2013).
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Martin. *Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Marzal. "Partisipasi Orang Tua Siswa dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah di MTs Negeri Yogyakarta II". *Tesis*. Yogyakarta: UNY, 2008.
- Mas, Sitti Roskina. "Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan". *Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Malang* (tt.)
- Mastuhu. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad ke-21*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Mintarti, Sri. "Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (Studi Situs SDN Panjang 02 Ambawarawa)". *Tesis*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
- Mof, Yahya. dkk., "Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan pada MTs Muhammadiyah 3 Al-Furqan Banjarmasin". *Jurnal Tashwir Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari*. 1, no.2, Juli – Desember (2013): 62.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mulyasa, E. *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005.
- Mulyono. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Parwoto. *Pemberdayaan Masyarakat dan Prinsip Partisipatif*. Medan: tp., 2007 dalam www.library.usu.ac.id/download/fp/06008762.pdf diakses pada 30 Mei 2017.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Pidarta, Made. *Perencanaan Pendidikan Partisipatoris dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Cipta, 1990.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam*. Surabaya: Erlangga, 2007.
- Rahman, K. A. "Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Islam Universitas Jambi*. 1. no. 2, Desember (2012): 243.
- Rahmawati, Diana Sufa. "Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor". *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Redaktur Koran Pendidikan, *Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pendidikan* dalam <http://wacana.koranpendidikan.com/view/750/mendorong-partisipasi-aktif-masyarakat-dalampendidikan.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2017.
- Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- _____ dan Nur Fuadi, *Kepribadian Guru*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2009.
- Sahidu, Arifudin. "Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat". *Disertasi*. Bogor: IPB, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhardi, Muhamad dan M. Ary Irawan. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Yanmu NW Praya Lombok Tengah NTB)". *Jurnal Kependidikan IKIP Mataram*. 14, (2015).
- Suharyati, Sri. "Partisipasi Keluarga Miskin dan Manajemen Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Banjarnegara" *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.

Sulistiyorini. *Manajemen Pendidikan Islam*. Surabaya: eIKAF, 2006.

Sunarto, K. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas UI, tt.

Sunhaji. "Between Social Humanism and Social Mobilization: The Dual Role of Madrasah in the Landscape of Indonesian Islamic Education". *Journal of Indonesian Islam*. 11. no. 1 (2017): 130, dalam <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/259> diakses pada 22 Nopember 2017 pukul 07.10 WIB.

Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI. *Pedoman Pembinaan TKQ/TPQ*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Tim Penyusun. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Upe, Ambo. "Manajemen Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir". *Tesis*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Wibowo, Agus. "Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Keterlaksanaan Pendidikan di Sekolah Daerah Terpencil (Studi Multisitus pada SDN Panikel 02 dan SDN Ujunggagak 03, Kampung Laut, Kabupaten Cilacap)". *Tesis*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2015.

Zubaedi. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

<http://emispendis.kemenag.go.id/emis2016v1/index.php?jpage=S0h0bDk2R3NLZTJIWEJBUW1WUIRRUT09> diakses pada 10 Juni 2017 pukul 10.46 WIB.